



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0122);
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB VII PENUTUP

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun:
 - a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 selain menjadi pedoman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

Uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam RKPD Tahun 2024, dapat dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sepanjang mendapatkan persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dituangkan ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2024 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, priritas dan sasaran pembangunan, rencana program, dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran dan kegiatan dan indikator kinerja masing masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2024.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD Tahun 2024 telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras, dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RKPD Tahun 2024 dan program strategis nasional;
 - b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD Tahun 2024 telah dipedomani dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

c. evaluasi...

- c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2024.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2024.
- (4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.
- (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2024.

Pasal 9

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI TANGERANG
WAKIL,

Ttd.

MAD ROMLI

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Dokumen RKPD ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional dan program prioritas Provinsi Tahun 2024, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai yang tercantum dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Selain itu, penyelarasan dilakukan juga dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam RKP serta program strategis nasional dan program prioritas provinsi lainnya.

Dalam proses penyusunannya, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RKPD ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Kabupaten Tangerang.

Tangerang, 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

Kepala,



H. UJANG SUDIARTONO, ST, MT

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.197103261999021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	6
1.4 Maksud dan Tujuan	7
1.5 Sistematika Dokumen RPD	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	9
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	9
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	9
2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana	15
2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah.....	18
2.1.1.4 Demografi	20
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	25
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	25
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	38
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	41
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar	41
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	71
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	94
2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	100

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	112
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	112
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	113
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	115
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	117
2.2 Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan.....	118
2.2.1 Evaluasi Terhadap RPJMD	118
2.2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan	125
2.2.3 Capaian Kinerja Program Unggulan	129
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	141
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	141
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	142
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	 148
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	148
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi.....	148
3.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	153
3.1.3 Ketenagakerjaan	156
3.1.4 Kemiskinan	159
3.1.5 Indeks Gini Rasio.....	161
3.1.6 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2023 dan 2024.....	162
3.2 Kebijakan Keuangan Daerah	163
3.2.1 Pendapatan Daerah	164
3.2.2 Belanja Daerah	166
3.2.3 Pembiayaan Daerah	168

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	TAHUN 2024	170
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	170
4.1.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	171
4.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024.....	175
4.1.3	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024	179
4.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	183
4.2.1	Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	183
4.2.2	Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024	190
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024	205
4.2.4	Arah Kebijakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat.....	219
4.2.5	Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting	222
4.3	Keselarasan Tema Pembangunan Pusat, Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang Tahun 2024	224
4.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	226
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	239
5.1	Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024.....	239
5.2	Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024	260
5.3	Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2024.....	274
5.4	Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024	280

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 281

BAB VII PENUTUP 309

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2022, Hasil Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Curug	11
Tabel 2.2	Kecepatan dan Tekanan Angin di Kabupaten Tangerang Tahun 2022	11
Tabel 2.3	Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023	11
Tabel 2.4	Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang.....	14
Tabel 2.5	Potensi Bencana Kabupaten Tangerang tahun 2022-2027	15
Tabel 2.6	Tabel Kajian Pra Bencana Kabupaten Tangerang	16
Tabel 2.7	Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang	17
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang 2022	20
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2022	21
Tabel 2.10	Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2022	23
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (Persen), tahun 2018-2022	25
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (miliar rupiah), Tahun 2017-2022	28
Tabel 2.13	PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (miliar Rupiah).....	29
Tabel 2.14	Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2022	30
Tabel 2.15	Penentuan Sektor Basis dan Non Basis Sektor Unggulan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022	31

Tabel 2.16	Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2022	32
Tabel 2.17	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022	37
Tabel 2.18	Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022	40
Tabel 2.19	Persentase Balita Stunting Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022	41
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Murni (APM) KabupateTangerang Tahun 2015-2022	42
Tabel 2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 – 2022	42
Tabel 2.22	Tingkat Kerusakan sarana dan Prasarana SD dan SMP Kabupaten Tangerang Tahun 2022	44
Tabel 2.23	Jumlah Peserta JKN yang Terintegrasi	59
Tabel 2.24	Jumlah Peserta JKN Kabupaten Tangerang Tahun 2022	60
Tabel 2.25	Rekapitulasi Pasien Jamkesda Per Rumah Sakit dan Puskesmas Tahun 2022	61
Tabel 2.26	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	83
Tabel 2.27	Jumlah Kendaraan dan Panjang Jalan di Kabupaten Tangerang.....	83
Tabel 2.28	Kepemilikan KIR di Kabupaten Tangerang	84
Tabel 2.29	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya.....	84
Tabel 2.30	Jumlah Produk UM yang dipasarkan	85
Tabel 2.31	Fasilitasi UPDB pada Koperasi dan UM	85
Tabel 2.32	Produksi Perikanan Tahun 2018-2022	98
Tabel 2.33	Konsumsi Ikan Tahun 2018-2022	98
Tabel 2.34	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	98
Tabel 2.35	Produksi Perikanan Budidaya Kelompok Nelayan	99
Tabel 2.36	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	99
Tabel 2.37	Nilai Tukar Nelayan	100

Tabel 2.38	Jumlah Seluruh PNS Kabupaten Tangerang Non Nakes dan Guru	105
Tabel 2.39	Jumlah PNS Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Kabupaten Tangerang	107
Tabel 2.40	Pemerintah Kabupaten Tangerang Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	109
Tabel 2.41	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga Kabupaten Tangerang 2018-2022	112
Tabel 2.42	Rasio Panjang Jalan (KM) per jumlah Kendaraan (Unit) Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2022	113
Tabel 2.43	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022	115
Tabel 2.44	Jenis dan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tangerang.....	116
Tabel 2.45	Jumlah Lulusan Angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang Tahun 2022	118
Tabel 2.46	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022	119
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kabupaten Tangerang Tahun 2022	120
Tabel 2.48	Faktor Penghambat dan Rencana Tindak lanjut Capaian IKU Tahun 2022	122
Tabel 2.49	Permasalahan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2022	125
Tabel 2.50	Capaian Program Unggulan Kabupaten Tangerang Tahun 2022	130
Tabel 2.51	Alokasi anggaran pemenuhan program unggulan pada APBDP 2023	141
Tabel 3.1	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tangerang atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	151

Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerangatas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2022	152
Tabel 3.3	PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022	153
Tabel 3.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang Menurut Komponen Tahun 2016-2022	154
Tabel 3.5	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Golongan Umur di Kabupaten Tangerang Tahun 2022	156
Tabel 3.6	Penduduk Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022	157
Tabel 3.7	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2022.....	158
Tabel 3.8	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022	160
Tabel 3.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022	161
Tabel 3.10	Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024	163
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	165
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025	168
Tabel 3.13	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2024.	169
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	176
Tabel 4.2	Perumusan Tujuan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026	179
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024	180
Tabel 4.4	Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Tangerang....	180

Tabel 4.5	Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional.....	210
Tabel 4.6	Rekapitulasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2024	227
Tabel 5.1	Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024	239
Tabel 5.2	Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024	239
Tabel 5.3	Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	240
Tabel 5.4	Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2024	239
Tabel 5.5	Capaian dan Target Pencapaian SPM Tahun 2020-2024 ..	261
Tabel 5.6	Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Tahun 2024	264
Tabel 5.7	Usulan Daerah Rakortekbang Tahun 2024 Kabupaten Tangerang.....	279
Tabel 6.1	Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024	281
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2024	282
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024	283
Tabel 6.4	Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024	290

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	7
Gambar 2.1	Peta Rencana Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Tangerang	16
Gambar 2.2	Peta Kawasan Rawan Bencana	18
Gambar 2.3	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang	19
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022	22
Gambar 2.5	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (dalam jiwa)	24
Gambar 2.6	Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2022	24
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022	27
Gambar 2.8	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2022	27
Gambar 2.9	Perkembangan Inflasi di Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2015-2022	33
Gambar 2.10	Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten (2017-2022 (000 rupiah)	34
Gambar 2.11	Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2022 (000 rupiah)	35
Gambar 2.12	Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022.....	35

Gambar 2.13	Prosentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022	36
Gambar 2.14	Prosentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022	36
Gambar 2.15	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022	37
Gambar 2.16	Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022	38
Gambar 2.17	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022	39
Gambar 2.18	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022	39
Gambar 2.19	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	40
Gambar 2.20	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021	41
Gambar 2.21	Angka Partisipasi Ditamatkan SD dan SMP di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022	43
Gambar 2.22	Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI dan SMP/Mts Tahun 2018-2022	43
Gambar 2.23	Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022	44
Gambar 2.24	Angka Kematian Bayi 100.000/Kelahiran Hidup Tahun 2014-2022	45
Gambar 2.25	Penyebab Kematian Bayi Tahun 2021	45
Gambar 2.26	Peyebab Kematian Bayi Tahun 2022	46
Gambar 2.27	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022	46
Gambar 2.28	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022	47

Gambar 2.29	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2021	47
Gambar 2.30	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022	47
Gambar 2.31	Perkembangan Posyandu di Kabupaten Tangerang Tahun 2009-2022	48
Gambar 2.32	Perkembangan Posyandu di Kabupaten Tangerang Tahun 2022	48
Gambar 2.33	Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita) di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022	49
Gambar 2.34	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 1000 Penduduk ...	49
Gambar 2.35	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) Tahun 2017-2022	50
Gambar 2.36	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2017-2022	50
Gambar 2.37	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2017-2022 .	51
Gambar 2.38	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2018-2022	52
Gambar 2.39	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2018-2022	52
Gambar 2.40	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2018-2022	53
Gambar 2.41	Penderita Diare Yang ditangani Tahun 2018-2022	54
Gambar 2.42	Angka kejadian Malaria Tahun 2018-2023	54
Gambar 2.43	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018- 2022	54
Gambar 2.44	Cakupan Puskesmas Tahun 2018-2022	55
Gambar 2.45	Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2018-2022	56
Gambar 2.46	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2018-2022 ...	56
Gambar 2.47	Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2018-2022	57
Gambar 2.48	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani Tahun 2018-2022	58
Gambar 2.49	Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2018-2022	58

Gambar 2.50	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2018-2022	59
Gambar 2.51	Cakupan Pemberian TTD Pada Ibu Hamil Tahun 2018-2022	61
Gambar 2.52	Jumlah Kasus Tuberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021	62
Gambar 2.53	Angka Penemuan Kasus TBC di Puskesmas (CDR) di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	63
Gambar 2.54	Distribusi Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang Sampai dengan Tahun 2022.....	64
Gambar 2.55	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2021	65
Gambar 2.56	Persentase Rumah Tinggal Bersanitas Tahun 2018-2021	66
Gambar 2.57	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	66
Gambar 2.58	Persentase Areal Kawasan Kumuh	67
Gambar 2.59	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	68
Gambar 2.60	Luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	68
Gambar 2.61	Rasio Bangunan Ber-IMB per satuan Bangunan	69
Gambar 2.62	Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018- 2021	70
Gambar 2.63	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	70
Gambar 2.64	Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2018- 2022	71
Gambar 2.65	Ketersediaan Energi Masyarakat Tahun 2018- 2022 (kg/kapita/hari)	72
Gambar 2.66	Ketersediaan Protein per g/kapita/hari 2018- 2022 (kg/kapita/hari)	72
Gambar 2.67	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2018-2022	73
Gambar 2.68	Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2018-2021	73

Gambar 2.69	Penyelesaian Izin Lokasi dan KKPR Tahun 2018-2021 ..	74
Gambar 2.70	Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2018-2021 ..	75
Gambar 2.71	Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2018-2021	75
Gambar 2.72	Persentase PKK Aktif	76
Gambar 2.73	Persentase Posyandu Aktif	77
Gambar 2.74	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2018-2022 ..	78
Gambar 2.75	Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2018-2022	79
Gambar 2.76	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	79
Gambar 2.77	Angka Kelahiran Remaja Tahun 2018-2022	80
Gambar 2.78	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	81
Gambar 2.79	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang ..	82
Gambar 2.80	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	82
Gambar 2.81	Jumlah Koperasi Aktif 2018-2021	84
Gambar 2.82	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2018-2022	85
Gambar 2.83	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	86
Gambar 2.84	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)...	86
Gambar 2.85	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	87
Gambar 2.86	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	88
Gambar 2.87	Persentase Wirausaha Muda	88
Gambar 2.88	Cakupan Pembinaan Olahraga	89
Gambar 2.89	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	90
Gambar 2.90	Jumlah Atlet Berprestasi	90
Gambar 2.91	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	91
Gambar 2.92	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	92
Gambar 2.93	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	92
Gambar 2.94	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku.....	93
Gambar 2.95	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan.....	94

Gambar 2.96	Kunjungan Wisata.....	94
Gambar 2.97	Penyelenggaraan Seni Budaya.....	95
Gambar 2.98	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2018-2022	95
Gambar 2.99	Ekspor Perdagangan Kabupaten Tangerang.....	96
Gambar 2.100	Cakupan Bina Kelompok Perajin	97
Gambar 2.101	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	101
Gambar 2.102	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	102
Gambar 2.103	Persentase SILPA terhadap APBD	103
Gambar 2.104	Proporsi Belanja pendidikan.....	103
Gambar 2.105	Proporsi Belanja Kesehatan	104
Gambar 2.106	Persentase Tindak Lanjut Temuan	105
Gambar 2.107	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB	113
Gambar 2.108	Jumlah Bank Umum di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022	114
Gambar 2.109	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Bersih di Kabupaten Tangerang tahun 2018-2022.....	114
Gambar 2.110	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022	115
Gambar 2.111	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	116
Gambar 2.112	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk.....	116
Gambar 2.113	Rasio Ketergantungan	118
Gambar 3.1	Pro Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022	150
Gambar 3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022	154
Gambar 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022	159
Gambar 3.4	Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022.....	162

Gambar 4.1	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2024	190
Gambar 4.2	Penyelarasan Tema Pembangunan	225
Gambar 4.3	Keselaran dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Banten	225
Gambar 4.4	Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Tahun 2024	226

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tangerang, dokumen ini juga merupakan sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Dalam dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023, bahwasanya tujuan dan sasaran yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Tangerang yaitu "*Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani.*" dengan 5 (lima) misi pembangunan meliputi:

- 1).Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
- 2).Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdayasaing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
- 3).Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- 4).Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
- 5).Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Secara umum arah kebijakan RKPD Tahun 2024, difokuskan pada "Pemantapan SDM yang Berdaya Saing dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat"

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini disusun tidak hanya berpedoman terhadap dokumen yang disebutkan di awal saja, namun juga perlu mempertimbangkan terhadap kebijakan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Pada Tahun 2024, ada dua peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 meliputi :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, menggunakan pendekatan :

- a. teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- c. politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD;
- d. atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan top-down (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Banten.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada

substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan :

- a. holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- b. integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
- c. spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.

Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Tahun 2024 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, Program Pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan daerah lainnya.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Tangerang untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan

nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (Specific), Terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan tepat waktu (Time). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. RKPD Tahun 2024 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan ditengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.

2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKPD 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunn 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 Tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas

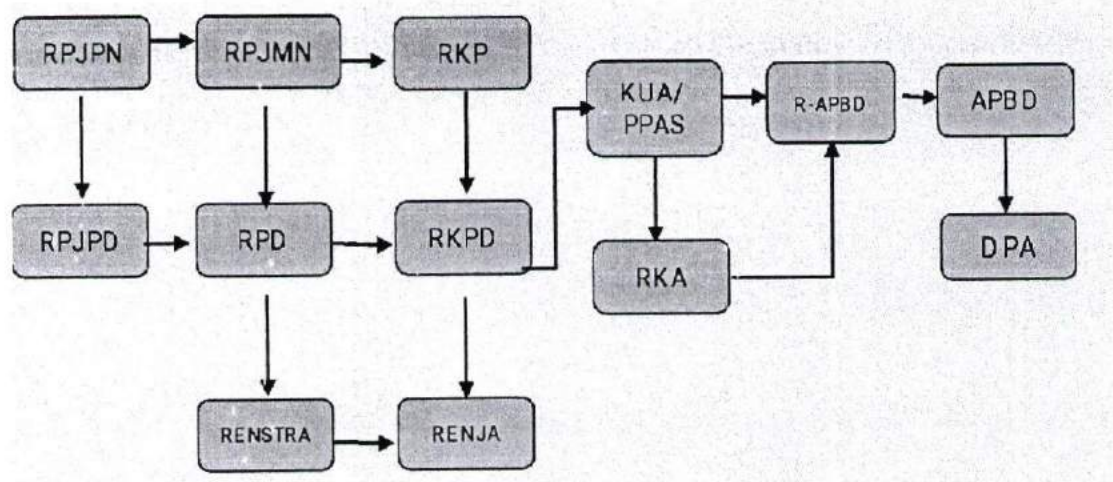
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
 27. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD mempedomani dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, Revisi RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011- 2031 dan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat mengikat. Lebih lanjut hubungan RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yaitu RKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan PD, penjabaran Renstra PD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Hubungan antara RKPD Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 disusun seiring dengan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RPD.
- b. RKPD Tahun 2024 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
- c. RKPD Tahun 2024 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011- 2031.
- d. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen



4. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. RKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran;

5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyajian RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagaimana dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan mengenai Latar Belakang Penyusunan Dokumen RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2024

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Menjelaskan mengenai Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang didalamnya terkait dengan Tujuan dan Sasaran

Pembangunan serta prioritas Pembangunan Daerah pada tahun anggaran 2024 yang akan datang.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan mengenai Sistem Pengukuran Kinerja yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Dan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

BAB VII

PENUTUP

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2024.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kabupaten Tangerang yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/ kecamatan/desa.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah bagian Timur Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tangerang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang strategis bagi perkembangan wilayah. Dengan posisinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Jakarta. Sementara itu, ditinjau dari segi transportasi, Kabupaten Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang-Jakarta dan Jalan Tol Merak-Jakarta. *Double Track* Kereta Api Jakarta-Rangkas Bitung serta akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno - Hatta. Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan membutuhkan kawasan pergudangan dan industri untuk mendistribusikan produk industri dan perdagangan, sehingga kemudahan akses terhadap pelabuhan dan bandara menjadi kebutuhan utama. Selain itu, perkembangan sektor properti semakin meningkat terutama di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti daerah Cisauk dan Pagedangan sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas bagi Kawasan pemukiman warga *commuter* Jakarta - Tangerang.

Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Tangerang terutama untuk mengatasi dampak dari beban wilayah yang sangat besar kedepannya. Perluasan *Runway* Bandara Soekarno - Hatta. pembangunan Tol Serpong - Balaraja. Tol Bandara - Balaraja. penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran.

Secara geografis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan pintu gerbang di perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui proses *trickle down effect* dan *backwash effect*. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan dan pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung.

2.1.1.1 Karakteristik lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas.

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Luas Kabupaten Tangerang adalah 959.6 Km². Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah urban. Secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta maka akan menimbulkan interaksi yang menimbulkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, *trickling down* dan *backwash effect*, sehingga terjadi bentuk hubungan yang sinergis.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

b. Topografi

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 25 meter di atas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 50 km.

c. Geologi /Jenis Tanah

Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus. dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah dataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolik yaitu asosiasinya. Efektif tanah adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah atau suatu lapisan di mana perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalaman efektif tanah berpengaruh terhadap erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di suatu wilayah. Kabupaten Tangerang terbagi atas 3 kelas kedalaman efektif tanah, meliputi :

1. Kedalaman 30-60 cm seluas 33 Ha (0,03 %)^[1]_{SEP}
2. Kedalaman 60-90 cm seluas 2.598 Ha (2,34 %)
3. Kedalaman > 90 cm seluas 101.777 Ha (91,66 %)

d. Klimatologi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Suhu udara berdasarkan penelitian di Stasiun Meteorologi Budiarto Curug rata-rata berkisar antara 26,2 – 27,2°C, suhu maksimum tertinggi pada tahun 2021 bulan April yaitu 34,9°C, sedangkan suhu maksimum pada bulan April 2022 sekitar 35,0°C. dan pada tahun 2021 suhu

minimum terendah pada bulan Juli yaitu 20,1°C, sedangkan pada tahun 2022 suhu minimum terjadi pada bulan Juni sekitar 20,0°C. Rata-rata kelembaban udara. pada tahun 2021 minimum di bulan Agustus sebesar 37%, dan maksimum di bulan Mei, September dan Desember sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 kondisi Kelembaban Udara rata-rata antara 99°C - 100°C dengan minimum di bulan Februari-Mei sebesar 99%, dan maksimum di bulan Januari, Juni-Desember sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2022, hasil Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Curug

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	21,4	26,7	34,8	38,0	83,2	100,0
Februari	22,3	26,3	34,8	47,0	84,8	99,0
Maret	22,6	26,8	34,8	51,0	84,4	99,0
April	22,3	27,2	35,0	44,0	83,1	99,0
Mei	22,22	27,1	34,8	51,0	84,9	99,0
Juni	20,0	26,3	34,0	45,0	85,9	100,0
Juli	21,4	27,2	34,1	40,0	81,8	100,0
Agustus	22,0	27,0	34,6	39,0	82,9	100,0
September	20,9	26,6	34,8	36,0	85	100,0
Oktober	21,7	26,6	34,2	42,0	85,2	100,0
November	22,5	26,6	34,9	43,0	86,0	100,0
Desember	21,9	26,2	34,6	39,0	86,9	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang. 2022

Tabel 2.2
Kecepatan dan Tekanan Angin di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Bulan	Kecepatan Angin			Tekanan (mbar)		
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	0	3,9	17,0	1000,7	1004,7	1008,6
Februar	0	3,6	21,0	998,0	1003,8	1008,8
Maret	0	4,4	33,0	995,5	1003,4	1008,0
April	0	3,7	18,0	998,4	1003,7	1007,9
Mei	0	3,0	18,0	999,2	1003,9	1007,6
Juni	0	2,6	17,0	1000,4	1004,5	1007,2
Juli	0	2,6	14,0	1000,3	1004,1	1009,2
Agustus	0	2,7	11,0	1000,8	1004,6	1008,0
September	0	2,9	23,0	999,3	1005,4	1009,9
Oktober	0	3,6	17,0	1000,0	1004,8	1008,5
November	0	4,0	18,0	999,7	1004,3	1008,5
Desember	0	4,1	18,0	998,5	1003,7	1009,4

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Keadaan curah hujan pada tahun 2022, tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 533,5, dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari, curah hujan pada tahun 2022, tertinggi pada bulan September sebanyak 413,3 curah hujan, dengan Jumlah hari paling lama 21 hari, dengan lama penyinaran selama 9999 jam.

Tabel 2.3
Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	157,2	18
Februari	240,6	21
Maret	361,9	15
April	131,6	18
Mei	179,6	17
Juni	278,0	16

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Juli	150,8	9
Agustus	225,9	12
September	413,3	17
Oktober	164,1	18
November	398,1	16
Desember	251,3	14

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2022

e. Hidrogeologi

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi enam kecamatan yaitu : Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliputi :

1. Akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir;
2. Akifer menengah dengan kedalaman 20 – 70 m yang merupakan lapisan lempung formasi Bantam Atas;
3. Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi Genteng dan formasi Bojongmanik;
4. Recharge akifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan sungai/danau, sedang recharge akifer dalam melalui batuan formasi Bojongmanik di sebelah selatan yang tersingkap (outcropped) dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian.

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budidaya perikanan darat, semak belukar dan hutan.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di Wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis,

pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain.

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linier).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang – Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara. terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain.

Penggunaan tanah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2016 menurut hasil Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang saat ini merupakan data dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Perubahan RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031. terdiri dar:

Tabel 2.4
Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang

NO	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
1	Fasilitas Umum	Hotel/ Motel/ Hostel/ Losmen	9.336
		Kantor Pos Besar	0,382
		Pusat Perdagangan Tradisional	3.614
		Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas	0,926
		Tempat Hiburan	1.470
1	Fasilitas Umum	Terminal Bus/ Angkutan Kendaraan Lainnya	0,697
		Pelabuhan Udara Non Reguler	559.005
		Pariwisata/ Seni/ Budaya/ Olah Raga Lainnya	18.401
		Pusat Pergudangan/ Terminal Peti Kemas/ Cargo	271.120
		Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/ Toserba)	251.919
		Stasiun Kereta Api	0,464
2	Industri	Industri Bahan Dasar Kimia	1.001
		Industri Maritim	2.743
		Industri Bahan Dasar Bangunan	5.609
		Industri Elektronik	60.456
		Industri Manufaktur Lainnya	3.744.921
		Pengolahan Air Minum	4.931
		Industri	38.733
3	Kebun/ Perkebunan	Kebun/ Perkebunan	12.752.221
4	Kesehatan	Rumah Sakit Umum	13.991
5	Pasir	Pasir/ Bukit Pasir Darat	17.939
		Pasir/ Bukit Pasir Laut	2.488
6	Pemukiman	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	19.071.920
		Rumah Komplek/ Properti Real Estate	2.245.332
7	Pendidikan	Pendidikan Agama Islam	42.630
		Pendidikan Dasar	10.731
		Pendidikan Menengah Pertama	13.869
		Pendidikan Menengah Umum	52.198
		Pendidikan Tinggi	51.612
8	Perairan	Air Danau/ Situ	708.909
		Air Empang	217.529
		Air Laut	452.451
		Air Rawa	101.991
		Air Tawar Sungai	5.835.362
9	Perkantoran/ Pemerintahan	Lembaga Pemasarakatan	2.039
		Kantor Camat	1.229
		Kantor Lembaga Negara	174.868
		Pusat Bisnis Lainnya	574.267
		Pusat Perkantoran Bisnis/ Komersial Terpadu	49.252
10	Peternakan/ Penangkaran	Peternakan/ Penangkaran	285.480

NO	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
11	Pusat Listrik	Instalasi TNI (AD/AL/AU)	14.928
		Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi	13.835
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap	41.298
12	Rumput/ Tanah Kosong	Tanah Kosong/ Gundul	5.437.083
13	Sawah	Sawah	46.386.978
14	Semak Belukar	Semak Belukar	45.983
		Semak Belukar/Alang-alang	269.826
15	Tegalan/ Ladang	Tegalan/ Ladang	3.589.746
		TOTAL	103.453.711

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Jika dilihat dari kondisi fisik wilayah Kabupaten Tangerang, masih terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi memberikan ancaman diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Potensi bencana dilihat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Untuk bencana yang pernah terjadi berpedoman pada DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi berpedoman pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Berdasarkan pedoman tersebut, maka dapat ditentukan potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Tangerang. Dari DIBI tercatat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tangerang. Bencana yang pernah terjadi tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Adapun potensi bencana di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan berdasarkan DIBI, metodologi pengkajian risiko bencana dan telah disepakati daerah.

Menurut hasil Review Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2027 pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi luas paparan bahaya, jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

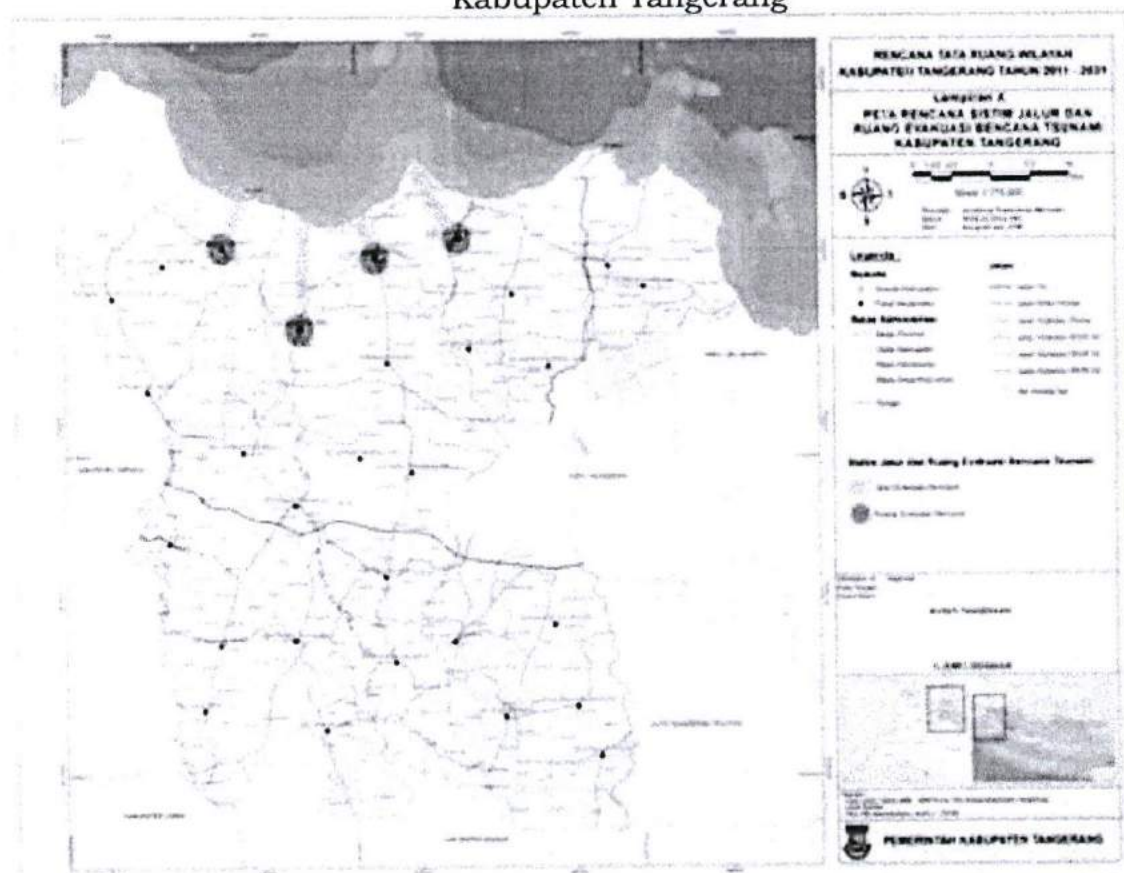
Tabel 2.5
Potensi Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2027

POTENSI BENCANA DALAM REVIEW KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TANGERANG	
1. CUACA EKSTRIM	5. BANJIR BANDANG
2. GELOMBANG EKTRIM DAN ABRASI	6. GEMPA BUMI
3. KEKERINGAN	7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
4. BANJIR	8. TSUNAMI

Sumber ; BPBD Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tangerang meliputi 8 (delapan) jenis bencana yang teridentifikasi memiliki potensi terjadi. Bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tsunami.

Gambar 2.1
Peta Rencana Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Tangerang



Tabel 2.6
Tabel Kajian Pra Bencana Kabupaten Tangerang

Jenis Bencana	Potensi							
	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Risiko	
	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Luas
Banjir	Sedang-Tinggi	63.526 Ha	Sedang	99.780 Ha	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	89.379
Gempa Bumi	Sedang-Tinggi	42.025	Sedang	11.923	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	94.349
			Tinggi	88.429				
Kekeringan	Sedang-Tinggi	0	Tinggi	708	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	0
Tsunami	Sedang-Tinggi	4.461	Sedang	5722	Sedang	8 Kecamatan	Sedang-Tinggi	3.389
Multi bahaya	Sedang-Tinggi	104.061	Sedang	99.780	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	104.042
	Sedang-Tinggi		Tinggi	100.072				

Sumber : inarisk.go.id

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan

tingkat kerentanan dan kapasitas Kawasan tersebut. Potensi dari dampak ini menggambarkan potensi Jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam kajian tersebut menggunakan pendekatan tiga parameter risiko bencana yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas terkait bencana.

Kajian yang dilakukan oleh BNPB terhadap risiko bencana di Kabupaten Tangerang diperoleh potensi bencana meliputi meliputi bencana dengan hasil kajian diperoleh bahwa total potensi jiwa yang terpapar (Sedang-Tinggi) sebanyak 3.105.042 jiwa, nilai aset terpapar lebih dari Rp. 28.138.521 juta rupiah. dengan nilai ekonomi terpapar sebanyak Rp. 9.495.283 juta rupiah. Potensi Bencana yang dikaji meliputi potensi jiwa yang terpapar sebanyak 3.105.042 jiwa, dengan kerugian aset senilai Rp. 4.209.798 juta rupiah. dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 3.453.588 juta rupiah. Potensi banjir yang terpapar sebanyak 1.946.838 jiwa. dengan nilai aset yang terpapar sebesar Rp. 7.881.809 juta rupiah. dengan nilai ekonomi yang terpapar Rp.6.885.114 juta rupiah. Potensi tsunami di Kabupaten Tangerang cukup rendah dengan banyaknya jiwa yang terpapar sebanyak 7.018 jiwa. Potensi kekeringan di Kabupaten Tangerang yang terpapar sebanyak 3.105.042 jiwa, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.4.768.500 juta rupiah. Potensi bencana dari Cuaca Ekstrim sebanyak 3.105.043 jiwa yang terpapar, dengan kerugian nilai aset sebesar Rp. 28.131.896 juta rupiah, dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 9.489.535 juta rupiah. Potensi gelombang ekstrim di Kabupaten Tangerang yang terpapar sebanyak 7.460 jiwa, sedangkan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 26.014 juta rupiah. Potensi bencana untuk banjir bandang dengan banyaknya jiwa yang terpapar sebanyak 10.340 jiwa, dengan nilai aset sebesar Rp.57.571 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.17.984 juta rupiah. Potensi bencana untuk Likuefaksi atau pencairan tanah sebanyak 4.467.563 jiwa yang terpapar dengan nilai aset sebesar Rp. 30.510.193 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.12.006.444 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel Matriks kajian risiko bencana Kabupaten Tangerang.

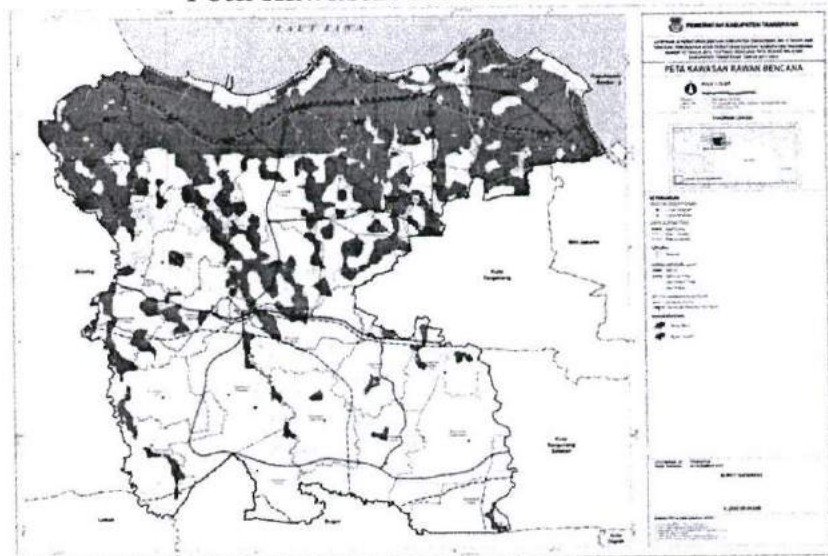
Tabel 2.7
Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang

<i>Bencana</i>	<i>Rendah</i>	<i>Sedang</i>	<i>Tinggi</i>
1. Multi Bencana			
<i>Sosial (Jiwa)</i>	-	8.198	3.096.844
<i>Fisik (Juta Rupiah)</i>	-	15.644	28.122.877
<i>Ekonomi (Juta Rupiah)</i>	-	41.717	9.453.566
<i>Lingkungan (Ha)</i>	-	-	-
2. Gempa Bumi			
<i>Sosial (Jiwa)</i>	876.437	2.217.164	11.441
<i>Fisik (Juta Rupiah)</i>	-	4.108.789	101.009
<i>Ekonomi (Juta Rupiah)</i>	-	3.371.638	81.950
<i>Lingkungan (Ha)</i>	-	-	-
3. Banjir			
<i>Sosial (Jiwa)</i>	73.691	1.194.513	678.634
<i>Fisik (Juta Rupiah)</i>	-	2.113.524	5.768.285
<i>Ekonomi (Juta Rupiah)</i>	-	1.129.689	5.755.425
<i>Lingkungan (Ha)</i>	-	-	-
4. Tsunami			
<i>Sosial (Jiwa)</i>	7.018	-	-
<i>Fisik (Juta Rupiah)</i>	-	-	-
<i>Ekonomi (Juta Rupiah)</i>	-	-	-

Bencana	Rendah	Sedang	Tinggi
Lingkungan (Ha)	-	-	-
5. Kekeringan			
Sosial (Jiwa)	-	3.105.042	-
Fisik (Juta Rupiah)	-	-	-
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	4.768.500	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-
6. Cuaca Ekstrim			
Sosial (Jiwa)	-	9.217	3.095.826
Fisik (Juta Rupiah)	-	16.663	28.115.233
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	47.464	9.442.071
Lingkungan (Ha)	-	-	-
7. Gelombang Ekstrim			
Sosial (Jiwa)	3.329	966	3.165
Fisik (Juta Rupiah)	-	1.967	24.047
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	-	-
Lingkungan (Ha)	-	-	-
8. Banjir Bandang			
Sosial (Jiwa)	1.022	3.617	5.701
Fisik (Juta Rupiah)	-	9.618	47.953
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	2.039	15.945
Lingkungan (Ha)	-	-	-
9. Likuefaksi			
Sosial (Jiwa)	517	1.360.690	3.106.356
Fisik (Juta Rupiah)	-	2.311.972	28.198.221
Ekonomi (Juta Rupiah)	-	2.550.653	9.455.791
Lingkungan (Ha)	-	-	-

Sumber : inarisk.bnpp.go.id/BUKU-RBI-2022

Gambar 2.2
Peta Kawasan Rawan Bencana

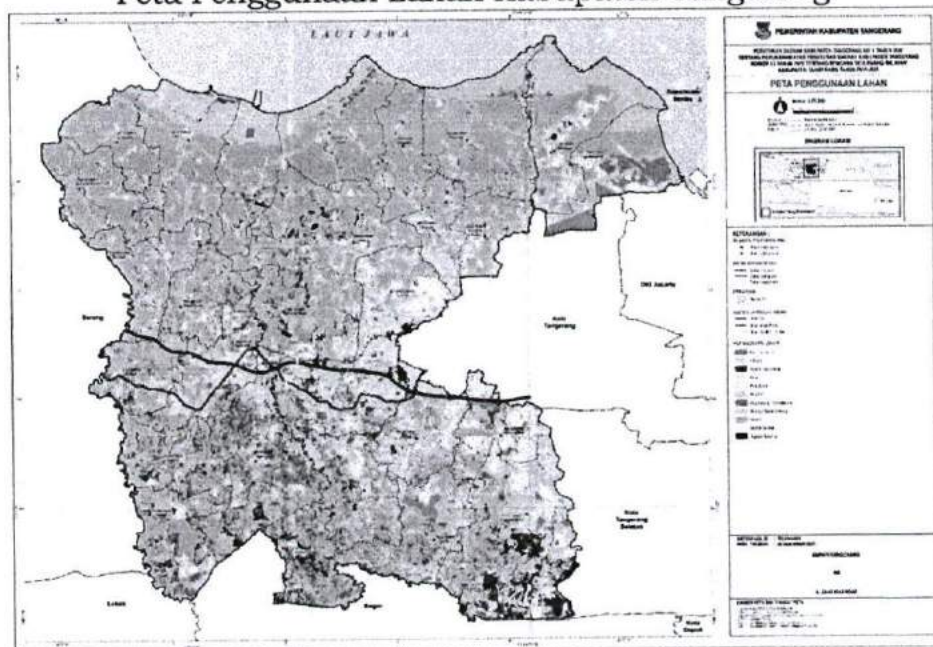


2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang sesuai Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, arahan potensi di Kabupaten Tangerang meliputi kawasan peruntuan lindung dan kawasan budidaya.

Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. maka dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 diatur pola ruang dalam Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera pada gambar berikut:

Gambar 2.3
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang



Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang. Tahun 2019-2023

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri. kawasan industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linear).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linear dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang-Grogol) yang terkonsentrasi pada pusat kota, sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara, terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

2.1.1.4 Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Menurut BPS Provinsi Banten salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Admuduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "Satu Data Kependudukan Indonesia".

SP 2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun yang tadinya ditentukan 6 bulan. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2023 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP 2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran total sejak tahun 2020 konstan 2.1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045). Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045. dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015. Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP 2020 (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni).

Memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 berjumlah 3.352.472 jiwa yang terdiri dari 1.713.548 jiwa penduduk laki-laki dan 1.638.924 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduknya sebesar 3.493.58 per km².

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	146.907	138.435	285.342
2	5 - 9	149.708	142.616	292.324
3	10 - 14	140.576	132.397	272.973
4	15 - 19	137.363	130.074	267.437
5	20 - 24	142.795	139.779	282.574
6	25 - 29	153.752	150.618	304.370
7	30 - 34	154.477	146.480	300.957
8	35 - 39	146.091	140.205	286.296

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
9	40 – 44	134.812	134.507	269.319
10	45 – 49	120.403	117.671	238.074
11	50 – 54	99.199	90.820	190.019
12	55 – 59	73.591	66.022	139.613
13	60 – 64	51.186	46.513	97.699
14	65 – 69	33.729	30.432	64.161
15	70 – 74	16.868	17.527	34.395
16	75+	12.091	14.828	26.919
	Jumlah	1.713.548	1.638.924	3.352.472

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Menurut data BPS tahun 2022 dibandingkan sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2022 mengalami penambahan sekitar 58.939 jiwa, dengan jumlah 3.352.472 jiwa, sedangkan berdasarkan data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2022, jumlah penduduk yang ber-NIK Kabupaten Tangerang berjumlah Rp. 3.273.321 jiwa, dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.359.976 jiwa.

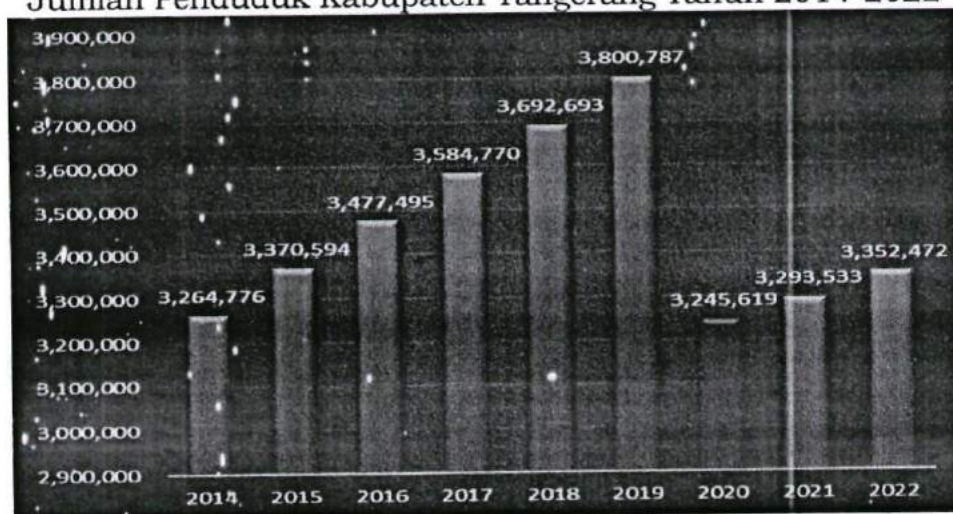
Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Kecamatan	Wajib Ktp (Jiwa)		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
1	Balaraja	45.009	44.029	89.038
2	Jayanti	25.255	24.776	50.031
3	Tigaraksa	57.600	56.383	113.983
4	Jambe	19.065	18.736	37.801
5	Cisoka	34.387	33.043	67.430
6	Kresek	25.942	25.706	51.648
7	Kronjo	22.947	23.466	46.413
8	Mauk	32.992	31.937	64.929
9	Kemiri	17.955	17.631	35.586
10	Sukadiri	23.951	23.158	47.109
11	Rajeg	65.760	63.591	129.351
12	Pasar Kemis	96.033	94.514	190.547
13	Teluknaga	60.936	59.210	120.146
14	Kosambi	41.463	40.680	82.143
15	Pakuhaji	46.614	44.396	91.010
16	Sepatan	40.337	38.784	79.121
17	Curug	64.396	63.961	128.357
18	Cikupa	76.699	74.484	151.183
19	Panongan	45.870	45.113	90.983
20	Legok	44.063	42.610	86.673
21	Pagedangan	39.743	39.158	78.901
22	Cisauk	32.325	31.787	64.112
23	Sukamulya	26.667	26.324	52.991
24	Kelapa Dua	62.843	64.742	127.585
25	Sindang Jaya	33.716	32.733	66.449
26	Sepatan Timur	38.619	36.540	75.159

No	Kecamatan	Wajib Ktp (Jiwa)		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
27	Solear	35.675	34.374	70.049
28	Gunung Kaler	20.033	20.012	40.045
29	Mekar Baru	15.546	15.657	31.203
TOTAL		1.192.441	1.167.535	2.359.976

Sumber : Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil semester II Tahun 2022. Disdukcapil Kabupaten Tangerang

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Proyeksi penduduk merupakan sebuah perkiraan yang didasari oleh perhitungan ilmiah. Hasil perhitungan proyeksi ini dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti kelahiran, kematian, hingga perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2019 merupakan proyeksi dari perhitungan BPS dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010. Sementara pada tahun 2020 dilaksanakan Sensus Penduduk (SP) sehingga jumlah penduduk tahun 2021-2022 merupakan proyeksi dari Sensus Penduduk 2020. Pelaksanaan sensus penduduk oleh BPS di Indonesia hanya dilakukan sepuluh tahun sekali, pada tahun yang berakhiran angka nol. Di Indonesia saat ini, data penduduk yang dapat disebut paling mendekati kondisi sebenarnya hanyalah data penduduk hasil sensus dan ternyata proyeksi tahun 2019 berdasarkan SP 2010 hasilnya lebih tinggi daripada jumlah penduduk tahun 2020 berdasarkan SP tahun 2020, sehingga jumlah penduduk tahun 2020 terlihat lebih sedikit dari tahun 2019. Hal ini juga disebabkan karena terdapat perbedaan ketentuan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk, pada Sensus Penduduk 2020 sudah berbasis NIK sehingga lebih mendekati kondisi sebenarnya.

Kabupaten Tangerang merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang paling tinggi jumlah penduduknya, proporsinya mencapai 27 persen dari seluruh penduduk di Provinsi Banten. Hal ini dipengaruhi oleh daya tarik Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah industri, sehingga selain pertumbuhan penduduk dari kelahiran alami, kenaikan jumlah penduduk juga dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk yang datang untuk mencari kerja, untuk itu Kabupaten Tangerang harus berupaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat tingginya jumlah penduduk, antara lain dengan menyiapkan SDM yang berkualitas, kondisi iklim investasi yang kondusif dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Tabel 2.10
Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun
2022

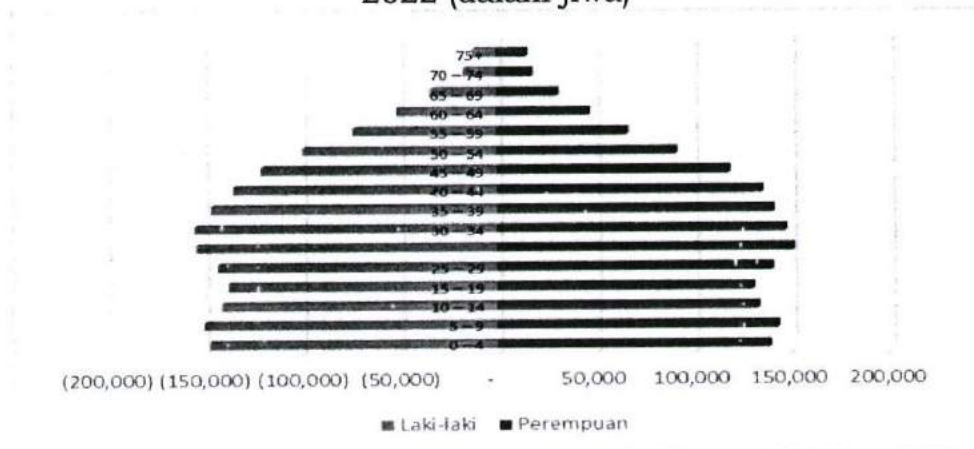
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
1	Cisoka	100.454	110,93	3.723.28
2	Solear	100.579	107	3.467.05
3	Tigaraksa	164.081	104,08	3.366.45
4	Jambe	53.679	105,56	2.062.99
5	Cikupa	208.948	104,84	4.895.69
6	Panongan	138.632	105,52	3.968.85
7	Curug	177.012	102,56	6.457.94
8	Kelapa Dua	169.866	99,9	6.967.43
9	Legok	122.995	104,36	3.501.14
10	Pagedangan	110.755	104,13	2.424.05
11	Cisauk	97.379	104,59	3.506.63
12	Pasar Kemis	281.603	103,55	10.864.32
13	Sindang Jaya	94.373	102,31	2.540.32
14	Balaraja	121.239	104,56	3.612.60
15	Jayanti	66.075	104,33	2.765.80
16	Sukamulya	71.591	103,41	2.657.42
17	Kresek	69.683	104,06	2.683.21
18	Gunung Kaler	51.887	102,82	1.751.16
19	Kronjo	63.198	99,82	1.428.85
20	Mekar Baru	42.663	102,79	1.791.06
21	Mauk	87.374	104,71	1.699.22
22	Kemiri	49.749	103,66	1.521.38
23	Sukadiri	65.848	104,64	2.727.75
24	Rajeg	205.098	106,15	3.819.33
25	Sepatan	122.326	106,52	7.062.70
26	Sepatan Timur	111.169	106,93	6.084.78
27	Paku haji	122.550	106,77	2.362.64
28	Teluknaga	166.048	105,46	4.091.87
29	Kosambi	115.618	105,29	3.885.01
	<i>Jumlah/Total</i>	3.352.472	104,55	3.493.58

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang. tahun 2022

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah 104.55 sedangkan tahun 2021 adalah 105. Sex ratio 104.55 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 110 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kecamatan Kronjo yakni sebesar 99.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 25-29 tahun yaitu sebesar 304.370 jiwa, meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 301.789 jiwa, usia tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 153.752 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 150.618 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 26.919 jiwa bertambah dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 25.457 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 12.091 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 14828 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2.5.

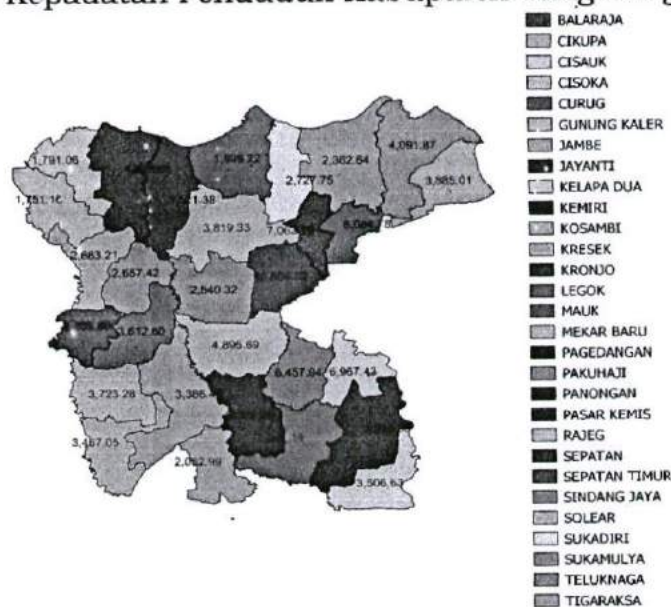
Gambar 2.5
Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 (dalam jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang tahun 2022

Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2022 berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas atau piramida penduduk muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang. Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan, kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi. Apabila ditinjau dari kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, berikut adalah peta kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.6.
Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2022, diolah

Dari gambar di atas terlihat bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi ada di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Curug,

Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kemiri.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik menjadi salah satu tolak ukur terwujudnya keberhasilan pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2022 mengalami kenaikan setelah pandemic Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020 sekitar 3,76% tumbuh positif di tahun 2021 menjadi 4,70%. upaya pemulihan ekonomi baik nasional dan daerah berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang di tahun 2022 yang mencapai 5,47%. angka tersebut berada di atas angka nasional, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2022 merupakan angka tertinggi selama dua tahun terakhir (2020-2021). Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,34% dan sektor lapangan usaha konstruksi sebesar 8,25%. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada sebanyak 2 sektor lapangan mengalami penurunan yaitu sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta sektor lapangan usaha jasa Pendidikan.

Tabel 2.11

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen). Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	2,25	2,84	(0,84)	2,28
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	2,30	(5,90)	(9,45)	(12,20)
C	Industri Pengolahan	2,66	3,20	(8,74)	4,26	5,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	(4,23)	(12,35)	11,69	5,56
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,19	6,71	8,60	5,81	1,36
F	Konstruksi	8,18	9,44	(3,29)	11,96	8,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,69	6,22	(3,70)	1,82	3,27
H	Transportasi dan Pergudangan	9,60	9,55	(5,32)	9,90	7,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,62	7,86	(5,63)	4,45	8,34
J	Informasi dan Komunikasi	8,35	9,69	9,12	5,17	6,85

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,16	0,72	1,56	6,07	6,81
L	Real Estat	9,44	9,49	1,96	3,07	5,19
M,N	Jasa Perusahaan	6,02	9,20	(6,00)	(2,25)	4,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	8,75	(0,38)	(0,76)	1,09
P	Jasa Pendidikan	8,25	8,30	0,62	(1,10)	(0,02)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,68	11,13	4,41	9,14	2,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,69	9,36	(6,11)	1,39	7,77
Total		5,80	5,56	(3,76)	4,70	5,47

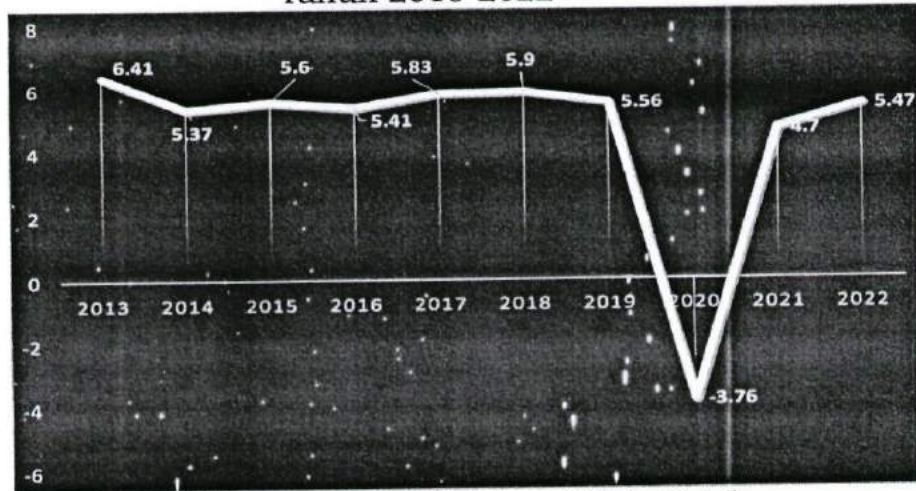
*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2022

Di tahun 2022, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 160.168,18 miliar rupiah, sedangkan pada tahun yang sama. PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 103.221,02 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 5,47 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 97.869,38 miliar rupiah. Kondisi tersebut mulai menunjukkan peningkatan setelah tahun 2021 yang merupakan fase pemulihan ekonomi PDRB Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%. tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,56%. Memasuki tahun 2020 gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka minus 3,76%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya. pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional. Banten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021-2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,70% di tahun 2021, dan meningkat di tahun 2022 di angka 5,47%. begitu juga dengan Provinsi Banten yang mulai tumbuh sekitar 5,03%.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang
Tahun 2016-2022



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2022, diolah.

Gambar 2.8
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten.
dan Nasional Tahun 2016-2022



Sumber: BPS Nasional. Provinsi Banten. dan Kabupaten Tangerang. 2022

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2022, kontribusi terbesar pada tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 53.176,12 miliar rupiah atau sekitar 33,20% dari PDRB sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 26.926,03 miliar rupiah atau sekitar 16,81% dari PDRB, sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17.698,47 miliar rupiah atau sekitar 11,05% dari PDRB, sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10.135,98 miliar rupiah atau sekitar 6,33% dari share PDRB.

Menurut PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2022 kontribusi sektor lapangan usaha yang paling besar dari sektor lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 36.003,68 miliar rupiah, sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 15.139,01 miliar rupiah, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11.823,97 miliar rupiah.

Tabel 2.12
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (miliar rupiah) Tahun 2017-2022

	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	5.339,40	5.498,45	5.622,08	5.781,50	5.732,64	5.863,37
B	Pertambangan dan Penggalian	35,87	37,92	38,79	36,50	33,05	29,02
C	Industri Pengolahan	33.877,15	34.778,08	35.890,71	32.752,13	34.147,21	36.003,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	1.408,41	1.490,37	1.427,30	1.251,07	1.397,36	1.475,50
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	70,53	74,19	79,17	85,98	90,97	92,21
F	Konstruksi	10.909,63	11.802,04	12.916,15	12.491,21	13.985,16	15.139,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.113,12	10.991,87	11.675,61	11.244,17	11.449,34	11.823,97
H	Transportasi dan Pergudangan	2.461,27	2.697,43	2.955,03	2.797,73	3.074,77	3.316,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.302,58	1.414,83	1.525,99	1.440,15	1.504,19	1.629,58
J	Informasi dan Komunikasi	4.436,55	4.807,00	5.272,80	5.753,68	6.051,14	6.465,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.347,71	4.659,19	4.692,76	4.765,93	5.055,38	5.399,42
L	Real Estat	7.019,03	7.681,62	8.410,61	8.575,46	8.838,72	9.297,45
M N	Jasa Perusahaan	823,60	873,19	953,52	896,31	876,14	915,25
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.251,11	1.332,18	1.448,75	1.443,24	1.432,30	1.447,94
P	Jasa Pendidikan	1.982,45	2.146,00	2.324,12	2.338,53	2.312,76	2.312,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365,41	400,78	445,38	465,03	507,53	522,45
R S T	Jasa Lainnya	1.220,22	1.326,26	1.450,39	1.361,78	1.380,70	1.487,98
U	Produk Domestik Regional Bruto	86.964,03	92.011,41	97.129,17	93.480,39	9.7869,38	10.3221,02

*Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Tabel 2.13
 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (miliar Rupiah)

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.151,59	8.678,39	9.045,55	9.435,98	9.473,10	10.135,98
B	Pertambangan dan Penggalian	51,56	56,53	58,54	55,54	50,93	45,88
C	Industri Pengolahan	43.841,07	46.552,10	49.164,34	45.200,55	48.117,52	53.176,12
,D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.769,27	4.947,79	4.693,53	4.096,16	4.630,76	4.936,40
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	74,50	79,67	85,48	93,49	100,24	102,87
F	Konstruksi	16.202,51	18.448,09	20.797,30	20.159,33	23.459,65	26.926,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.138,61	14.742,54	16.234,31	15.934,12	16.403,33	17.698,47
H	Transportasi dan Pergudangan	3.449,70	3.865,87	4.320,45	4.148,08	4.651,38	5.330,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.786,71	1.960,20	2.133,60	2.021,19	2.123,07	2.342,57
J	Informasi dan Komunikasi	3.907,54	4.136,44	4.505,50	4.898,70	5.144,75	5.553,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.344,54	7.081,15	7.290,26	7.412,07	8.239,97	9.597,07
L	Real Estat	8.688,00	9.698,31	10.957,41	11.392,27	11.859,43	12.706,97
M,N	Jasa Perusahaan	1.240,18	1.357,31	1.537,09	1.470,01	1.454,75	1.569,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.027,46	2.200,72	2.469,16	2.571,45	2.618,05	2.742,84
P	Jasa Pendidikan	3.011,68	3.444,99	3.899,57	3.981,03	3.957,24	4.030,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	496,31	570,59	656,87	695,57	774,48	811,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.812,85	2.005,27	2.240,33	2.166,13	2.225,00	2.461,19
	Produk Domestik Regional Bruto	118.994,08	129.825,98	140.089,29	135.731,68	145.283,68	160.168,18

*Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Tabel 2.14
Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,85	6,68	6,46	6,95	6,52	6,33
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
C	Industri Pengolahan	36,84	35,86	35,10	33,30	33,12	33,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,01	3,81	3,35	3,02	3,19	3,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
F	Konstruksi	13,62	14,21	14,85	14,85	16,15	16,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,04	11,36	11,59	11,74	11,29	11,05
H	Transportasi dan Pengudangan	2,90	2,98	3,08	3,05	3,20	3,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	1,51	1,52	1,49	1,46	1,46
J	Informasi dan Komunikasi	3,28	3,19	3,22	3,61	3,54	3,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,33	5,45	5,20	5,46	5,67	5,99
L	Real Estat	7,30	7,47	7,82	8,39	8,16	7,93
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,05	1,10	1,08	1,00	0,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,70	1,70	1,76	1,89	1,80	1,71
P	Jasa Pendidikan	2,53	2,65	2,78	2,93	2,72	2,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,44	0,47	0,51	0,53	0,51
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,52	1,54	1,60	1,60	1,53	1,54
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Catatan / Note: * Angka sementara / Preliminary figures

** Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. 2022

Tabel 2.15
 Penentuan Sektor Basis dan Non Basis Sektor Unggulan di Kabupaten
 Tangerang Tahun 2015-2022

No.	URAIAN	Rata-Rata	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,0748	BASIS
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0617	Non Basis
3	Industri Pengolahan	1,0772	BASIS
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,5706	BASIS
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,8504	Non Basis
6	Konstruksi	1,3203	BASIS
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,8727	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,5135	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,6241	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,9068	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6880	BASIS
12	Real Estate	0,9700	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0,9188	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,8340	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,7710	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,3560	Non Basis
17	Jasa lainnya	0,6825	Non Basis

Sumber : Analisis LQ PDRB Kabupaten Tangerang, 2016-2022

Analisis PDRB dalam penentuan sektor basis maupun non basis berdasarkan PDRB Menurut Harga Konstan tahun 2015-2022 diperoleh bahwa sektor lapangan usaha PDRB yang menjadi sektor basis di Kabupaten Tangerang adalah :

1. Jasa Keuangan dan Asuransi
2. Pengadaan Listrik dan Gas
3. Konstruksi
4. Industri Pengolahan
5. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kelima (5) sektor tersebut mampu melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang dan juga mampu melayani masyarakat di luar Kabupaten Tangerang,

Analisis Shift Share PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2015-2022 diperoleh hasil analisis terhadap lapangan usaha sebanyak 17 sektor yaitu bahwa :

- a. Sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Tangerang seluruh sektor (17) tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata Provinsi Banten.
- b. Sektor yang tumbuh secara lambat. meliputi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
- c. Sektor yang maju dan sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meliputi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan

- Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.
- d. Sektor tidak memiliki daya saing di Kabupaten Tangerang. sektor ini meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan dan Jasa Pendidikan.

2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di Kota Serang. Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan. dua mingguan maupun bulanan.

Pada Desember 2022, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 4,56 persen. atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,94 pada Desember 2021 menjadi 111,82 pada Desember 2022. Tingkat inflasi mtm (*month to month*) sebesar 0,43 persen dan tingkat inflasi ytd (*Year to date*) sebesar 4,56 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi yoy di Kota Tangerang adalah bensin sebesar 1,36 persen. mobil sebesar 0,27 persen, angkutan udara sebesar 0,15 persen, bawang merah sebesar 0,14 persen, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Banten di 3 kota, pada Desember 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 7,22 persen untuk kota Serang 5,86 persen untuk Kota Cilegon dan 4,56 persen untuk Kota Tangerang.

Inflasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran. yaitu kelompok transportasi sebesar 18,80 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,87 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,31 persen; kelompok makanan. minuman. dan tembakau sebesar 4,49 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,31 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,51 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,33 persen; kelompok rekreasi. olahraga dan budaya sebesar 0,63 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,03 persen; Sementara itu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy di kota Tangerang pada Desember 2022 antara lain bensin, mobil, angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, upah asisten rumah tangga, tukang bukan mandor, telur ayam ras, tahu menta dan daging ayam ras. Sementara itu komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: cabai merah, minyak goreng, kangkung, pisang, udang basah, bawang putih, cabai rawit, shampo, daun bawang dan baju muslim wanita.

Tabel 2.16
Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang. Kota Serang. Kota Cilegon. Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2022

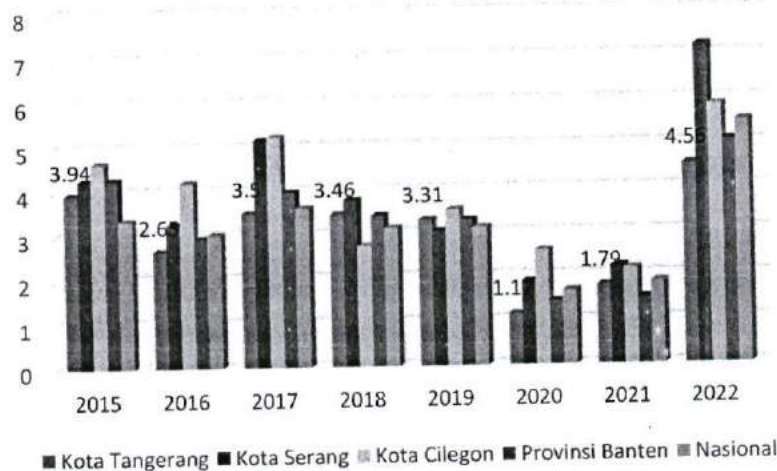
<i>inflasi YoY (%)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Kota Tangerang</i>	3,94	2,65	3,50	3,46	3,31	1,17	1,81	4,56
<i>Kota Serang</i>	4,28	3,26	5,17	3,78	3,06	1,89	2,23	7,22

inflasi YoY (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Cilegon	4,67	4,22	5,24	2,73	3,54	2,59	2,19	5,86
Provinsi Banten	4,29	2,94	3,98	3,42	3,30	1,45	1,51	5,08
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	3,13	1,68	1,87	5,51

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Banten, 2015 – 2022
(Inflasi Kota Tangerang)

Inflasi Kabupaten Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2022, laju inflasi di Kabupaten Tangerang sekitar 4,56% tahun 2022. Inflasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 11 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 18,80 persen. kenaikan pada transportasi merupakan dampak secara nasional pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) pada September 2022. Beberapa komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan September ini adalah komoditas: bensin, angkutan dalam kota, angkutan tarif rumah sakit, tarif kendaraan roda 2 online, beras, tarif kendaraan roda 4 online, lemari pakaian, akademi/ perguruan tinggi, mainan anak. Sementara komoditas yang dominan menyumbang deflasi pada bulan September ini adalah komoditas: bawang merah, cabai merah, cabai rawit, angkutan udara, susu bubuk untuk balita, tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan bawang putih.

Gambar 2.9
Perkembangan Inflasi di Tangerang. Provinsi Banten. dan Nasional Tahun 2015-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Perkembangan tingkat inflasi Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dari tahun 2015-2022 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2022. Nilai inflasi tertinggi Kota Tangerang adalah pada tahun 2022, yaitu sebesar 4,56%, sementara nilai inflasi pada tahun 2020 adalah yang terendah yaitu sebesar 1,17%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,31% sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,30% memasuki

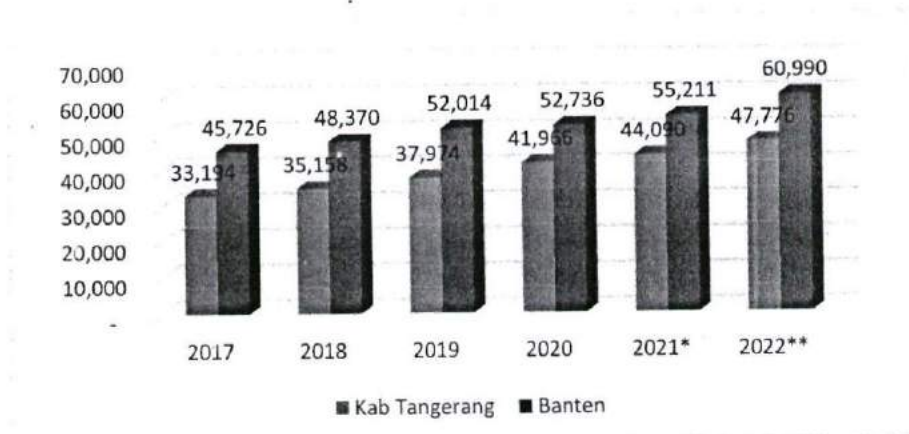
tahun 2022 inflasi kota Tangerang naik menjadi mencapai nilai 4,56% yang nilainya lebih tinggi dari inflasi Provinsi Banten sebesar 5,08%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2019-2022, inflasi Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30% dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72% dan tahun 2022 inflasi Kota Tangerang sebesar 4,56% tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun 2022 sebesar 5,51%.

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2017-2022. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai titik tertinggi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 47.776 (000 rupiah). PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2022 sebesar Rp. 30.789,52 (000 rupiah).

Gambar 2.10
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten
Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2022
(000 rupiah)

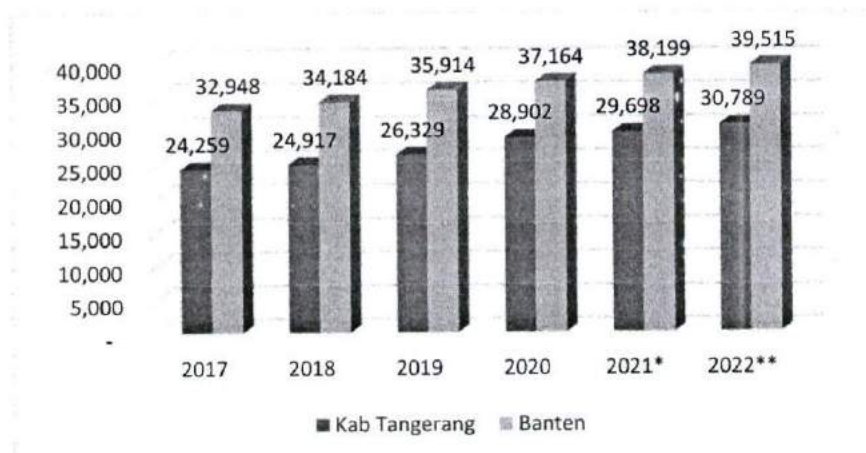


Sumber: BPS Provinsi Banten. 2022

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 2.11
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten
Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2022 (000 rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten. 2022

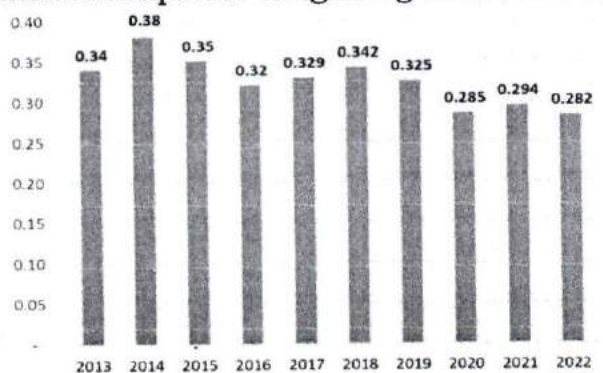
* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

4. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama, menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua ketimpangan menengah yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga ketimpangan tinggi yaitu berada di atas 0,5. Gini Rasio Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar 0,282 angka ini menurun dibandingkan dengan Gini Ratio 2021 yang sebesar 0,294. Ini menandakan level ketimpangan Pendapatan penduduk di Kabupaten Tangerang masih tergolong pada level rendah.

Gambar 2.12
Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022



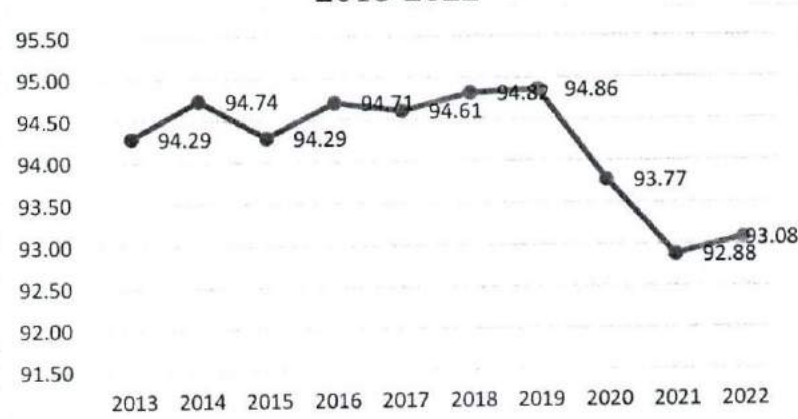
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022, diolah.

5. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022



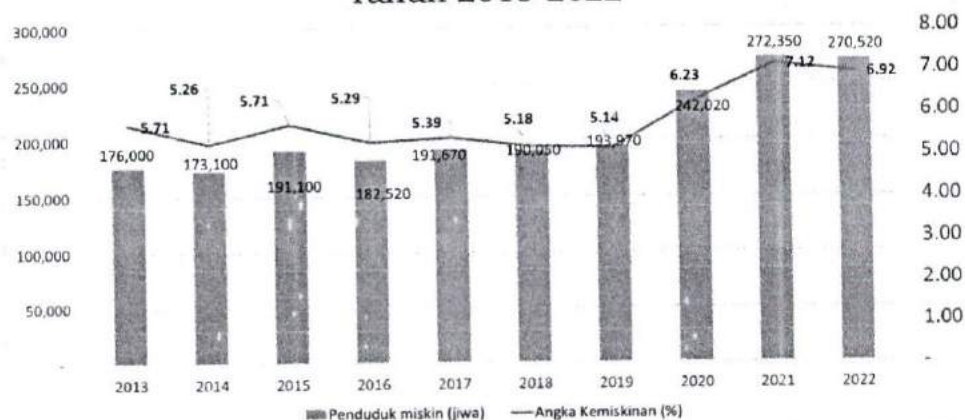
Sumber: BPS RI. diolah.

Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan terhadap persentase penduduk diatas garis kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 capaian Penduduk di atas garis kemiskinan adalah sebesar 94,86%. kemudian capaian ini pada tahun 2020 menjadi 93,77% dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 92,88%. Capaian ini kemudian kembali meningkat di tahun 2022 mencapai 93,08%.

6. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2016- 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.14
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022



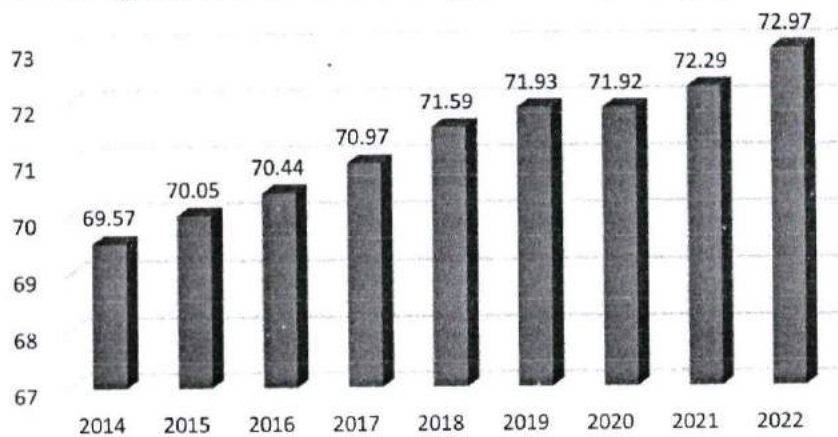
Sumber: BPS RI. diolah.

Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya. pada tahun 2018 mencapai nilai sebesar 5.18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5.14%. Untuk di tahun 2020 mengalami kenaikan . persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 6.23%. tahun 2021 kembali naik menjadi 7.12%. serta tahun 2022 turun menjadi sekitar 6.92% hal ini mengindikasikan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022



Sumber : BPS Provinsi Banten. 2022

Dari data dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang relatif mengalami peningkatan.

Tabel 2.17
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat lahir (UHH, Tahun)	69,37	69,47	69,61	69,79	69,89	69,93	70,28
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	12,11	12,51	12,8	12,81	12,82	12,84	12,85
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	8,23	8,27	8,27	8,28	8,39	8,61	8,92
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribuan Rupiah)	11,863	11,914	12,179	12,476	12,203	12,273	12,427
IPM	70,44	70,97	71,59	71,93	71,92	72, 29	72,97

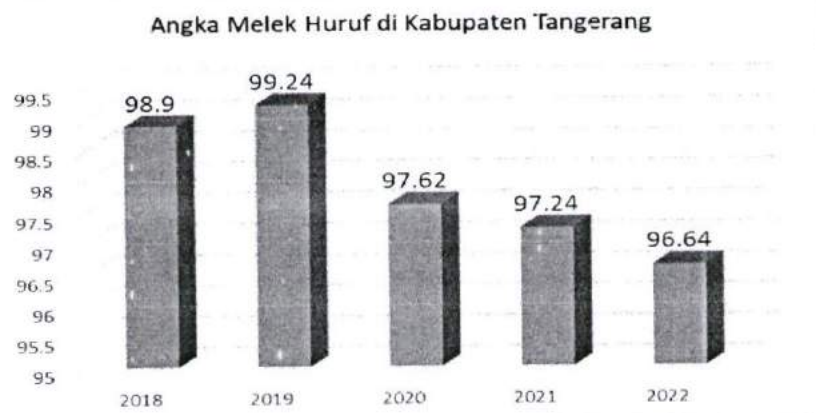
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2023

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia.

Gambar 2.16
Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022



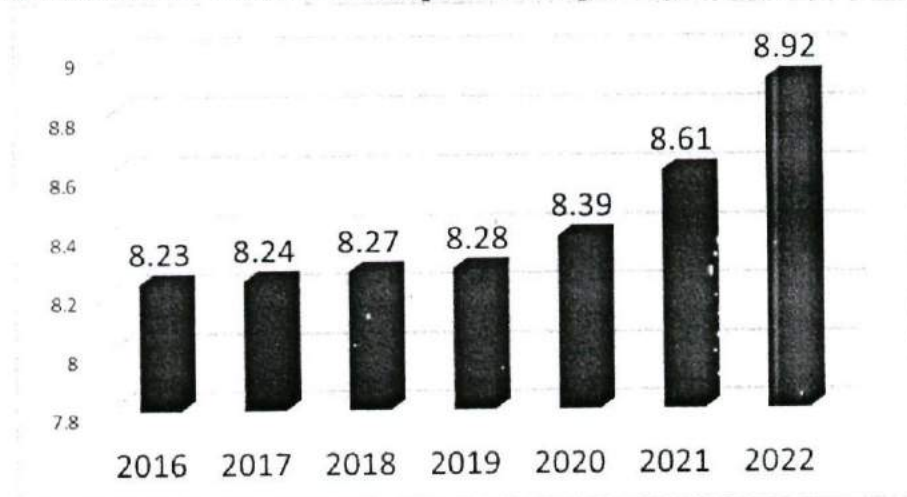
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2022, diolah.

Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan di suatu daerah antara lain adalah dengan melihat persentase harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan. Data diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan persentase Angka Melek huruf mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hal ini disebabkan penduduk yang berusia 15 tahun keatas makin banyak yang belum mengenyam pendidikan dasar, dikarenakan belum terakses secara optimal pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang berumur lebih dari 15 tahun keatas yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah merupakan Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 8,61 tahun. Sedangkan di tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,92 tahun. Walaupun meningkat setiap tahun akan tetapi belum memenuhi Wajardikdas 9 tahun yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Terdapat beberapa akar masalah yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, antara lain belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Tangerang sehingga masih terdapat masyarakat yang putus sekolah sebelum menamatkan jenjang pendidikan menengah pertama, demikian pula dengan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pendidikan belum optimal.

Gambar 2.17
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022

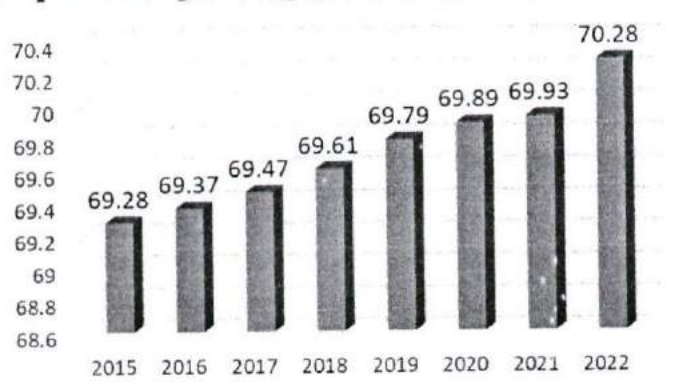


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. 2022 diolah.

3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup digunakan untuk mengukur indeks kesehatan, sementara indeks kesehatan merupakan salah satu komponen dasar dalam pengukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 adalah 70,28 tahun. Sedangkan dari data tahun 2021 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang sekitar 69,93 tahun.

Gambar 2.18
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

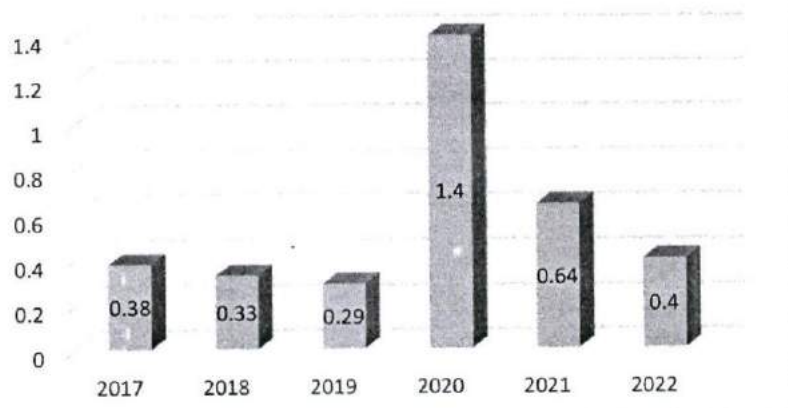


Sumber: BPS Provinsi Banten. 2022. diolah.

4. Persentase balita gizi buruk

Gizi buruk pada balita merupakan kondisi ketika berat badan balita terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk atau *severe wasting* biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah sehingga berisiko terkena penyakit parah, bahkan berisiko meninggal.

Gambar 2.19
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022



Sumber: Sumber: Dinkes. 2021. diolah

Data persentase balita gizi buruk menunjukkan bahwa persentase balita gizi buruk tertinggi pada tahun 2020 sebesar 1,4 persen, hal ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 berdampak pada kondisi kesehatan karena terhalangnya akses pada sarana kesehatan dan juga dipengaruhi kondisi perekonomian masyarakat, akan tetapi seiring dengan keadaan yang makin kondusif, kondisi kesehatan pun terlihat makin membaik. Data yg digunakan hingga 2019 adalah data BPB dengan interpretasi gizi buruk menggunakan indikator BB/U. Data 2020 saat ini menggunakan data EPPGBM dengan interpretasi gizi buruk menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2020 terkait standar antropometri

Diperlukan adanya komitmen secara menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumberdaya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI dan KERAMAS, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal menurunkan angka gizi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah dalam penanggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Gambaran status gizi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022

Tahun	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2014	1,172	0.45	8,583.00	3.28	249,877.00	95.55	1,892.00	0.72
2015	1,091	0.39	8,099.00	2.86	271,407.00	95.89	2,227.00	0.79
2016	1,164	0.41	8,935.00	3.17	268,339.00	95.32	2,880.00	1.03
2017	1,161	0.38	9,644.00	3.14	294,027.00	95.68	2,479.00	0.81
2018	1,040	0.33	7,863.00	2.51	296,092.00	94.66	2,134.00	0.68
2019	932	0.29	7,234.00	2.28	305,893.00	96.22	2,131.00	0.67
2020	2,553	1.40	6,375.00	3.52	154,325.00	85.20	17,857.00	9.86
2021	1,368	0.64	4,992.00	2.34	187,040.00	87.59	20,136.00	9.43
2022	907	0.40	6,047.00	2.50	222,478.00	93.30	3,074.00	1.20

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Tangerang, 2022

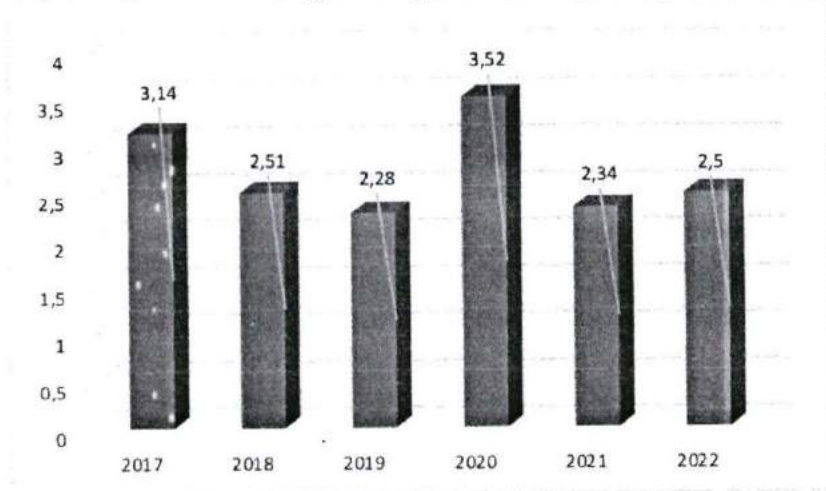
5. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 3,52% menjadi 2,34% di

tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali prevalensi balita gizi kurang,

Data yang digunakan hingga 2019 adalah data Bulan Penimbangan Bayi (BPB) dengan interpretasi gizi kurang menggunakan indikator BB/U. Sedangkan data 2020 saat ini menggunakan data ePPGBM dengan interpretasi gizi kurang menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2020 terkait Standar Antropometri. Peningkatan prevalensi gizi kurang di tahun 2022 karena balita dengan gizi buruk kondisinya membaik menjadi gizi kurang.

Gambar 2.20
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022



Sumber: Dinkes, 2022

Tabel 2.19
Persentase Balita Stunting Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

No	Metode Perhitungan	2019	2020	2021	2022
1	E-PPGM	12	8,5	7,6	3,7
2	SSGI	18,4	N/A	23,3	21,1

Sumber : Dinkes, 2022

Perhitungan Balita Stunting dengan menggunakan metode Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM) dilakukan setiap bulan oleh petugas gizi Puskesmas kepada seluruh balita di Posyandu sedangkan dengan metode dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dilakukan setiap tahun oleh Balitbangdes dengan sampel rumah tangga dengan balita. Secara nasional target stunting 2024 adalah 14 persen (SSGI) untuk itu dibutuhkan berbagai upaya untuk pencapaian tersebut karena hingga saat ini Kabupaten Tangerang masih pada angka 21,1 persen.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Secara umum nilai APM akan lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang tertentu. APM mengukur proporsi anak yang

bersekolah tepat waktu yang dibagi dalam dua kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun dan SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun.

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD/Sederajat	94.12	96.6	96.3	95.84	95.61	95.86	94.78	94.61
SMP/Sederajat	84.31	78.4	78.95	79.06	76.54	84.39	74.20	74.02

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

APM SD mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan demikian pula APM SMP yang sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah anak yang bersekolah sesuai dengan kelompok usianya semakin menurun. hal ini kemungkinan disebabkan makin banyaknya anak berusia diluar kelompok usianya yang bersekolah pada jenjang SD dan SMP karena bersekolah lebih dini dibandingkan usia yang semestinya.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. berapapun usianya. yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2022 APK di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 104,8 naik bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 103,69. APK tingkat SMP/MTs sebesar 103,56 meningkat dari tahun 2021. APK setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi akan tetapi selalu diatas 100, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang bersekolah dijenjang SD dan SMP lebih banyak daripada kelompok usia yang seharusnya ini menunjukkan bahwa terdapat siswa yang belum memasuki usia sekolah tapi sudah sekolah lebih awal. Secara lebih lengkap data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2022 dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2022

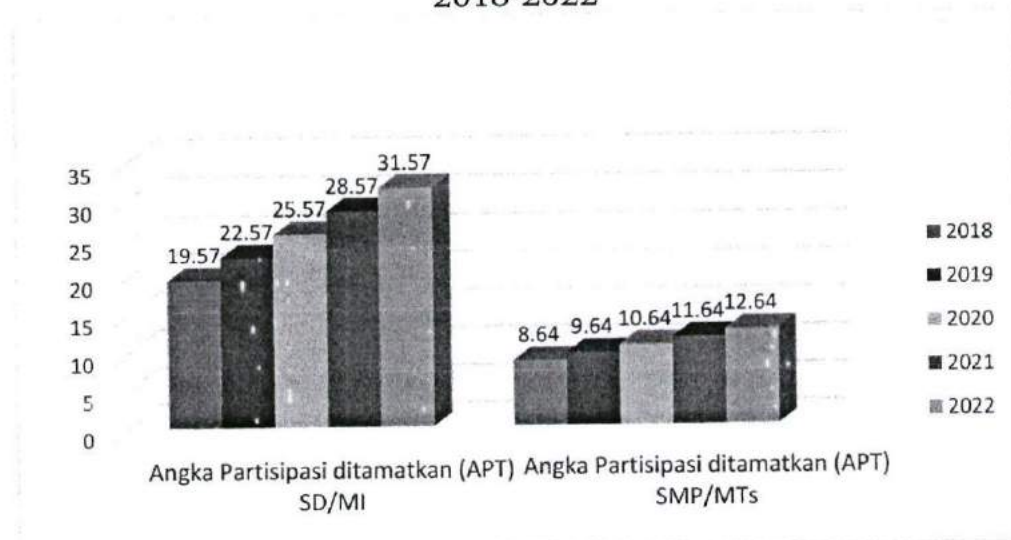
No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	109.64	110.92	111.02	86.81	107.87	103.3	103.69	104.8
2	SMP/MTs	104.06	105.09	105.29	96.27	103.14	103.33	102.57	103.56

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

c. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja. terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah

Gambar 2.21
Angka Partisipasi Ditamatkan SD dan SMP di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022



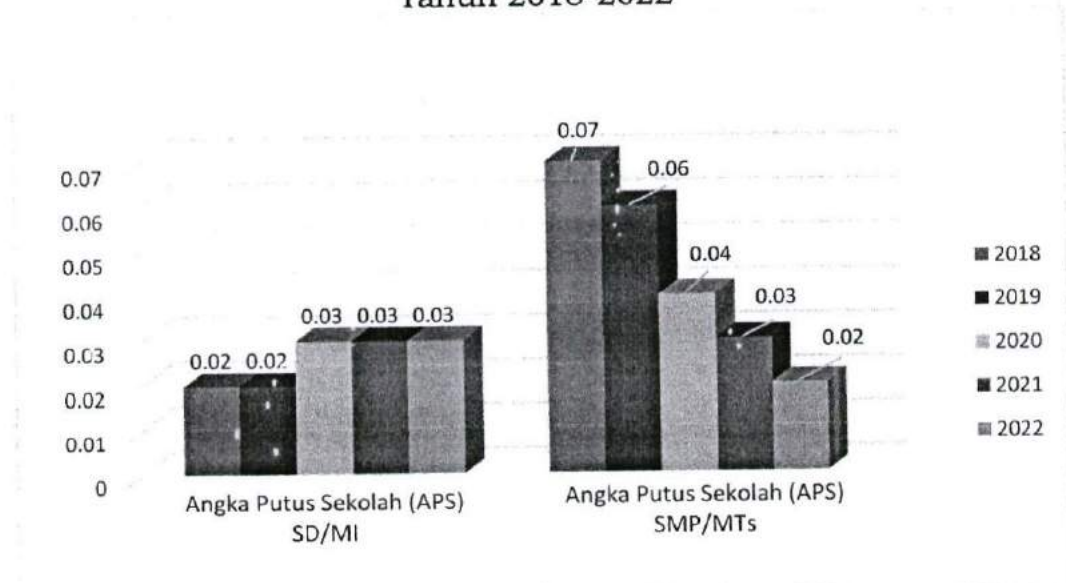
Sumber: Dinas Pendidikan 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat APT di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs

d. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Berikut merupakan data Angka Putus Sekolah (APS) di tingkat SD/MI dan Angka Putus Sekolah (APS)

Gambar 2.22
Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI dan SMP/Mts Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa untuk Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dari tahun mengalami kenaikan sebesar 0.01% dari tahun 2019 ke 2020. Dimana di tahun 2020 sampai 2022 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar

0,03%. Sedangkan untuk Angka Putus Sekolah (APS) Angka Putus Sekolah (APS) relatif menurun yaitu dari 0,07 di tahun 2018 hingga menjadi 0,02%.

e. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah ditingkat SD dan SMP baik secara kualitas dan kuantitas sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Tangerang. Rincian tingkat kerusakan ruang kelas SD dan SMP dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.22
Tingkat Kerusakan Sarana dan Prasarana SD dan SMP Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Jenis Sarpras	SD		SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1. Ruang Kelas					
a. Baik	4.055	2.289	1.292	1.663	9.299
b. Rusak Ringan	2.313	850	647	1.167	4.977
c. Rusak Sedang	1.022	-	123	-	1.145
d. Rusak Berat	455	-	37	-	492
TOTAL	7.845	3.139	2.099	2.830	15.913

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. 2022

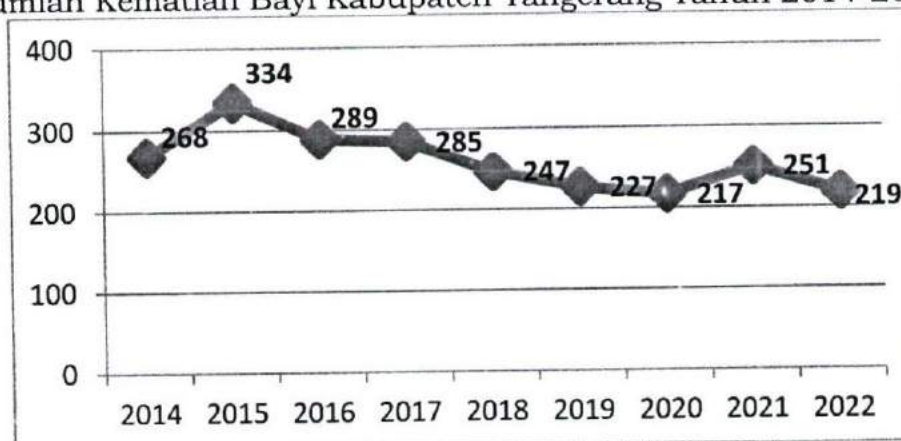
Ruang kelas SD Negeri dengan kondisi rusak berat 5,79 persen dan kondisi rusak sedang sebesar 13,03 persen sedangkan untuk tingkat SMP Negeri kondisi ruang kelasnya masih lebih baik, akan tetapi masih terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat.

2. Bidang Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

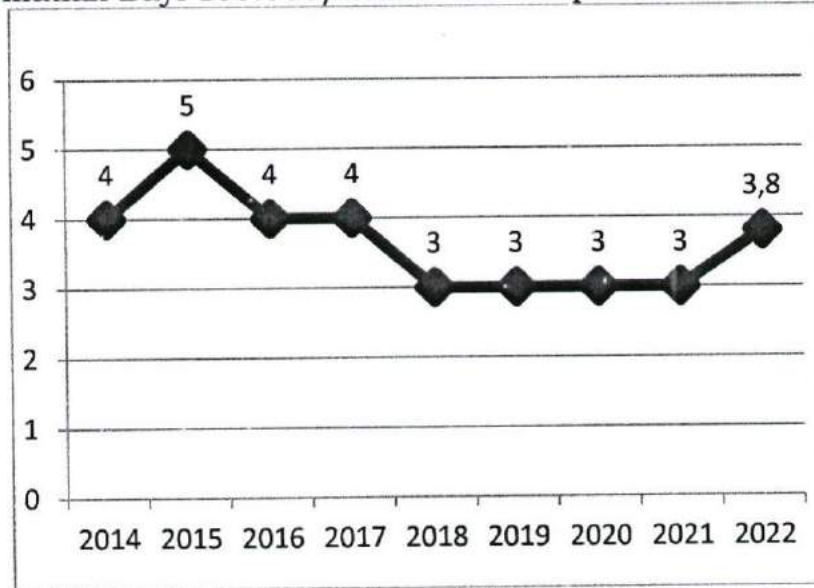
Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan jumlah kematian bayi dibawah satu tahun. Pada gambar 2.25 terlihat angka kematian bayi di Kabupaten Tangerang menurun sejak Tahun 2018 sebesar 247 orang menjadi 227 orang pada tahun 2019 dan terus menurun pada tahun 2020 sebesar 217 orang akan tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 251 orang akan tetapi dengan berbagai upaya penanganan maka tahun 2022 menurun menjadi 219 orang.

Gambar 2.23
Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

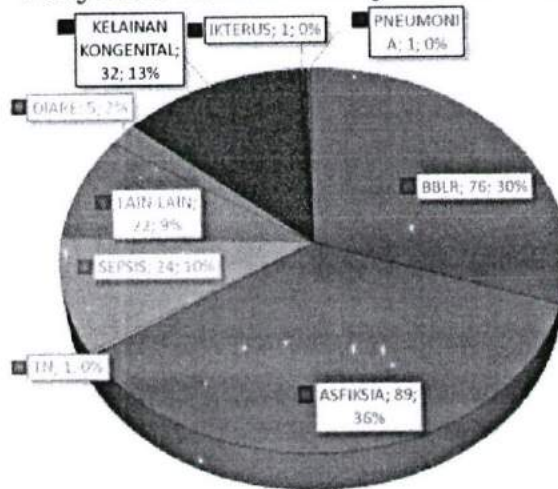
Gambar 2.24
Angka Kematian Bayi 100.000/Kelahiran Hidup Tahun 2014-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

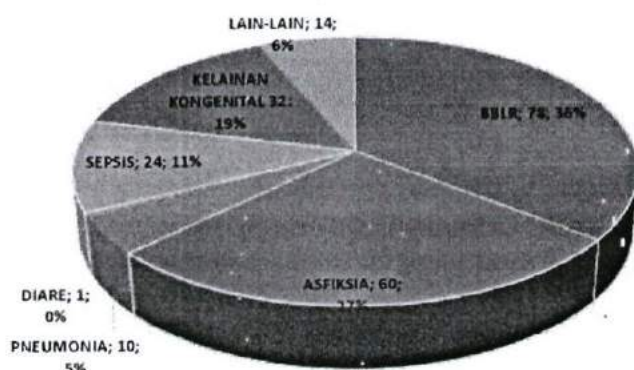
Penyebab kematian bayi pada usia 0-11 bulan disebabkan beberapa hal. Pada tahun 2021 kematian bayi didominasi oleh afiksia sebesar 36 persen dan tahun 2022 didominasi oleh Berat Badan Lahir Rendah sebesar 36 persen, pendampingan terhadap ibu hamil masih sangat perlu menjadi perhatian untuk menurunkan Angka Kematian Bayi.

Gambar 2.25
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2021



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Gambar 2.26
Peyebab Kematian Bayi Tahun 2022

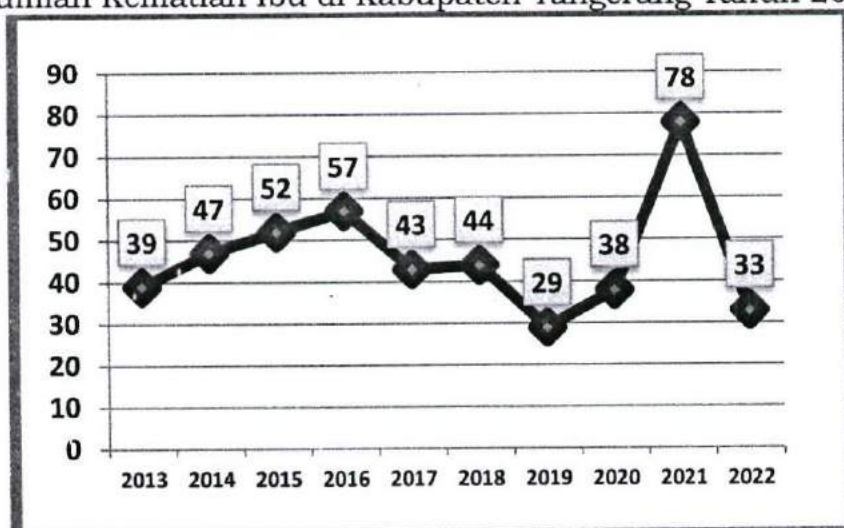


Sumber: Dinkes. 2022. diolah

b. Angka Kematian Ibu

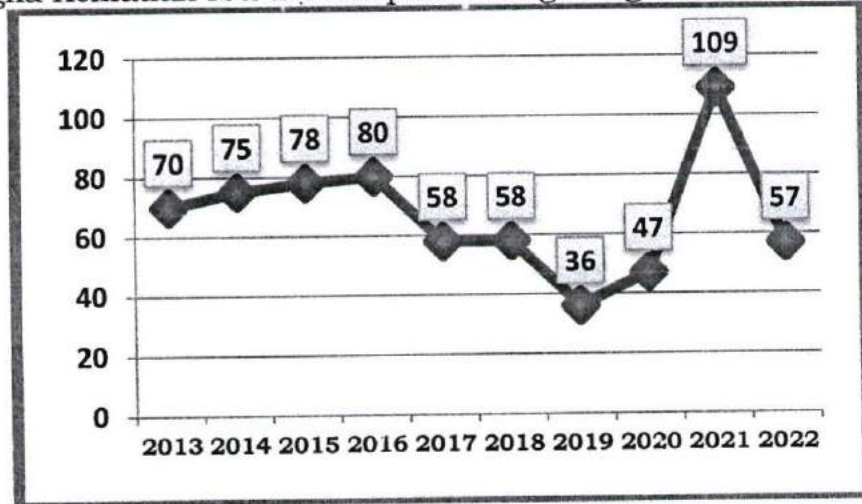
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung berdasarkan 100.000/Kelahiran Hidup. jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu paling tinggi pada tahun 202, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang masih terasa dampaknya sampai dengan tahun 2021.

Gambar 2.27
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

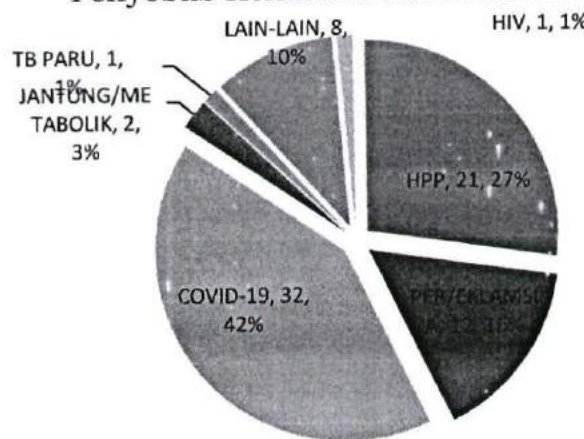
Gambar 2.28
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2022



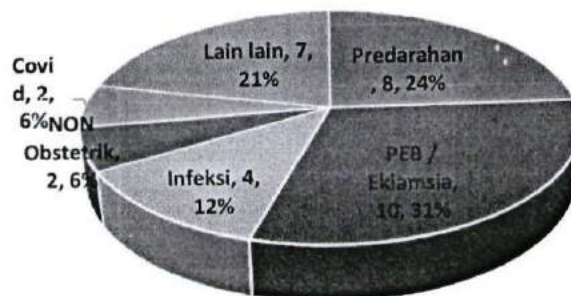
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Tingginya kematian ibu ini disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil yaitu kondisi wanita usia subur yang anemia, kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyerta seperti tuberculosis dan lain-lain. Penyebab kematian ibu pada tahun 2021 didominasi Covid-19 sebesar 42 persen dan 2022 didominasi oleh PEB/Eklamsia sebesar 31 persen.

Gambar 2.29
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2021



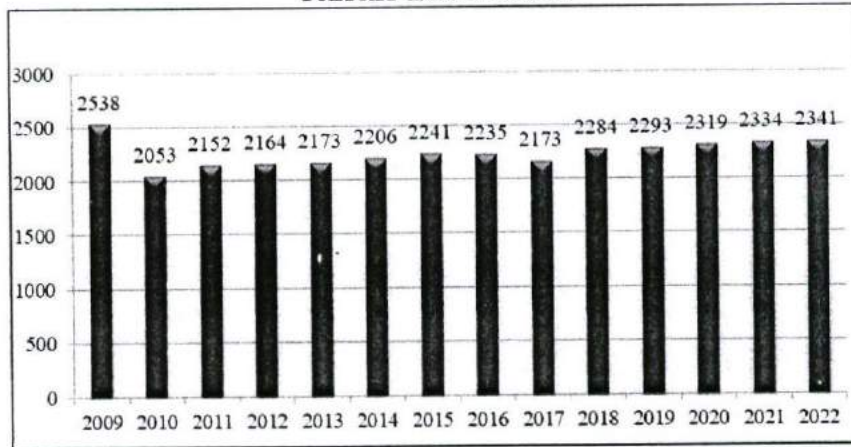
Gambar 2.30
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022



c. Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)

Salah satu bentuk pembinaan UKBM adalah pembinaan pada posyandu. Pada Tahun 2022 di Kabupaten Tangerang sudah terbentuk sebanyak 2341 posyandu. Tingkat perkembangan posyandu di Kabupaten Tangerang hingga Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

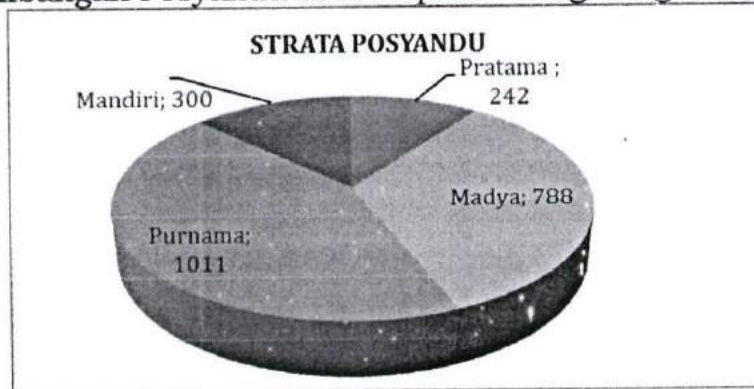
Gambar 2.31
Perkembangan Posyandu di Kabupaten Tangerang
Tahun 2009-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tangerang Tahun 2022

Target pembinaan posyandu adalah tercapainya Posyandu Aktif atau posyandu yang berada pada strata Purnama dan Mandiri. Pada Tahun 2022 target Posyandu Purnama dan Mandiri adalah 1.600 posyandu dan capaiannya adalah 1311 posyandu. Pencapaian Posyandu Purnama dan Mandiri Tahun 2022 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain karena a) masih adanya posyandu yang memiliki kader kurang dari 5 org, b) masih banyak petugas yang menjadikan adanya gedung posyandu sebagai syarat strata, c) masih adanya posyandu yang memiliki sarana prasarana posyandu yang tidak lengkap. Pada grafik dibawah ini dapat dilihat tingkat strata posyandu di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2022.

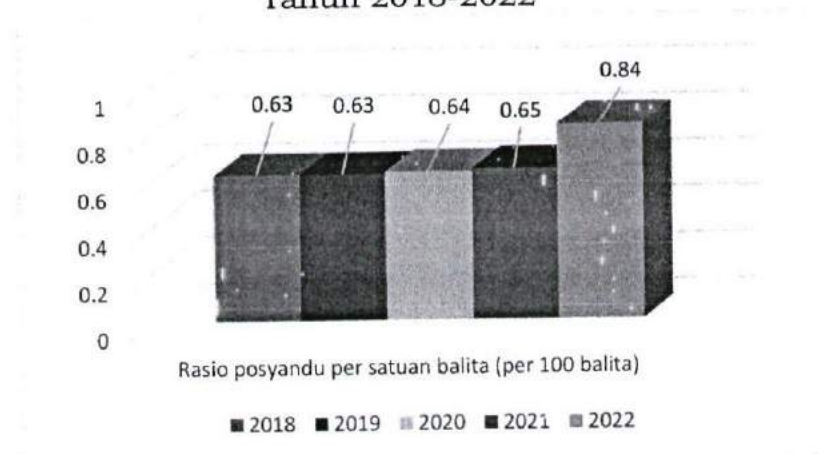
Gambar 2.32
Perkembangan Posyandu di Kabupaten Tangerang Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tangerang Tahun 2022

Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk setiap 100 orang balita.

Gambar 2.33
Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita) di Kabupaten Tangerang
Tahun 2018-2022



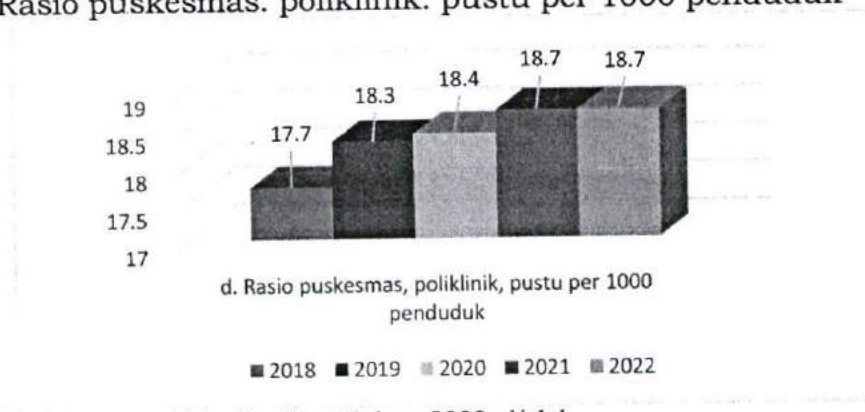
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rasio pelayanan posyandu di tahun 2022 sebesar 0.84 yang menunjukkan bahwa pelayanan posyandu berjalan dengan baik dari tahun ke tahun. Ditunjukkan oleh kenaikan rasio posyandu dalam kurun waktu 5 tahun.

d. Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per 1000 penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas. polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas. bahkan di beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit. Jumlah ini terdiri dari puskesmas rawat inap 37 unit dan non rawat inap 46 .

Gambar 2.34
Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per 1000 penduduk



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

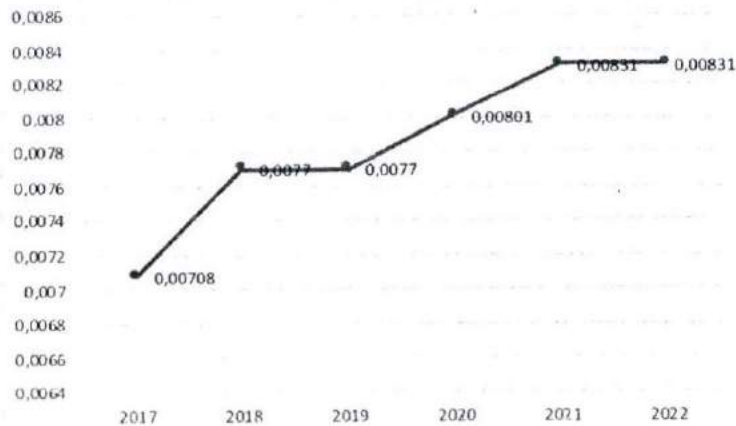
Angka rasio jumlah puskesmas. poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk. hal ini ditunjukkan oleh data diatas dimana rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Tangerang naik di tahun 2021 dan 2022 sebesar 18,7%, pada tahun 2022 jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu sebanyak 570 unit.

e. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)

Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara

berkesinambungan. diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk. Angka rasio Rumah Sakit mencapai 0,00831 di tahun 2022. Dalam penyelenggaraan fungsi rumah sakit perlu dilakukan upaya peningkatan peran rumah sakit dalam pelaksanaan program prioritas.

Gambar 2.35
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) Tahun 2017-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

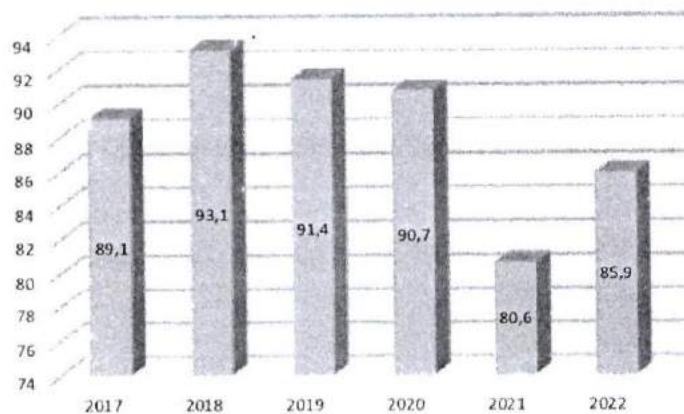
f. Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)

Rasio Dokter per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan Dokter baik dokter umum ataupun spesialis dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Pada tahun 2022 rasio dokter per 1000 penduduk adalah 1,307 artinya satu dokter menangani 1.307 penduduk Kabupaten Tangerang, rasio ini dirasakan masih sangat jauh dari kecukupan.

g. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dapat didefinisikan sebagai ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.36
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2017-2022

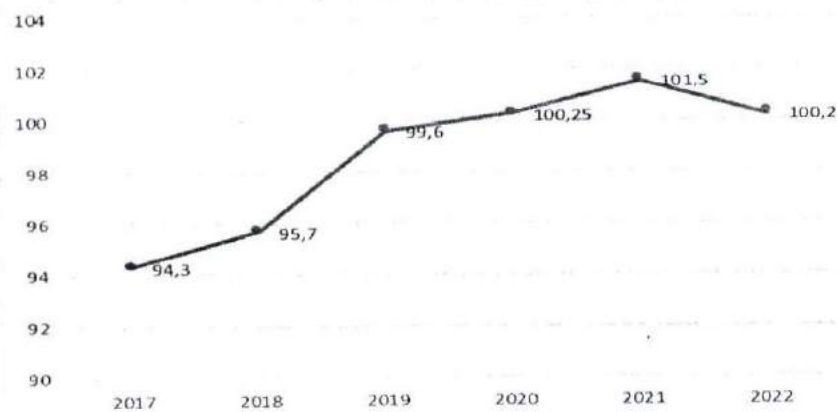


Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari diagram diatas yang menunjukkan penurunan dari tahun 2021 yang awalnya sebesar 90,7% pada tahun 2020 dan turun menjadi 80,6% di tahun 2021 dan mengalami kenaikan tahun 2022 sebesar 85,9 persen. Sehubungan dengan hal tersebut puskesmas harus meningkatkan tindakan promotif dan preventif terhadap komplikasi kebidanan, sehingga akan lebih cepat dalam penanganannya h. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Meningkatnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB. Dari data dibawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.37
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2017-2022



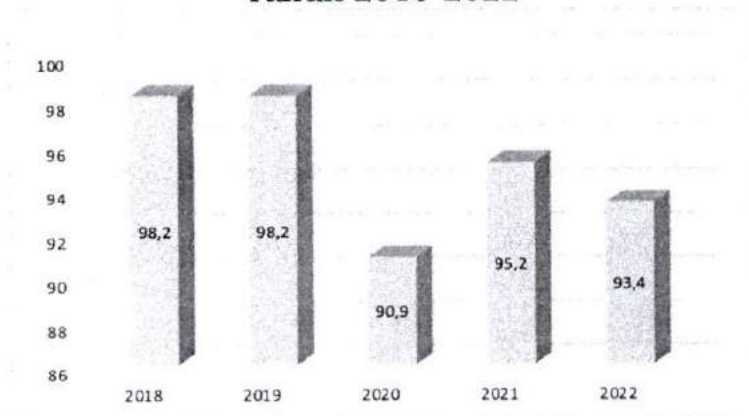
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Dimana persentase di tahun 2018 sebesar 95,7%. Kemudian naik menjadi 99,6% di tahun 2019 dan terus naik sampai dengan tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 100,2% Hal ini harus segera ditindaklanjuti melihat tren penurunan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

i. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah indikator lain, selain dari imunisasi dasar lengkap, untuk mengukur keberhasilan pemberian imunisasi. UCI desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Gambar 2.38
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022

Upaya imunisasi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi (*herd immunity*) sehingga Penyakit-penyakit yang dapat di imunisasi (PD3I) dapat dibasmi, dieliminasi atau dikendalikan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya imunisasi dapat semakin efektif bermutu dan efisien.

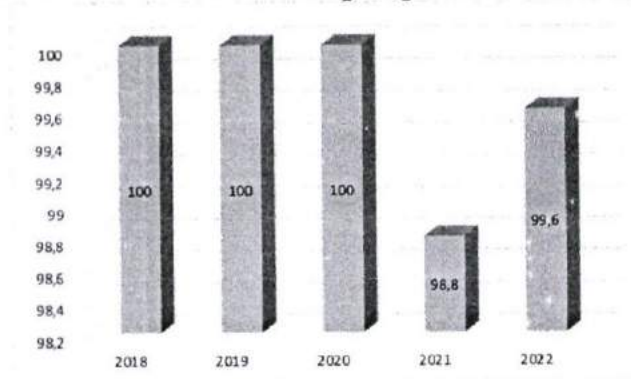
Universal Child Immunization (UCI) sudah tidak dipakai sejak tahun 2020 berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2020-2024. Indikator yang dipakai saat ini adalah persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

j. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Dari data dibawah ini dapat diketahui bahwa di tahun 2018-2020 cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan 98,8 persen dan tahun 2022 mencapai 99,6 persen.

Gambar 2.39
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. Diolah

Untuk meningkatkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan perlunya komitmen dari Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait untuk melakukan upaya seperti upaya penyuluhan gizi, peningkatan cakupan penimbangan balita, pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan bagi balita dengan gizi kurang, peningkatan kapasitas petugas dalam tata laksana

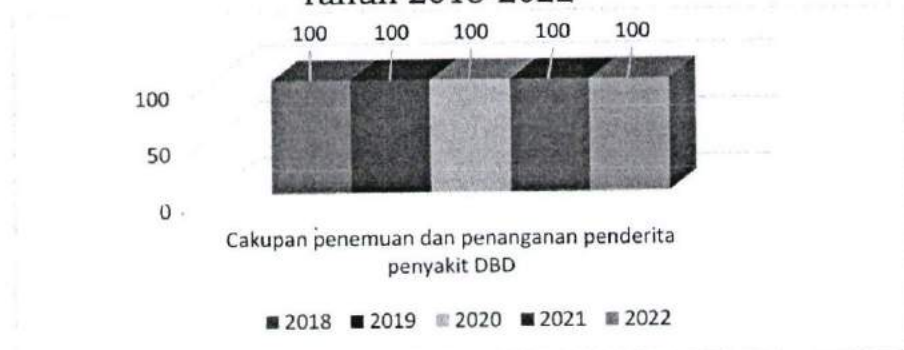
balita gizi buruk. pembentukan *Therapeutic Feeding Centre* (TFC) dan *Community Feeding Centre* (CFC) sebagai pusat-pusat pemulihan gizi di faskes serta upaya lain untuk mendukung peningkatan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.

Penanganan balita gizi buruk dilakukan pada balita gizi buruk yang dilaporkan pada bulan sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat 6 balita dan tahun 2022 terdapat 2 balita yang sesuai hasil pengukuran, ditemukan gizi buruk, namun balita ini pindah domisili keluar Kabupaten Tangerang sebelum sempat dilakukan intervensi/ditangani.

k. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Pada gambar 2.40 menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100% di tahun 2018 hingga 2022. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD dititik beratkan pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di semua wilayah dan pemantauan jentik berkala untuk mencapai angka bebas jentik sesuai target >95%). kegiatannya dilakukan dengan melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik khususnya di wilayah-wilayah endemis DBD, melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan melaksanakan Fogging Fokus sesuai kriteria dari hasil penyelidikan Epidemiologi sebagai upaya untuk memutus rantai penularan DBD yang didahului dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Gambar 2.40
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Larvasidasi (pemberian abate untuk membunuh jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air) dan dilanjutkan fogging fokus dengan radius 200 m.

l. Penderita diare yang ditangani

Berdasarkan hasil kegiatan Rapid Survei Diare yang dilaksanakan pada tahun 2015. diketahui bahwa angka kesakitan diare pada semua umur adalah 270 per 1000 penduduk. angka kesakitan diare pada balita adalah 843 per 1000 penduduk. Selain itu diare juga merupakan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga perlu dilakukan upaya untuk penanganan penyakit diare. Persentase penderita diare yang ditangani di Kabupaten Tangerang relatif mengalami kenaikan dan penurunan selama kurun waktu 5 tahun . Hal ini terlihat dari grafik di bawah:

Gambar 2.41
Penderita diare yang ditangani Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

m. Angka kejadian Malaria

Penyakit Malaria merupakan *penyakit* infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Berdasarkan data diagram di bawah dapat diketahui bahwa dalam kurun lima tahun terakhir, di Kabupaten Tangerang tidak memiliki kasus penyakit malaria yang mana ditunjukkan oleh data angka kejadian Malaria dari tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 2.42
Angka kejadian Malaria Tahun 2018-2022

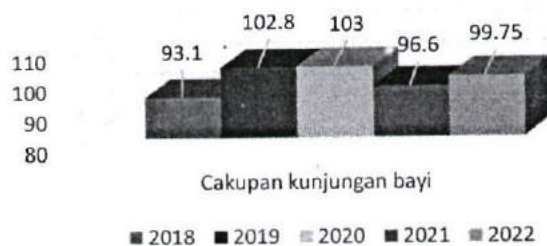


Sumber: Dinkes. 2022. diolah

n. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kunjungan bayi tersebut dapat pelayanan kesehatan rutin mulai dari pelayanan kesehatan neonatal dasar yang meliputi tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian imunisasi.

Gambar 2.43
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2022



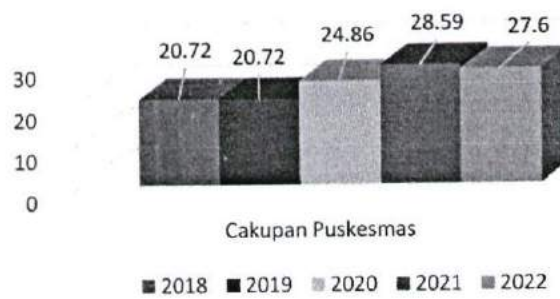
Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari-11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2018 sebesar 93.1% menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 94.7%. namun cakupan tersebut sudah mencapai target Renstra tahun 2018 sebesar 90%. Kemudian pada tahun 2020 cakupan kunjungan Bayi mulai meningkat, yaitu 99.9%. Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwasanya capaian kunjungan bayi di kabupaten Tangerang bersifat fluktuatif. Pada tahun Angka ini mengalami penurunan menjadi 96.6% pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 99.75% pada tahun 2022.

o. Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan dikalikan dengan 100%. Capaian pada tahun 2018 adalah 20,72%. capaian ini bertahan hingga tahun 2019. Tahun 2020 capaian ini mengalami peningkatan menjadi 24,86% dan kembali meningkat menjadi 28,59% pada tahun 2021 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 27.6%. Berikut grafik yang menggambarkan ketercapaian tersebut:

Gambar 2.44
Cakupan Puskesmas Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

p. Cakupan Pembantu Puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas adalah jumlah populasi atau wilayah yang dilayani oleh seorang pembantu puskesmas. Pembantu puskesmas adalah tenaga kesehatan yang bertugas untuk membantu dokter dalam melaksanakan tugas-tugas medis di puskesmas. Cakupan pembantu puskesmas biasanya ditentukan berdasarkan jumlah populasi atau luas wilayah yang harus dilayani oleh pembantu tersebut. Tujuan dari menentukan cakupan pembantu puskesmas adalah untuk memastikan bahwa seluruh wilayah yang dilayani oleh puskesmas memiliki akses yang sama dan cukup terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini juga membantu dalam menentukan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di setiap puskesmas untuk memastikan bahwa semua pasien dapat mendapatkan pelayanan yang tepat dan efektif.

Cakupan Pembantu puskesmas adalah cakupan pembantu atau tenaga kesehatan yang ada dalam puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Capaian pada tahun 2018 adalah 18.78%. capaian ini menurun pada tahun 2019 menjadi 16.79%. Capaian ini bertahan hingga tahun 2021. Tahun 2022 capaian ini mengalami peningkatan menjadi 16.8%. Berikut grafik yang menggambarkan ketercapaian tersebut:

Gambar 2.45
Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

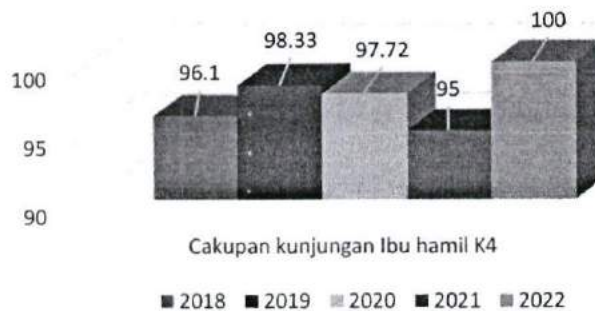
q. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah persentase atau proporsi ibu hamil yang melakukan kunjungan ke dokter atau tenaga kesehatan sebanyak 4 kali atau lebih selama masa kehamilannya. Kunjungan ibu hamil K4 adalah bagian dari program perawatan ibu hamil yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Tujuan dari kunjungan ibu hamil K4 adalah untuk memastikan bahwa ibu hamil menerima perawatan yang tepat dan dapat mengatasi masalah kesehatan yang muncul selama masa kehamilan. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan janin dan memastikan bahwa ibu dan janin menerima nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Persentase kunjungan ibu hamil K4 mengalami peningkatan dari 99% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022. Capaian ini sudah mencapai target SPM pelayanan kesehatan pada ibu hamil sebesar 100%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan K1 dan K4 antara lain pendataan ibu hamil, kunjungan rumah bagi ibu hamil yang tidak mematuhi jadwal ANC, optimalisasi Kelas ibu hamil, optimalisasi MOM (Mobile Obstetri Monitoring), Penyuluhan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dan peningkatan kualitas pelayanan ANC serta peran aktif dari MKIA (Motivator Kesehatan Ibu dan Anak).

Gambar 2.46
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah

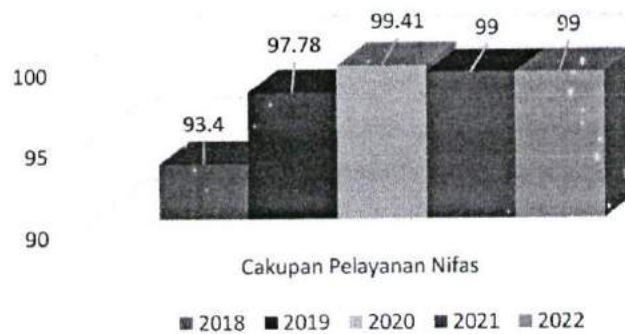
r. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah persentase atau proporsi ibu bersalin yang menerima pelayanan nifas setelah melahirkan. Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk ibu bersalin selama masa pasca melahirkan. Tujuan dari pelayanan nifas adalah untuk memastikan bahwa ibu

bersalin memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif setelah melahirkan. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan ibu dan memastikan bahwa ibu menerima perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatannya setelah melahirkan.

Capaian Pelayanan di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 93.4% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 97.78%. capaian ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 99.41% kemudian pada tahun 2021 dan 2022 capaian ini menurun menjadi 99%. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.47
Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2018-2022



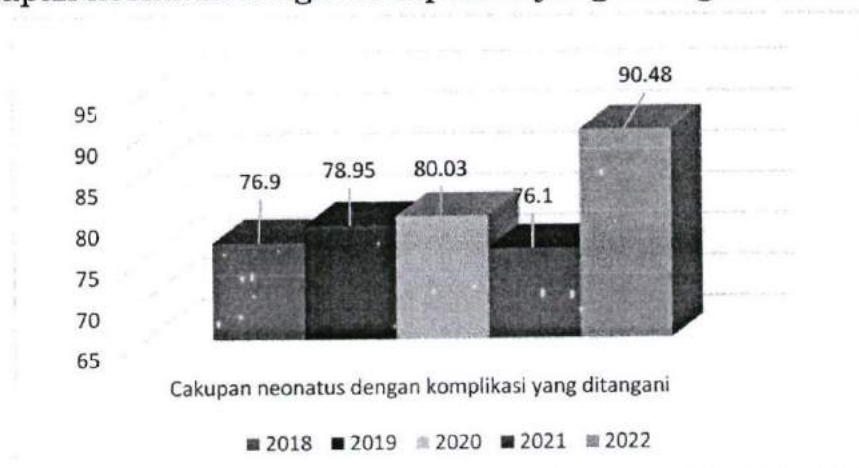
Sumber: Dinkes. 2022. diolah.

s. Cakupan Neonatus Komplikasi

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah persentase atau proporsi neonatus yang menderita komplikasi kesehatan dan menerima perawatan yang tepat dan efektif. Komplikasi kesehatan pada neonatus dapat berupa masalah pernapasan, masalah pada jantung, infeksi, dan lain-lain. Tujuan dari perawatan neonatus dengan komplikasi adalah untuk memastikan bahwa neonatus memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa neonatus memperoleh perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatannya dan menghindari komplikasi yang lebih serius.

Cakupan Neonatus ini mengalami tren peningkatan yang cukup baik. Capaian pada tahun 2018 adalah 76.9%. kemudian meningkat menjadi 78.95% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 capaian ini kembali meningkat menjadi 80.03%. Kemudian tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 76.1% dan kembali meningkat menjadi 90.48%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.48 berikut.

Gambar 2.48
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Tahun 2018-2022

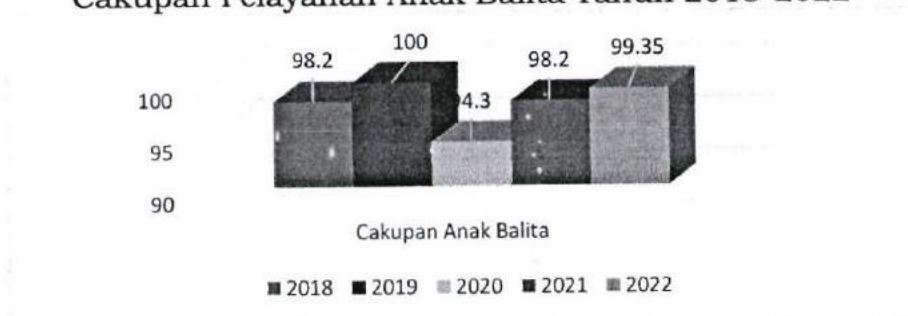


Sumber: Dinkes. 2022 diolah.

t. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan anak balita adalah persentase atau proporsi anak usia 1 sampai 5 tahun yang menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, termasuk imunisasi, skrining kesehatan, dan perawatan untuk masalah kesehatan. Anak balita membutuhkan perawatan kesehatan yang konsisten dan tepat waktu untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan. Tujuan dari cakupan anak balita adalah untuk memastikan bahwa anak balita memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif dan membantu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Ini juga membantu dalam menentukan kebutuhan untuk tenaga kesehatan dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif bagi anak balita.

Gambar 2.49
Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2018-2022



Sumber: Dinkes. 2022. diolah.

Capaian Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Tangerang termasuk kategori tinggi dan memuaskan, hal ini dilihat dari capaian yang terlihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 angka capaian ini adalah 98.2%, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 100%. Pada tahun 2020 capaian ini mengalami penurunan menjadi 94.3% dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98.2% dan kembali mengalami peningkatan menjadi 99.35% pada tahun 2022.

u. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah persentase atau proporsi masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap

pelayanan kesehatan dasar yang tepat dan efektif. Pelayanan kesehatan dasar meliputi perawatan dasar untuk masalah kesehatan seperti penyakit menular, masalah gizi, dan masalah kesehatan reproduksi. Tujuan dari cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan. Ini juga membantu dalam mengatasi masalah kesehatan yang berkembang dan memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan dan memelihara kondisi kesehatannya.

Gambar 2.50
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Tahun 2018-2022



Sumber: Sumber Dinkes 2022. Diolah.

Capaian dari cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan. hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai angka 85.99% kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 102,33%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 94,35% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 98.8% dan pada tahun 2022 menjadi 96%.

- j. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, seluruh penduduk Kabupaten Tangerang harus memiliki Jaminan Kesehatan Nasional JKN-KIS yang dilakukan secara bertahap. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016 tentang Integrasi program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang Kedalam Jaminan Kesehatan Nasional, sejak tahun 2016 secara bertahap peserta program Kartu Sehat Pada Jamkesda Kabupaten Tangerang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan. Dengan jumlah peserta sebagai berikut :

Tabel 2.23
Jumlah Peserta JKN Terintegrasi

NO	TAHUN	SK BUPATI	JUMLAH PESERTA JKN TERINTEGRASI
1.	2016	Nomor : 440/Kep.414-HUK/2016, tentang Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2016	37.076
2.	2017	Nomor : 440/KEP.325-HUK/2017, tentang Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2017	49.699

NO	TAHUN	SK BUPATI	JUMLAH PESERTA JKN TERINTEGRASI
3.	2018	Nomor : 440/Kep. 159-Huk/2018, Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2018	80.000
4.	2019	Nomor : 440/Kep. 771-Huk/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019	90.000
5.	2020	Nomor : 440/Kep. 771-Huk/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019	90.000
6	2021	Nomor : 440/Kep. 771-Huk/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019	90.000
7	2022	Telah tercapainya UHC maka mekanisme pengaktifan BPJS PBI APBD Kabupaten Tangerang adalah langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari	322.454

Sumber Data : UPTD.PJK Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 2022

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan sampai dengan bulan Desember 2022 dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang 3.216.456 sebanyak 97,44% atau 3.133.947 jiwa telah menjadi peserta JKN KIS/BPJS Kesehatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.24
Jumlah Peserta JKN Kabupaten Tangerang Tahun 2022

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	1.076.845	33,48
2	PBI APBD	322.459	10,03
SUB JUMLAH		1.399.299	43,50
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	1.169.221	36,35
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	544.277	16,92
3	Bukan Pekerja (BP)	21.177	0,66
SUB JUMLAH NON PBI		1.734.675	53,93
JUMLAH PESERTA JKN KABUPATEN TANGERANG		3.133.974	
JUMLAH PENDUDUK (DUKCAPIL SM 2 TH 2021)		3.216.465	
PERSENTASE		97,44	

Sumber : BPJS Kesehatan tahun 2022

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan anggaran jamkesda yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan yang tidak dijamin oleh JKN/BPJS kesehatan.

Jumlah pasien jamkesda yang dilayani baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas sebanyak 7.359 orang dengan rincian sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 2.25
Rekapitulasi Pasien Jamkesda Per Rumah Sakit dan Puskesmas Tahun 2022

NO	RUMAH SAKIT	JUMLAH PASIEN
1	RSUPN Dr. Cipto Mangun Kusumo	53
2	RSU Tangerang	2.160
3	RSUD Balaraja	2.718
4	RSUD Pakuhaji	1.369
5	RSUP Dr. Sitanala	661
6	RS Jiwa Dr. Marzoeqi Mahdi	22
7	RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan	90
8	RS Hermina Bitung	1
9	Puskesmas	285
TOTAL		7.359

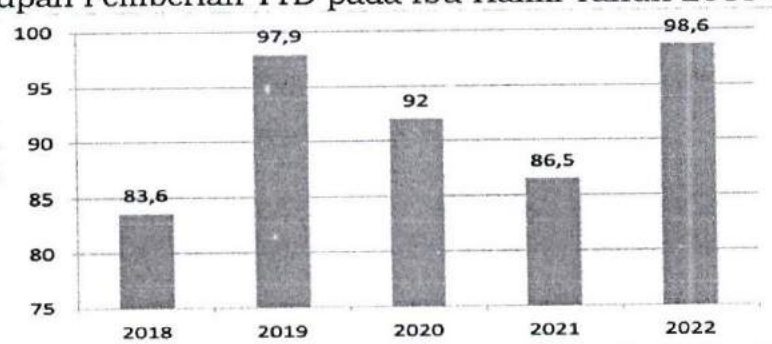
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2022

j. Kasus anemia ibu hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko kelahiran premature, kematian ibu dan anak serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebanyak 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapat tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil di Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah 98,6 % meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 86,5%.

Gambar 2.51
Cakupan Pemberian TTD pada Ibu Hamil Tahun 2018-2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2022

Pada tahun 2022, Kecamatan dengan cakupan tertinggi pemberian TTD pada ibu hamil adalah Kecamatan Solear, Jambe, Panongan, Pagedangan, Pasar Kemis, Sindang Jaya, Sukamulya, Kresek, Kronjo, Mauk, Kemeru, Sukadiri, Tigaraksa sebesar 100 %, sedangkan kecamatan dengan persentase terendah adalah Kecamatan Jayanti sebesar 86,2 %.

k. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) sampai dengan saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia walaupun upaya penanggulangan TB telah dilaksanakan di banyak negara sejak tahun 1995.

Menurut laporan WHO tahun 2015, di tingkat global diperkirakan 9,6 juta kasus TB paru dengan 3,2 juta kasus diantaranya adalah perempuan. Dengan 1,5 juta kematian karena TB dimana 480.000 kasus adalah perempuan. Dari kasus TB tersebut ditemukan 1,1 juta (12%) HIV positif dengan kematian 320.000 orang (140.000 orang adalah perempuan) dan 480.000 TB Resisten Obat (TB-RO) dengan kematian 190.000 orang.

Dari 9,6 juta kasus TB paru, diperkirakan 1 juta kasus TB Anak (di bawah usia 15 tahun) dan 140.000 kematian/tahun. Jumlah kasus TB di Indonesia menurut Laporan WHO tahun 2015, diperkirakan ada 1 juta kasus TB paru pertahun (399 per 100.000 penduduk) dengan 100.000 kematian pertahun (41 per 100.000 penduduk). Diperkirakan 63.000 kasus TB dengan HIV positif (25 per 100.000 penduduk). Angka Notifikasi Kasus (Case Notification Rate/CNR) dari semua kasus, dilaporkan sebanyak 129 per 100.000 penduduk. Jumlah seluruh kasus 324.539 kasus, diantaranya 314.965 adalah kasus baru. Secara nasional perkiraan prevalensi HIV di antara pasien TB diperkirakan sebesar 6,2%. Jumlah kasus TB-RO diperkirakan sebanyak 6700 kasus yang berasal dari 1,9% kasus TBRO dari kasus baru TB dan ada 12% kasus TB-RO dari TB dengan pengobatan ulang.

Gambar 2.52
Jumlah Kasus Tuberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang
Tahun 2013 – 2022

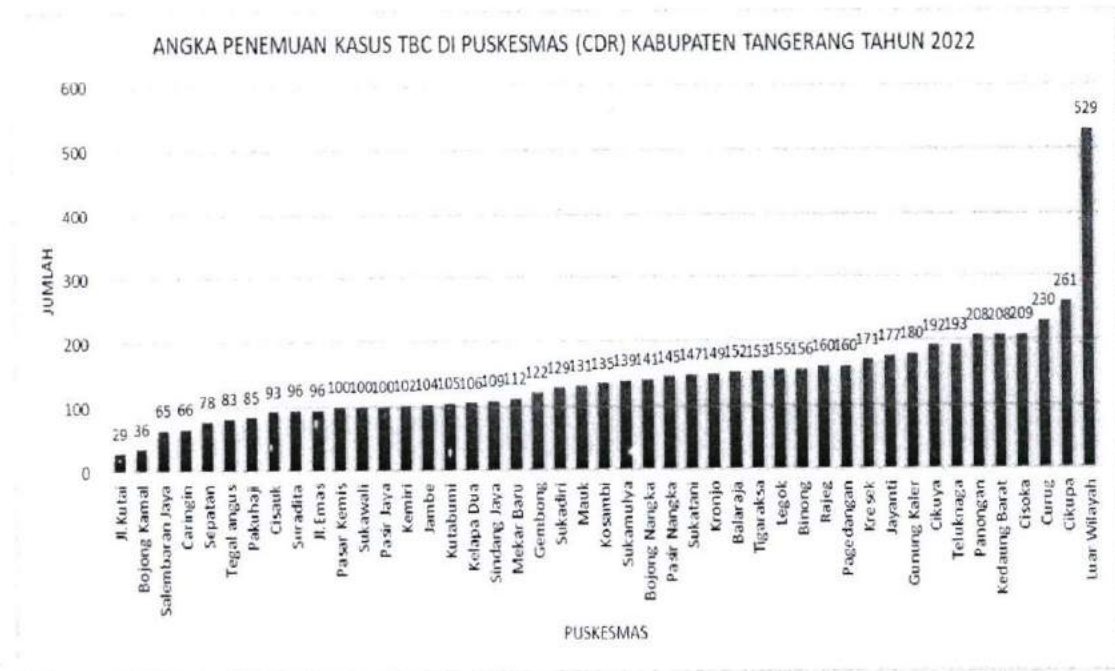


Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2022

Gambar di atas menunjukkan, pada tahun 2020 kembali menjauhi titik temu, artinya terdapat kesenjangan antara capaian dan estimasi.

Gambar 2.53

Angka Penemuan Kasus TBC di Puskesmas (CDR) Kabupaten Tangerang Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2022

Dari gambar di atas terlihat cakupan penemuan kasus tertinggi di luar wilayah Kabupaten Tangerang kemudian Cikupa dan Curug.

1. HIV dan AIDS

Pemerintah bersama masyarakat memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian HIV AIDS untuk mencapai eliminasi HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) pada tahun 2030. Pemerintah bersama masyarakat mendukung upaya pencapaian eliminasi HIV AIDS yang telah disepakati di tingkat global bahwa pada tahun 2030 kita dapat mencapai 95-95-95 untuk pengobatan, dimana 95 persen ODHIV mengetahui status, 95 persen dari ODHIV yang mengetahui status mendapatkan pengobatan, dan 95 persen dari ODHIV yang diobati virusnya tersupresi. Pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengendalian HIV AIDS.

Gambar 2.54
Distribusi Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang Sampai Dengan Tahun 2022



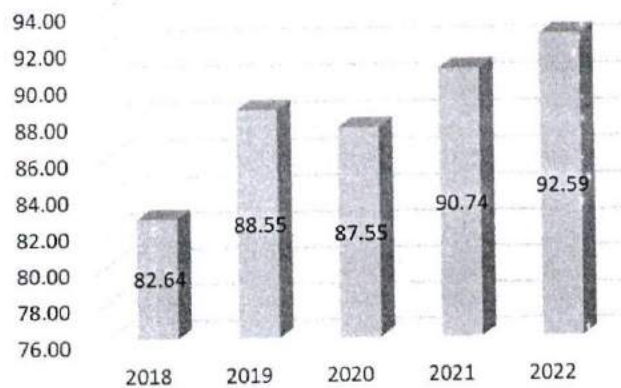
Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2022 ditemukan 533 kasus pada orang dengan HIV positif (ODHIV), dengan temuan pada HIV sebanyak begitu pula pada kasus AIDS dari 298 kasus ke 150 kasus. Serta terjadi kenaikan kumulatif dari 3.168 kasus ke 3.582 kasus. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19 dan mempengaruhi dalam penanggulangan HIV AIDS. Selain stigma dan upaya pencegahan melalui penggunaan kondom, ada masalah lain yang muncul selama pandemi COVID-19, antara lain:

- 1). Kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi pencegahan HIV AIDS yang biasanya dilakukan secara massal dengan keterbatasan media edukasi digital;
- 2). Penundaan pelaksanaan mobile VCT atau tes HIV pada populasi berisiko, dikarenakan sumber daya yang terbatas dan dialihkan untuk penanggulangan COVID-19; serta
- 3). Keterbatasan akses antiretroviral therapy (ART) dan risiko kerentanan ODHIV atau ODHIV yang lebih besar terinfeksi COVID-19.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kondisi mantap jalan (%) merupakan proporsi dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka *Roughness Index* (IRI) di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat *roughometer* dengan satuan *Internasional Roughness Indeks* (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Gambar 2.55
Proporsi Panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Bina Marga dan SDA. diolah.

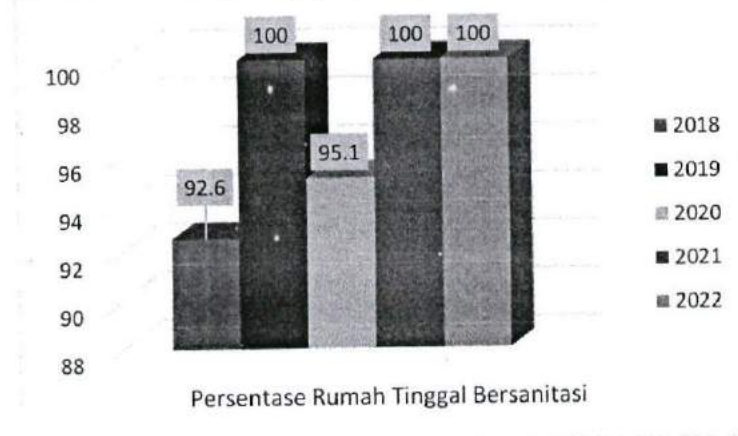
Proporsi Panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2018 sebesar 82.64% dan pada tahun 2019 menjadi 88.55% dan pada tahun 2020 menjadi 87.55% dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 90.74% dan tahun 2022 menjadi 92.59. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tangerang.

b. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah rumah yang memiliki fasilitas air bersih, buang air dan fasilitas pembuangan sampah yang baik. Rumah ini memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, sehingga membantu untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan kualitas hidup yang baik bagi penghuninya. Fasilitas air bersih harus memenuhi standar kualitas air minum dan terjamin keamanannya. Fasilitas buang air harus memiliki sistem pembuangan yang baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan. Fasilitas pembuangan sampah harus memiliki sistem yang efisien dan tidak membahayakan lingkungan. Dengan memiliki rumah tinggal bersanitasi, penghuni akan merasa lebih nyaman dan aman, serta memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk fasilitas-fasilitas yang penting bagi kesehatan dan kebersihan. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas akses terhadap rumah tinggal bersanitasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pihak terkait.

Cakupan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari capaian yang ada. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga di Kabupaten Tangerang yang bersanitasi adalah 92.6% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 100%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 95.1% dan kembali meningkat menjadi 100% pada tahun 2021.

Gambar 2.56
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2018-2022



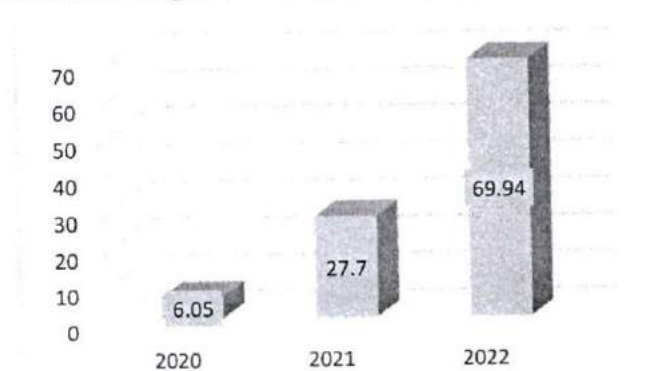
Sumber: Dinas Perkim. Diolah.

c. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Irigasi dalam kondisi baik adalah sistem irigasi yang berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas air dan teknis. Irigasi yang baik akan memastikan bahwa tanaman memiliki cukup air untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. sehingga membantu untuk meningkatkan hasil pertanian dan produktivitas lahan. Sistem irigasi yang baik harus memenuhi berbagai kriteria. seperti: Aliran air yang stabil dan cukup Sumber air yang terjamin dan memenuhi standar kualitas air Sistem pengendalian air yang efisien dan akurat Infrastruktur irigasi yang terawat dan dalam kondisi baik Ketersediaan irigasi yang baik sangat penting bagi pertanian dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas sistem irigasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah.

Capaian Persentase irigasi di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2020 adalah 6,05% dan meningkat menjadi 27,7%. Angka ini kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 69,94%. Berikut grafik penggambarannya:

Gambar 2.57
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik



Sumber: Dinas Bina Marga dan SDA. Diolah

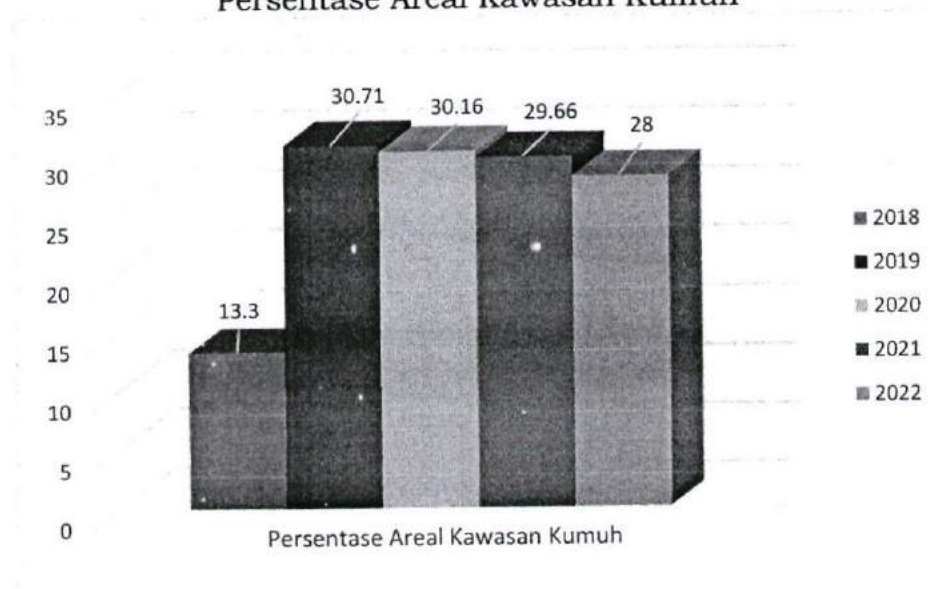
d. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Areal Kawasan Kumuh adalah daerah atau wilayah yang memiliki tingkat pembangunan rendah dan kualitas lingkungan yang buruk. Kawasan ini biasanya ditandai dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk, kekurangan fasilitas umum, sanitasi yang buruk dan lingkungan yang tidak sehat. Kawasan

kumuh sering menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat karena memiliki berbagai masalah sosial dan lingkungan. Penduduk kawasan kumuh sering memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas umum dan layanan kesehatan, serta rentan terhadap masalah kesehatan dan lingkungan.

Capaian Persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 adalah 13,3% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 30,71% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 30,16%. Angka ini kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 29,66% dan tahun 2022 menjadi 28%. Berikut gambaran grafik capaian tersebut:

Gambar 2.58
Persentase Areal Kawasan Kumuh



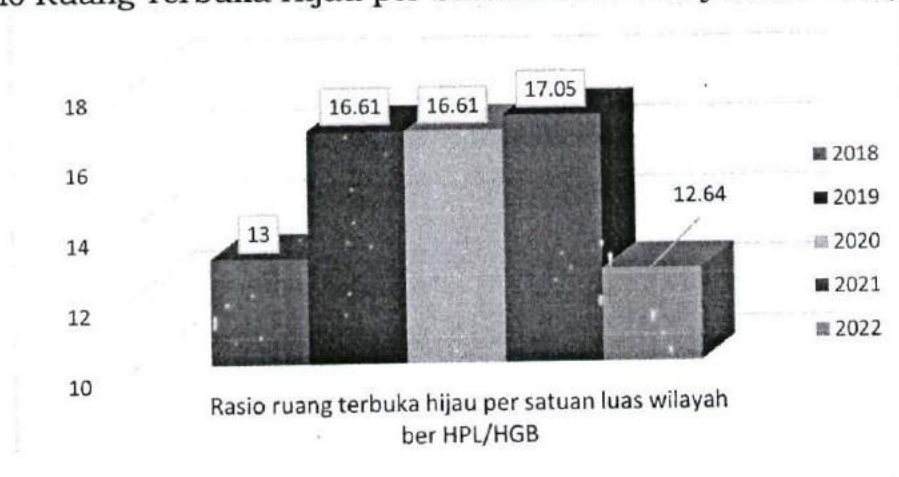
Sumber: Dinas Perkim. diolah

e. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok. yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. tempat tumbuh tanaman. baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan. yang ditetapkan dengan kriteria diantaranya adalah lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi. berbentuk satu hamparan. berbentuk jalur. atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan terakhir adalah Didominasi komunitas tumbuhan

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 16,61% kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 17,05%, namun di tahun 2022 ini turun menjadi 12,64%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.59.

Gambar 2.59
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

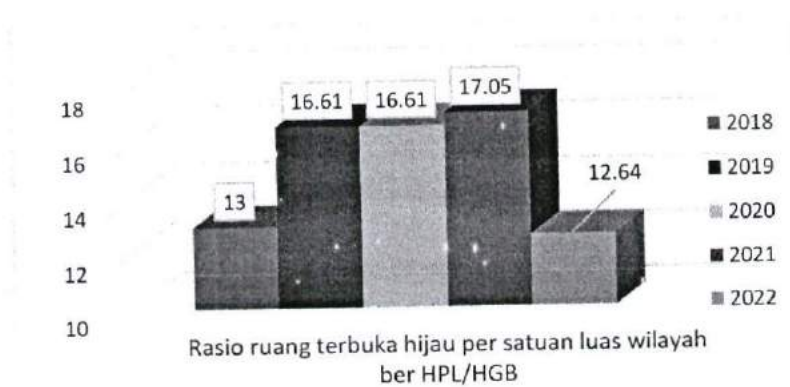


Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan. diolah.

- f. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu fungsi yang wajib ada di Rencana Tata Ruang Wilayah terutama di perkotaan. Dalam amanat UU No.26/2007 disebutkan bahwa luasan RTH minimum 30 persen, meliputi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas RTH. Pertama, konsisten dalam mengkonservasi alam di perkotaan. RTH sebagai bagian dari kawasan lindung memiliki kontribusi besar untuk mensuplai ketahanan dan keseimbangan lingkungan perkotaan. Kegiatan menanam pohon pun bisa menjadi salah satu bagian kecil mewujudkan RTH

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 16.61%. capaian ini kembali bertahan hingga tahun 2020 menjadi. kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 17.05% namun di tahun 2022 turun menjadi 12,64%. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.60
Luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan



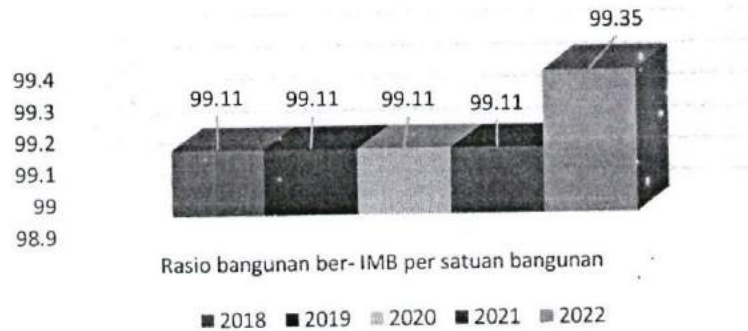
Sumber: Dinas LH. diolah

- g. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
- Bangunan Ber IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah bangunan yang memiliki izin resmi untuk dibangun dan ditempati. IMB adalah suatu bukti

bahwa bangunan tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Capaian Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Tangerang termasuk kategori tinggi dan memuaskan. hal ini dilihat dari capaian yang terlihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 angka capaian ini adalah 99,11% kemudian angka ini bertahan hingga tahun 2021, dan naik menjadi 99,35% pada tahun 2022. Berikut grafik penggambarannya:

Gambar 2.61
Rasio Bangunan Ber-IMB per satuan Bangunan



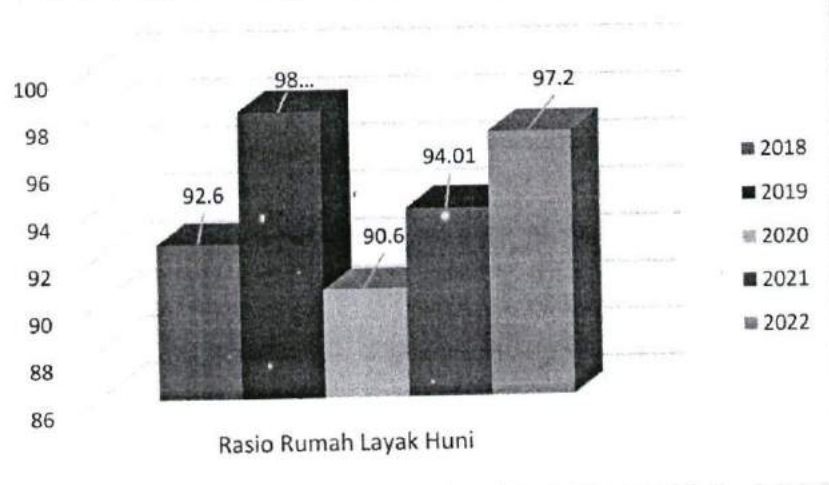
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan. diolah.

h. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah yang layak huni dengan jumlah rumah yang ada dalam suatu wilayah. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar kualitas dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. seperti: Struktur bangunan yang kuat dan stabil Ventilasi dan pencahayaan yang memadai Akses air bersih dan sanitasi yang memenuhi standar Ketersediaan fasilitas umum seperti listrik dan jalan akses Rasio rumah layak huni yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap rumah yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Peningkatan rasio rumah layak huni dapat dilakukan melalui berbagai cara. seperti pembangunan rumah baru yang layak huni. perbaikan rumah yang tidak layak huni. dan peningkatan akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih. sanitasi. dan listrik. Upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah. masyarakat. dan pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang baik terhadap rumah layak huni.

Capaian dari Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan. hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan rasio ini mencapai angka 92.6% kemudian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 98%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 90.6% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 94.1% kemudian naik lagi di tahun 2022 menjadi 97,2%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.62

Gambar 2.62
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perkim. diolah.

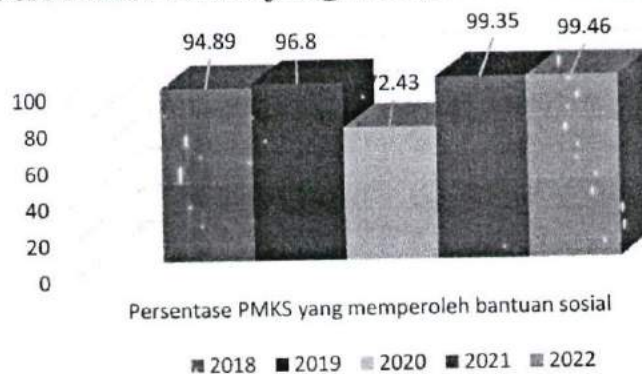
4. Sosial

a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial adalah persentase dari total jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga swasta. Bantuan sosial adalah bantuan finansial atau non-finansial yang diberikan kepada PMKS untuk membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Capaian dari Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tangerang terbilang cukup tinggi dan memuaskan. Hal ini terlihat dari capaian sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 cakupan rasio ini mencapai angka 94,89% kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 96,8%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 72,43% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 99,35% dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 99,46%. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.63

Gambar 2.63
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial



Sumber: Dinsos. diolah.

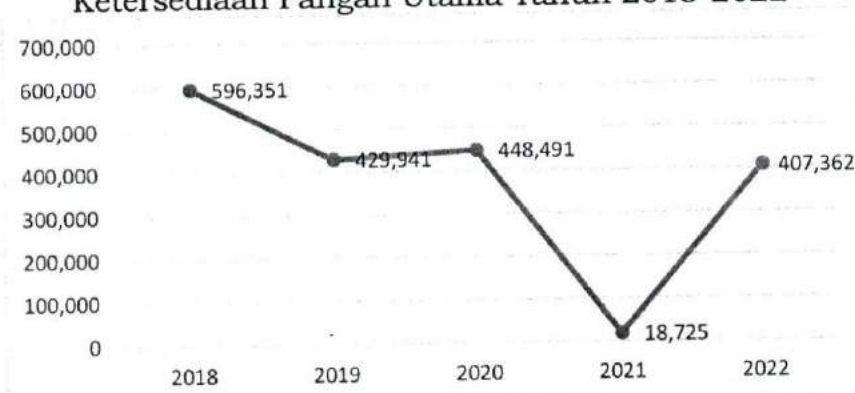
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kabupaten Tangerang telah memastikan ketersediaan pangan daerah dalam kondisi yang optimal, sehingga setiap masyarakat dapat menikmati pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupannya.

Gambar 2.64
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2018-2022



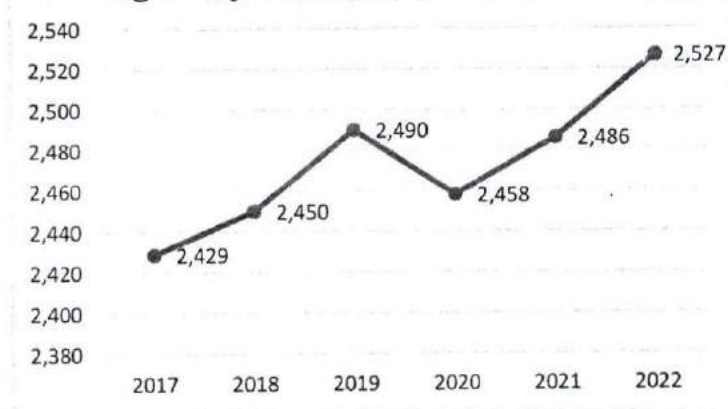
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2022

Berdasarkan grafik diatas ketersediaan pangan utama Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021 sebesar 18.725 ton dimana pada tahun 2018 kondisi pangan di Kabupaten Tangerang mencapai 596.351 ton. Hal tersebut disebabkan karena anomali musim yang berubah-ubah mengakibatkan menurunnya produktivitas pangan di Kabupaten Tangerang. harga bahan baku pakan yang tidak stabil untuk produksi unggas. skala pemeliharaan ternak rakyat masih rendah, belum optimalnya sistem pengelolaan cadangan pangan. Masih rendahnya tata kelola, pendampingan pengelolaan dan jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang aktif. Belum berkembangnya kelembagaan dan jaringan distribusi pangan. Masih rendahnya penanganan daerah dan efisiensi serta efektivitas rentan rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan. Berbagai hal diatas mengakibatkan penurunan produktivitas pangan di Kabupaten Tangerang. dimana penurunan produktivitas merupakan angka yang paling berkontribusi besar dalam menurunnya ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tangerang.

b. Ketersediaan Energi dan Protein

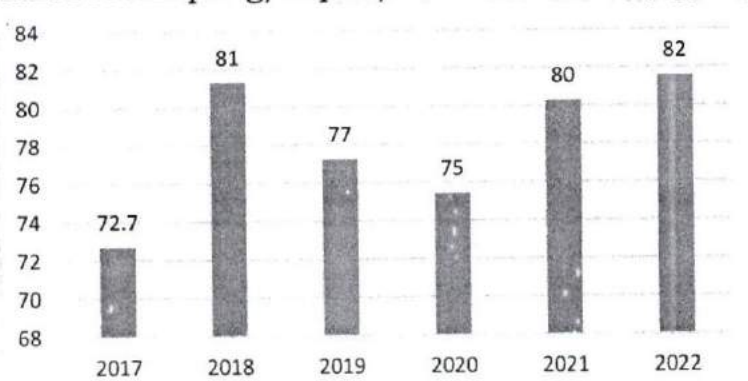
Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein menggambarkan konsumsi energi dan protein oleh masyarakat.

Gambar 2.65
Ketersediaan Energi Masyarakat Tahun 2018-2022 (kg/kapita/hari)



Sumber : DPKP. 2022

Gambar 2.66
Ketersediaan Protein per g/kapita/hari 2018-2022 (kg/kapita/hari)



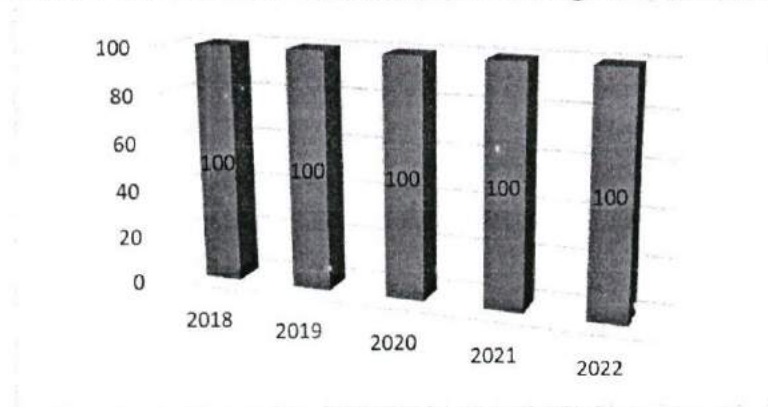
Sumber : DPKP. 2022

Berdasarkan grafik diatas konsumsi energi dan protein mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan terjadi tidak lain karena akses masyarakat terhadap pangan dapat dipastikan mudah atau terjangkau. Kemudahan akses merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan konsumsi di suatu daerah. Selain akses, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh produksi pertaniannya. utamanya tanaman pangan dan ternak.

c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ditujukan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia. Pengawasan keamanan pangan dilakukan secara insidental, apabila ada informasi kasus keamanan pangan yang perlu ditindak lanjuti. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi ke tempat kejadian, penelusuran terhadap asal produk, pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan.

Gambar 2.67
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2018-2022



Sumber : DPKP. 2022

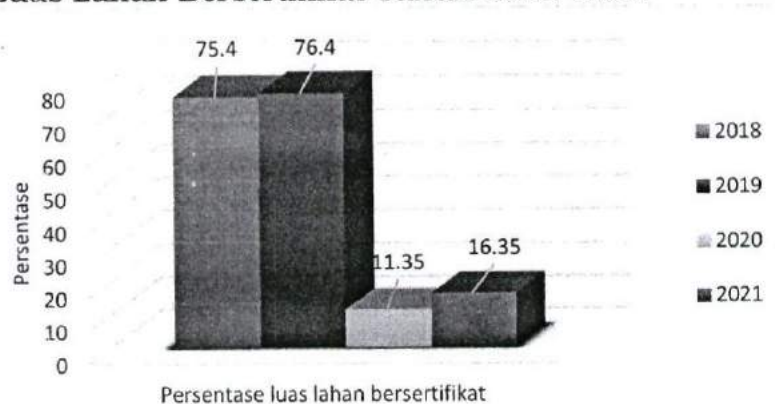
Berdasarkan grafik diatas. kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan mencapai 100% dalam setiap tahunnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengawasan dan pembinaan keamanan pangan telah dilakukan secara optimal untuk menjaga kualitas dari bahan pangan yang telah dihasilkan. serta mencegah tercemarnya bahan pangan dari campuran kimia yang mengganggu. berbahaya dan merugikan. Sehingga tercapainya sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

2. Pertanahan

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Luas lahan bersertifikat adalah luas lahan yang sudah disahkan dengan ditandai surat bukti yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat yang dimaksud adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengukuran luas lahan bersertifikat ditujukan untuk melihat luas lahan yang sudah di legalisasi secara hukum oleh BPN.

Gambar 2.68
Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2018-2021



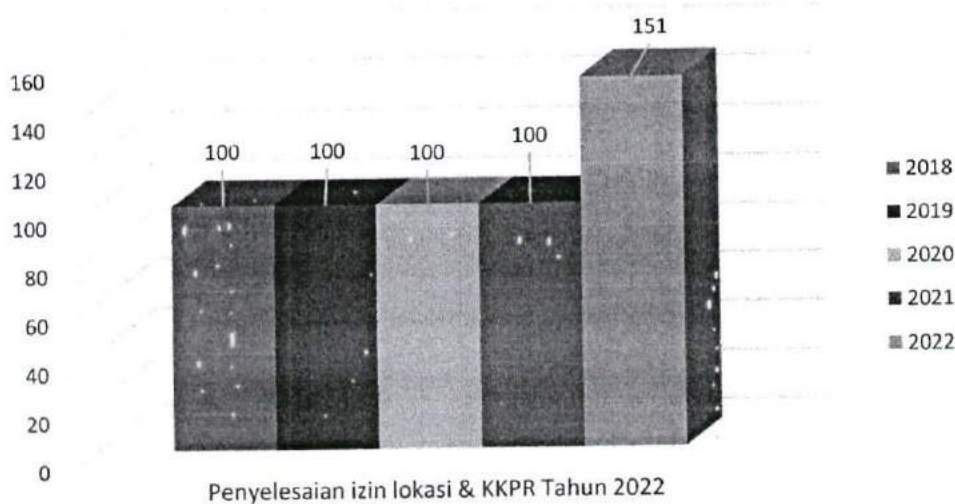
Berdasarkan grafik diatas, persentase luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 11,35%. Capaian dua tahun sebelumnya yaitu 2018 dan 2019 mencapai 75%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 merupakan masa puncak pandemic covid-19, sehingga untuk mendapatkan data pada tahun tersebut sangatlah terbatas. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 11,35% dari keseluruhan sampling luas lahan yang sudah disahkan dengan ditandai surat bukti yang sudah diterbitkan oleh Badan

Pertanahan Nasional. Hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Tangerang.

b. Penyelesaian Izin Lokasi

Izin lokasi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Pemberian izin lokasi mempertimbangkan agar terciptanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi, harmonis dan berkelanjutan. Dalam hal ini fungsi pemberian izin lokasi bermaksud untuk mengarahkan dan mengendalikan badan usaha dalam memperoleh tanah, mengingat pemberian izin lokasi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Penyelesaian izin lokasi adalah berapa banyak izin lokasi yang diajukan yang kemudian diterbitkan izinnnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gambar 2.69
Penyelesaian Izin Lokasi & KKPR Tahun 2018-2022



Sumber : DPMPTSP 2023

Berdasarkan grafik diatas, tingkat penyelesaian izin lokasi mencapai 100% setiap tahun nya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh izin lokasi yang diajukan telah diberikan izin atas lokasi yang dikehendaki. Dalam artian lain Kabupaten Tangerang telah mengalokasikan izin lokasi diberikan untuk kepentingan masyarakat banyak. dibuktikan dengan izin lokasi yang telah diselesaikan yang diberikan atas dasar kebermanfaatn bagi orang banyak yang diharapkan mampu meningkatkan derajat hidup dan masyarakat yang ada disekitarnya.

Untuk tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya maka Izin Lokasi berubah menjadi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) tahun 2022 sebanyak 151.

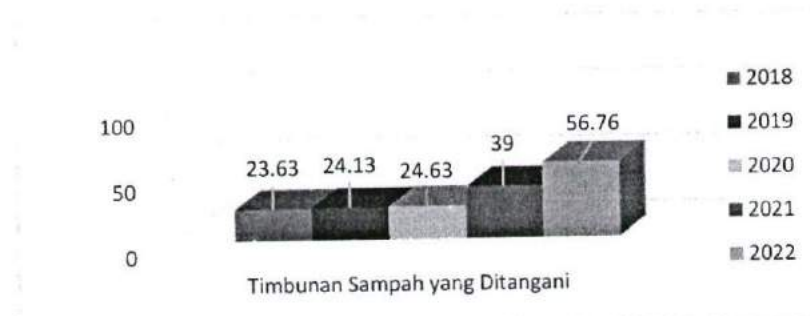
3. Lingkungan Hidup

a. Timbulan Sampah yang Ditangani

Timbulan sampah merupakan tempat penumpukan sampah yang ditangani oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Timbunan sampah ini dapat terdiri dari beberapa tipe seperti timbunan sampah terbuka atau tertutup. Pengelolaan timbunan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa sampah tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya optimal untuk

menangani masalah sampah agar dapat tertangani dengan baik dan berdampak baik bagi lingkungan secara berkelanjutan.

Gambar 2.70
Timbunan Sampah yang Ditangani Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2022

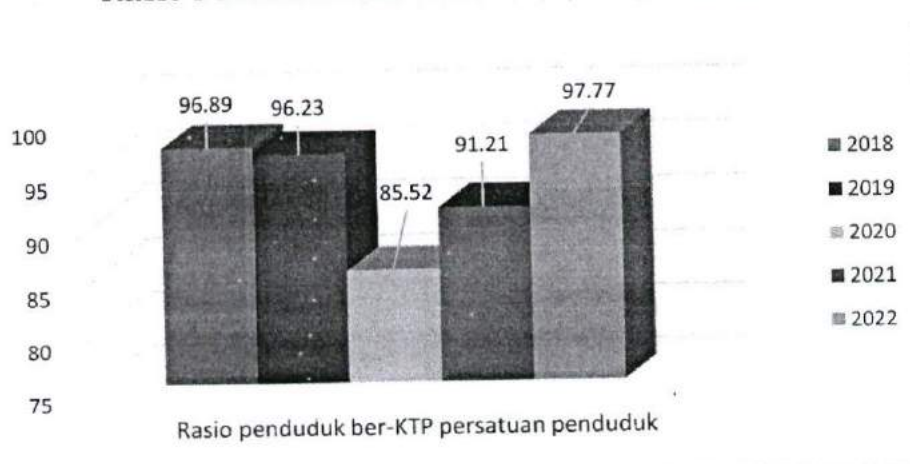
Grafik diatas menunjukkan capaian timbunan sampah yang ditangani. Berdasarkan data tersebut pada tahun 2022 persentase timbunan sampah yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang mencapai 56,76%. terdapat peningkatan sekitar 17% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya keseriusan pemerintah dalam menangani timbunan sampah. Sehingga lingkungan dapat dikondisikan tetap asri dan nyaman dihuni oleh masyarakatserta perlunya dukungan dari masyarakat untuk terus meningkatkan kesadarannya akan pengelolaan sampah dan akan didukung oleh pemerintah melalui pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai.

4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) terhadap jumlah penduduk total dalam suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penetrasi KTP di suatu wilayah. Tingkat penetrasi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah sukses dalam memfasilitasi penerbitan KTP dan memastikan bahwa masyarakat memilikinya.

Gambar 2.71
Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2023

Grafik diatas menunjukkan tingkat penetrasi KTP di suatu wilayah yang diambil dari rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk. Dapat dilihat dari

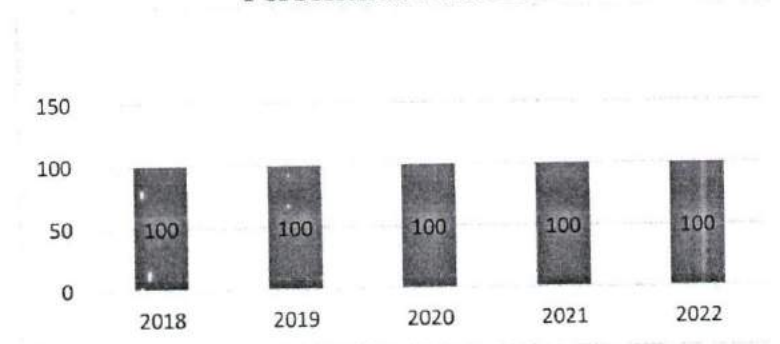
grafik diatas, capaian Kabupaten Tangerang dalam memfasilitasi penerbitan KTP dan memastikan bahwa masyarakat dapat memiliki KTP sangat tinggi, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar kemungkinan dipengaruhi oleh pandemic covid-19. Namun pada tahun 2022 angka penetrasi kembali membaik diangka 97,77% yang mengindikasikan lebih banyak pendudukan yang dapat difasilitasi untuk membuat KTP. Dalam hal ini. Kabupaten Tangerang akan mengoptimalkan inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil agar menjamin setiap warganya agar bisa mendapatkan dan memiliki akses membuat KTP dengan mudah dan terjangkau.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Persentase PKK aktif mengukur efektivitas program PKK. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa program PKK efektif dan masyarakat memanfaatkan PKK sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar turut serta dalam pembangunan. sedangkan angka yang rendah menunjukkan bahwa ada hambatan dalam program atau kendala yang menghalangi masyarakat dari memanfaatkan layanannya.

Gambar 2.72
Persentase PKK Aktif



Sumber : DPMPD. 2022

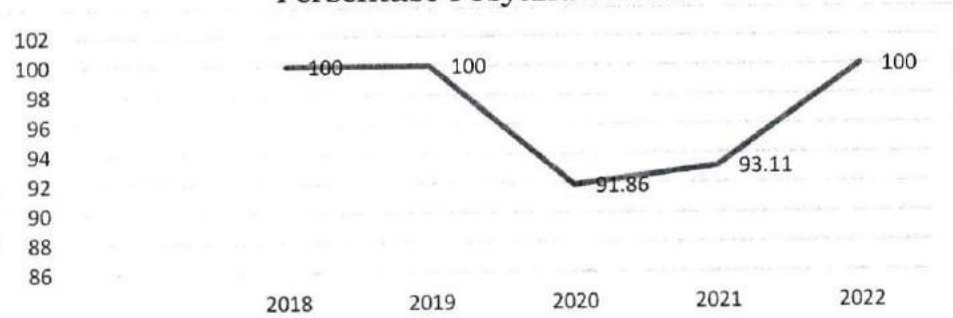
Dari grafik diatas menunjukkan capaian PKK aktif yang ada di Kabupaten Tangerang adalah 100% dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh organisasi PKK yang ada seluruhnya aktif dan melaksanakan program dan kegiatan yang ada dan turut serta dalam program pembangunan. Melihat angka tersebut partisipasi masyarakat terhadap program PKK juga sangat tinggi dan bisa dikatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan berkontribusi dalam pembangunan melalui program PKK yang kemudian mendekatkan pada tercapainya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

b. Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pusat pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat terkhusus bagi ibu, anak dan lansia. Persentase posyandu aktif mengukur efektivitas program posyandu dalam melayani masyarakat. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa posyandu efektif dan masyarakat memanfaatkan layanan didalamnya, sedangkan angka yang rendah menunjukkan bahwa ada hambatan dalam program atau kendala

lain yang dihadapi dalam pelaksanaan posyandu dalam memberikan layanan Kesehatan bagi masyarakat.

Gambar 2.73
Persentase Posyandu Aktif



Sumber : DPMPD. 2022

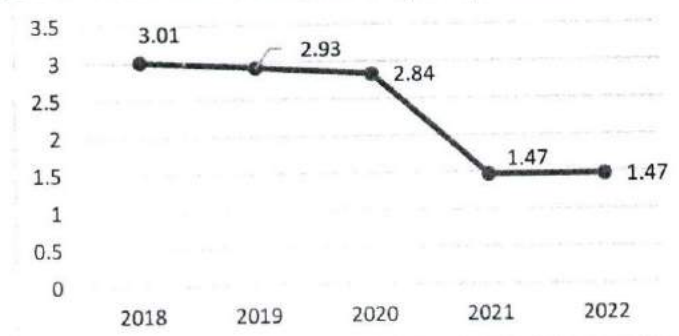
Grafik diatas menunjukkan tingkat persentase Posyandu yang aktif dibandingkan dengan seluruh Posyandu yang ada. Berdasarkan data diatas. persentase posyandu yang aktif berada pada angka yang tinggi. Pada tahun 2018 dan 2019 mencapai angka 100%. sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan di angka 91,86% dan 93,11%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan posyandu atau ada beberapa posyandu yang kemudian tidak aktif yang diakibatkan juga oleh adanya pandemic covid-19. Dilain sisi pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam hal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program posyandu yang dikhususkan bagi ibu. anak dan lansia. Capaian tersebut juga memastikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang dapat menikmati dan mendapatkan akses fasilitas kesehatan.

6. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini diukur sebagai persentase perubahan jumlah penduduk dari periode sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah dan memahami dinamika populasi. Laju pertumbuhan penduduk bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi. Jika tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian, maka laju pertumbuhan penduduk akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat kematian lebih tinggi daripada tingkat kelahiran, maka laju pertumbuhan penduduk akan menurun.

Gambar 2.74
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2018-2022



Sumber : DPPKB, 2022

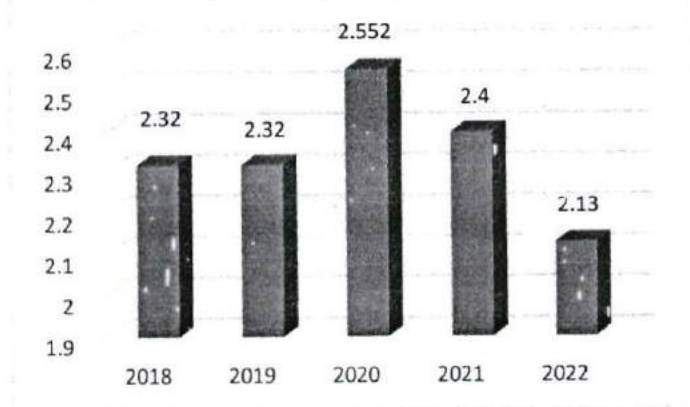
Grafik diatas menunjukkan tingkat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, pertumbuhan laju penduduk selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mencapai angka 3,01%, kemudian menurun pada tahun 2021 hingga mencapai angka 1,47% demikian pula tahun 2022. Menurunnya LPP ini karena terdapat perbedaan perhitungan jumlah penduduk yang sebelum tahun 2020 menggunakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, sedangkan jumlah penduduk tahun 2020 sampai dengan 2022 menggunakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 dimana dalam perhitungan jumlah penduduk telah memperhatikan penduduk ber-NIK. Pertumbuhan penduduk yang relatif stabil menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak menjadi isu yang serius karena masih dapat dikondisikan dan dapat ditangani dengan kebijakan yang ada.

b. Total Fertility Rate (TFR)

Total fertility rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya (umumnya didefinisikan sebagai usia antara 15-49 tahun) jika tingkat kelahiran dan kematian tetap stabil. Total fertility rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya (umumnya didefinisikan sebagai usia antara 15-49 tahun) jika tingkat kelahiran dan kematian tetap stabil. Ini adalah ukuran kunci dari tingkat reproduksi suatu populasi.

TFR digunakan untuk mengukur tingkat kelahiran dalam suatu populasi dan membantu memahami dinamika populasi dan proyeksi pertumbuhan penduduk. Nilai TFR yang tinggi menunjukkan tingkat reproduksi yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cepat, sementara nilai TFR yang rendah menunjukkan tingkat reproduksi yang rendah dan pertumbuhan penduduk yang lambat.

Gambar 2.75
Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2018-2022



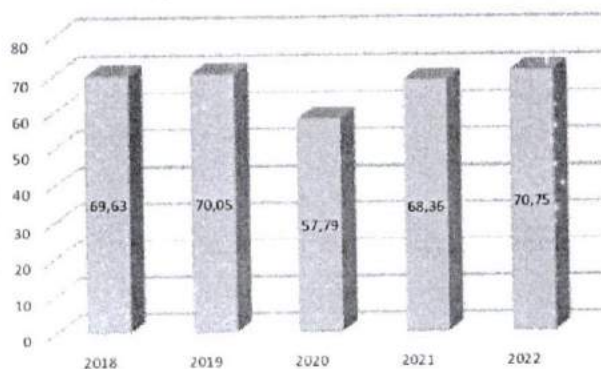
Sumber : DPPKB, 2022

Grafik diatas menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa produktifnya. Berdasarkan data diatas, angka pertumbuhan penduduk berada pada kondisi yang stabil, tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 angka TFR mencapai 2,552%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh tingginya usia perkawinan masyarakat Kabupaten Tangerang yang berada dalam masa produktifnya, sehingga dapat mempengaruhi jumlah rata-rata kelahiran.

c. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49

Angka pemakaian kontrasepsi adalah persentase perempuan menikah yang menggunakan metode kontrasepsi untuk membatasi atau memperlambat kehamilan. Angka ini berguna untuk mengukur tingkat kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana. Di Indonesia, angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah pada tahun 2020 sekitar 56%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan menikah di Indonesia sudah memiliki akses dan memahami pentingnya layanan keluarga berencana. Namun, masih ada beberapa faktor seperti keterbatasan akses, stigma, dan kendala ekonomi yang mempengaruhi pemakaian kontrasepsi bagi sebagian kecil dari masyarakat.

Gambar 2.76
Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun



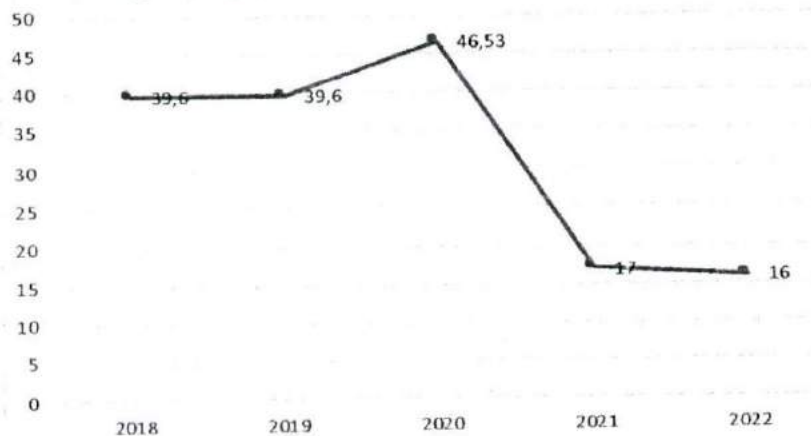
Sumber : DPPKB, 2022

Grafik diatas menunjukkan tingkat angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49. Berdasarkan data diatas, angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2020 mencapai 57,59% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai angka 70,75%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan menikah di Kabupaten Tangerang makin menaruh perhatian terhadap pemakaian kontrasepsi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perempuan menikah telah memiliki akses dan kesadaran akan pentingnya keluarga berencana.

d. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Angka kelahiran remaja adalah jumlah bayi yang dilahirkan oleh wanita berusia 15-19 tahun. Angka ini menjadi salah satu indikator penting kesehatan reproduksi dan memberikan informasi tentang tingkat pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Di Indonesia, angka kelahiran remaja masih cukup tinggi. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2020 sekitar 27% dari total kelahiran adalah pada remaja. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja.

Gambar 2.77
Angka Kelahiran Remaja Tahun 2018-2022



Sumber : DPPKB, 2022

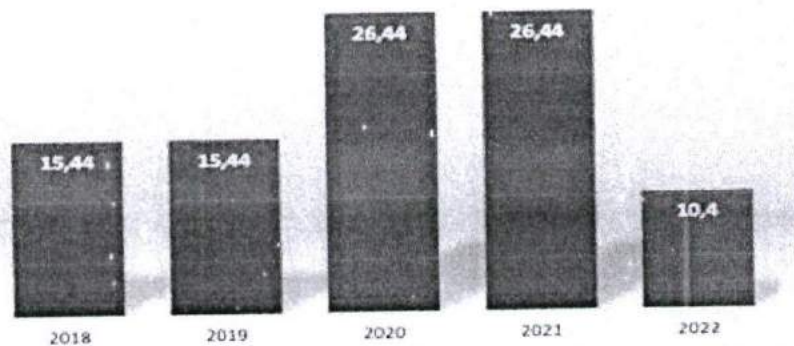
Grafik diatas menunjukkan angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Berdasarkan data diatas, persentase kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun masih tergolong tinggi pada tahun 2020 yang mencapai 46,53 persen, akan tetapi mengalami penurunan menjadi 16 persen pada tahun 2022. Dalam pelaksanaan masih ada kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja. Kurangnya optimalnya promosi akan keluarga berencana yang mampu diterima dan dipahami oleh perempuan remaja juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan tingginya angka kelahiran remaja.

e. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah persentase pasangan usia subur (wanita dan pria berusia 15-49 tahun) yang ingin membatasi atau memutuskan kehamilan, tetapi belum memiliki akses

atau belum menggunakan layanan keluarga berencana. Unmet need merupakan indikator penting untuk mengukur keterbatasan akses layanan keluarga berencana dan memahami kebutuhan dan permintaan masyarakat. Di Indonesia, unmet need pada tahun 2020 sekitar 10%. Ini berarti masih ada sekitar 10% dari pasangan usia subur yang ingin membatasi kehamilan, tetapi belum memiliki akses atau belum menggunakan layanan keluarga berencana. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses layanan, stigma, dan kendala ekonomi.

Gambar 2.78
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)



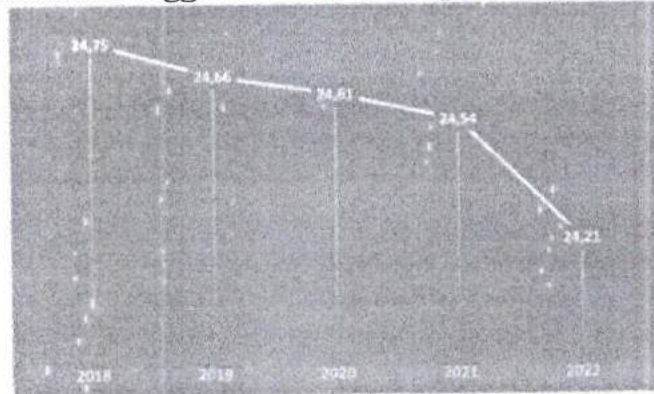
Sumber : DPPKB, 2022

Grafik di atas menunjukkan angka cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*). Berdasarkan data di atas, persentase PUS yang ingin ber-KB pada tahun 2020 dan 2022 mencapai 10,4%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 10,4% PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi karena keterbatasan akses layanan Kesehatan reproduksi. Angka tersebut menjadikan indikator bahwa program keluarga berencana belum sepenuhnya menyentuh seluruh lini masyarakat, diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan pasangan usia subur yang ingin membatasi kehamilan di Kabupaten Tangerang.

f. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah pemakaian alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik, implan, dan IUD (Intra Uterine Device). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan memerlukan pemasangan yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari. Di Indonesia, pemakaian MKJP masih terbilang rendah, sekitar 20% dari seluruh pengguna kontrasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

Gambar 2.79
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang



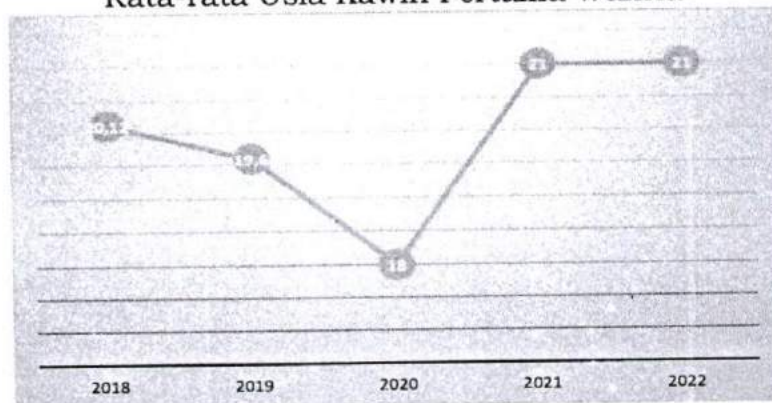
Sumber : DPPKB, 2022

Grafik diatas menunjukkan persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Tangerang berada pada angka yang stabil yaitu sepanjang 2018 hingga 2021 berkutat pada angka 24%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Tantangan yang muncul dari hal ini adalah upaya pemerintah dalam mempromosikan kontrasepsi jangka panjang melalui program keluarga berencana. Sehingga dapat meningkatkan persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Tangerang.

g. Rata-rata usia kawin pertama Wanita

Berdasarkan data World Bank pada tahun 2020, rata-rata usia kawin pertama wanita di Indonesia adalah 22.7 tahun. Namun, perlu dicatat bahwa data ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi di suatu negara atau wilayah.

Gambar 2.80
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita



Sumber : DPPKB, 2022

Grafik diatas menunjukkan rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 rata-rata usia kawin pertama wanita berada pada usia 21 tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya, semakin banyak wanita yang mengejar Pendidikan tinggi, yang mungkin semakin tinggi keinginan mereka untuk menunda pernikahan. Banyak wanita yang ingin membangun karir mereka sebelum menikah dan perubahan nilai social yang membuat mereka mengambil

keputusan untuk tidak menikah hingga usia yang matang. Factor lain adalah ketidakpastian kondisi ekonomi sehingga mereka lebih aman memilih menunda atau tidak menikah ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

7. Perhubungan

Data kendaraan umum yang melakukan uji KIR di Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perhubungan pada tahun 2022 mencapai 58.304 unit kendaraan umum dengan jenis kendaraan meliputi mobil penumpang sebanyak 1.752 unit, mobil barang sebanyak 56.103 unit, kondisi uji KIR di Kabupaten Tangerang meningkat dari tahun 2020-2022, kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat keselamatan berkendara bagi kendaraan umum menjadi prioritas utama dalam keselamatan transportasi.

Tabel 2.26
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Kendaraan	2018	2019	2020	2021	2022
Mobil Barang :	51,505	27,562	48,956	54,154	56,103
-Truck	6,732	25,661	22,302	23,464	23,960
-Pick Up	27,112	1,129	19,065	23,485	25,020
-Light Truck	17,661	772	7,426	7,018	7,107
-TR. HEAD			163	187	16
Mobil Penumpang:	3,346	206	1,916	1,612	1,752
-Angkutan Kota			1,113	913	102
-Bis	266	86	536	103	216
-Micro	554	87	209	562	788
-Mini	2,379	32			
-Taxi	147	1	58	34	646
Tempelean	202	12	261	371	431
Kendaraan Khusus			6	11	18
Total	55,053	27,780	51,139	56,148	58,304

Sumber : Dinas Perhubungan, Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Rasio Rasio Panjang jalan per Jumlah kendaraan di Kabupaten Tangerang menghitung pelayanan panjang jalan dengan Jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Tangerang. Panjang Jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2.27
Jumlah Kendaraan dan Panjang Jalan di Kabupaten Tangerang

Kendaraan	2018	2019	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	168,626	192,302	189,087	189,647	189,087
Bus	245	400	310	1,648	310
Truk	50,043	55,246	53,669	52,844	53,669
Sepeda Motor	1,216,558	1,339,870	1,253,300	1,203,050	1,253,300

Kendaraan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	1,435,472	1,587,818	1,496,366	1,447,189	1,496,366
Panjang Jalan	1,128.29	1,128.29	1,128.61	1,128.64	1,128.64
Rasio (unit/Km)	1,272.25	1,407.28	1,325.85	1,282.24	1,325.81

Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Tangerang per 1 km Panjang jalan melayani sekitar 1.325 unit kendaraan bermotor, tahun 2022 per 1 Km Panjang jalan melayani sekitar 1.282 unit kendaraan. Kepemilikan KIR di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mencapai 23,99 persen dari 243.066 unit kendaraan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.28
Kepemilikan KIR di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kendaraan	218,914	247,948	243,066	244,139	243,066
2	Uji KIR	55,053	27,780	51,139	56,148	58,304
3	Persentase Kepemilikan KIR	25.15	11.20	21.04	23.00	23.99

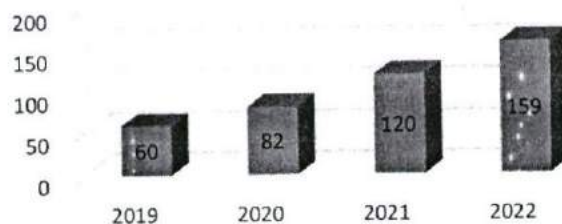
Sumber : Dinas Perhubungan

8. Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah

a. Koperasi

Peran koperasi dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya melalui partisipasi aktif dalam ekonomi. Koperasi dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2.81
Jumlah Koperasi Aktif 2018-2022



Sumber : DKUM. 2022

Jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Tangerang. setiap tahun mengalami peningkatan Hal ini memperlihatkan bahwa peran Pemerintah Daerah bukan hanya meningkatkan jumlah koperasi akan tetapi juga koperasi yang senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan kapasitasnya. Dibawah ini disajikan data koperasi yang meningkat kualitasnya

Tabel 2.29
Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya

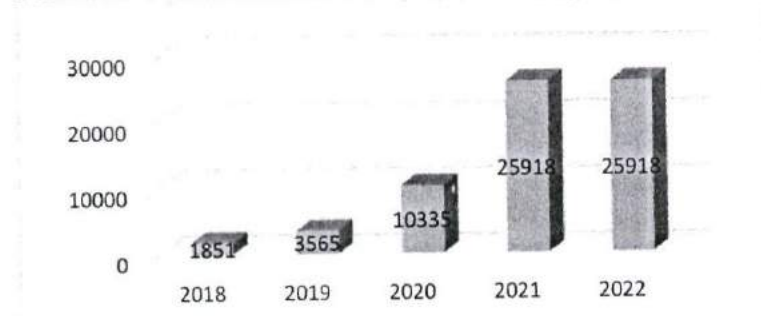
Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	Koperasi	60	82	120	159

Sumber : Dinas Koperasi dan UM, 2022

b. Usaha Mikro Kecil

Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah bentuk usaha skala kecil yang dimiliki oleh individu atau kelompok kecil yang memiliki aset atau modal terbatas, UMK dapat bergerak di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, jasa atau manufaktur. UMK memiliki peran penting dalam perekonomian, karena dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, UMK juga dapat mempromosikan kemandirian dan kewirausahaan dalam masyarakat.

Gambar 2.82
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2018-2022



Sumber : DKUM, 2022

Dari grafik tersebut menggambarkan bagaimana geliat perekonomian di Kabupaten Tangerang sangatlah dinamis. Banyaknya UMK yang ada adalah representasi dari sehatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.30
Jumlah Produk UM yang Dipasarkan

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah produk usaha mikro yang dipasarkan	Produk	231	250	300	336

Sumber : DKUM. 2022

Tabel 2.31
Fasilitasi UPDB pada Koperasi dan UM

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Dana bergulir yang telah disalurkan	RP.	10.380.000.000	39.840.000.000	29.790.000.000	25.940.000.000	18.780.000.000
Dana bergulir yang ada	RP.	39.093.740.348	26.969.527.671	14.008.834.135	19.954.901.883	35.395.123.101
Jumlah umkm yang mendapatkan pembiayaan UPDB	Usaha Mikro	5303	5067	4655	3275	1698
Jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan UPDB	Koperasi	13	17	11	14	13

Sumber : DKUM. 2022

9. Penanaman Modal

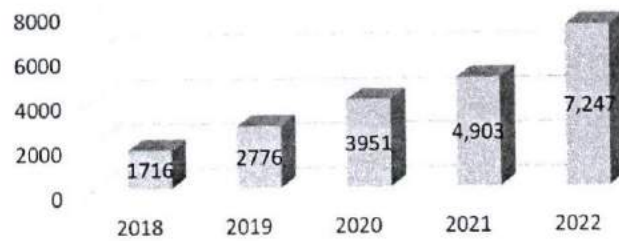
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor berskala nasional adalah investor yang beroperasi dalam skala yang cukup besar di tingkat nasional, yaitu investor yang melakukan investasi di berbagai wilayah atau sektor ekonomi dalam suatu negara. Investor berskala nasional biasanya mencakup institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi dan dana pensiun, serta perusahaan investasi swasta. Investor berskala nasional memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. karena mereka dapat memberikan sumber daya keuangan yang

signifikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan proyek-proyek infrastruktur.

Gambar 2.83 menunjukkan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas. terjadi peningkatan jumlah investor pada tahun 2022 mencapai angka 7.247 investor. Angka tersebut menunjukkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan lingkungan investasi yang aman dan kondusif, sehingga para investor mau untuk berinvestasi di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.83
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

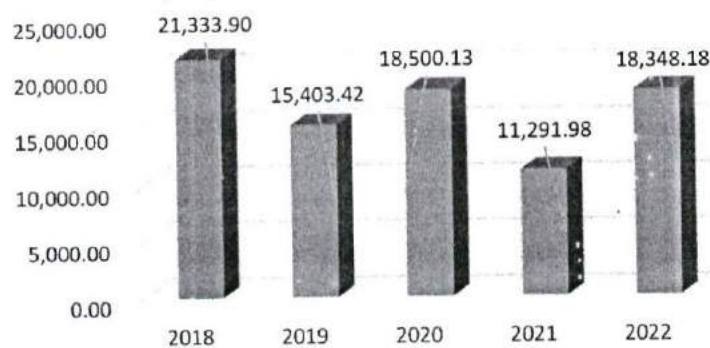


Sumber : DPMPSTP. 2022

a. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Investasi berskala nasional adalah investasi yang dilakukan dalam skala besar di tingkat nasional, yang melibatkan dana yang cukup besar dan memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi suatu negara. Investasi berskala nasional dapat dilakukan oleh berbagai jenis investor, termasuk perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Investasi berskala nasional memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, investasi semacam itu juga memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta. serta regulasi dan pengawasan yang memadai untuk memastikan investasi tersebut dilakukan dengan transparan, adil dan bertanggung jawab. Berdasarkan gambar 284 menunjukkan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas jumlah nilai investasi mencapai angka yang cukup tinggi pada tahun 2022 mencapai angka 18.348.18 Milyar Rupiah.

Gambar 2.84
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)



Sumber : DPMPSTP. 2022

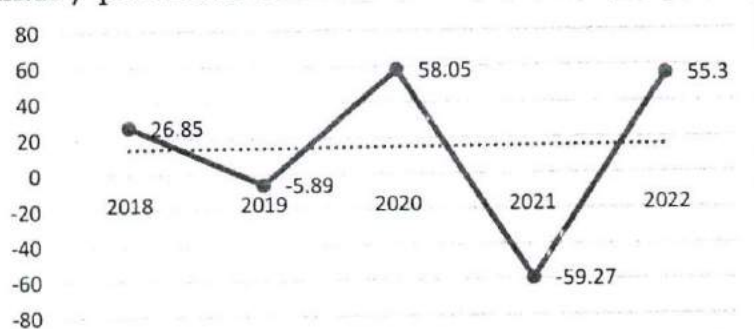
Angka tersebut menunjukkan pada tahun 2022 banyak investor yang mulai berinvestasi di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut tidak lepas

dari kondisi iklim investasi yang baik dan kondusif di Kabupaten Tangerang itu sendiri.

b. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengacu pada total nilai investasi yang diinvestasikan oleh perusahaan domestik di dalam negeri dalam bentuk modal dan aset. Jika terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN, artinya terdapat peningkatan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan domestik yang dapat diindikasikan sebagai peningkatan minat investasi dalam negeri. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai realisasi PMDN, artinya terdapat penurunan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan domestik. Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

Gambar 2.85
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)



Sumber : DPMPTSP. 2022

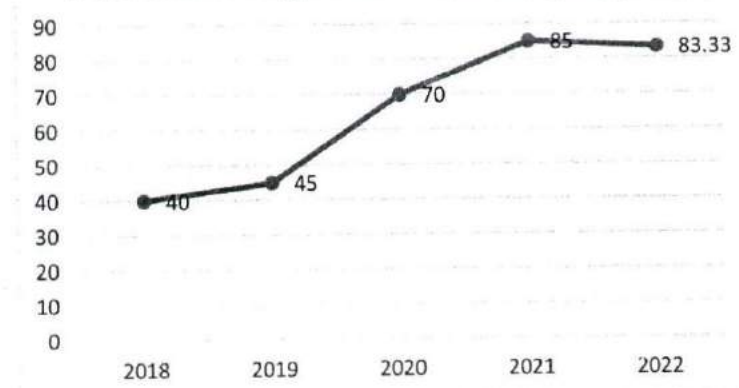
Grafik diatas menunjukkan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah). Terlihat bahwa nilai realisasi PMDN sempat mengalami penurunan hingga minus. Pada tahun 2020 nilai realisasi mencapai 58.05 milyar rupiah dan tahun 2022 telah kembali mencapai 55.3 milyar rupiah. Angka tersebut menunjukkan adanya minat investasi yang cukup baik di Kabupaten Tangerang. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi agar realisasi investasi daerah dapat meningkat.

10. Kepemudaan dan Olahraga

a. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator organisasi pemuda yang aktif penting untuk mengevaluasi kinerja dan dampak dari organisasi pemuda tersebut dalam mencapai tujuannya. Indikator-indikator tersebut dapat memberikan gambaran tentang seberapa aktif organisasi pemuda tersebut dalam melakukan kegiatan, seberapa besar dampak yang telah dicapai, serta seberapa besar kontribusinya terhadap pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator organisasi pemuda yang aktif juga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kekurangan atau potensi perbaikan dalam kinerja organisasi pemuda tersebut dan membantu mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja dan dampaknya.

Gambar 2.86
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif



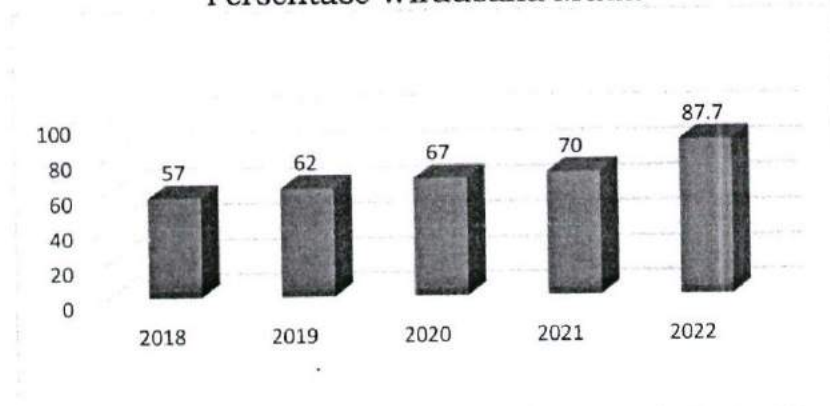
Sumber : Disporabudpar. 2022

Grafik diatas menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas angka persentase selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mencapai angka 85% organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Tangerang. Angka tersebut menunjukkan keaktifan pemuda di Kabupaten Tangerang yang juga turut serta berkontribusi dalam pembangunan kepemudaan melalui tujuan masing-masing organisasi pemuda yang ada. Pada tahun 2022 persentase organisasi pemuda yang aktif sedikit menurun menjadi 83,33 persen. hal ini disebabkan pertumbuhan organisasi pemuda baru senantiasa bertambah sehingga dibutuhkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

a. Persentase wirausaha muda

Wirausaha muda adalah satu bentuk representasi kesehatan ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini Kabupaten Tangerang menganalisis melalui pertumbuhan wirausaha muda yang turut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti, menilai kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah dengan melihat seberapa besar kontribusi dari sektor usaha kecil dan menengah yang banyak dijalankan oleh wirausaha muda dan Melihat tingkat partisipasi generasi muda dalam perekonomian dan membantu memotivasi lebih banyak orang muda untuk menjadi wirausaha.

Gambar 2.87
Persentase Wirausaha Muda



Sumber : Disporabudpar. 2022

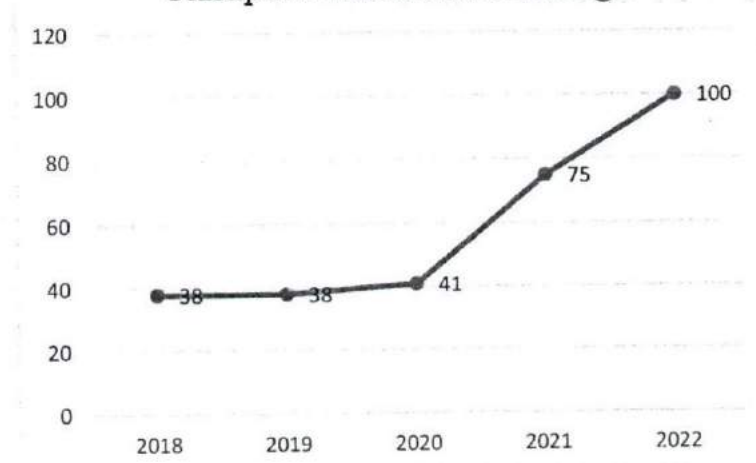
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan persentase wirausaha muda yang ada di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas angka persentase wirausaha muda selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka

persentase wirausaha muda mencapai 87.7%. Angka tersebut menunjukkan Kesehatan ekonomi Kabupaten Tangerang masih dalam kondisi sehat, dilihat dari banyaknya wirausaha muda yang mulai menjalankan usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh pemuda di Kabupaten Tangerang.

b. Cakupan pembinaan olahraga

Cakupan pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda, serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan olahraga ini penting untuk mengembangkan atlet muda yang berprestasi dan menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat nasional. Cakupan pembinaan olahraga mencakup beberapa aspek seperti pelatihan atlet muda, pengembangan program pelatihan fisik, hingga pemberian fasilitas olahraga yang memadai dan dukungan finansial.

Gambar 2.88
Cakupan Pembinaan Olahraga



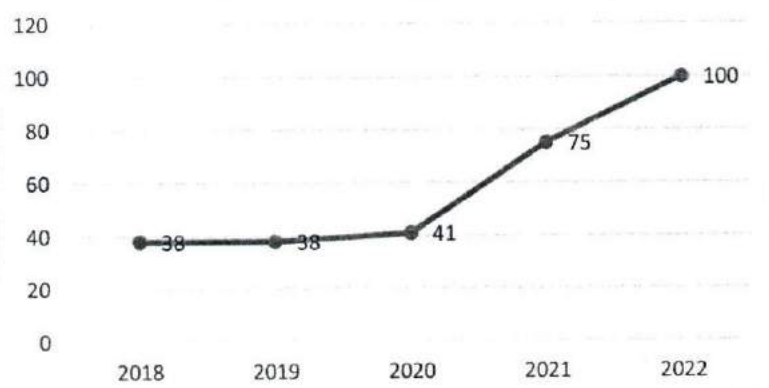
Sumber : Disporabudpar

Grafik diatas menunjukkan cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan drastis pada tahun 2022 yang mencapai angka 100%. Angka tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti mulai dilaksanakannya berbagai pelatihan pembentukan atlet, penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan berbagai kompetisi lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius menangani permasalahan pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang agar terciptanya masyarakat yang bugar dan sehat jasmaninya.

c. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda meliputi berbagai hal yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan atlet muda ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat daerah serta mencetak atlet muda yang berprestasi.

Gambar 2.89
Cakupan Pembinaan Atlet Muda



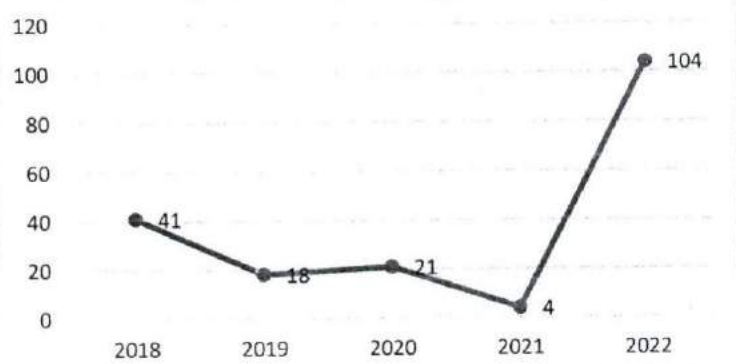
Sumber : Disporabudpar

Grafik diatas menunjukkan angka cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas cakupan pembinaan atlet muda mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 angka cakupan pembinaan atlet muda mencapai 100%. angka tersebut menunjukkan bahwa pembinaan atlet muda mulai diperhatikan oleh pemerintah. Pembinaan atlet muda yang bermuara pada terciptanya atlet berbakat daerah yang berprestasi.

d. Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet berprestasi diciptakan dari iklim keolahragaan yang baik serta dukungan dari berbagai pihak. Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam hal pembentukan atlet berprestasi salah satunya melalui berbagai program kepemudaan dan olah raga yang diampu oleh Dinas pemuda dan olahraga. Atlet berprestasi menunjukkan keberhasilan program pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.90
Jumlah Atlet Berprestasi



Sumber : Disporabudpar. 2022

Grafik diatas menunjukkan jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Tangerang. Jumlah atlet yang berprestasi menurut grafik diatas mengalami penurunan pada tahun 2021 capaian jumlah atlet berprestasi menurun drastis hanya pada angka 4 orang saja. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan pembinaan olahraga yang mulai dirintis kembali setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang lalu. Pada tahun 2022 telah banyak prestasi yang diraih seiring dengan mulai normalnya berbagai kompetisi olahraga yaitu 104 atlet berprestasi. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pembinaan olahraga sehingga tercipta atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama harum daerah di kancah nasional hingga internasional.

11. Perpustakaan

a. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Kunjungan ke perpustakaan bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan, namun tidak satu-satunya indikator untuk menilai kualitas perpustakaan. Beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perpustakaan antara lain koleksi buku dan materi lainnya, ketersediaan dan kemudahan akses ke sumber daya digital, kualitas layanan dan program yang ditawarkan, kecukupan dan keterampilan staf, ketersediaan dan kualitas fasilitas dan lingkungan perpustakaan, serta sejauh mana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan penggunaannya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang holistik untuk menilai kualitas perpustakaan yang mencakup beberapa aspek tersebut.

Gambar 2.91
Jumlah Pengunjung Perpustakaan



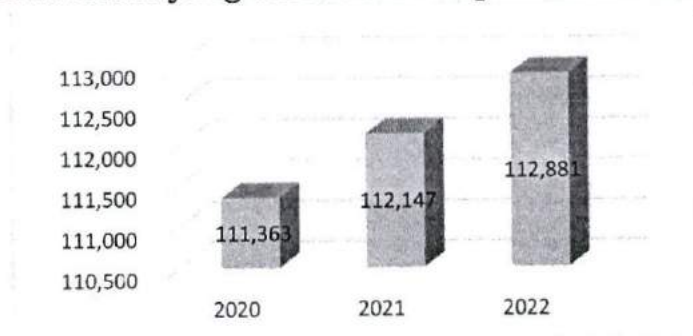
Sumber : Disperpusip. 2022

Grafik diatas menunjukkan jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas, terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2021 mencapai angka 15.582 orang, sedangkan pada tahun 2019 angka kunjungan perpustakaan sangat tinggi berada pada angka 335.707 orang. Angka tersebut memperlihatkan penurunan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan, dimungkinkan perkembangan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, karena informasi telah dapat diakses dengan mudah melalui media digital diperlukan upaya promosi lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang. Walaupun pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kunjungan sebanyak 52.841 kunjungan akan tetapi jumlah kunjungan belum bisa melewati capaian tahun 2019. Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan kunjungan di perpustakaan relatif menurun seperti sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar, Kompetensi SDM Perpustakaan masih terbatas serta Promosi layanan perpustakaan masih belum masif.

b. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah semakin meningkat, kondisi ini harus diimbangi dengan promosi terhadap layanan Perpustakaan sehingga bisa dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat.

Gambar 2.92
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah



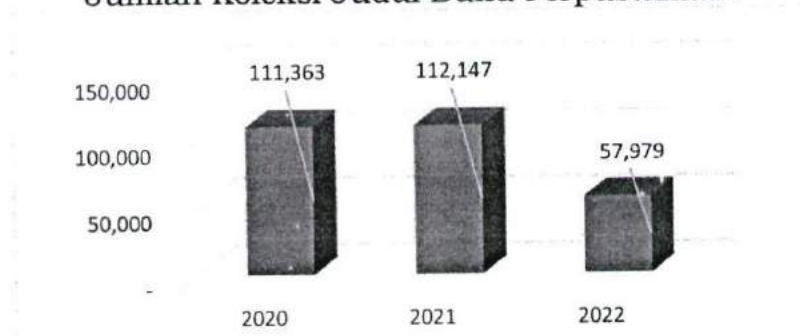
Sumber : Disperpusip. 2022

Grafik diatas menunjukkan jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Berdasarkan grafik diatas, koleksi buku di perpustakaan daerah cukup mumpuni untuk perpustakaan sekelas perpustakaan daerah. Angka tersebut memperlihatkan kuantitas buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Dilihat dari jumlah yang tidak sedikit, perpustakaan daerah juga menyediakan berbagai macam buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa memanfaatkan layanan perpustakaan tersebut.

c. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya, grafik dibawah ini menunjukkan koleksi judul buku di perpustakaan daerah cukup mumpuni untuk perpustakaan sekelas perpustakaan daerah.

Gambar 2.93
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan



Sumber : Disperpusip. 2022

Data diatas menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya. Angka tersebut memperlihatkan kuantitas judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Dilihat dari jumlah koleksi judul yang tidak sedikit, memperlihatkan perpustakaan daerah juga menyediakan berbagai macam judul buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa memanfaatkan layanan perpustakaan tersebut. Meskipun apabila dilihat dari data yang tersedia, terdapat penurunan jumlah judul buku dari 112.147 judul pada tahun 2021 menjadi 57.979 buku di Tahun 2022.

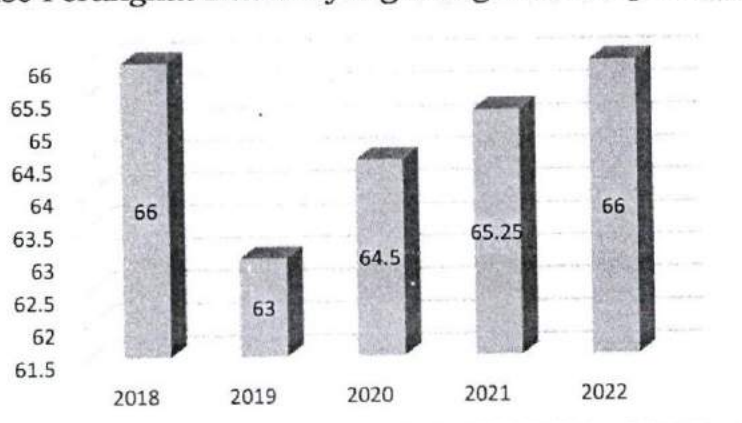
12. Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Pengelolaan arsip secara baku merujuk pada proses atau sistematisasi yang konsisten dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dengan mengikuti standar atau pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, keamanan dan aksesibilitas arsip dalam jangka waktu yang lama. Standar-standar tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi atau instansi yang melakukan pengelolaan arsip.

Gambar 2.94

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku



Sumber : Dinas Perpustakaan. 2022

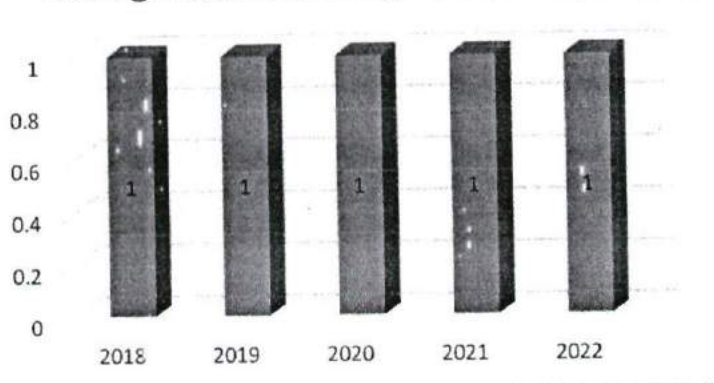
Grafik diatas menunjukkan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Berdasarkan grafik diatas, angka persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2022 mencapai angka 66% yang artinya sebanyak 66% perangkat daerah telah mengelola arsip sesuai dengan standar pengelolaan arsip. Namun masih terdapat beberapa permasalahan sehingga pengelolaan kearsipan di tingkat perangkat daerah masih belum optimal yaitu Pelaksanaan akuisisi dan penyerahan arsip statis masih belum maksimal dan belum terkelolanya arsip sesuai NSPK.

b. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Sumber Daya manusia pengelola kearsipan perlu untuk ditingkatkan agar menunjang dan meningkatkan kualitas kinerja. Tidak tersedianya sumber daya Arsiparis yang kompeten menjadi salah satu permasalahan yang ada di di bidang urusan kearsipan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program pelatihan SDM pengelola kearsipan agar mampu mengelola arsip sesuai standar dan berkualitas

Gambar 2.95

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan



Sumber : Disperpusip. 2022

Grafik diatas menunjukkan kegiatan yang diikuti oleh SDM pengelola kearsipan. Berdasarkan grafik diatas kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan selalu diadakan minimal sekali dalam satu tahun untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan. Hal tersebut dilakukan guna menunjang pengelolaan kearsipan yang berkualitas dilingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang.

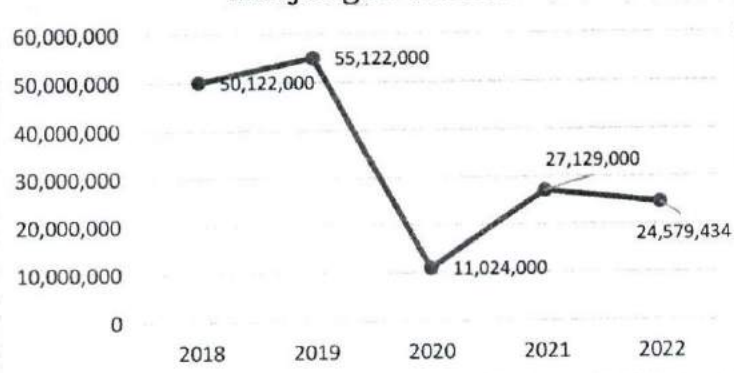
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.

Gambar 2.96
Kunjungan Wisata



Sumber : Disporabudpar. 2022

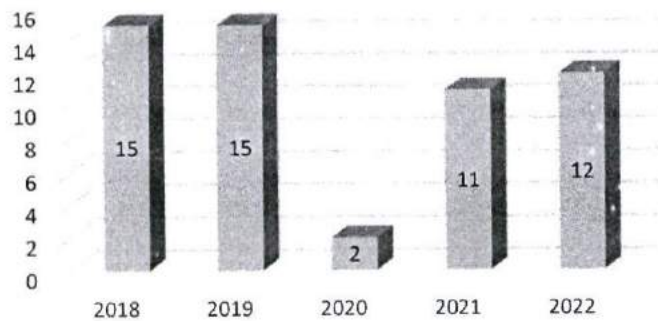
Berdasarkan grafik diatas kunjungan wisata di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 maka kunjungan wisata menurun drastis karena pembatasan aktivitas ekonomi. Mulai Tahun 2021 kembali meningkat di angka 27.129.000 pengunjung dan di tahun 2022 menurun menjadi 24.579.000 pengunjung. Penurunan angka tersebut karena kurangnya rencana aksi dan pengembangan kawasan strategis pariwisata, serta minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

b. Penyelenggara Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan salah satu cara untuk mempromosikan dan mengapresiasi kebudayaan dan tradisi suatu daerah Festival budaya yang dimaksudkan di sini adalah festival yang mengangkat tradisi sebagai bagian dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Festival dalam kategori ini adalah peristiwa yang dikelola baik oleh komunitasnya, atau dengan peran Pemerintah yang telah memasukkannya ke dalam program kerjanya.

Berdasarkan grafik diatas Penyelenggara Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 Penyelenggara Festival Seni dan Budaya sebanyak 15 kali, lalu tahun 2019 tetap di angka 15, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan kondisi pandemic Covid-19.

Gambar 2.97
Penyelenggaraan Seni Budaya



Sumber: Disporabudpar. 2022.

Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 11 kali dan tahun 2022 sebanyak 12 kali. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan penurunan tingkat penyelenggaraan budaya apabila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 yaitu:

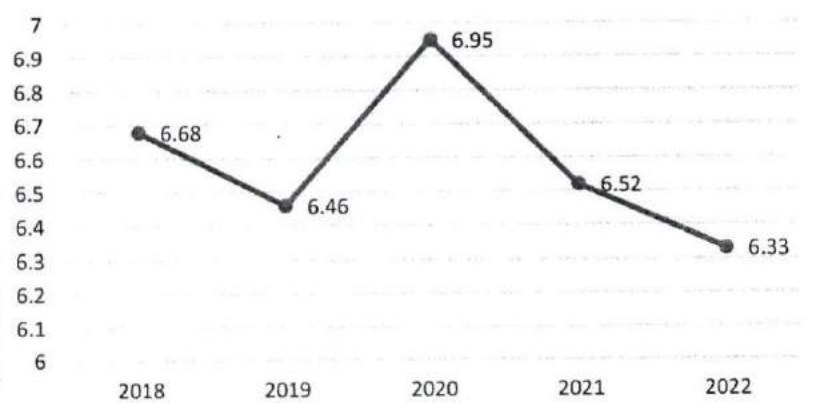
1. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya;
2. Minimnya sarana prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni;
3. Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan;
4. Kurangnya kontribusi pemerintah akan penghargaan terhadap pelaku seni budaya.

2. Pertanian

a. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. termasuk dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara. Berikut adalah beberapa kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB:

Gambar 2.98
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. 2022.

Berdasarkan grafik diatas Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebesar 6,68 persen. lalu tahun 2019

mengalami penurunan menjadi sebesar 6,46 persen. kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 6,95 persen. lalu di tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 6,52 persen dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 6.33 persen.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian yang terjadi di Kabupaten Tangerang:

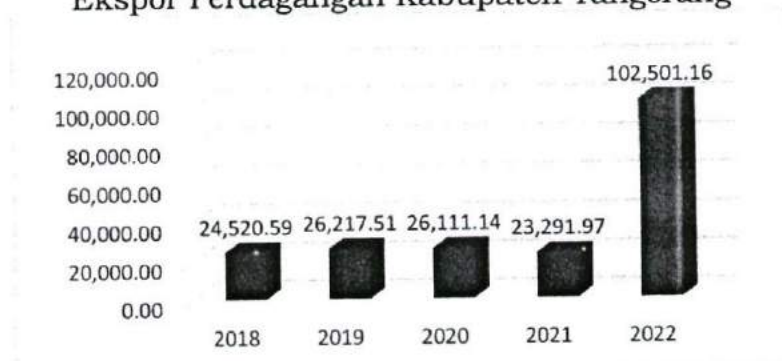
1. Masih rendahnya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan pangan berbahan baku palawija serta tepung umbi-umbian lokal;
2. Masih rendahnya kesediaan benih unggul;
3. Masih rendahnya ketersediaan sarana produksi pertanian dan peternakan;
4. Kurangnya ketersediaan air dan lahan pertanian;
5. Masih tingginya risiko serangan hama dan penyakit tanaman;
6. Masih rendahnya kualitas serta daya saing produk pertanian;
7. Masih rendahnya surveilans penyakit hewan. jumlah medik veteriner dan paramedik veteriner. serta pelayanan kesehatan hewan;
8. Masih rendahnya kualitas produk hewan;
9. Masih rendahnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian;
10. Masih rendahnya manajemen pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.

3. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan dalam bahasa Indonesia adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara. Ekspor bersih perdagangan mengukur seberapa banyak barang dan jasa yang diekspor oleh negara tersebut ke negara lain dan seberapa sedikit barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

Gambar 2.99
Ekspor Perdagangan Kabupaten Tangerang



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang. 2022

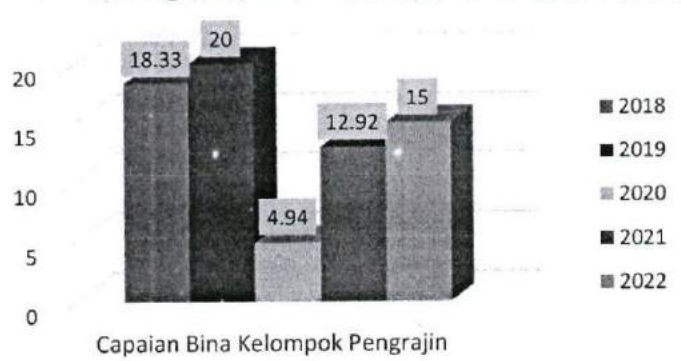
Berdasarkan grafik diatas Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 24.520.59 Miliar lalu meningkat tahun 2019 Rp.26.217.5 Milyar dan meningkat kembali tahun 2020. akan tetapi tahun 2021 sedikit menurun disebabkan kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Selain itu. menurunnya tingkat ekspor juga disebabkan oleh kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan masih minimnya penggunaan Gerai Tangerang Gemilang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal.

4. Perindustrian

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Bina kelompok pengrajin atau "artisan group building" dalam bahasa Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk atau membina kelompok pengrajin atau pekerja seni untuk bekerja sama dan meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Secara umum, cakupan dari bina kelompok pengrajin adalah untuk membantu para anggotanya dalam meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan mereka melalui kerjasama dan akses ke berbagai sumber daya yang berkualitas.

Gambar 2.100
Cakupan Bina Kelompok Perajin



Sumber: Disperindag, 2022, diolah.

Berdasarkan grafik diatas Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 18.33, lalu tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 20, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 4.94. Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 12,92 dan di tahun 2022 menjadi 15. Namun pembinaan pelaku Kelompok Pengrajin ini juga harus masih dikembangkan sehingga dapat mendorong tingkat cakupan bina kelompok Pengrajin

5. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan segmen industri yang memperoleh dan memproses hasil laut dan air tawar, termasuk ikan, udang, kerang, dan makanan laut lainnya. Produksi perikanan meliputi aktivitas penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Produksi perikanan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat dunia. Selain itu, sektor ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang di seluruh dunia dan membantu perekonomian negara-negara yang bergantung pada sektor perikanan.

Apabila produksi perikanan yang dihasilkan oleh para nelayan dan pembudidaya ikan meningkat, diikuti dengan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi ikan meningkat maka diharapkan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan pun akan meningkat. Dikarenakan ikan merupakan produk yang mudah sekali mengalami penurunan mutu dan kualitas akibat proses pembusukan maka perlu disiasati dengan meningkatkan nilai tambah produk perikanan agar harga ikan tidak turun.

Tabel 2.32
Produksi Perikanan Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi perikanan	Ton	90.03	207.9850	209.0221	210.3067	422.3700

Sumber : Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan tabel 2.32 diatas Produksi Perikanan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 90.03 ton, lalu tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 20.799 ton kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebanyak 209,02. Lalu di tahun 2021 sebesar 210,31 ton dan tahun 2022 sebanyak 42 ton.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah bagian dari diet manusia yang mencakup asupan ikan dan produk olahan ikan seperti tahu, tempe dan sushi. Ikan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mengandung asam lemak omega-3 yang berguna untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, serta protein berkualitas tinggi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pemulihan.

Tabel 2.33
Konsumsi Ikan Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi ikan	Persen	101.8	34.62	36.08	37.44	100.05

Sumber : Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan tabel 2.33 di atas Konsumsi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 selalu mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 101,8. lalu tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 34,62 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 36,08. Lalu di tahun 2021 sebesar 37,44 dan tahun 2022 sebesar 100,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan di tahun 2022 untuk Konsumsi Ikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hasil produksi perikanan yang disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi ikan turut meningkat. Sehingga hubungan antara suplai dan permintaan akan ikan meningkat secara signifikan di tahun 2022.

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Bina Kelompok Nelayan (BKN) adalah suatu upaya pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk membantu dan memfasilitasi pengembangan kelompok-kelompok nelayan. seperti kelompok nelayan tradisional atau modern, dalam memperoleh manfaat dan memperkuat posisi mereka di pasar.

Tabel 2.34
Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	38.47	37.5	24.07	28.35	29.17

Sumber : Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan tabel diatas cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. posisi terakhir pada angka 29,17 persen.

d. Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan

Produksi perikanan budidaya adalah proses memelihara atau mengendalikan pertumbuhan spesies ikan dalam kondisi terkendali. seperti kolam. tambak. atau waduk. Dalam konteks kelompok nelayan. produksi perikanan budidaya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi para nelayan. yang biasanya berkolaborasi dengan ahli budidaya ikan untuk memelihara spesies ikan yang cocok untuk lingkungan setempat dan memenuhi permintaan pasar.

Tabel 2.35
Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan	Persen	23.47	5.56	7.18	4,398	21.00

Sumber: Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan grafik diatas Proporsi tangkapan ikan Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 23,47, lalu tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 5.56 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 7,18. Lalu di tahun 2021 sebanyak 4,398 dan tahun 2022 meningkat 21. Kondisi yang fluktuatif ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Sistem produksi di nelayan dan pembudidaya masih tradisional;
2. Rendahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah dan pola pembinaan untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan belum maksimal.
3. Belum adanya rantai pemasaran produk perikanan yang terintegrasi;
4. Kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah;
5. Pengetahuan nelayan dan pembudidaya masih rendah;
6. Pembinaan dan fasilitasi dalam peningkatan konsumsi ikan belum maksimal.

e. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman bervariasi tergantung pada jenis ikan dan daerah perikanan. Batasan biologis yang aman adalah tingkat tangkapan ikan yang dapat diterima secara biologis dan ekonomis. yang memastikan bahwa populasi ikan tetap stabil dan terpelihara dalam jangka panjang.

Tabel 2.36
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	99.78	95.29	96.73	97.73	98.71

Sumber: Dinas Perikanan. 2021

Berdasarkan grafik diatas Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 99,78, lalu tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 95,29 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 96.73, lalu di tahun 2021 sebanyak 97,73 dan tahun 2022 sebanyak 98,71.

f. Nilai tukar nelayan

Nilai tukar nelayan adalah seberapa besar upah atau penghasilan yang diterima oleh seorang nelayan per satuan produksi ikan atau per satuan waktu. Nilai tukar nelayan yang rendah dapat menjadi indikasi bahwa sektor perikanan belum menjadi sumber penghasilan yang adil dan berkelanjutan bagi nelayan. Oleh karena itu, penting untuk memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan nilai tukar nelayan melalui peningkatan akses ke pasar, peningkatan keterampilan dan teknologi dan peningkatan kualitas produk.

Tabel 2.37
Nilai Tukar Nelayan

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai tukar nelayan	Persen	121.68	109.65	98.73	110.21	106.45

Sumber: Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan grafik diatas Nilai tukar nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 121,68, lalu tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 109,65 kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 98.73. Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 110,21.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tersedianya dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda merupakan hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa RPJPD dan RPJMD tersebut tersedia bagi masyarakat dan mudah diakses. Ini membantu masyarakat dalam memahami visi dan misi pembangunan daerah, dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tangerang akan berakhir tahun 2025, dalam rangka penyusunan RPJPD 2025-2045 berbagai langkah harus ditempuh mulai dari penyusunan Evaluasi RPJPD, KLHS RPJPD, tahapan penyusunan dokumen RPJPD yang akan di-Perdakan pada tahun 2024.

RPJMD Kabupaten Tangerang yang berakhir tahun 2023 akan ditetapkan menjadi Perda pada Tahun 2025 seiring dengan ditetapkannya Kepala Daerah melalui Pilkada Serentak tahun 2024.

b. Dokumen Perencanaan Tahunan

Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Kewajiban setiap daerah untuk menetapkan RKP

menjadi Peraturan Kepala Daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD setiap tahun. Setiap tahun disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk perencanaan tahun yang akan datang dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk perencanaan tahun berjalan

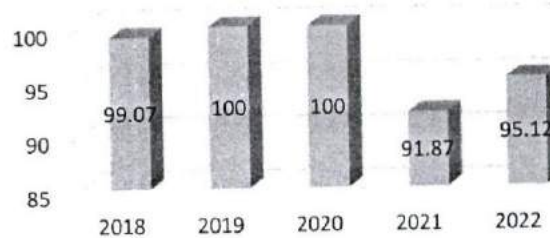
c. Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda memastikan bahwa perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah dilakukan dengan cara yang terencana, sistematis dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah dipedomani dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen RTRW telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

d. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam jangka pendek sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam jangka menengah. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara berkesinambungan dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan RPJMD.

Gambar 2.101
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD



Sumber : Bappeda. 2022

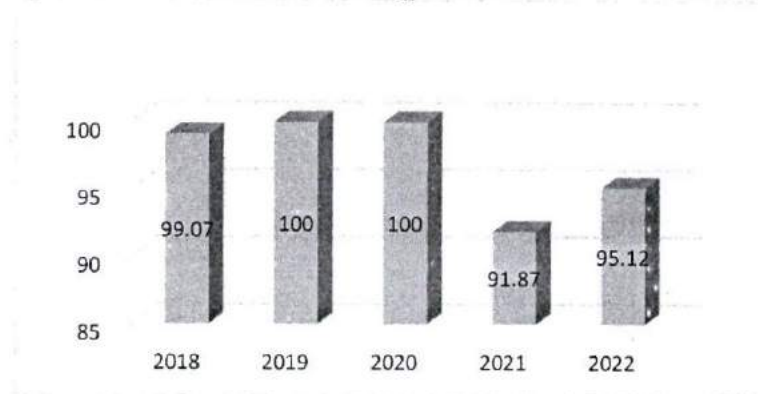
Berdasarkan grafik diatas Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, akan tetapi capaiannya selalu diatas 90 persen, ketidaksinkronan antara Program dalam RPJMD dan RKPD terutama disebabkan karena terdapat kegiatan mandatori seperti DAK yang banyak menggunakan program diluar yang sudah dialokasikan pada RKPD.

e. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Konsistensi program antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dilakukan secara terintegrasi dan efektif. Konsistensi ini memastikan bahwa

program yang dicanangkan dalam RKPD sejalan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD.

Gambar 2.102
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD



Sumber : Bappeda. 2022

Berdasarkan grafik diatas Penjabaran Konsistensi Program RKPD dengan APBD mencapai diatas 90 persen. Ketidaksesuaian program dalam RKPD dan APBD disebabkan karena adanya kebijakan dalam penganggaran yang baru muncul pada saat terbitnya Pedoman Penyusunan APBD tahun bersangkutan dan terdapat kegiatan mandatori seperti DAK yang sudah ditentukan sub kegiatan, kegiatan dan programnya sehingga menyesuaikan dengan yang telah disusun dalam RKPD.

2. Keuangan

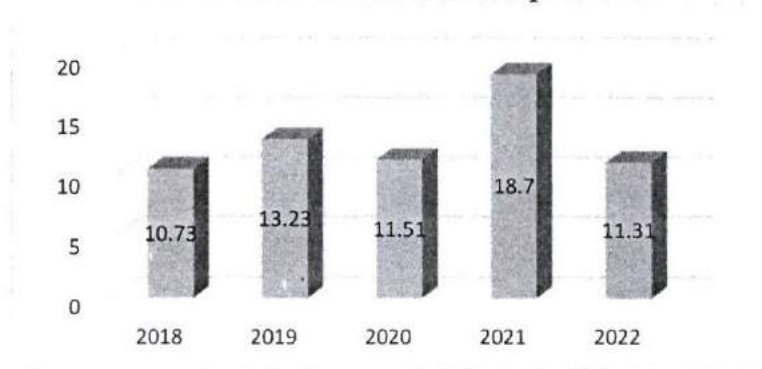
a. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menilai dan memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. BPK memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini BPK sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, karena memberikan informasi tentang keandalan dan keakuratan laporan keuangan pemerintah. Opini BPK juga memberikan dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi dan memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan capaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2018 hingga 2022 selalu WTP.

b. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rasio antara SILPA dan APBD, yang menunjukkan seberapa besar sisa anggaran pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.

Gambar 2.103
Persentase SILPA terhadap APBD



Sumber: BPKAD. 2022

Berdasarkan grafik diatas Persentase SILPA terhadap APBD di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif, Silpa terbesar terlihat pada tahun 2021 sebesar 18,7 pesen, hal ini disebabkan makin membaiknya kondisi pasca pandemi sehingga terdapat kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang dari BTT yang tidak dimanfaatkan, besarnya Silpa juga disebabkan oleh pendapatan yang melebihi dari target. Silpa sebagian juga berasal dari Silpa BLUD terutama dari pelampauan target pendapatan BLUD RSUD, Puskesmas dan UPDB yang dapat dimanfaatkan kembali oleh BLUD. Besarnya silpa juga dapat memperlihatkan efektivitas dan efisiensi dalam penatausahaan keuangan.

c. Belanja pendidikan (20%)

Belanja pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Dalam hal ini, persentase belanja pendidikan sebesar 20% adalah rasio antara belanja pendidikan dan total belanja pemerintah. Angka ini menunjukkan seberapa besar prioritas pemerintah dalam mengelola pengeluaran untuk pendidikan. Semakin besar angka ini, menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prioritas yang tinggi terhadap pendidikan dan memperhatikan peran pendidikan dalam pembangunan suatu daerah.

Gambar 2.104
Proporsi Belanja Pendidikan



Sumber: BPKAD. 2023

Berdasarkan grafik diatas Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 872.472,58 juta. lalu tahun 2019 di angka 744.540,23 juta kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 653.110,62 Juta. Namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan drastis sampai 1.528.469 juta.

d. Belanja Kesehatan (10%)

Belanja kesehatan merupakan salah satu kategori belanja dalam APBD yang memiliki andil 10% dalam total belanja pemerintah. Belanja kesehatan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan kesehatan, seperti penyediaan pelayanan kesehatan. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain.

Gambar 2.105
Proporsi Belanja Kesehatan



Sumber: BPKAD. 2023

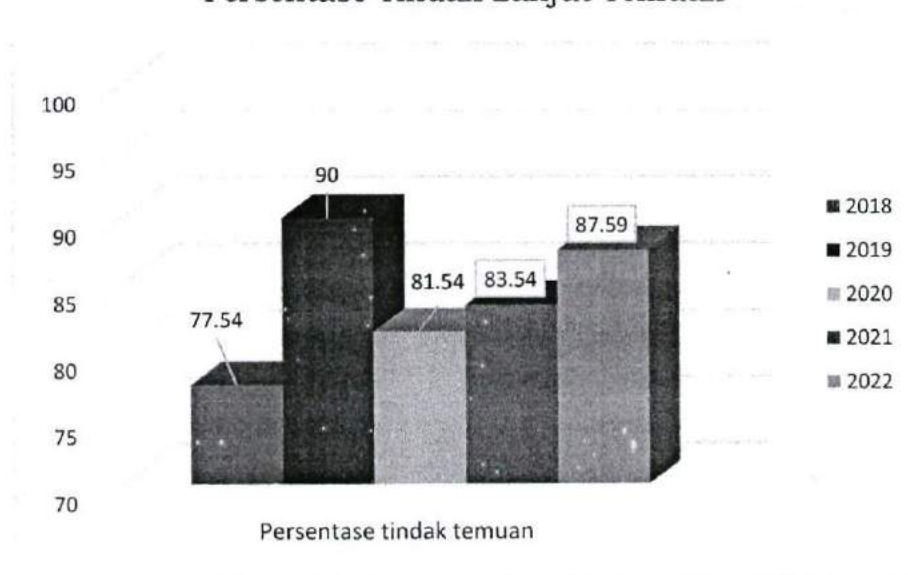
Berdasarkan grafik diatas Belanja Kesehatan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif. dimana pada tahun 2018 sebanyak 436.236.29 juta. lalu tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 372.270.12 juta. kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan Kembali sebanyak 326.555.31 Juta. lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 614.192.02 Juta dan di tahun 2022 bertambah menjadi 1.297.643.89 juta. Penyebab kenaikan tersebut dikarenakan adanya pemulihan pasca kejadian covid-19.

4. Pengawasan

a. Persentase tindak lanjut temuan

Tindak lanjut temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan proses untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Tujuan utama tindak lanjut temuan BPK adalah untuk memastikan bahwa masalah yang ditemukan sudah teratasi dan pencegahan masalah serupa dapat dilakukan di masa yang akan datang.

Gambar 2.106
Persentase Tindak Lanjut Temuan



Sumber: Inspektorat. 2023

Berdasarkan grafik diatas Persentase tindak lanjut temuan di kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021 capaian fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 77,54 lalu tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 90, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 81,54, lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan yang sebesar 83,54 dan di tahun 2022 naik 87,59. Hal tersebut dikarenakan peran APIP sudah optimal dalam menjalankan tugasnya.

5. Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah senantiasa ditingkatkan dalam sisi kualitas dan kuantitas. Gambaran kondisi pegawai Kabupaten Tangerang dapat diperlihatkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Jumlah Seluruh PNS Kabupaten Tangerang Non Nakes dan Guru

No	UNIT KERJA	JUMLAH SELURUH		
		L	P	JML
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40	27	67
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	5	12
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86	5	91
4	Badan Pendapatan Daerah	104	43	147
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46	29	75
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32	16	48
7	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	114	40	154
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36	23	59
9	Dinas Kesehatan	108	217	325
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	39	22	61
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	19	15	34

No	UNIT KERJA	JUMLAH SELURUH		
		L	P	JML
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	67	23	90
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	30	9	39
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	16	28
15	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	31	10	41
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54	24	78
17	Dinas Pendidikan	84	26	110
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	29	36
19	Dinas Perhubungan	43	2	45
20	Dinas Perikanan	20	18	38
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34	15	49
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	23	43	66
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	60	40	100
24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman	51	15	66
25	Dinas Sosial	23	19	42
26	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	63	27	90
27	Dinas Tenaga Kerja	29	10	39
28	Inspektorat	50	35	85
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	6
30	Kecamatan Balaraja	14	8	22
31	Kecamatan Cikupa	23	8	31
32	Kecamatan Cisauk	21	6	27
33	Kecamatan Cisoka	19	3	22
34	Kecamatan Curug	24	18	42
35	Kecamatan Gunung Kaler	16	3	19
36	Kecamatan Jambe	24	3	27
37	Kecamatan Jayanti	17	2	19
38	Kecamatan Kelapa Dua	33	19	52
39	Kecamatan Kemiri	21	1	22
40	Kecamatan Kosambi	40	7	47
41	Kecamatan Kresek	19	4	23
42	Kecamatan Kronjo	25	3	28
43	Kecamatan Legok	25	5	30
44	Kecamatan Mauk	26	6	32
45	Kecamatan Mekar Baru	22	1	23
46	Kecamatan Pagedangan	25	11	36
47	Kecamatan Pakuhaji	25	5	30
48	Kecamatan Panongan	25	8	33
49	Kecamatan Pasar Kemis	32	15	47
50	Kecamatan Rajeg	20	5	25
51	Kecamatan Sepatan	25	6	31
52	Kecamatan Sepatan Timur	18	6	24
53	Kecamatan Sindang Jaya	15	4	19
54	Kecamatan Solear	18	4	22

No	UNIT KERJA	JUMLAH SELURUH		
		L	P	JML
55	Kecamatan Sukadiri	20	6	26
56	Kecamatan Sukamulya	17	4	21
57	Kecamatan Teluk Naga	29	3	32
58	Kecamatan Tigaraksa	27	11	38
59	Satuan Polisi Pamong Praja	65	7	72
60	Sekretariat Daerah	109	50	159
61	Sekretariat DPRD	40	10	50
	TOTAL	2196	1056	3252

Sumber : BKPSDM Kab. Tangerang, 2022.

Tabel 2.39
Jumlah PNS Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Kabupaten Tangerang

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			
		Total	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	%
1	Sekretariat Daerah	55	50	5	9
2	Sekretariat DPRD	2	2	0	
3	Inspektorat	68	47	21	31
4	Satuan Polisi Pamong Praja	14	4	10	71
5	Dinas Sosial	5	5	0	
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	0	
7	Dinas Pendidikan	52	52	0	
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	2	1	33
9	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1	1	0	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	0	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1	1	0	
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4	4	0	
13	Dinas Kesehatan	4	1	3	75
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	5	16	76
15	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	4	2	2	50
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45	45	0	
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	14	0	
18	Dinas Perhubungan	4	4	0	
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3	3	0	
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	12	0	

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			
		Total	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	%
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	26	15	11	42
22	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	10	9	1	10
23	Dinas Tenaga Kerja	12	12	0	
24	Dinas Perikanan	1	0	1	100
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5	0	
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	4	0	
27	Badan Pendapatan Daerah	5	5	0	
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	8	6	43
29	Kecamatan Balaraja	1	1	0	
30	Kecamatan Cikupa	1	1	0	
31	Kecamatan Cisauk	2	2	0	
32	Kecamatan Cisoka	1	1	0	
33	Kecamatan Curug	1	1	0	
34	Kecamatan Gunung Kaler	1	1	0	
35	Kecamatan Jambe	2	2	0	
36	Kecamatan Jayanti	1	1	0	
37	Kecamatan Kelapa Dua	2	2	0	
38	Kecamatan Kemiri	1	1	0	
39	Kecamatan Kosambi	2	2	0	
40	Kecamatan Kresek	1	1	0	
41	Kecamatan Kronjo	1	1	0	
42	Kecamatan Legok	1	1	0	
43	Kecamatan Mauk	1	1	0	
44	Kecamatan Mekar Baru	1	1	0	
45	Kecamatan Pagedangan	1	1	0	
46	Kecamatan Pakuhaji	2	2	0	
47	Kecamatan Panongan	2	2	0	
48	Kecamatan Pasar Kemis	1	1	0	
49	Kecamatan Sepatan	1	1	0	
50	Kecamatan Sepatan Timur	1	1	0	
51	Kecamatan Sindang Jaya	1	1	0	
52	Kecamatan Solear	2	2	0	
53	Kecamatan Sukadiri	2	2	0	
54	Kecamatan Sukamulya	2	2	0	
55	Kecamatan Teluk Naga	1	1	0	
56	Kecamatan Tigaraksa	1	1	0	
	TOTAL	428	351	77	

Sumber : BKPSDM Kab. Tangerang, 2022.

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah PNS Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

Kabupaten Tangerang berjumlah 351 atau sekitar 82 persen, sedangkan pegawai yang belum bersertipikat sebanyak 77 pegawai atau sebanyak 17 persen.

Tabel 2.40
Pemerintah Kabupaten Tangerang Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan
(Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN										JUMLA H
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	TOTAL
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			10			9	2	35	11		67
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								6	6		12
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			47					31	13		91
4	Badan Pendapatan Daerah			43	1		26	2	48	27		147
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			22			11		32	10		75
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			7	1		3		11	25	1	48
7	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air			31			10	6	82	25		154
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			7			10	1	26	15		59
9	Dinas Kesehatan	6	6	45	3		50	13	115	86	1	325
10	Dinas Komunikasi dan Informatika			8			5		39	9		61
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			5					20	9		34
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1		22			6		37	24		90
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			9				2	20	8		39
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			6			4	1	7	10		28
15	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata			11			3		17	10		41
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2	17			1	1	31	26		78
17	Dinas Pendidikan			13		4	2		67	23	1	110
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			3	1		4		9	19		36
19	Dinas Perhubungan			9		1	1		18	16		45
20	Dinas Perikanan			7			3	2	12	14		38

NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	TOTAL
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			5			2	1	29	12		49
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip			11			19		22	14		66
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			17			7	2	52	22		100
24	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman		2	16			1	1	35	11		66
25	Dinas Sosial			10		1	2	2	19	7	1	42
26	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	1		15			3	2	50	19		90
27	Dinas Tenaga Kerja			3			4		20	11	1	39
28	Inspektorat			3			1	1	60	20		85
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			3				1	2			6
30	Kecamatan Balaraja			2					13	7		22
31	Kecamatan Cikupa			10			2		14	5		31
32	Kecamatan Cisauk		1	9					12	5		27
33	Kecamatan Cisoka			10			2	2	5	3		22
34	Kecamatan Curug		2	7			1	1	20	11		42
35	Kecamatan Gunung Kaler			4					11	4		19
36	Kecamatan Jambe			13			2	1	8	3		27
37	Kecamatan Jayanti		1	4				1	10	3		19
38	Kecamatan Kelapa Dua			6			2	2	31	11		52
39	Kecamatan Kemiri		1	5					13	3		22
40	Kecamatan Kosambi		1	14		2			21	9		47
41	Kecamatan Kresek			3					15	5		23
42	Kecamatan Kronjo		1	8			3		10	6		28
43	Kecamatan Legok			11					11	8		30
44	Kecamatan Mauk		1	12			1	1	14	3		32
45	Kecamatan Mekar Baru			6			2	1	8	6		23
46	Kecamatan Pagedangan		1	12		1	2	1	11	8		36
47	Kecamatan Pakuhaji			10					12	8		30
48	Kecamatan Panongan		1	9			3		14	6		33
49	Kecamatan Pasar Kemis		1	10		1	3	1	19	12		47
50	Kecamatan Rajeg			7			1		9	8		25
51	Kecamatan Sepatan	1		11			1	1	9	8		31
52	Kecamatan Sepatan Timur			8					12	4		24
53	Kecamatan Sindang Jaya			4			2		10	3		19

NO	INSTANSI	STRATA PENDIDIKAN										JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	TOTAL
54	Kecamatan Solear			8			2	2	6	4		22
55	Kecamatan Sukadiri			8			1		12	5		26
56	Kecamatan Sukamulya			6					13	2		21
57	Kecamatan Teluk Naga		1	12			1	1	13	4		32
58	Kecamatan Tigaraksa			10			1		18	9		38
59	Satuan Polisi Pamong Praja	1		31					32	8		72
60	Sekretariat Daerah			21			8	3	87	40		159
61	Sekretariat DPRD			17			2		23	8		50
Grand Total		10	22	713	6	10	229	58	1468	731	5	3252
Total PNS Berdasarkan Pendidikan		745			2.507						3.252	

Sumber : BKPSDM Kab. Tangerang, 2022.

Jumlah pegawai dengan Pendidikan DIV-S3 di Kabupaten Tangerang mencapai 69 persen atau sebanyak 2.262 pegawai diluar tenaga Kesehatan dan guru.

6. Sekretariat Dewan

- a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Penyediaan RKT ini penting untuk memastikan bahwa Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. RKT juga akan membantu Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adalah ada.

- b. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Penyusunan dan integrasi program-program kerja DPRD dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKPD) merupakan hal yang penting agar program-program kerja DPRD memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur. RPJM dan RKPD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan bahwa program-program kerja DPRD dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adalah ada

- c. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memastikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan sudah terintegrasi dan terukur. Hal ini akan membantu DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam hal adanya temuan bahwa program-program DPRD belum terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD. maka hal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan memastikan bahwa program-program DPRD sudah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD. Tindak lanjut ini akan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Komponen pengeluaran konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Menurut BPS Kabupaten Tangerang (2022) seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tangerang ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga.

Periode tahun 2018-2022 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas harga berlaku) maupun secara riil (atas harga konstan). Kenaikan jumlah Penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Kenaikan tersebut akan mendorong kenaikan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.41
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

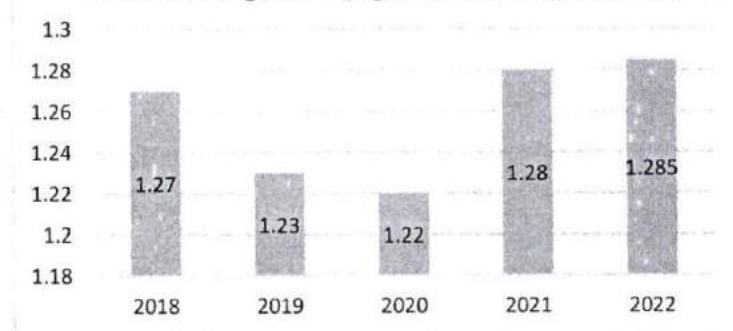
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total Konsumsi	67.159,46	72.998,71	71.693,73	74.770,60	81.562,48
Rumah tangga:					
a. ADHB (miliar Rp.)					
b. ADHB 2010 (Miliar Rp.)	52.000,18	54.496,20	53.124,89	54.816,80	57.185,98
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	51,73	52,11	52,82	51,47	50,92
Rata-Rata konsumsi perkapita:					
a. ADHB (miliar Rp.)	18.187,12	19.787,85	22.165,56	22.702,25	24.329,05
b. ADHK (Miliar Rp.)	14.081,91	14.772,35	16.424,63	16.643,77	17.057,86
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi Rumahtangga	5,25	4,80	-2,52	3,18	4,32
b. Perkapita	2,17	4,90	11,18	1,33	2,49
Jumlah Penduduk	3.692.693	3.689.068	3.234.465	3.293.533	3.352.472

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022.

2. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)

Transaksi ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Sebaliknya, impor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*) terhadap resident suatu wilayah.

Gambar 2.107
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB



Sumber : BPS. 2022 diolah

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Tabel 2.42
Rasio Panjang Jalan (Km) per Jumlah Kendaraan (Unit) di Kabupaten
Tangerang Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020	2021	2022
1	Jalan Nasional	27.70	27.7	27.7
2	Jalan Provinsi	108.30	108.3	108.3
3	Jalan Kabupaten	992.61	992.61	992.61
	Total Panjang Jalan	1,128.61	1,128.61	1,128.61
4	Jumlah Kendaraan	1496366	1447189	1445061
5	Rasio	0.000754234	0.000779864	0.000781012

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2022

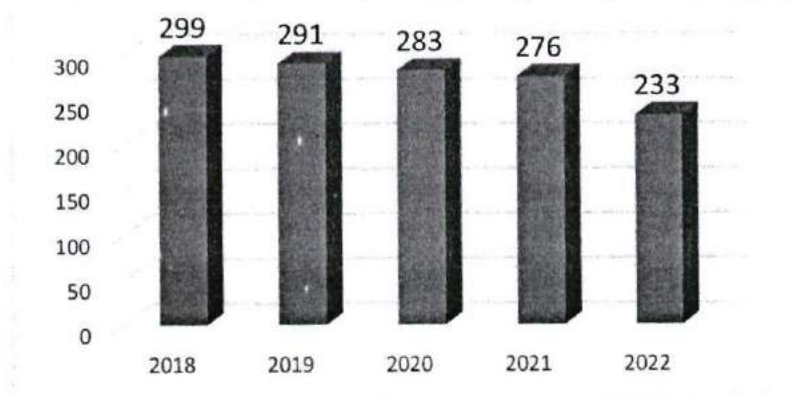
Dari 1.128,61 Km panjang jalan pada 2022, terdiri dari jalan negara/nasional 27,70 km, jalan provinsi 108,30 km, dan jalan kabupaten 992,61 km. Asumsi lebar jalan nasional (biasanya dua jalur enam lajur) 12 meter, lebar jalan provinsi (dua jalur dua lajur) 6 meter, dan lebar jalan kabupaten (dua jalur dua lajur) adalah 3 meter.

Dengan demikian, kapasitas jalan (M2) di Kabupaten Tangerang terdiri dari 332.400 meter persegi jalan nasional, 649.800 meter persegi jalan provinsi, dan 2.977.830 meter persegi jalan kabupaten. Total kapasitasnya adalah 3.960.030 meter persegi atau 3,96 kilometer persegi.

2. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Jumlah bank yang ada di Kabupaten Tangerang sampai tahun 2022 adalah sebanyak 233 unit bank umum. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.108
Jumlah Bank Umum di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

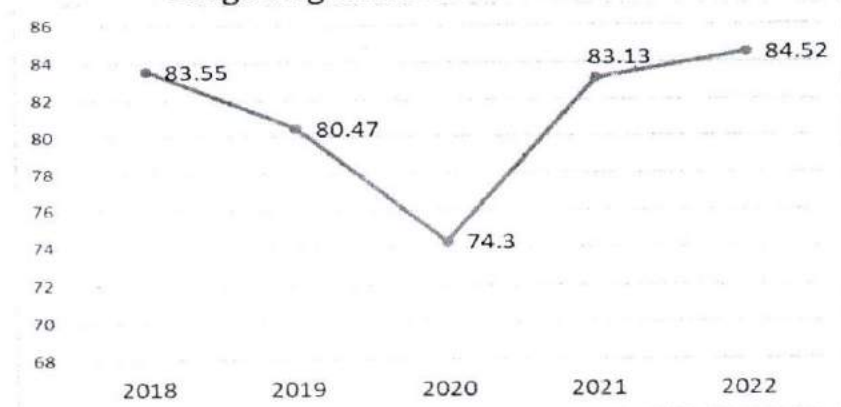


Sumber : BPS Provinsi Banten, tahun 2023, diolah.

3. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Air bersih adalah air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) >10 m. Persentase rumah tangga dengan akses air minum bersih pada tahun 2022 sekitar 84,52 persen dengan kondisi pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, dengan adanya program pembangunan sarana air bersih (SAB) di Kabupaten Tangerang akses terhadap pemanfaatan air minum bersih oleh masyarakat diharapkan menggunakan air bersih sebagai sumber kehidupan rumah tangganya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar.

Gambar 2.109
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Bersih di Kabupaten Tangerang tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Banten, tahun 2023, diolah.

4. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

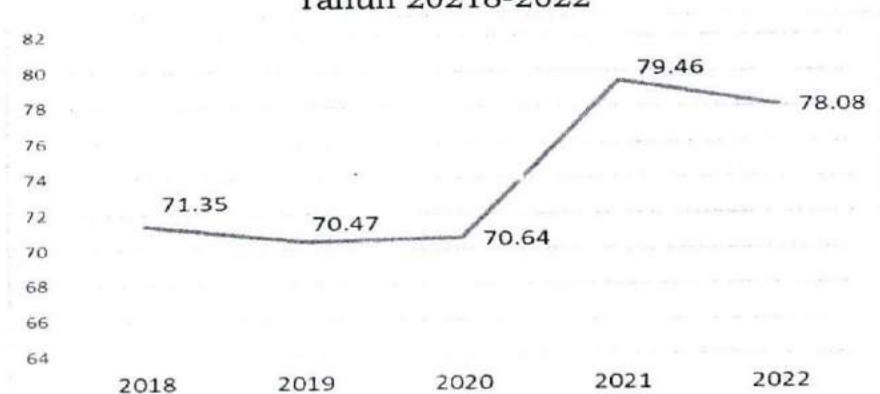
Tolok ukur pembangunan yang sejahtera menurut BPS adalah penggunaan telepon atau telepon genggam oleh masyarakat. BPS Provinsi Banten meriilis data Persentase penggunaan HP/telepon khususnya di Kabupaten Tangerang tahun 2022 untuk jenis kelamin laki-laki sekitar 82,63 persen lebih besar dibandingkan perempuan yang sekitar 73,35 persen, rata-rata kepemilikan telepon/HP di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 sebesar 78,08 persen cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 79,46 persen.

Tabel 2.43
Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Tangerang
Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Rata-Rata
1	2018	76.51	65.95	71.35
2	2019	76.31	98.2	70.47
3	2020	77.27	63.67	70.64
4	2021	84.68	73.99	79.46
5	2022	82.63	73.35	78.08

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2023

Gambar 2.110
Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Tangerang
Tahun 2018-2022



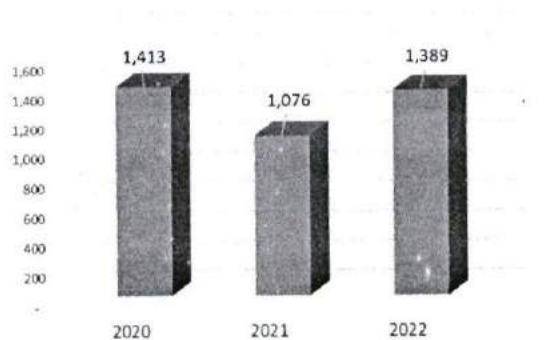
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2023. Diolah.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

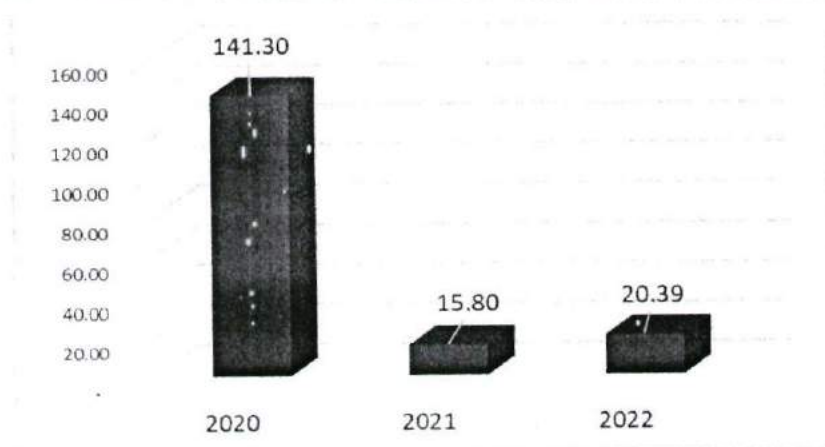
Peningkatan investasi yang berdampak kepada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tergantung situasi politik, hukum, ketentraman dan ketertiban umum suatu daerah, karena itu salah satu indikator kesejahteraan sosial suatu daerah salah satunya adalah menurunnya tingkat kriminalitas di suatu daerah. Sesuai data BPS Provinsi Banten tahun 2023, sepanjang tahun 2022 telah terjadi laporan kejahatan di wilayah kewenangan Polda Banten sebanyak 1.389 laporan, cenderung naik dari tahun 2021 yang sebesar 1.076 laporan. Seiring banyaknya laporan kejahatan yang dilaporkan di wilayah Polda Banten, tingkat risiko yang Penduduk pun cenderung berisiko mengalami tindak kejahatan. Dari data tahun 2022 risiko Penduduk per 100.000 penduduk angkanya mencapai 20,39, tahun 2021 sekitar 15,80, sedangkan tahun 2020 mencapai 141,30, perbedaan angka disebabkan jumlah Penduduk tahun 2020 yang menggunakan metode sensus yang berbeda, sehingga berdampak kepada nilai 100.000 penduduk dari jumlah Penduduk tahun 2020.

Gambar 2.111
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2023, diolah.

Gambar 2.112
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk



2. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah yang paling besar di Kabupaten Tangerang berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan Retribusi daerah bersumber dari Persetujuan Bangunan Gedung/PBG yang dulu dikenal dengan IMB, dan Retribusi Parkir.

Tabel 2.44
Jenis dan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tangerang

No.	Jenis dan Jumlah
	Pajak
1	Pajak Hotel
2	Pajak Motel
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya
5	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
6	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
7	Pajak Kantin dan Sejenisnya
8	Pajak Jasa Boga / Katering dan Sejenisnya
9	Pajak Tontonan Film
10	Pajak Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana
11	Pajak Pameran
12	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
13	Pajak Sirkus / Akrobat / Sulap

No.	Jenis dan Jumlah
14	Pajak Permainan Biliar dan Bowling
15	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
16	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
17	Pajak Pertandingan Olahraga
18	Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron
19	Pajak Reklame Kain
20	Pajak Reklame Berjalan
21	Pajak Reklame Udara
22	Pajak Reklame Film / Slide
23	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
24	Pajak Parkir
25	Pajak Air Tanah
26	BPHTB-Pemindahan Hak
Retribusi	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
2	Retribusi Pelayanan Penguburan / Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran / Pengabuan Mayat
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan / atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
6	Retribusi Penyediaan Peta Foto
7	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
8	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
11	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
12	Retribusi Pemakaian Laboratorium
13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
16	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Sumber : Bapenda Kab Tangerang, 2023.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualifikasi lulusan angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang menggambarkan besaran jumlah serapan tenaga Kerja dengan kualifikasi Pendidikan tertentu. Data BPS Provinsi Banten menampilkan bahwa jumlah angkatan Kerja yang ada di kabupaten Tangerang didominasi oleh lulusan SMTA sebanyak 753.317 orang, kedua didominasi oleh lulusan SD sebanyak 365.255 orang, sedangkan lulusan Diploma sampai Sarjana sebanyak 23.041 orang, sehingga rasio lulusan S1-S3 terhadap angkatan Kerja (AK) sebesar 0,123. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.45

Tabel 2.45
Jumlah Lulusan Angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang
Tahun 2022

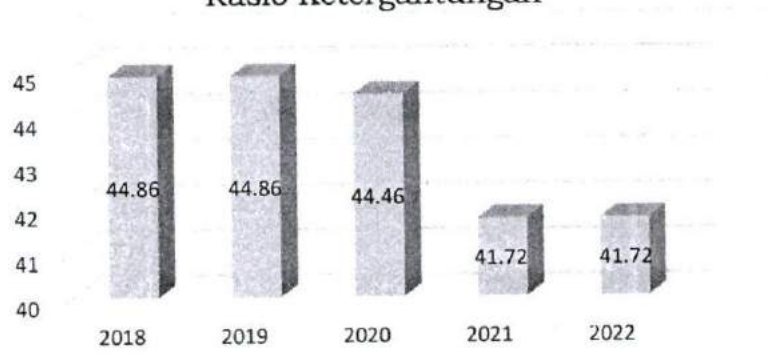
No.	Ijasah	Jumlah
1	Tidak punya ijasah	148,347
2	SD	365,255
3	SLTP	318,314
4	SMTA	753,317
5	Diploma/Universitas	223,041
	Total	1,808,274

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2023, diolah.

2. Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*depercency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun)

Gambar 2.113
Rasio Ketergantungan



Sumber : BPS. 2022 (diolah)

Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Secara Keseluruhan Kabupaten Tangerang memiliki rasio ketergantungan di tahun 2022 sebesar 41,72% yang dapat diartikan setiap 100 penduduk Kabupaten Tangerang yang produktif memiliki tanggungan 42 orang penduduk yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

2.2.1 Evaluasi Terhadap RPJMD

Indikator Makro dalam RPJMD Kabupaten Tangerang menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat

Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang
Tahun 2018-2022

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	LPE	Persen	5,93	5,45	-3,75	4,63	5,47
2	Inflasi	Persen	3,46	3,31	1,17	1,79	4,56
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,7	8,91	13,06	9,06	7,88
4	Kemiskinan	Persen	5,18	5,14	6,23	7,12	6,92
5	IPM	Nilai	71,59	71,93	71,92	72,92	72,97

Laju pertumbuhan ekonomi Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2022 mengalami kenaikan setelah pandemi Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020 sekitar 3,75%, tumbuh positif ditahun 2021 menjadi 4,63%, upaya pemulihan ekonomi baik nasional dan daerah berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang di tahun 2022 yang mencapai 5,47%, angka tersebut berada diatas angka nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2022 merupakan angka tertinggi selama dua tahun terakhir (2020-2021). Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,34%, dan sektor lapangan usaha konstruksi sebesar 8,25%. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada sebanyak 2 sektor lapangan mengalami penurunan yaitu sector lapangan usaha pertambangan dan penggalian, serta sektor lapangan suaha jasa Pendidikan.

Tangerang mengalami inflasi sebesar 4,56 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy di kota Tangerang pada Desember 2022 antara lain: bensin, mobil, angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, upah asisten rumah tangga, tukang bukan mandor, telur ayam ras, tahu mentah, dan daging ayam ras. Sementara itu komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: cabai merah, minyak goreng, kangkung, pisang, udang basah, bawang putih, cabai rawit, shampo, daun bawang, dan baju muslim wanita.

Kemiskinan, berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 1,21 dan tahun 2022 menurun di angka 1,06. Sedangkan pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,29 dan tahun 2022 mencapai 0,26. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 7,12% atau sebanyak 272.350 orang, tahun 2022 turun menjadi 270.520 orang atau sekitar 6,92 persen. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022 senilai Rp 576.122,-/kapita/bulan.

Menurut data BPS Provinsi banten tahun 2022, angka pengangguran di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 7,88 yang sebelumnya di tahun 2021 mencapai 9,06, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang pada Agustus tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,06%. Agustus tahun 2022 kembali mengalami penurunan sampai 7,88%. Tahun 2022 jumlah

penduduk usia kerja (> 15 tahun) di Kabupaten Tangerang sekitar 2.950.420 jiwa, yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 1.978.358 jiwa, dan Jumlah bukan Angkatan Kerja sebanyak 972.062 jiwa, meliputi Ibu Rumah Tangga, usia Sekolah, dan lainnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 63,94%.

IPM Capaian angka IPM Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan ditahun 2022 sebesar 72,97 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang sekitar 72.29. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersumber dari indeks komposit IPM yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity), dan Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar 8.92, dengan harapan lama sekolah (HLS) tahun 2022 selama 12,85 tahun, dengan angka harapan hidup (AHH) selama 70,28 tahun.

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kabupaten Tangerang
Tahun 2022

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	Persen	100	100	100
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,08	70,28	100,28
3	Prevalensi stunting	Tahun	16	21,1	68,1
4	Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	Persen	87	97,4	112
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	62,05	63,35	97,94
6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)	Persen	8,45	8,92	105,56
7	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	Persen	5,27	2,28	43,26
8	Penambahan Kunjungan wisatawan	persen	4	9,17	104,80
9	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	+5.12% dari realisasi tahun 2022	+68% dari realisasi tahun 2021	159.8
10	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	Indeks	68	67,05	98,60

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Persentase koperasi aktif	Persen	55	71,34	129,31
12	Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten	Jumlah	16.866	1.010	5,98
13	Nilai AKIP	Nilai	71,99	72,68	100,9
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83	85,18	102,63
15	Survey Eksternal Persepsi Korupsi/Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Skala	70.56	75.07	106.3
16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.15	2.66	84.44
17	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	Persen	93	92.95	99.95
18	Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga	Persen	50.00	98.32	196,64
19	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	Indeks	88.89	89,81	101.03
20	IKA (Indeks Kualitas Air	Indeks	57	58.89	103.32
21	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen	39.5	56.76	143.70
22	Indeks Risiko Bencana	Indeks	130	130,45	99.65
23	Persentase inovasi yang diimplementasikan	Persentase	68	100	147.06

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 adalah sebagai berikut dari 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu :

- 14 (empat belas) Indikator melampaui/melebihi target
- 1 (satu) Indikator mencapai target
- 8 (delapan) tidak tercapai

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang di masa mendatang.

Capaian Indikator Kinerja Utama yang belum maksimal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48
Faktor Penghambat dan Rencana Tindak lanjut Capaian IKU
Tahun 2022

NO	IKU	FAKTOR PENGHAMBAT	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Prevalensi stunting	Belum optimalnya penginputan hasil penimbangan dan pengukuran rutin di posyandu ke dalam EPPGM selama ini masih berfokus hanya di bulan Februari dan Agustus, masih ada balita yang tidak memiliki NIK untuk input EPPGBM.	Optimalisasi intervensi gizi spesifik yang langsung menysasar ke sasaran seperti ANC lengkap pada bumil, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, penyediaan PKMK untuk balita bermasalah gizi, pemeriksaan balita bermasalah gizi oleh DSA, pemberian TTD rematri, kegiatan UKBM gizi (pos gizi, KP ASI, keping emas), Peningkatan kapasitas petugas sehingga bisa memberikan pelayanan gizi optimal ke pada sasaran, serta optimalisasi/peningkatan cakupan input EPPGBM setiap bulan.
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Belum optimalnya kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan gender, seperti program bantuan untuk perempuan kepala keluarga, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja bagi perempuan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Tingkat Daerah.
3	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	Gagal panen yang diakibatkan oleh banjir yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang berdampak besar pada perekonomian petani dan masyarakat di Kabupaten Tangerang, terutama bagi mereka yang mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber penghasilan utama.	Melakukan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, seperti program pemberian pupuk dan benih gratis, pelatihan dan pendampingan petani, serta pengembangan pasar dan agrowisata. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Tangerang agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

NO	IKU	FAKTOR PENGHAMBAT	RENCANA TINDAK LANJUT
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="558 318 1027 717">1. Edukasi dan kualifikasi tenaga kerja Kualitas dan kualifikasi tenaga kerja di Kabupaten Tangerang masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Banyak tenaga kerja yang belum memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri atau sektor tertentu, sehingga sulit untuk mengejar posisi yang lebih baik. <li data-bbox="558 717 1027 1079">2. Mobilitas tenaga kerja Mobilitas tenaga kerja di Kabupaten Tangerang relatif rendah, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di beberapa sektor yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas tinggi. <li data-bbox="558 1079 1027 1415">3. Kurangnya kesempatan kerja Kabupaten Tangerang memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga jumlah tenaga kerja yang tersedia juga cukup banyak. Namun, kurangnya kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. <li data-bbox="558 1415 1027 1751">4. Kesenjangan gender Kesenjangan gender masih menjadi masalah di beberapa sektor pekerjaan di Kabupaten Tangerang. Banyak perempuan yang sulit untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya atau mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki dalam lapangan pekerjaan tertentu. <li data-bbox="558 1751 1027 2138">5. Edukasi dan kualifikasi tenaga kerja Kualitas dan kualifikasi tenaga kerja di Kabupaten Tangerang masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Banyak tenaga kerja yang belum memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri atau sektor tertentu, sehingga sulit untuk mengejar posisi yang lebih baik. <li data-bbox="558 2138 1027 2287">6. Mobilitas tenaga kerja Mobilitas tenaga kerja di Kabupaten Tangerang relatif rendah, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan 	<p data-bbox="1049 318 1516 655">Meningkatkan kualitas dan kualifikasi tenaga kerja, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan menghilangkan kesenjangan gender di lapangan kerja. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tangerang.</p>

NO	IKU	FAKTOR PENGHAMBAT	RENCANA TINDAK LANJUT
		<p>atau terpencil. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di beberapa sektor yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas tinggi.</p> <p>7. Kurangnya kesempatan kerja Kabupaten Tangerang memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga jumlah tenaga kerja yang tersedia juga cukup banyak. Namun, kurangnya kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja.</p> <p>8. Kesenjangan gender Kesenjangan gender masih menjadi masalah di beberapa sektor pekerjaan di Kabupaten Tangerang. Banyak perempuan yang sulit untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya atau mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki dalam lapangan pekerjaan tertentu.</p>	
5	Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten	<p>1. Menurunnya daya beli masyarakat. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi keuangan masyarakat sehingga daya beli produk IKM menurun.</p> <p>2. Keterbatasan akses pembiayaan. Lembaga keuangan masih menarik diri dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku IKM akibat dampak pandemi COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya.</p> <p>3. Kesulitan adaptasi dengan tuntutan pasar baru. Pasar dan perilaku konsumen saat ini mengalami perubahan signifikan akibat pandemi COVID-19. Pelaku IKM perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut agar dapat terus bersaing.</p>	Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pembentukan IKM baru. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan berbagai program pelatihan dan bantuan modal untuk membantu masyarakat dalam mendirikan IKM. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan pendirian usaha melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>1. Perbedaan persepsi terkait beberapa hal diantaranya penyajian peta proses bisnis, Arsitektur SPBE (Evidence) antara Diskominfo/ kabupaten kota dengan tim evaluator. Belum dilakukannya audit TIK oleh auditor eksternal (Brin, BSSN).</p> <p>2. Penilaian tahun 2022 hanya dilakukan pemantauan bukti</p>	melakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan SPBE.

NO	IKU	FAKTOR PENGHAMBAT	RENCANA TINDAK LANJUT
		dukung tanpa ada desk evaluation.	
7	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran pemeliharaan/ rehabilitasi kurang ideal, alokasi tidak sesuai dengan tingkat kerusakan jalan. 2. Tonase kendaraan melebihi kapasitas yang ditentukan. 3. Kurang optimalnya segi pengawasan yang berimbas pada temuan PPHP yang berdampak pada silpa. 	Meningkatkan pengawasan tonase kendaraan supaya tidak melebihi kapasitas dan meningkatkan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur
8	Indeks Risiko Benca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya beberapa indikator kapasitas Daerah yang seharusnya menjadi Prioritas kegiatan, Contohnya adanya keterlambatan dalam penyusunan kajian risiko bencana (KRB) dan belum tersusunnya perbup sebagai tuntunan perda No 07 Tahun 2021 tentang penanggulangan bencana. 2. Belum terbentuknya tim evaluasi indeks ketahanan daerah (IKD) lintas Perangkat daerah di Kabupaten Tangerang sehingga pengisian indikator dan pelaksanaan kegiatan yang penunjang IKD belum terlaksana secara sinergis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembentukan Tim evaluasi penilaian IKD Kab. Tangerang yang beranggotakan seluruh OPD terkait. 2. Melakukan reviu pemenuhan capaian IKD terhadap 7 prioritas, 71 indikator, dan 284 pertanyaan; 3. Menyusun Rencana Tindakanlanjutan hasil Reviu tim evaluasi oleh OPD terakait; 4. Melakukan rapat koordinasi tim evaluasi secara rutin minimal persemester; 5. Melakukan mitigasi structural untuk bencana banjir sehingga tingkat bahayanya dapat di turunkan.

2.2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan

Pencapaian target program yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 telah dievaluasi sampai dengan tahun 2022 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Secara umum target yang telah ditentukan telah tercapai, dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan Tabel 2.48 terdapat program kegiatan dan sub kegiatan yang belum maksimal capaian kinerjanya. Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahannya adalah sebagai berikut;

Tabel 2.49
Permasalahan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2022

N O.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	adanya regulasi yang membatasi penerima bantuan MBR	Memperbaiki regulasi terkait MBR	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Cabang olah raga yang dilombakan berkurang	Berkoordinasi dengan pusat dan provinsi	DINAS PENDIDIKAN

N O.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Cabang olah raga yang dilombakan berkurang	Berkoordinasi dengan pusat dan provinsi	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Belum adanya rekomendasi dari APH	Menyusun regulasi baru terkait Pengelolaan BOS	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Belum adanya rekomendasi dari APH	Menyusun regulasi baru terkait Pengelolaan BOS	DINAS PENDIDIKAN
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Adanya estimasi kenaikan harga dan perbedaan biaya untuk konstruksi ruang kelas bertingkat	Menyusun rencana pembangunan berdasarkan estimasi harga tahun berjalan	DINAS PENDIDIKAN
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pelaksanaan pendaftaran, lomba dan seleksinya secara online sehingga peserta tidak dapat secara maksimal mengikuti lomba	Berkoordinasi dengan pusat dan provinsi	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Belum adanya rekomendasi dari APH	Menyusun regulasi baru terkait Pengelolaan BOS	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Belum adanya rekomendasi dari APH	Menyusun regulasi baru terkait Pengelolaan BOS	DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 lokasi yang dituju tidak memiliki lahan yang memadai sesuai dengan pembangunan UKS	Lebih selektif dalam menentukan pembangunan ruang UKS	DINAS PENDIDIKAN
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Data siswa miskin tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan	Melakukan koordinasi dengan Dukcapil, Kecamatan dan pihak desa terkait verifikasi siswa miskin	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dikarenakan adanya pandemi covid-19 dimana RS Pemerintah memfokuskan pelayanan rujukan Covid-19 sehingga pemanfaatan tempat tidur, dialihkan untuk covid-19 dan dengan menurunnya kasus Covid-19 pemanfaatan tempat tidur menjadi rendah (BOR rendah)	Pemanfaatan tempat tidur untuk jenis pelayanan lainnya	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terdapat perbedaan data, dimana Pemerintah Pusat menggunakan data survey (SSGI) sementara Dinkes menggunakan data survei (ePPGBM) berdasarkan laporan pengukuran dan penimbangan Puskesmas dimana Puskesmas menggunakan data by name by adress untuk dilakukan intervensi	Dalam menetapkan target menggunakan standar pengukuran yang berstandar nasional	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Pada masa Pandemi COVID-19 dilakukan penundaan Survey Akreditasi, dan dengan keluarnya SE Kemenkes No.	Menyiapkan pendukung penyelenggaraan akreditasi	DINAS KESEHATAN

N O.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	HK.02.01/Menkes/652/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinyatakan bahwa izin penyelenggaraan/operasional Puskesmas dinyatakan masih tetap berlaku		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Berdasarkan Hasil Validasi Dinas Kesehatan per-Januari 2023 ke lapangan/Posyandu, sudah ada 56 Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	Berupaya meningkatkan kinerja posyandu sehingga berada pada strata purnama mandiri	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Masih adanya kawasan area rawan banjir	Peningkatan kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	kendaraan melebihi tonase sehingga laju kerusakan jalan mencapai 1-2%	Peningkatan perbikan dan rehabilitasi jalan kabupaten hingga mengurangi jalan rusak	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Belum optimalnya kerja samaa pelatihan kerja dan penempatan dengan perusahaan pemberi kerja	Mengoptimalkan jejering kerjasama pelatihan dan penempatan dengan dunia industry	DINAS TENAGA KERJA
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Masihbanyaknya perusahaan tidak menyiapkan lowongan kerja	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi ke perusahaan mengenai peraturan tentang wajib lapor lowongan dan penempatan tenaga kerja	DINAS TENAGA KERJA
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Belum optimalnya lembaga kerja bipartit dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan diperusahaan	Mendoornng peningkatan peran lembaga kerjasama Bripartit untuk mewujudkan hubungan yang harmonis diperusahaan dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	DINAS TENAGA KERJA
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kekurangan Armada Pengangkutan mengingat jarak tempuh ke TPA Jatiwaringan	Penambahan Armada pengangkutan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengurusan Kartu Keluarga masih rendah	1. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit Umum seperti RSUD Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, RSUD Pakuhaji, RS Swasta, dan Puskesmas. Kerjasama tersebut melalui pelayanan terintegrasi BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa Akta Kelahiran, KK, dan KIA)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

N O.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2. Sebagian kecil masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan di bidang IT. Hal ini mengakibatkan masyarakat belum bisa memanfaatkan kemudahan pelayanan online karena belum memiliki email, yang seharusnya masyarakat bisa mencetak Kartu Keluarga secara mandiri	2. Bekerjasama dengan pihak KUA agar menghimbau pasangan baru mengurus Kartu Keluarga	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3. Masalah teknis seperti salah unggah berkas persyaratan Kartu Keluarga dan penulisan alamat email sehingga dokumen Kartu keluarga tidak dapat terkirim ke pemohon		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	4. Banyak pasangan yang sudah menikah belum melakukan pisah Kartu Keluarga dan masih bergabung dengan Kartu Keluarga orang tua, adapun pasangan yang mengajukan Kartu Keluarga baru tidak memenuhi persyaratan berkas yaitu melengkapi Kartu Keluarga yang lama karena alasan hilang sehingga proses pengajuannya tidak dapat dilanjutkan		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Yang boleh mengikuti Diklat Hayen ASN sementara direncanakan dengan Non ASN	Seleksi Pegawai untuk mengikuti Diklat	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peraturan Perbup tentang Parkir berlangganan baru terbit di akhir tahun 2022	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 tahun 2022, dilaksanakan pada tahun 2023	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyerapan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan Komputer 3 Unit Laptop dan 2 Unit PC disebabkan harga pasaran melebihi Pagu Anggaran Di SIPD	Perubahan Harga Satuan dengan ketentuan merek yang diatur haruslah update harga pasaran agar dapat disesuaikan di SIPD	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ucapan Publikasi Pada Koran Sudah Tidak Ada	Penyesuaian Ucapan Publikasi pada Media	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Harga Koran Kompas Tidak Tersetap Karena Harga Rp.6000/Eksemplar sedangkan di DPA dengan Harga Satuan Rp. 4.500/Eksemplar	Penyesuaian Harga Update pada SIPD	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luas Tanam Menurun dari yang target	memberikan bantuan sebagai stimulan dan memberikan penyuluhan atau himbauan kepada petani	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

N O.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Beberapa komponen standar yang diberlakukan oleh LPSE belum dapat dipenuhi antara lain sarana dan prasarana serta konsolidasi paket	Sosialisi peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN dan katalog elektronik lokal	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	disesuaikan dengan tamu yang berkunjung	akan menyesuaikan anggaran dengan kunjungan tamu	SEKRETARIAT DPRD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Raperda terlaksana 2 kali sesuai dengan SK propemperda 2022	diupayakan masuk ke dalam SK Raperda	SEKRETARIAT DPRD
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda terlaksana 2 kali sesuai dengan SK propemperda 2022	diupayakan masuk ke dalam SK Raperda	SEKRETARIAT DPRD
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sesuai dengan usulan raperda inisiatif	yang akan dimasukkan ke usulan Raperda Inisiatif	SEKRETARIAT DPRD
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terlaksana namun tidak menggunakan Mamin	akan di maksimalkan penggunaan anggaran sesuai pagu	SEKRETARIAT DPRD
	Pembahasan Laporan Semester	Belum dijadwalkandi Banmus	akan dijadwalkan di Banmus	SEKRETARIAT DPRD
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	waktu kegiatan bersamaan dengan jadwal kunker dewan	akan di atur jadwal supaya tidak berbarengan	SEKRETARIAT DPRD
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	dalam pelaksanaannya haus koordinasi dengan Bappeda oleh Staff Fraksi	staf fraksi akan berkoordinasi dengan Banpeda	SEKRETARIAT DPRD

2.2.3 Capaian Kinerja Program Unggulan

Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan “Program Unggulan” sebagai program pembangunan daerah yang merupakan program monumental berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung pencapaian Visi Misi yang diusung Kepala Daerah. Program ini menjadi program prioritas bersifat strategis yang berorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten telah dan akan mengawal serta melaksanakan 10 (sepuluh) program unggulan sebagai program yang bersifat lintas sektor dan lintas OPD. sehingga program tersebut dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Capaian Program Unggulan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Capaian Program Unggulan Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian S.D 2023	Target akhir RPJMD	Kekurangan APBDP	% Capaian Sebelum APBDP	% Capaian Setelah APBDP	OPD PENANGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023						
1	TANGERANG RELIGI	Insentif Guru Ngaji	Tersedianya Penerima Insentif Guru Ngaji	Orang / Tahun	3.014	3.288	3.562	3.851	13.715	17.810	15	100,08	100,08	Kesra Setda	
		Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur'an	Jumlah peserta didik SD dan SMP yang dapat Baca Tulis Al Qur'an	Siswa	0	0	10.000	10.000	20.000	30.000	0	100	100	Disdik	
		Pembangunan sarana Saritansi Pada Pondok Pesantren	Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan	pondok pesantren	196	0	150	205	551	645	-1	99,85	100,00	Kesra Setda	
			Jumlah Pontren dibina PHBS	pondok pesantren	40	46	100	150	336	486	0	100	100	Dinkes	
	Rata-rata capaian											99,98	100,02		
2	GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN (GSM)	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun	USB	5	0	0	6	11	15	0	100	100	Disdik	
		Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Ruang	293	258	6	41	598	668	7	101	101	Disdik	

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian S.D 2023	Target akhir RPJMD	Kekurangan APBDP	% Capaian Sebelum APBDP	% Capaian Setelah APBDP	OPD PENANGUNG JAWAB	
					2019	2020	2021	2022	2023							
		Rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Ruang	316	329	72	207	924	110	1.034	833	201	124	124	Diedik
		Beasiswa Pendidikan Berprestasi dan MBR	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa	orang	0	1.154	2.583	3.873	3.873	6.590	10.463	6.590	3.873	100	100	Diedik
		Fasilitasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah dibina menjadi ramah anak	sekolah	77	152	152	250	631	250	881	881	0	100	100	DP3A
		Sekolah Sehat	Jumlah Sekolah SD/SMP yang menerapkan program Sehat	sekolah	0	13	30	20	63	20	83	83	0	100	100	BAPPEDA
		Rata-rata capaian												105,04	105,04	
3	GERAKAN TANGERANG SEHAT	Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (Jamkesda)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui Jamkesda	orang	15.186	6.549	5.202	7.359	34.296	4.000	38.296	35.437	2.859	108	108	DINKES
		Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (BPJS PBI)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui BPJS PBI	orang	89.289	83.403	90.088	144.736	101.879	120.000	221.879	96.556	125.323	109	109	DINKES

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target akhir RPJMD	Kekurangan APBDP	% Capaian Sebelum APBDP	% Capaian Setelah APBDP	OPD PENANGUNG JAWAB	
					2019	2020	2021	2022	2023						
	Aksi Konvergensi Stunting	Prevalensi Stunting	persen	18,4	N/a	23,3	21,1	21,1	18	18	14	-4	77,78	77,78	DINKES, DPPKB, DISDI K, DPPP, DISKAN, DPKP, DISKOMINFO, DPMPD, DINSOS
	Desa bebas ODF (<i>open defecation free</i>)	Jumlah desa ODF	Desa	0	10	21	111	111	121	121	100	21	121	121	Pemdes, Perkim dan Dinkes
	Pembangunan RSUD Ngurahrsa :														
	a. Feasibility study	Jumlah dokumen FS	Dokumen	1	0	0	0	0	1	-	1	0	100	100	DINKES
	b. Master plan dan Detail engineering design	Jumlah dokumen Master plan	Dokumen	0	1 (master plan)	1 (DED)	0	2	2	-	2	0	100	100	DINKES
	c. penyediaan lahan	Luas Lahan	M ²	-	5.844	43.264	765	49.873	49.873	-	49.873	0	100	100	PERKIM
	d. pembangunan	Jumlah Bangunan yang dibangun	Persen	-	0	0	6,22	6,22	100	100	100	6	100	100	DINKES
	Alat Kesehatan & Sarpras	Jumlah Paket Alat Kesehatan & Sarpras	Jenis						250	250	250	0	100	100	DINKES
	Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan	Orang						150	150	150	0	100	100	DINKES
	Obat dan BMHP	Jumlah Paket Obat & BMHP	Paket						2	2	2	0	100	100	DINKES

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi										Target akhir RPJMD	Kekurangan APBDP	% Capaian Sebelum APBDP	% Capaian Setelah APBDP	OPD PENANGUNG JAWAB
					2019	2020	2020	2021	2022	2022	Capaian S.D 2023	APBD 2023	Capaian S.D 2023	2022					
		Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas yang dibina menjadi ramah anak	puskesmas	7	11	22	33	33	33	44	77	44	33	100	100	DINKES dan DPPPA		
		Olahraga bersama Masyarakat dan Pelajar	Jumlah kelompok masyarakat dan pelajar yang berolahraga bersama	Kelompok	643	1.093	35	35	1.806	35	1.841	1.841	0	100	100	Kecamatan, Disporabudpar			
		Rata-rata capaian													101,24	101,24			
4	TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN (TANGERANG MANTAP)	Pengembangan Kawasan Agropoltan	Jumlah produksi Hortikultura di kawasan Agropoltan	Ton	775	780	878,7	870	3.304	870	4.174	4.174	0	100	100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian	Jumlah sarana dan prasarana Produksi Pertanian di Kawasan Agropoltan	Jenis	12	12	14	14	52	14	66	66	0	100	100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		Pelaksanaan Pembangunan Pusat kawasan agropoltan (Puskagro)	pembangunan Bangunan Utama pusat kawasan agropoltan (Puskagro)	Persen		50	100	100	100	100	100	100	0	100	100	DTRB			

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian S.D 2023	Target akhir RPJMD	Kekurangan APBDP	% Capaian Sebelum APBDP	% Capaian Setelah APBDP	OPD PENANGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023						
		1. Desain Puskagro	Jumlah dokumen DED	DED		1			1	1	0	100	100	DTRB	
		2. Pembangunan Puskagro	Jumlah Puskagro	Unit			1		1	1	0	100	100	DTRB	
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskagro	Jumlah sarana dan prasarana Puskagro	Paket			1		1	1	0	100	100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Pemberian Insentif pada Lahan LP2B	Luas lahan LP2B yang diberikan bantuan	Ha	1.605	1.623	4.466	12.586	13.935	13.931	4	100	100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Pembangunan Daerah Irigasi	Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi	Daerah Irigasi (DI)	0	1	8	14	14	14	0	100	100	DBMSDA	
		Rata-rata capaian										100,00	100,00		
5	GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN)	Konservasi Penanaman Mangrove	Jumlah Ha lokasi penanaman (Luasan Penanaman Mangrove)	Luasan Ha	5	5	5	20	22,5	25	-2,5	90	100	DLHK	
		Pembangunan WANA WISATA TMC	% KAWASAN Wana wisata TMC terbangun	%	1	70	100	100	100	100	0	100	100	DTRB	
		Pembangunan Sentra Budidaya Perikanan (Ketapang Urban Aqua Culture)									0			DINAS PERIKANAN	
		1. Desain Ketapang Urban Aqua Culture	Jumlah dokumen	DED/F S					1	1	1	0	100	100	DINAS PERIKANAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Capaian S.D 2023	Target akhir RPJMD	Kekurangan APBDP	% Capaian Sebelum APBDP	% Capaian Setelah APBDP	OPD PENANGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023						
		2. Pembangunan Ketatapang Urban Aqua Cultur	Jumlah Unit Ketatapang Urban Aqua Cultur yang dibangun	Unit	0	1	-	10	11	-	11	100	100	DINAS PERIKANAN	
		3. Penataan Lahan Ketatapang Urban Aqua Cultur	Presentase Luasan Ketatapang Urban Aqua Cultur yang ditata	Persen	34	48	55	85	85	100	185	100	100	DINAS PERIKANAN	
		4. Pemeliharaan dan Operasionalisasi KUA	Persentase yang dipelihara	Persen	-	-	20	20	40	100	140	100	100	DINAS PERIKANAN	
		Pemberdayaan Budidaya Ikan	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	170	220	150	150	690	150	840	100	100	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah unit kolam	unit kolam bulat	50	170	0	40	260	40	300	100	100	DINAS PERIKANAN	
		Pemberdayaan Budidaya Ikan Hias	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	10	10	10	10	40	10	50	100	100	DINAS PERIKANAN	
		Pemberdayaan Nelayan	Jumlah nelayan yang diberdayakan	Nelayan	110	24	150	150	434	150	584	100	100	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah alat penangkap ikan (API)	unit api	3500	3905	3500	4.120	15.025	3.650	18.675	103	103	DINAS PERIKANAN	
		Pemberdayaan Pengolah Ikan	Jumlah Pengolah Yang dilatih	Kelompok	10	10	10	10	40	10	50	100	100	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah Bantuan Sarana Pengolahan ikan	Unit	10	10	10	10	40	10	50	100	100	DINAS PERIKANAN	
Rata-rata capaian															
											100,29	100,29	100,29		

GERAKAN PEMBANGUNAN MASTARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN)

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satua	Realisasi					Target akhir RPJMD	Kekurangan APBDP	% Capaian Sebelum APBDP	% Capaian Setelah APBDP	OPD PENANGUNG JAWAB	
					2019	2020	2021	2022	2023						
6	OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN ASSET (OPTIMA)	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perincian dan Nonperincian berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	persentase realisasi penyelenggaraan perijinan secara online dan terintegrasi	Persen	37	40	71,43	82	80	95	175	95	80	100	DPMPTSP
		Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persentase Sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi	Persen			21	51	51	60	111	60	100	100	DISKOMINFO
		pengelolaan manajemen SDM terintegrasi	Persentase pengelolaan manajemen SDM terintegrasi	Persen				80	80	100	180	100	100	100	BKPSDM
		pengelolaan perencanaan dan money terintegrasi	Persentase pengelolaan perencanaan dan money terintegrasi	Persen				90	80	100	180	100	100	100	BAPPEDA
		operasionalisasi e-office	Persentase OPD pengguna e-office	Persen			84	100	100	100	200	100	100	100	DISKOMINFO
		Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset	Persentase sistem aset yang dikembangkan	Persen	50	60	70	93	93	100	193	100	100	100	BPKAD

Untuk memenuhi target RPJMD sampai dengan akhir tahun 2023, pada perubahan APBD 2023 dialokasikan anggaran untuk pencapaian target sebagai berikut;

Tabel 2.51
Alokasi anggaran pemenuhan program unggulan pada APBDP 2023

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Target Akhir RPJMD	Pencapaian s.d 2022	DPA Tahun 2023	Pencapaian S.D APBD 2023	Target APBDP 2023	Kebutuhan Anggaran	OPD Penanggung Jawab
1	TANGERANG RELIGI	Pembangunan sarana Sanitasi Pada Pondok Pesantren	646	551	94	645	1 Sanitren	130.000.000	Bagian Kesra SETDA
2	GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN)	Konservasi Penanaman Mangrove	25	20	2,5	22,5	2,5 Luasan Ha	220.000.000	DLHK
3	KITA PEDULI PERMASALAHAN SAMPAH (KIPRAH)	Koordinasi dan Fasilitasi pengelolaan sampah berbasis bio conversi maggot	50	31	-	31	19 Kelompok	1.425.000.000	DLHK
4	PENGENDALIAN KEMACETAN LALU LINTAS (PEKATLANTAS)	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System)	2	1	-	1	1 ATCS	2.700.000.000	Dinas Perhubungan
5	PENGENDALIAN KEMACETAN LALU LINTAS (PEKATLANTAS)	Pembangunan Fly Over Cisauk (Pengadaan Lahan)	11.900	11.075	-	11.075	1.003 M	13.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman Pertanahan
6	PRODUK INOVATIF DAN KREATIF (PROAKTIF)	Optimalisasi GTG (Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan)	190	101	-	101	100 IKM	500.000.000	Indag
7	PRODUK INOVATIF DAN KREATIF (PROAKTIF)	pengembangan kluster Usaha Mikro	2	0	-	-	2 Kluster UM	500.000.000	Diskum
Kebutuhan Anggaran Untuk Program Unggulan								18.475.000.000	

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Dari hasil evaluasi terhadap program prioritas permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain menggali dan mengembangkan potensi Daerah, kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM serta pengembangan sektor unggulan
2. Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus ditata dan dikelola dengan baik dalam rangka mendukung perwujudan Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pasca pandemi Covid-19 yang masih perlu ditingkatkan
4. Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya dan politik dalam upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Dari hasil evaluasi terhadap urusan pemerintahan, permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Bidang Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antara lain :

1. Adanya kenaikan harga terhadap bahan bangunan dan peralatan elektronik yang mendukung pembangunan dan pemenuhan fasilitas sekolah.
2. Kebutuhan peserta didik terhadap ruang kelas masih belum ideal;
3. Rendahnya fasilitas sekolah;
4. Tidak memiliki tenaga teknis bangunan;
5. Masih rendahnya peran orang tua terhadap pentingnya Pendidikan PAUD.
6. Belum maksimalnya pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka Kurikulum Merdeka
7. Belum meratanya distribusi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
8. Masih kurangnya kemampuan manajemen tata kelola keuangan di satuan pendidikan.
9. Masih rendahnya nilai rapor pendidikan yang berdampak terhadap mutu pendidikan

b. Bidang kesehatan

Permasalahan pada Bidang Kesehatan Tahun 2022 antara lain :

1. Meningkatnya jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021 sebanyak 109 orang per 100.000 KH dengan penyebab langsung Pandemi Covid 19 yaitu sebanyak 42% kematian ibu karena Covid-19, selain itu juga penyebab tidak langsung kematian ibu karena RS penuh di bulan Juni sampai dengan pertengahan Agustus 2021;
2. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah tidak bisa dilakukan secara maksimal terkendala peraturan PPKM, jumlah pendamping yang terbatas, banyak petugas Puskesmas yang terpapar Covid-19 pada bulan Juni - Agustus 2021 dan fokus pada percepatan vaksinasi di bulan September 2021.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 antara lain :

1. Ketersediaan lahan dan kepastian status lahan;
2. Undang-Undang Cipta Kerja belum ada turunan produk hukum di daerah. Sehingga pelayanan dokumen perijinan tertunda;
3. Tonase kendaraan melebihi kapasitas yang ditentukan

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antara lain :

1. Banyaknya usulan perbaikan sarana prasarana perumahan yang belum menjadi asset pemda sehingga tidak bias direalisasikan;
2. Pada sebagian TPU tidak ada batas antara TPU wakaf dan TPU milik pemda.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 antara lain :

1. Permasalahan Penegakan Perda dan Perkada;

- Tingkat Kesadaran Masyarakat akan Perda dan Perkada masih kurang,
 - Data persebaran/pertumbuhan tempat hiburan belum akurat,
 - Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan aktifitas pelaku usaha hiburan, peredaran Miras.
2. Permasalahan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Penyalahgunaan Pelaku kegiatan usaha/penyalahgunaan Fasos Fasum untuk kegiatan usaha,
 - Belum optimalnya koordinasi penanganan masalah gangguan trantibum,
 - Belum optimalnya koordinasi penanganan gangguan PSK.
3. Permasalahan perlindungan Masyarakat;
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Satlinmas.
- f. Bidang Sosial
- Permasalahan pada Bidang Sosial Tahun 2022 antara lain :
1. Belum optimalnya verifikasi dan validasi pendataan PMKS dan PSKS;
 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PMKS.
 3. Belum optimalnya penataan Taman Makam Pahlwan (TMP)
- g. Bidang Tenaga Kerja
- Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antara lain :
1. Belum optimalnya penyerapan lulusan pelatihan UPTD Latihan kerja di perusahaan;
 2. Kurangnya tenaga instruktur yang kompeten sesuai dengan kejuruan yang ada;
 3. Masih banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja;
 4. Tidak ada kesesuaian anantara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan;
 5. Atitude pencari kerja yang rendah;
 6. Belum optimalnya lembaga kerja sama Bipartit dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan;
 7. Belum efektifnya penanganan PHI pada tahap Bipartit.
- h. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antara lain :
1. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 2. Adanya pembatasan kegiatan tatap muka sehingga pembinaan tidak maksimal.
- i. Bidang Pangan
- Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 antara lain :
1. Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tangerang cukup secara kuantitas namun belum beragam secara kualitas;
 2. Anomali Iklim;
 3. Harga bahan baku pakan unggas tidak stabil (sering terjadi lonjakan);
 4. Skala usaha pemeliharaan ternak rakyat masih rendah dan perorangan.
- j. Bidang Pertanian
- Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah tidak ada kesepakatan harga pengadaan tanah antara pemilik tanah dengan harga yang ditetapkan oleh tim apresial.

k. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antara lain :

1. Pengelolaan TPA Jatiwaringin belum optimal;
2. Tindak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang masih banyak.
3. Kegiatan pengelolaan sampah yaitu dengan adanya perubahan kenaikan bahan bakar minyak (Dexlite, Pertamina, Bio Solar dan Pertamina Dex) sewaktu – waktu mempengaruhi operasional pengangkutan dan pengelolaan persampahan.

l. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 antara lain :

1. Adanya Surat Edaran dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor: 906/1622/KEUDA tanggal 25 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Kurangnya Sarana dan prasarana pelayanan adminduk, seperti alat perekaman KTP el, alat cetak KIA, Komputer Pengolah Data, tidak punya gedung arsip dokumen adminduk;
3. Masih sedikitnya OPD yang memanfaatkan data kependudukan;

m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDesa disebabkan kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes dan pengurus BUMDes sehingga pengurus belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, peranan Kepala Desa dan BPD selaku penasehat dan pengawas masih belum optimal yang menyebabkan fungsi pengawasan (controlling) dalam manajemen BUMDes belum berjalan efektif;
2. Pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa dikarenakan produk BUMDes yang tidak sesuai dengan potensi maupun harapan dari masyarakat desa;

n. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antara lain :

1. Belum optimalnya penyerasian Kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan (kurangnya dukungan pada kampung keluarga berkualitas);
2. tidak adanya PKB/PLKB di Tingkat Kecamatan dan Desa.

o. Bidang Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antara lain :

1. Jumlah Petugas Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas tidak sebanding dengan target penanganan titik kemacetan sesuai Renstra Dinas Perhubungan 2019-2023. Jumlah petugas Dinas Perhubungan pada tahun 2021 yang melaksanakan tugas di lapangan berupa penjagaan dan pengaturan lalu lintas (gatur lalin) berjumlah 159 orang. Sementara jumlah simpang yang perlu dilakukan gatur lalin sebanyak 18 simpang. Secara eksisting yang dilakukan gatur lalin hanya 9 titik, sementara sisanya 9 titik belum dilakukan gatur lalin karena keterbatasan personil. Tugas petugas bukan hanya melakukan gatur lalin, melainkan juga harus melakukan penjagaan dan

- pengawasan operasional angkutan tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018. Hal ini menyebabkan tugas gatur lalin menjadi kurang fokus. Dari 9 titik yang dilakukan gatur lalin, di perbatasan-perbatasan sebanyak 15 titik dilakukan penjagaan dan pengawasan Perbup 47. Jika dijumlah, sebanyak 24 titik yang dilakukan penjagaan tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.
2. Lebar ruas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan yang melewati jalan. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah penyangga ibukota Jakarta, sehingga pertumbuhan penduduknya tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap pertumbuhan kendaraan yang melewati jalan. Sementara pertumbuhan lebar jalan cukup lambat, mengingat dalam suatu pelebaran jalan tidak serta bias dilakukan. Harus dibebaskan dulu lahannya yang membutuhkan biaya yang besar. Hal inilah yang menyebabkan kemacetan menjadi semakin banyak di Kabupaten Tangerang.
 3. Kurangnya payung hukum Peraturan Bupati sebagai turunan dari Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam penyelenggaraan perhubungan di daerah payung hukumnya mengacu pada Peraturan Daerah sebagai upaya pengaturan masalah perhubungan disesuaikan dengan muatan lokal Kabupaten Tangerang. Peraturan Daerah nya sudah ada, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Namun aturan turunannya, yaitu Peraturan Bupati belum ada. Hal ini yang menyebabkan penindakan pelanggaran dan pengaturan di lapangan menjadi kurang optimal.
- p. Bidang Komunikasi dan Informatika
Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dihadapi pada tahun 2021 adalah belum optimalnya pengamanan Teknologi Informasi terhadap ancaman hacker.
- q. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 adalah terkendalanya dalam fasilitasi legalitas usaha dikarenakan yang mengeluarkan legalitas adalah instansi vertikal, sehingga waktu terbitnya legalitas usaha tidak bisa di prediksi.
- r. Bidang Penanaman Modal
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah perubahan regulasi dan kebijakan perizinan berusaha.
- s. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah belum optimalnya pembinaan terhadap Wira Usaha Baru (WUB).
- t. Bidang Kebudayaan
Permasalahan bidang kebudayaan yang dihadapi Tahun 2022 antara lain:
1. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya;
 2. Minimnya sarana dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni;
 3. Rendahnya animo masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional.

4. Terdapat 81 cagar budaya yang ada di kabupaten tangerang yang belum dapat legalitas pelestarian dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui tim Akademis Cagar Budaya (TACB)
- u. Bidang Perpustakaan
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 antara lain :
 1. Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar;
 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Perpustakaan masih terbatas.
- v. Bidang Kearsipan
Permasalahan pada Bidang Kearsipan pada tahun 2022 adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan masih terbatas.
- w. Bidang Perikanan
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 antara lain :
 1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan, pembudidaya, maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan. Para nelayan di kabupaten Tangerang masih menggunakan sistem produksi nelayan dan pembudidaya yang tradisional;
 2. Rendahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah dan pola pembinaan untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan belum maksimal.
- x. Bidang Pariwisata
Permasalahan bidang pariwisata yang dihadapi pada tahun 2022 adalah belum optimalnya promosi pariwisata dan Budaya di Kabupaten Tangerang.
- y. Bidang Pertanian
Permasalahan bidang pertanian pada Tahun 2022 adalah Kurangnya ketersediaan air di lahan-lahan pertanian, dan serangan hama, anomali iklim dan penyakit tanaman.
- z. Bidang Perdagangan
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 antara lain :
 1. Kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan masih minimnya penggunaan Gerai tangerang Gemilang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal Kabupaten Tangerang
 2. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar karena beberapa kendala, seperti masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen menurut undang-undang dan juga regulasi yang belum mengatur mekanisme detail tentang penyidikan dan aturan pelaksanaa pengurusan sengketa konsumen
 3. Banyaknya kerugian dan menurunnya aktivitas perdagangan karena pandemi Covid-19
- aa. Bidang Perindustrian
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah Pembinaan kepada pelaku IKM hanya terbatas dilakukan secara virtual.
- bb. Bidang Transmigrasi
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah terbatasnya jumlah kuota transmigran yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Tangerang tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi.

cc. Bidang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antara lain :

1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait penanganan Pandemi Covid-19 terhadap pembatasan kegiatan kunjungan kerja dan rapat/bimtek/diklat;
2. Regulasi target waktu pelayanan belum maksimal diterapkan. dikarenakan dalam penyelesaian pelaksanaan pelayanan perizinan belum semuanya bisa dijalankan sesuai SOP dan perlu didukung oleh OPD teknis terkait.

dd. Bidang Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah Kurang optimalnya tugas tugas pengawas karena pembatasan kinerja.

ee. Bidang Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi bidang penunjang fungsi Perencanaan pada Tahun 2022 antara lain :

1. Pengolahan dan Pemanfaatan data pendukung perencanaan yang belum optimal;
2. Sistem kendali pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal;
3. apasitas dan kompetensi SDM perencanaan yang belum memadai;
4. Penataan kelembagaan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ee. Bidang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 antara lain :

1. Kualitas layanan pajak daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.
2. Masih terdapat masyarakat yang belum patuh dalam membayar dan mentaati ketentuan pajak daerah;
3. Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan sosial masyarakat sehingga petugas pajak dilapangan menemui kendala dalam berinteraksi dan berkoordinasi dengan wajib pajak yang berdampak pada penurunan optimalisasi pajak daerah.

ff. Bidang Penunjang Kepegawaian

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 adalah Pandemic covid masih belum berakhir maka berpengaruh pada proses pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan indeks biaya kegiatan karena pola pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dimasa pandemi ini.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target wpembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tema RKP Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci arah kebijakan bidang ekonomi dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
 - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
 - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
 - Transformasi Digital.
3. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38-13,0 miliar.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Pengelolaan Terpadu UMKM

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi

dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomidari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

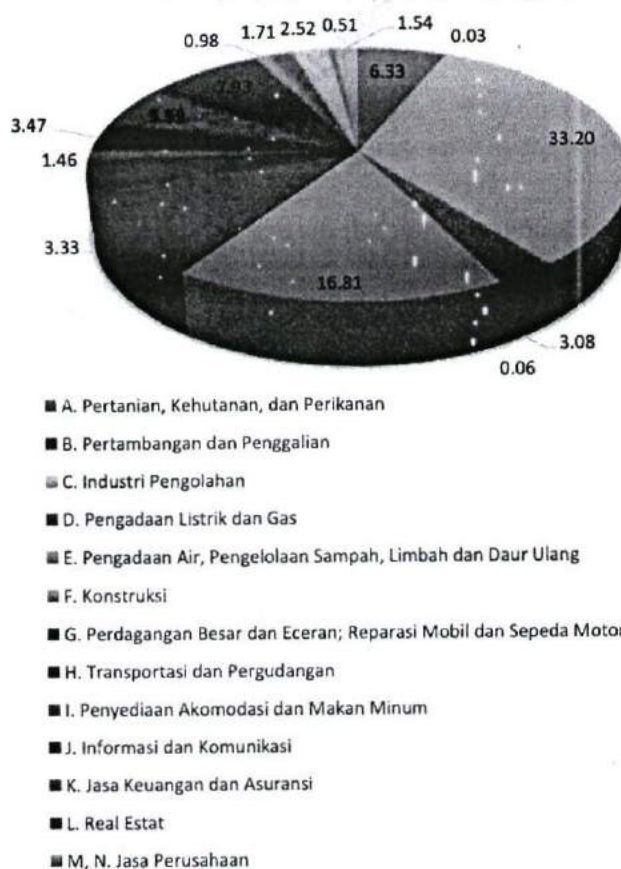
Struktur ekonomi merujuk pada dasar sebuah perekonomian yang dikaitkan dengan sektor (lapangan usaha) pembentuknya, atau dapat pula diartikan struktur ekonomi sebagai komposisi peranan masing-masing lapangan usaha dalam perekonomian.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Terdapat tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Kabupaten Tangerang selama periode 2018 2022, yaitu Industri Manufaktur, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Tiga lapangan usaha utama tersebut tetap masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Tangerang dimana pada tahun 2022 share dari Industri Manufaktur, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, masing-masing adalah 33,20 persen, 16,81 persen, dan 11,05 persen. Jika share lapangan usaha tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, ternyata lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami penurunan share yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 11,29 persen menjadi 11,05 persen di tahun 2022, Share yang juga mengalami penurunan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaa Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan sebagian lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan bahkan yang memiliki share terbesar yaitu Industri Pengolahan yang semula di tahun 2021 memiliki 33,12 menjadi 33,20 di tahun 2022, kategori Konstruksi yang notabene mempunyai share terbesar kedua juga mengalami peningkatan yaitu dari 16,15 di tahun 2021 menjadi 16,81 pada tahun 2022, kategori-kategori yang

juga mengalami peningkatan diantaranya Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi dan Jasa Lainnya.

Gambar 3.1
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Tabel 3.1
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tangerang
atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha / Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	6,68	6,46	6,95	6,52	6,33
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	35,86	35,10	33,30	33,12	33,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	3,81	3,35	3,02	3,19	3,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	14,21	14,85	14,85	16,15	16,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	11,36	11,59	11,74	11,29	11,05
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	2,98	3,08	3,06	3,20	3,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,51	1,52	1,49	1,46	1,46
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	3,19	3,22	3,61	3,54	3,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,45	5,20	5,46	5,67	5,99
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	7,47	7,82	8,39	8,16	7,93
M, N	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	1,05	1,10	1,08	1,00	0,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1,70	1,76	1,89	1,80	1,71
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	2,65	2,78	2,93	2,72	2,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,44	0,47	0,51	0,53	0,51
R,S,T,U	Jasa lainnya / <i>Other Services Activities</i>	1,54	1,60	1,60	1,53	1,54
Produk Domestik Regional Bruto / <i>Gross Regional Domestic Product</i>		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Perekonomian Kabupaten Tangerang pada Tahun 2022 tumbuh cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,70 menjadi 5,47 persen di tahun 2022.

Namun demikian ada beberapa sektor yang mengalami kontraksi pada tahun 2021, yaitu pertambangan dan penggalian sebesar -12,20 persen. Dan sektor Jasa Pendidikan sebesar -0,02 persen

Sementara itu, terdapat tiga sektor yang mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan pada tahun 2022, yaitu Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Transportasi dan Pergudangan, masing-masing sebesar 8,25 persen, 8,34 persen, dan 7,86 persen.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang
atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha / Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2,98	2,25	2,84	-0,84	2,28
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	5,72	2,30	-5,90	-9,45	-12,20
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	2,66	3,20	-8,74	4,26	5,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	5,82	-4,23	-12,35	11,69	5,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water Supply, Sewerage,</i>	5,19	6,71	8,60	5,81	1,36
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	8,18	9,44	-3,29	11,96	8,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,69	6,22	-3,70	1,82	3,27
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	9,60	9,55	-5,32	9,90	7,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,62	7,86	-5,63	4,45	8,34
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	8,35	9,69	9,12	5,17	6,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	7,16	0,72	1,56	6,07	6,81
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	9,44	9,49	1,96	3,07	5,19
M, N	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	6,02	9,20	-6,00	-2,25	4,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,48	8,75	-0,38	-0,76	1,09
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	8,25	8,30	0,62	-1,10	-0,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,68	11,13	4,41	9,14	2,94
R,S,T,U	Jasa lainnya / <i>Other Services Activities</i>	8,69	9,36	-6,11	1,39	7,77
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		5,80	5,56	-3,76	4,70	5,47

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita, PDRB per kapita dirumuskan sebagai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat memberikan gambaran mengenai laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dan menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penggunaan indikator ini harus digunakan secara hati-hati karena pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, namun harus berkesinambungan, mantap dan harus disertai terjadinya perubahan sikap dan kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan ekonomi.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2022, PDRB per kapita

Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 44,11 juta di tahun 2021 menjadi Rp 47,78 juta di tahun 2022, atau mengalami kenaikan sebesar 8,31 persen dibandingkan tahun 2021.

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan perkapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita.

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB per Kapita (juta rupiah) <i>Per Capita GRDP (million rupiahs)</i>	35,16	37,97	41,97	44,11	47,78
PDRB per Kapita (US \$) <i>Per Capita GRDP (million rupiahs)</i>	2.465,93	2.684,12	2.882,97	3.082,85	3.217,71
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen) <i>Growth of Per Capita GRDP (percent)</i>	5,91	8,01	10,51	5,12	8,31

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

3.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

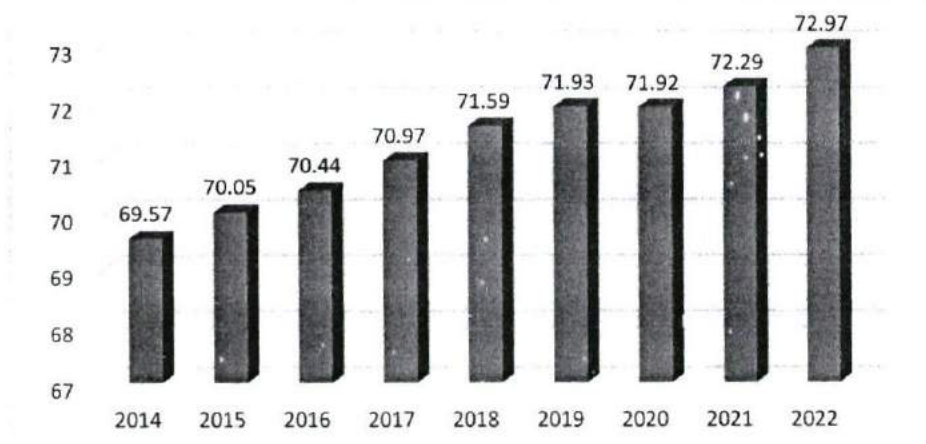
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Ratarata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Untuk menganalisis kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian

Gambar 3.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Tangerang meningkat dari 70,44 pada tahun 2016 menjadi 71,93 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Tangerang rata-rata tumbuh 0,70 persen pertahun. Pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang. IPM Kabupaten Tangerang tahun 2020 tercatat sebesar 71,92 atau turun 0,01 persen (menurun 0,01 poin) dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Tangerang kembali meningkat sebesar 0,51 persen (meningkat 0,37 poin) dan meningkat kembali menjadi 72,97 (meningkat 0,68 poin). Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2016-2022 menjadi sebesar 0,6 persen per tahun. Pada periode 2016 hingga 2021, pembangunan manusia Kabupaten Tangerang berstatus “tinggi”.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. Perlambatan capaian IPM Kabupaten Tangerang tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan, sedangkan komponen lainnya masih tetap tumbuh positif.

Tabel 3.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang Menurut
Komponen Tahun 2016-2022

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat lahir (UHH.Tahun)	69,37	69,47	69,61	69,79	69,89	69,93	70,28
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	12,11	12,51	12,8	12,81	12,82	12,84	12,85

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	8,23	8,27	8,27	8,28	8,39	8,61	8,92
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Jutaan Rupiah)	11,863	11,914	12,179	12,476	12,203	12,273	12,427
IPM	70,44	70,97	71,59	71,93	71,92	72,29	72,97

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2016 hingga 2021, Peningkatan Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Tangerang saat lahir sebesar 0,56 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,16 persen per tahun. Pada tahun 2016, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Tangerang sebesar 69,37 tahun, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 69,93 tahun dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 70,28.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tangerang meningkat sebesar 0,74 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,69 tahun.

Pada periode 2016 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,2 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Tangerang yang bersekolah. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tangerang telah mencapai 12,85 tahun, berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tangerang tumbuh 2,17 persen per tahun pada periode 2016 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal dasar dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Tangerang yang lebih baik. Pada tahun 2022, secara rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang usia 15 tahun ke atas mencapai 8,92 tahun atau hingga kelas 2 SMP.

Angka Rata-rata Lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani, kesulitan dalam peningkatan capaian Rata-rata Lama Sekolah karena selain masih terdapat anak usia sekolah yang tidak menyelesaikan sekolah sampai dengan pendidikan dasar sembilan tahun, masih terdapat penduduk usia dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal minimal sembilan tahun, hal ini dapat diatasi melalui pendidikan kesetaraan paket B dan paket C, akan tetapi hal ini juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022, Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Tangerang mencapai 12,427 juta per tahun, meningkat sebesar 154 ribu rupiah dibandingkan tahun 2021.

3.1.3 Ketenagakerjaan

Dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia memerlukan mata pencaharian yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Untuk itu, hal mendasar yang dibutuhkan adalah dengan bekerja. Menurut BPS, definisi bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. Penduduk yang telah tergolong sebagai penduduk usia kerja adalah yang berusia 15 tahun ke atas.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2022 banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Tangerang ada sebanyak 1.822.512 orang. Dari total pekerja tersebut, jumlah pekerja yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding pekerja perempuan. Untuk banyaknya angkatan kerja di Kabupaten Tangerang di tahun yang sama berjumlah sekitar 1.978.358 orang.

Tabel 3.5
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Golongan Umur di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/ <i>Gender</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	1 252 348	726 010	1 978 358
1. Bekerja/ <i>Working</i>	1 178 460	644 052	1 822 512
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	73 888	81 958	155 846
II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Economically Inactive</i>	255 452	716 610	972 062
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	120 180	116 914	237 094
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	26 908	573 314	600 222
3. Lainnya/ <i>Others</i>	108 364	26 382	134 746
Jumlah/<i>Total</i>	1 507 800	1 442 620	2 950 420

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Angkatan kerja yang merupakan pasokan tenaga kerja diharapkan aktif secara ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah. Kualitas seorang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dapat dilihat salah satunya dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh pelamar kerja, semakin tinggi pula kualitas yang dimiliki sebagai nilai tambah dalam mencari pekerjaan. Di tahun 2022, 32,02 persen penduduk usia 15 tahun ke atas adalah tamatan SLTP ke bawah. Tamatan perguruan tinggi hanya mencapai sekitar 9,25 persen dari total penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Tabel 3.6
Penduduk Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Bukan Angkatan Kerja <i>Not Economically Active</i>	Penduduk Usia Kerja <i>Working Age Population</i>	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja <i>Percentage of Economically Active to Working Age Population</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
0	343 656	944 710	63,62
1	325 635	686 507	52,57
2	257 099	1 046 364	75,43
3	45 672	272 839	83,26
Jumlah/Total	972 062	2 950 420	67,05

Catatan/Note: ¹ 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School
1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School
2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School
3. Perguruan Tinggi/Collage

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Secara keseluruhan penduduk yang bekerja, 32,24 persen diantaranya bekerja di lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dikaitkan dengan banyaknya tenaga kerja di Kabupaten Tangerang yang sebagian besar lulusan SMTA bekerja di bidang itu. Hal ini dikarenakan lapangan usaha tersebut pada umumnya membutuhkan kualifikasi pendidikan minimal SMTA, kecuali beberapa industri pengolahan berskala mikro dan kecil yang tidak terlalu memikirkan kualifikasi pendidikan yang tinggi. Pada tahun yang sama, sangat sedikit penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada seminggu yang lalu.

Tabel 3.7
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang
Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Tangerang Tahun 2022

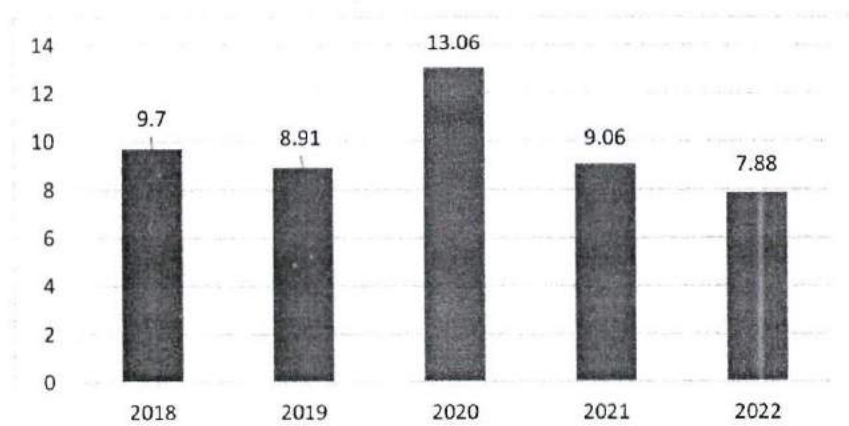
Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	218 064	167 077	385 141
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	66 491	43 425	109 916
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	28 266	1 737	30 003
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	726 368	304 327	1 030 695
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	109 005	46 850	155 855
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	30 266	80 636	110 902
Jumlah/Total	1 178 460	644 052	1 822 512

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Dari seluruh penduduk yang bekerja, 28,81 persen diantaranya berstatus sebagai pekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, maupun berusaha dibantu buruh dibayar. Selain itu, sekitar lebih dari 50 persen penduduk bekerja berstatus sebagai buruh atau karyawan. Pekerja bebas baik di pertanian maupun di non pertanian di tahun yang sama berjumlah sekitar 8,55 persen. Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar jumlahnya mencapai 6,09 persen.

Selain yang aktif bekerja, penduduk usia kerja juga ada yang termasuk dalam pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2022 mencapai 7,88 persen. Artinya, dari 100 orang yang termasuk angkatan kerja sekitar 9 sampai 10 orang diantaranya tergolong pengangguran terbuka. Status tersebut antara lain sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau sebenarnya sudah diterima namun belum mulai bekerja.

Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Masalah pengangguran merupakan hal yang selalu muncul setiap tahun. Hal ini terjadi karena banyaknya penawaran pada pasar tenaga kerja sering kali tidak seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja di pasar lapangan kerja. Selain itu, kompetensi atau keahlian yang ditawarkan oleh para tenaga kerja terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu.

Sekitar 4 persen pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang di tahun 2021 tidak punya Ijazah Sekolah Dasar (SD). Pengangguran terbuka paling banyak merupakan tamatan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Jumlah ini mencapai 56 persen dari total penganggur terbuka di Kabupaten Tangerang pada tahun tersebut.

Dari keseluruhan pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang, 72 persen diantaranya berstatus sedang mencari pekerjaan. Sementara 15 persen lainnya sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Termasuk pula didalamnya adalah para tamatan SMTA. Lulusan SMTA ini yang masuk dalam kategori penganggur terbuka juga sedang melakukan usaha untuk mendapat pekerjaan/usaha atau bahkan sebenarnya sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja. Dan pada tahun ini sekitar 14 persen penganggur berstatus merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan ternyata tidak terdapat pengangguran terbuka yang mempersiapkan usaha.

3.1.4 Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu GK terus meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan baik makanan ataupun non makanan. Usaha untuk menekan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin juga mendapatkan tantangan yang cukup berat karena harus berusaha untuk menaikkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

yang terus meningkat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjaga agar penduduk yang hanya berada sedikit di atas GK untuk tidak jatuh ke bawah Garis Kemiskinan.

Secara umum, pada periode 2015–2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19.

Tabel 3.8
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	372 431	191,12	5,71
2016	405 902	182,52	5,29
2017	423 486	191,62	5,39
2018	451 325	190,05	5,18
2019	476 636	193,97	5,14
2020	520 741	242,02	6,23
2021	545 065	272,35	7,12
2022	576 122	270,52	6,92

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode tahun 2021-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 1,06, turun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 1,21. Demikian juga dengan Indeks Keparahan

Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,29 menjadi 0,26.

Tabel 3.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

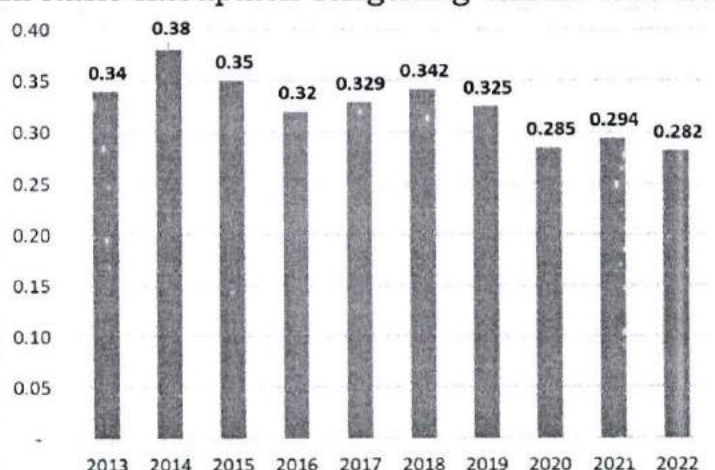
Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2015	0,82	0,18
2016	0,79	0,18
2017	0,68	0,13
2018	0,82	0,2
2019	0,69	0,14
2020	0,95	0,22
2021	1,21	0,29
2022	1,06	0,26

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

3.1.5 Indeks Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama, menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua ketimpangan menengah yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga ketimpangan tinggi yaitu berada di atas 0,5. Gini Rasio Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar 0,282 angka ini menurun dibandingkan dengan Gini Ratio 2021 yang sebesar 0,294. Ini menandakan level ketimpangan Pendapatan penduduk di Kabupaten Tangerang masih tergolong pada level rendah.

Gambar 3.4
Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022

3.1.6 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2023 dan 2024

Kondisi perekonomian tahun 2023 dan tahun 2024 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 dan pada 2023 akan tumbuh pada kisaran 5%. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional dan melihat perkembangan pandemi covid-19 maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,5 persen. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi pertumbuhan positif sektor industri pengolahan yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Kabupaten Tangerang. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai 5,5%. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2023 akan tumbuh pada kisaran 5%. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional dan melihat perkembangan pandemi covid-19 maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,6 persen. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi pertumbuhan positif sektor industri pengolahan yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Kabupaten Tangerang. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai 5%.

Proyeksi kinerja perekonomian Kabupaten Tangerang berdasarkan beberapa asumsi :

1. Kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada baik ditingkat nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang yang akan dilaksanakan secara serentak tahun 2024
2. Sektor unggulan pembentuk PDRB yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat tumbuh dengan baik seperti masa sebelum Covid-19
3. Iklim investasi yang membaik sehingga banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Tangerang.

Target Makro Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,6 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,51 persen,
- Angka kemiskinan diproyeksikan turun sebesar 5,94 persen
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 73,55
- Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,28

Tabel 3.10

Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024

NO	URAIAN INDIKATOR MAKRO	SATUAN	CAPAIAN		TARGET	
			2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,63	5,47	5,20-5,47	5,11-5,25
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,06	7,88	7,67	7,51
3	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin	Persen	7,12	6,92	6,58	5,94
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,29	72,97	73,27	73,55
5	Index Gini	Poin	0,294	0,282	0,28	0,28

3.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Upaya diatas dijabarkan lebih teknis melalui upaya intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun aktivitas yang berkaitan langsung dengan upaya tersebut antara lain :

a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tercapainya optimalisasi pajak penerimaan daerah dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak melalui upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tersebut untuk melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Sosialisasi kepada wajib pajak daerah terkait ketentuan perpajakan daerah.
2. Monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Pengawasan kepatuhan dan kebenaran kewajiban pembayaran pajak para wajib pajak.
4. Optimalisasi pajak melalui pemeriksaan pajak.
5. Dukungan pemanfaatan dan pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi manajemen terkini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan cakupan subjek pajak dan objek pajak. Upaya ini dilakukan dengan cara :

1. Pendataan dan survey subjek pajak dan objek pajak guna mengetahui informasi berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri atau berdasarkan data yang dimiliki fokus melakukan pengukuhan secara jabatan dan mengenakan pajak atas subjek pajak atau objek pajak yang semula belum dikenakan pajak.
2. Koordinasi optimalisasi pajak daerah melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Arah kebijakan anggaran pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan mencakup :
 - a. Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
 - b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;

- c. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
 - d. Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif, agar mereka mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit bagi seluruh subyek pajak dan atau retribusi daerah;
 - f. Kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 - g. Mengintensifkan obyek pungutan yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengkaji ulang sejumlah peraturan yang berkenaan dengan lain-lain pendapatan yang sah, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
- 2) Untuk kelompok pendapatan transfer, arah kebijakannya mencakup:
- a. Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari pendapatan transfer sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana transfer bagi kabupaten/kota;
 - c. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- 3) Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, arah kebijakannya mencakup perkiraan penerimaan dari Biaya Operasional Sekolah (BOS); Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tangerang
Tahun 2021-2025

Kode	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD 2023	RKPD 2024	Proyeksi 2025
4	PENDAPATAN DAERAH					
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.869.928.724.492	3.665.704.373.870	3.389.752.631.917	3.593.714.045.212	3.765.121.003.868
04.01.01	Pajak Daerah	2.056.962.543.593	2.886.076.753.678	2.680.876.738.815	2.819.818.710.911	2.973.873.326.057
04.01.02	Retribusi Daerah	100.661.199.872	61861114298	132.997.192.076	132.649.655.616	118.090.000.000
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.167.387.998	617649686	58.482.204.636	60.323.495.946	61.327.677.811
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	657.137.593.029	6.561.537.888	517.396.496.390	580.922.182.739	611.830.000.000
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.970.840.235.913	3.152.027.594.557	3.376.554.831.989	3.376.554.831.989	3.511.617.025.269
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.126.906.818.356	2.390.083.789.837	2.672.056.649.000	2.672.056.649.000	2.778.938.914.960
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	843.933.417.557	761.943.804.720,00	704.498.182.989	704.498.182.989	732.678.110.309
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	308.374.669.000	551829301	0	0	0
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	308.374.669.000	551829301	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	6.149.143.629.405	6.818.283.797.728	6.766.307.463.906	6.970.268.877.201	7.276.738.029.137

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang, 2023

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dalam bentuk Program/Kegiatan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Nomenklatur Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

a. Belanja pegawai;

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Banten memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja barang dan jasa;

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja hibah;

Belanja yang bentuk belanjanya berupa uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

d. belanja bantuan sosial;

Belanja yang bentuk belanjanya berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset. Batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Peraturan Gubernur.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja modal meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

- a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bantuan keuangan Kabupaten Tangerang terdiri dari bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Transfer Dana Desa

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2025

Kode	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD 2023	RKPD 2024	Proyeksi 2025
5	BELANJA					
05.01	BELANJA OPERASI	3.859.623.140.812	4.416.755.637.814	4.854.089.003.134	5.138.492.967.613	5.194.021.377.427
05.01.01	Belanja Pegawai	1.848.671.982.738	2.151.189.803.213	2.282.262.153.291	2.452.934.368.863	2.497.023.549.615
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.539.029.767.368	1.943.227.065.240	2.375.605.794.343	2.411.018.090.472	2.500.776.772.312
05.01.05	Belanja Hibah	449.922.940.706	296.040.019.361	188.073.055.500	266.425.920.363	188.073.055.500
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	21.998.450.000	26.298.750.000	8.148.000.000	8.114.587.915	8.148.000.000
05.02	BELANJA MODAL	1.245.790.580.493	1.553.274.496.271	1.446.034.536.983	1.309.492.542.236	1.611.856.517.632
05.02.01	Belanja Modal Tanah	437.105.252.384	342.022.722.332	78.742.896.506	272.129.517.028	78.742.896.506
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.074.680.027	249.740.486.832	206.909.863.321	219.899.034.654	237.401.390.381
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	210.977.934.794	334.646.202.898	591.742.174.099	385.441.762.941	611.742.174.099
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	440.330.930.828	610.918.173.051	565.380.208.793	418.694.148.813	677.964.107.378
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	301.782.460	15.946.911.158	3.259.394.264	706.520.600	6.005.949.268
06.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya				12.621.558.200	
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	59.978.229.445	39.645.157.166	50.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	59.978.229.445	39.645.157.166	50.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	668.319.977.231	699.043.340.179	766.183.923.789	780.043.367.352	730.860.134.078
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	210.492.145.819	246.063.603.379	281.387.393.090	295.246.836.653	309.196.332.605
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	457.827.831.412	452.979.736.800	484.796.530.699	484.796.530.699	504.188.391.926
	Jumlah Belanja	5.833.711.927.981	6.708.718.631.430	7.116.307.463.906	7.258.028.877.201	7.566.738.029.137
	Total Surplus/(Defisit)	315.431.701.424	109.565.166.298	-350.000.000.000	-287.760.000.000	-290.000.000.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang, 2023

Pengelompokan jenis belanja hanya merupakan pendekatan karena penyusunan RKPD 2024 tidak menggunakan Rincian Belanja, sehingga akan terdapat perbedaan struktur belanja bila OPD telah melakukan input rincian dalam dokumen RKA.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang bersumber dari SiLPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 dialokasikan penyertaan modal kepada BUMD LKM Artha Kerta Raharja sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang

Tabel.3.13
 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD 2023	RKPD 2024	Proyeksi 2025
	Total Surplus/(Defisit)	315.431.701.424	109.565.166.298	-350.000.000.000	287.760.000.000	-290.000.000.000
6	PEMBIAYAAN					
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	535.497.284.677	850.908.111.379	350.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	535.497.284.677	850.908.111.379	350.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	535.497.284.677	850.908.111.379	350.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	850.908.111.379	0	12.240.000.000	10.000.000.000
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0	32.199.297.110	0	12.240.000.000	10.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	32.199.297.110	0	12.240.000.000	10.000.000.000
	Pembiayaan Netto	535.497.284.677	818.708.814.269	350.000.000.000	287.760.000.000	290.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	850.929.023.918	928.273.980.567	0	0	0
	TOTAL APBD	5.833.711.927.981	6.708.718.631.430	7.116.307.463.906	7.258.028.877.201	7.566.738.029.137

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang, 2023

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari penyelenggaraan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Dokumen RPD ini merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 yaitu Tahap Usaha Peningkatan Berkelanjutan. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Kabupaten Tangerang, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, adalah “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing didukung Masyarakat Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif;
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2024.
2. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2024.
3. Arah kebijakan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2024.
4. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
5. Hasil evaluasi RKPD tahun 2022 dan Pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
6. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten Tangerang sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten.
7. Identifikasi isu strategis serta penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2024.
8. Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu
9. Rangkaian Penyusunan RPJMD 2025-2030 (Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD dan Naskah Akademik)
10. Rangkaian Penyusunan Perda RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Guna mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten

Tangerang Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020- 2024 serta visi dan misi pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023- 2026.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2024 pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026.

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sementara, sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator
 - (a) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7%
 - (b) tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0-5,7%
 - (c) rasio gini sebesar 0,374-0,377 dan
 - (d) penurunan emisi gas rumah kaca/ GRK sebesar 27,27
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator
 - (a) indeks pembangunan manusia sebesar 73,99-74,02 dan
 - (b) tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5%

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani/NTP sebesar 105-108 dan nilai tukar nelayan/NTN sebesar 107-110.

Tema RKP Tahun 2024 adalah :

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana berikut :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan :
 - a. Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan social.
 - b. Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan social.
 - c. Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan.
 - d. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
 - e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan.
2. Arah kebijakan Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan dilakukan dengan :
 - a. Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan
 - b. Reformasi system perlindungan social.
 - c. Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta.
 - d. Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas.
 - e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
 - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Arah kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilakukan dengan;
 - a. Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok
 - b. Menyediakan iklim yang kondusif dalam Penyusunan Riset Nasional
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha dilakukan dengan;
 - a. Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi
 - b. Meningkatkan nilai tambah dan Daya Saing Ekonomi
 - c. Mewujudkan investasi yang Berkualitas melalui Penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif.
 - d. Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi
 - e. Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi dilakukan dengan;
 - a. Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sector prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industry hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir).
 - b. Konservasi lahan produktif.
 - c. Menguatakan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan.

- d. Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dilakukan dengan;
 - a. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh.
 - b. Meningkatkan pertahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air
 - c. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah.
 - d. Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi.
 - e. Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).
7. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara dilakukan dengan;
 - a. Membangun Gedung pemerintahan dan hunian.
 - b. Membangun infrastruktur utama
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan dengan ;
 - a. Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu /Pemilihan sesuai jadwal
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan.
 - c. Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
 - d. Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
 - d. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP reformasi sistem perlindungan sosial;
 - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
 - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase Sumber Daya Manusia IPTEK (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;

- f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
- g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP reformasi kesehatan nasional; dan
 - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP destinasi pariwisata prioritas; dan
 - MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
 - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan

konservasi energi.

7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optic kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
- MP transformasi digital;
- MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
- MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari penyelenggaraan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dokumen RPD ini merupakan periode keempat dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yaitu tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, adalah "Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa". Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RKPDP Provinsi Banten Tahun 2023, menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: "BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)*	Target Tahun 2024
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan 6,25% (2022) menjadi 5,49% (2024)	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan nilai)	55,00	63,46
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan daerah perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,655	0,675
				Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan persen)	7,73	7,75
			Tingkat Pengangguran Terbuka 8,82% (2022) Menjadi 8,51% (2024)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,00	65,54
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,00 (2022) menjadi 73,55 (2024)	Meningkatnya Pemerataan Akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (satuan : tahun)	9,00	9,20
					Harapan Lama Sekolah (satuan :tahun)	13,50	13,93
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan:tahun)	70,20	70,54
					Prevalensi Stunting pada Balita (satuan persen)	24,00	23,00
				Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	92,79	93,35
				Terbentuknya Karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Indeks pembangunan kebudayaan (satuan : nilai)	53,83	56,23
					Indeks Pembangunan Pemuda dan Olah Raga	49,00	50,17

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)*	Target Tahun 2024
					(satuan : nilai)		
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,00% (2022) menjadi 5,11 -5,25 (2024)	Meningkatnya Iklim Investasi Modal Tetap dan Usaha Bruto (PMTB) ADHB (satuan	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan ; persen)	3,90	4,92
				Meningkatnya Kontribusi industri Sektor Industri dan perdagangan	LPE sektor industri (satuan : persen)	4,95	5,06
					LPE sektor perdagangan (satuan :persen)	2,18	3,04
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan : persen)	4,35	4,48
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan:persen)	0,60	0,80
			Indeks Williamson 0,623-2022 menjadi 0,620 - 2024	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	Tinggi
			Indeks Gini 0,360 (2022) menjadi 0,349- 2024	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan : Ribu Rupiah)	12.1	12,303
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 16,00% (2022) menjadi 18,00% -2024	Menimngkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Hidup Pengelolaan Sumber Daya	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan : nilai)	62,95	63,04
				Meningkatnya Mitigasi, Bencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Resiko Bencana (satuan : nilai)	148,00	145,31
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi 65- 2022 menjadi 71 -2024	Meningkatnya Penyelenggaraa n Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan : nilai)	66,37	73,16
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan : nilai)	80,00	84,30

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)*	Target Tahun 2024
					Indeks Persepsi Anti Korupsi (satuan : nilai)	3-Feb	3-Feb
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan : nilai)	3,46	3,49
				Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2024 dan tema RKP Tahun 2024, adalah :

“Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi”

Permasalahan-permasalahan pembangunan merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan- permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
2. Ekonomi di Banten Selatan masih tertinggal dan Pengembangan sektor prospektif di Banten Utara belum maksimal;
3. Tingginya risiko bencana alam, dan perubahan iklim, serta belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi belum optimal; dan
5. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan PEMILU.

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah Tahun 2024 adalah:

1. Daya saing sumber daya manusia yang kompetitif;
2. Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit;
3. Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, berkelanjutan; dan
4. Reformasi birokrasi dan Demokrasi yang harmonis.

Hierarki prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatankualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidupp untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU.

Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,11%-5,25%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,51%
3. Tingkat kemiskinan sebesar 5,49%
4. Rasio Gini sebesar 0,349
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,55

4.1.3. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 serta memperhatikan RPJPMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Banten 2023-2024, Pemerintah Kabupaten Tangerang merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026.

Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025 dan berdasarkan pada analisis arah kebijakan RPJPD tahap IV serta memperhatikan isu strategis Kabupaten Tangerang, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perumusan Tujuan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026

Misi RPJPD	Tujuan RPD
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia dan Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional (Misi 1 dan Misi 3)	1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
	2 Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong
Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal dan Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional (Misi 2 dan Misi 3)	3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan	4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik
Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.	5 Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan tahun Pertama dari RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023- 2026. dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil dengan target indikator seperti yang disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,55
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,69
		Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,78
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	52
		Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	62,67
		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,3
2	Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan, Toleransi, dan Gotong Royong		Indeks Kesalehan Sosial	74
		Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif, Aman, dan Tertib	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	2,14
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,11-5,25
			Tingkat Pengangguran Terbuka	7,51
			Persentase Penduduk Miskin	5,94
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, dan Perikanan	3.08
			Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	5,12

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
			Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	22,73
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3,41
		Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7307
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,50
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,85
		Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berdaya	1,44%
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	73
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP	76
			Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	0,520
			Opini BPK	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	71
			Maturitas SPIP Terintegrasi	3
			Indeks SPBE	3,17
			Indeks Pelayanan Publik	4,2
5	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	70
		Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	32%
			Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	37%
			Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	0,9439

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
			Rasio Konektivitas Kabupaten	0.76
		Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,25
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	120

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011- 2031 yang untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan Industri, permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

Arah pembangunan wilayah yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 di Provinsi Banten dengan lokus di Kabupaten Tangerang yaitu :

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - Peningkatan kualitas wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur), termasuk wilayah Tangerang Raya di Provinsi Banten.
2. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - Pembangunan Desa Terpadu. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
 - Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di Provinsi Banten;
 - Peningkatan pelayanan pertanahan;
 - Penyelenggaraan penataan ruang

Untuk Proyek Strategis Provinsi tahun 2024 pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 di Kabupaten Tangerang :

1. Peningkatan Kapasitas Jalan; - Peningkatan status jalan ruas jalan eks kabupaten/kota (60 km); - Rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan.
2. Rehabilitasi daerah irigasi pada 20 daerah irigasi (kewenangan provinsi);
3. Pembangunan USB, RKB dan bangunan pendukung SMA, SMK dan SKh

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Tangerang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Banten dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 maupun RKPD Provinsi Banten Tahun 2024.

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan inersejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- g). Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1). Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2). Peningkatan pasokan bahan bakar nabati
 - 3). Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;

- 4). Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
- 5). Pengembangan industri pendukung EBT.
- h). Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1). Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2). Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3). Penyediaan air untuk pertanian;
 - 4). Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5). Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6). Pengembangan waduk multiguna.
- i). Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1). Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2). Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3). Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4). Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5). Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- j). Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1). Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2). Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3). Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4). Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5). Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- k). Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1). Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2). Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3). Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4). Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- e). Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1). Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir
 - 2). Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3). Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4). Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha

- 5). Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
- 6). Pengembangan industri halal.
- f). Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1). Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
 - 2). Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3). Pengelolaan Impor;
 - 4). Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
 - 5). Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
 - 6). Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
 - 7). Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- g). Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1). Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
 - 2). Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
 - 3). Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
 - 4). Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
 - 5). Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
 - 2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - 3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
 - 4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) Kesejahteraan Sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
 - 4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
 - 5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
 - 2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
 - 3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 - 5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1). Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - 2). Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 3). Kualitas Pemuda.
- f). Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
 - 3) Reforma Agraria; dan
 - 4) Perhutanan Sosial.
- g). Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
 - 2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
 - 3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
 - 4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1). Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2). Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3). Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4). Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5). Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6). Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1). Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2). Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 - 3). Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 - 4). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
 - 5). Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Peningkatan Budaya Literasi;
- 2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra
- 3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
- 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuat infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 - 2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - 3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - 4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - 5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
 - 6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1). Konektivitas Jalan;
 - 2). Konektivitas Kereta Api;
 - 3). Konektivitas Laut;
 - 4). Konektivitas Udara; dan
 - 5). Konektivitas Darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Transportasi Perkotaan; dan
 - 2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - 3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
 - 2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
 - 3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
 - c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
 - 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
 - 3) Pengembangan Industri Hijau.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 - 2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
 - 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
 - 2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 - 2) Transformasi pelayanan publik;
 - 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1). Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 - 2). Penguatan Keamanan Laut; dan
 - 3). Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Gambar 4.1

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2024



3

4.2.2. Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024

Permasalahan-permasalahan pembangunan merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masih Relatif Rendah
2. Masih Rendahnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja
3. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi dan Tantangan Pemulihan Ekonomi Daerah
5. Tantangan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan dan Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar
6. Meningkatnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Serta Potensi Bencana

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu- isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah Tahun 2024 adalah:

1. Daya Saing sumber daya manusia yang kompetitif
2. Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit;
3. Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup berkelanjutan; dan
4. Reformasi birokrasi dan demokrasi yang harmonis.

Berdasarkan isu-isu strategis daerah tersebut, dirumuskan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024. Hierarki prioritas pembangunan daerah tahun 2024 berdasarkan hasil analisis adalah:

1. Meningkatkan daya saing SDM yang kompetitif;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Meningkatkan Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi; dan
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten Tangerang adalah :

1. Proyek strategis nasional Tanggul Pantai di Kabupaten Tangerang
2. Pembangunan jalan tol baru di Tangerang
3. Penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Tangerang (Jabodetabek-punjur)
4. Pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta,

Adapun rencana Struktur Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, sebagai berikut :

1. PKN : Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur: Kawasan Perkotaan Kab. Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Selatan; Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Kab. Serang; dan Kawasan Perkotaan Cilegon
2. Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Daerah meliputi: Tangerang – Merak; Cilegon – Bojonegara; Serang – Panimbang; Semanan – Rajeg – Balaraja; dan Kamal – Teluk Naga – Rajeg;

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pada Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali di Provinsi Banten sesuai lokus di wilayah Kabupaten Tangerang yaitu :

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan : 5 (lima) Wilayah Metropolitan WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar
2. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi : Peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri, termasuk desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang;
3. Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 3 :
 - Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
 - Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
 - Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 5 :
 - Transformasi Digital
 - Pemulihan 4 DAS Kritis (wilayah Banten di DAS Cisadane)
 - 18 Waduk Multiguna (antara lain Modernisasi DI Cisadane)
 - Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
 - Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
 - Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90%) Rumah Tangga)
 - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Pada pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

- Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)
- Stabilisasi Inflasi Melalui Ketahanan Pangan Daerah
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- Penanganan Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi
- Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan pada RKPD Provinsi Banten di tahun 2024, maka penanganan di wilayah Kabupaten Tangerang difokuskan pada:

1. Infrastruktur jalan dan jembatan
 - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Sosial
2. Sosial
 - Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
3. Sarana Prasarana Umum
 - Penyediaan PSU
 - Dukungan Jalan Mantap yang berkeselamatan pada ruas jalan Provinsi meliputi Marka Jalan, ZoSS, PJU, rambu, trafficlight dan sebagainya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Tangerang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 4.4
Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Tangerang

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
Misi 1	Peningkatan pemahaman, • penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi • kelembagaan keagamaan dan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat • Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan • Pembinaan tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dan pemanfaatan modal sosial
	Peningkatan akses terhadap pelayanan yang bermutu dan terjangkau <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan ruang kelas untuk peserta didik • Sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin 	<p>terhadap pentingnya Pendidikan PAUD bagi pengembangan potensi anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan • Meningkatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik
	<p>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha <p>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin <p>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat <p>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinu dengan penekanan promotif dan preventif • Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil • Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik • Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisectoral, guna pencegahan dan pengendalian penyakit • Penguatan pelayanan Kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP Pemerintah dan FKTP Swasta • Pengembangan tenaga Kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan Kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas • Meningkatkan cakupan penerima bantuan bagi PPKS • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS • Meningkatkan pemutakhiran data penerima bantuan

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	<p>layanan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberdayaan melalui KUBE dan UEP bagi PPKS
	<p>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan <p>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain <p>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan pemagangan • Peningkatan akses dan kemudahan pelayanan informasi lowongan kerja bagi pencari kerja melalui sistem informasi berbasis web • Peningkatan perlindungan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha <p>Peningkatan keterampilan tenagakerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan pemagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komitmen Pemda, masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender dan dalam pemenuhan hak-hak anak • Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengeliminasi tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan jejaring kerjasama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Peningkatan kebijakan

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
		<p>menuju Kabupaten Layak Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan • Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Desa dan Perangkat Desa • Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi pembinaan SDM masyarakat desa • Meningkatkan penguatan fasilitasi pengembangan produk unggulan di desa • Meningkatkan penguatan fasilitasi pengembangan produk unggulan di desa • Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi kualitas lingkungan desa • Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes
	<p>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan pengendalian kependudukan • Mengoptimalkan penyediaan data kependudukan berbasis NIK • Melakukan pemetaan data kependudukan • Peningkatan kapasitas dan pendayagunaan PKB, PLKB dan Kader dalam penyuluhan dan pembinaan KB • Menyusun dasar hukum kebijakan GDPK untuk pengendalian penduduk • Meningkatkan kapasitas SDM dalam menemu kenali dampak kependudukan • Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pembangunan kependudukan • Meningkatkan sikap ego program/sektoral dalam pelaksanaan pembinaan ber-KB

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan data dan pemetaan sasaran dalam melakukan advokasi • Mengoptimalkan pendayagunaan mitra kerja dalam pelayanan KB • Menyediakan data dan pemetaan sasaran kelompok pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera • Meningkatkan strategi, desain program dan inovasi advokasi dan KIE dalam pelaksanaan pembinaan • Menyediakan data sasaran untuk perencanaan sarpras dan dukungan operasional dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3 • Mengoptimalkan pendayagunaan organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan • Menyediakan pusat informasi dan konseling ketahanan keluarga
	<p>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</p> <p>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan perekaman penduduk wajib KTP-el, KIA, aktivasi identitas Kependudukan Digital, cakupan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian • Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil yang membahagiakan melalui inovasi • Pemanfaatan data kependudukan • Dibentuknya program pembinaan pemuda dalam hal pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan organisasi kepemudaan, program kewirausahaan pemuda, program pembudayaan olahraga sejak dini, program pemusatan Latihan pada sentra olahraga, program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan OPK,

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
		<p>program promosi dan festival seni budaya, program pembangunan gedung pertunjukan kesenian</p> <p>kebudayaan program perencanaan kawasan strategis pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibentuknya rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif
Misi 2	<p>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan <p>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha <p>Promosi investasi</p> <p>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibentuknya program pembinaan pemuda dalam hal pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan organisasi kepemudaan, program kewirausahaan pemuda, program pembudayaan olahraga sejak dini, program pemusatan Latihan pada sentra olahraga, program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan OPK, program promosi dan festival seni budaya, program pembangunan gedung pertunjukan kesenian, kebudayaan, program perencanaan kawasan strategis pariwisata • Perbaikan iklim penanaman modal sebagai pelayanan yang mudah bagi investor • Menerapkan OSS dan SIPINTER dalam pelayanan sistem online perizinan berusaha dan non perizinan • Pembentukan koordinator wilayah pelayanan dana bergulir • Pembentukan jaringan kerjasama, pemasaran dan informasi produk koperasi • Peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola koperasi • Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan intensitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi • Penguatan manajemen usaha koperasi melalui pengembangan dan

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
		restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi
	<p>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan <p>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan <p>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarpras penangkapan ikan, produk hasil perikanan, pengolahan produk hasil perikanan dan perikanan budidaya serta pendidikan pelatihan dan bimtek penangkapan ikan bagi kelompok nelayan • Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura serta BPP • Melaksanakan penyediaan bibit ternak ruminansia dan unggas • Menyediakan obat-obatan hewan yang bermutu serta sarana kesehatan hewan yang berkualitas • Peningkatan sistem pengawasan terhadap kelompok usaha perikanan • Peningkatan pelayanan TPI dalam permodalan, meningkatkan kebersihan TPI melalui Gerakan Jumat Bersih, mendorong seluruh nelayan melelangkan hasil tangkapannya ke TPI melalui sosialisasi & penertiban • Peningkatan sistem pengawasan terhadap kelompok usaha perikanan • Meningkatkan pendampingan kepada para petani dalam melaksanakan GAP • Melaksanakan bimbingan teknis pengolahan pakan ternak dengan pemanfaatan sumber bahan baku • Mengembangkan kelompok tani ternak yang handal dalam melakukan manajemen usaha <p>Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan</p>

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	<p>lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar 	
	<p>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar <p>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata <p>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan <p>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan 	<p>Peningkatan akses pembiayaan, kemitraan dan promosi dengan pelaku usaha kecil dan menengah serta kualitas produk usaha mikro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promosi dan publikasi sosial media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri • Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan • Mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan • Meningkatkan koordinasi dan kerja sama pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah • Mengembangkan dan memperkuat keterampilan

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan 	<p>masyarakat dalam hal menyediakan makanan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan • Peningkatan capaian skor PPH dengan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal • Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi • Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan • Meningkatkan ketersediaan benih unggul melalui pembinaan kepada para penangkar benih • Meningkatkan ketersediaan alat mesin pertanian pra-panen • Meningkatkan sistem agribisnis on-farm dilokasi pusat kawasan agropolitan
	<p>Peningkatan pelayanan kepelabuhan bertaraf nasional dan internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan peningkatan pelabuhan - Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhan <p>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas • Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera <p>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan, alat berat, dokumen pengelolaan SDA, dokumen perencanaan teknis drainase dan fisik konstruksi • Memperbarui SK Jalan Kabupaten • Pemeliharaan drainase jalan kabupaten • Pembangunan sarpras transportasi • Beroperasinya moda transportasi angkutan • Melakukan pengawasan pengendalian lalu lintas

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan 	
	<p>Peningkatan pelayanan bandar udara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bandar udara yang ada • Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan <p>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) • Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi <p>Pengelolaan pengendalian banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase <p>Peningkatan pelayanan air bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih <p>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</p> <p>Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional <p>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan <p>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan <p>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu • Fasilitasi usaha pengembangan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan, alat berat, dokumen pengelolaan SDA, dokumen perencanaan teknis drainase dan fisik konstruksi • Pemeliharaan drainase jalan kabupaten • Menyediakan sarana air bersih bagi masyarakat • Melakukan pelayanan pendistribusian air bersih secara maksimal • Menyediakan sarana sanitasi bagi masyarakat miskin • Melakukan pelayanan penyedotan air limbah domestik baik niaga maupun non niaga secara maksimal • Melakukan peningkatan jalan lingkungan, sanitasi dan drainase lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penataan pada PSU perumahan • Melakukan pembangunan sarpras pemukiman

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
Misi 3	<p>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman • Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh <p>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu serasian rencana tata ruang wilayah • Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang <p>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II • Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I • Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III <p>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya • Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup • Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 	<p>Menyediakan sarana sanitasi bagi masyarakat miskin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan SIG sebagai database permohonan perizinan dan non perizinan • Membangun kawasan prioritas yang perlu ditetapkan RDTR secara berkesinambungan • Optimalisasi sosialisasi penataan ruang secara langsung maupun tidak langsung • Meningkatkan ketegasan dalam tindakan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Mengoptimalkan koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang • Pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang tepat peruntukannya <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup • Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan • Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan • Meningkatkan luas RTH • Meningkatkan sarpras dan pengelolaan dan penanganan persampahan • Terkelolanya pengolahan sampah melalui teknologi ramah lingkungan
	Mitigasi dan penanggulangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
Misi 4	<p>bencana alam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam • Fasilitasi penanggulangan bencana alam <p>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur <p>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	<p>kegiatan komunikasi informasi dan edukasi bagi masyarakat di daerah rawan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan penyelamatan evaluasi mandiri • Peningkatan cakupan layanan pemadam kebakaran melalui penambahan pos damkar di wilayah manajemen kebakaran, peningkatan kapasitas aparatur damkar, dan peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan damkar • Peningkatan peran relawan pemadam kebakaran dari tingkat kabupaten sampai <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan profesionalisme aparatur • Peningkatan pengembangan karir aparatur melalui talent pool dan rencana suksesi • Peningkatan pelayanan kepegawaian sesuai standar pelayanan • Peningkatan terhadap bobot dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi • Peningkatan penyelenggaraan BIMTEK dan Diklat bagi perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan • Optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan • Peningkatan integrasi data perencanaan pembangunan • Membangun sistem perencanaan pembangunan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder • Peningkatan pemahaman PD terkait konsep anggaran berbasis kinerja • Pemanfaatan hasil kajian

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
		<p>sebagai dasar dalam implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan</p>
	<p>Peningkatan kerjasama pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab/kota dan instansi vertikal <p>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah <p>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah <p>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah <p>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kebijakan internal, strategi dan perencanaan tata kelola pemerintah berbasis elektronik • Meningkatkan penyelenggaraan informasi publik oleh Badan Publik melalui Forum PPID • Meningkatkan sarpras persandian • Meningkatkan penyediaan data sektoral <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penatausahaan keuangan • Peningkatan manajemen aset daerah melalui aplikasi yang handal dan terintegrasi • Inventarisasi bidang tanah milik Pemda • Pengoptimalan pengelolaan aset daerah • Peningkatan jaminan pengamanan aset daerah • Peningkatan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah

Misi RPJPD PROVINSI BANTEN	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	<p>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah, Penegakan supremasi hukum <p>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik <p>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat • Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan • Pembinaan tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dan pemanfaatan modal sosial

Sumber : RKPD Provinsi Banten Tahun 2024

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

RKPD Kabupaten Tangerang disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Banten. Penyusunan RKPD mempedomani RKP 2024 dan RKPD Provinsi Banten 2024, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi dengan prioritas pembangunan Daerah.

Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2024 dan tema RKP dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, adalah :

“Pemantapan SDM yang Berdaya Saing dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”

Tema tersebut merupakan upaya untuk menjawab isu strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. SDM yang kompetitif dan berdaya saing
2. Perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan
3. Infrastruktur yang merata dan berkualitas
4. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Dalam pelaksanaannya disusun Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024, yang terdiri dari:

1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
2. Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu
4. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan

Prioritas pembangunan masing-masing terbagi ke dalam focus pembangunan yang terdiri atas:

1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat fokus pada :

- a. Pemberdayaan Ekonomi

- Peningkatan Kompetensi SDM Pencari kerja
- Optimalisasi akses ketenagakerjaan
- Optimalisasi kelembagaan Perekonomian (Koperasi, UPDB, UMKM, BUMDES, BLUD)
- Optimalisasi akses pusat perdagangan
- Optimalisasi pengembangan obyek wisata
- Peningkatan pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif
- Optimalisasi fasilitasi Usaha Mikro
- Optimalisasi digitalisasi sektor ekonomi
- Peningkatan digitalisasi (e-commerce)
- Penguatan akses permodalan dan pemasaran sektor Usaha Mikro dan industri kecil menengah (IKM)
- Peningkatan jumlah wirausaha baru (WUB)
- Peningkatan kapasitas BLK
- Peningkatan kemudahan pelayanan perijinan usahabagi sektor UMKM/IKM, dan Wira Usaha Baru
- Peningkatan omset IKM/Usaha Mikro
- Optimalisasi Gerai Tangerang Gemilang (GTG)
- Pengembangan obyek destinasi wisata Kabupaten Tangerang
- Optimalisasi Kampung Tematik

- b. Penguatan Ketahanan Pangan

- Optimalisasi pelayanan kesehatan hewan
- Optimalisasi produktivitas pertanian
- Optimalisasi produktivitas Perikanan
- Optimalisasi katahanan pangan
- Peningkatan akses distribusi dan produksi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan
- Peningkatan operasionalisasi Pusat Kawasan Agropolitan
- Peningkatan kapasitas Balai Benih (Perikanan, Pertanian, Peternakan)
- Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam program ketahanan pangan
- Inovasi dan rekayasa teknologi pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan
- Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari
- Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- Optimalisasi Komisi Irigasi
- Optimalisasi Aksi Pangan dan Gizi

2. Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing, fokus pada:

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, ibu dan anak.
- Penanganan dan penurunan prevalensi *stunting*.
- Optimalisasi Sarana Prasarana dan SDM di Puskesmas dan

RSUD

- Pemenuhan Sarpras dan SDM Rumah Sakit Umum Daerah Tigaraksa
 - Percepatan eliminasi TB dan HIV
 - Pemenuhan Jaminan Kesehatan MBR dengan data terintegrasi.
 - Peningkatan UHC
 - Penurunan Kasus PTM
- b. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
- Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - Penurunan Rasio murid per kelas
 - Perbaikan kondisi ruang kelas yang rusak sedang-berat
 - Peningkatan kelengkapan sarana pendukung sekolah berupa laboratorium, perpustakaan, kantin dll
 - Optimalisasi angka melanjutkan sekolah dan rata-rata lama sekolah
 - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
 - Penyediaan beasiswa bagi siswa MBR berprestasi
 - Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik
 - Peningkatan budaya membaca dan literasi terpadu.
- c. Peningkatan perlindungan sosial, perempuan dan anak serta kepemudaan
- Peningkatan perlindungan perempuan, anak, difable, dan kaum marginal.
 - Optimalisasi pemberdayaan perempuan
 - Penurunan kemiskinan ekstrem
 - Optimalisasi keluarga berkualitas
 - Optimalisasi pemberdayaan pemuda
 - Optimalisasi Cakupan pelayanan sosial belum optimal
 - Optimalisasi pengembangan kebudayaan
 - Peningkatan pengarusutamaan gender
- d. Peningkatan Nilai-nilai Religius
- Pemberian insentif guru ngaji
 - Pengembangan diri siswa Baca Tulis Quran
 - Pembangunan sarana sanitasi pada Pondok Pesantren
 - Peningkatan pembangunan sectorekonomi di Pondok Pesantren
 - Peningkatan ketentraman dan ketertiban
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu, focus pada :
- a. Infrastruktur
- Peningkatan sarana dan prasarana tempat pendidikan dan pelatihan pencari kerja
 - Optimalisasi aksesibilitas destinasi wisata
 - Pemerataan kualitas Akses Jalan menuju Sentra2 Perikanan, Pertanian dan Indrustri Kecil Menengah
 - Optimalisasi sarana pendukung sektor pertanian
 - Optimalisasi pengembangan kawasan pesisir
 - Pemeliharaan dan pembangunan jalan
 - Pengendalian kemacetan
- b. Pengendalian Sumber Daya Air
- Penanggulangan banjir
 - Peningkatan kapasitas air baku dan sumber daya air yang menunjang sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan

- c. Penanganan Kawasan Kumuh
 - Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
 - Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan kumuh
 - d. Peningkatan sanitasi
 - Peningkatan persentase Desa/Kelurahan Bebas ODF
 - Pemerataan sarana Sanitasi Masyarakat
 - e. Pengelolaan Persampahan
 - Revitalisasi TPA Jatiwaring
 - Optimalisasi Tata Kelola Persampahan
 - TPS3R dan Bank Sampah
 - Biokonversi Maggot
 - f. Konservasi Lingkungan Hidup
 - Optimalisasi kualitas lingkungan hidup
 - Optimalisasi mitigasi bencana
 - Konservasi Keanekaragaman Hayati
 - Optimalisasi pemetaan potensi bencana
4. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan, focus pada :
- a. Peningkatan SDM Aparatur
 - Peningkatan Manajemen dan profesionalitas ASN
 - Peningkatan kapasitas aparat Perencanaan
 - Optimalisasi Penataan Kelembagaan Organisasi dan *Merit System*
 - Peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa
 - Optimalisasi pencegahan korupsi
 - Fasilitasi Pemilu dan Pilkada
 - b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Optimalisasi integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - Peningkatan kualitas Pengelolaan asset
 - Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan publik
 - Maksimalisasi penerapan Sakip
 - Maksimalisasi pengelolaan keuangan daerah
 - Optimalisasi pendapatan daerah
 - Peningkatan pelayanan kependudukan dengan SIAK terintegrasi
 - Implementasi Roadmap *Smart City* dan Tangerang Satu Data
 - Implementasi Design *Smart City*
 - Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - c. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
 - Penyediaan bantuan hibah KPU
 - Penyediaan bantuan hibah Bawaslu
 - Optimalisasi pengamanan Pemilu dan Pilkada
 - Optimalisasi koordinasi unsur Forkopimda dan Kecamatan

Dalam mendukung arah kebijakan daerah, maka perencanaan perwilayahan agar dapat mengakomodir hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Perencanaan Kelurahan :
 - a. Sarana dan prasarana Posyandu di Kelurahan berupa honor kader, gedung, sarana dan prasarana posyandu;
 - b. Operasional Pokja FKTS berupa perlengkapan administrasi, koordinasi dan pembinaan lapangan;
 - c. Kelurahan Bebas ODF dengan penyediaan sarana

- d. prasarana sanitasi, penyediaan jamban berseptik tank;
 - d. Validasi data sanitasi;
 - e. Penataan Ruang Bermain Ramah Anak dan Pojok Baca;
 - f. Pencegahan dan penurunan Stunting berupa Honor kader Pembangunan Manusia (KPM) Stunting, PMT balita Stunting, rebus stunting;
 - g. Verifikasi dan Validasi DTKS berupa Honor petugas pendataan dan operator, penggandaan format pendataan, FKP/ Muskel Penetapan Usulan Perbaikan DTKS;
 - h. Kelurahan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana
 - i. Pengembangan Produk Unggulan Kelurahan, pojok UM di Kelurahan dan Pembinaan UM
 - j. Pengembangan Kampung Tematik
 - k. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
 - l. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
2. Kebijakan Perencanaan Kecamatan
- a. Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan lapangan
 - b. Penataan Ruang Bermain Ramah Anak dan Pojok Baca
 - c. Pencegahan dan penurunan Stunting: PMT balita Stunting, rebus stunting,
 - d. Verifikasi dan Validasi DTKS berupa Pelatihan petugas pendataan, Rapat Penyepakatan DTKS
 - e. Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana
 - f. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UM di Kecamatan dan Pembinaan UM
 - g. Pengembangan Inovasi Kecamatan
 - h. Pengembangan Kampung Tematik
 - i. Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah dan Bio Konversi.
 - j. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
 - k. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
 - l. Pemeliharaan Stadion mini dan Gedung Bersama Keagamaan

Dalam rangka mengakomodir isu-isu strategis actual maka arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 dan fasilitasi kebutuhan pasca Pemilu dan Pilkada pada tahun 2025
- b. Tahun 2024 sebagai tahun awal pelaksanaan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dengan target dan indikator yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024 juga harus disiapkan tahapan penyusunan Rancangan akhir RPJPD 2025-2045 sampai Perda RPJPD serta penyusunan evaluasi dan teknokratik RPJMD 2025-2030.
- c. Percepatan penurunan prevalensi stunting yang harus ditangani mulai dari hulu sampai hilir
- d. Percepatan Penanganan lokasi yang teridentifikasi wilayah dengan kemiskinan ekstrem

Tabel 4.5
Interkoneksi Prioritas Daerah, Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PROGRAM PRIORITAS
1	PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Prioritas 2. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Sasaran 2.1.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, dan Perikanan Persentase Realisasi Investasi (PMA/PMDN) Persentase daya saing produk unggulan local Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen Persen Persen Persen	3,08 5,12 22,73 3,41	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PROGRAM PRIORITAS
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Program Pengembangan Ekspor

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PROGRAM PRIORITAS
								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				Sasaran 2.2. Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7307	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM PENATAAN DESA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
				Sasaran 2.3. Meningkatnya PPKS yang berdaya	Persentase PPKS yang berdaya	Persen	1,44	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PROGRAM PRIORITAS
								TINDAK KEKERASAN
2	PN-2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Prioritas 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Sasaran 2.1. Meningkatkan Daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Nilai	67,45	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
3	PN-3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Prioritas 1. Meningkatkan SDM yang berdaya saing	Sasaran 2.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,69	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pembinaan Perpustakaan
				Sasaran 2.1.2. Meningkatkan kualitas kesehatan	Indeks kesehatan	Indeks	0,78	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PROGRAM PRIORITAS
				Sasaran 2.1.4.Meningkat Partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	62,67	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak
				Sasaran 2.1.4.Meningkatkan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk	Angka	1,3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Sasaran 2.1.5 Mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	2,14	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PROGRAM PRIORITAS
4	PN-4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Prioritas 1. Meningkatkan SDM yang berdaya saing	Sasaran 2.1.3.Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan pemuda	Indeks	52	<p>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</p> <p>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN</p>
5	PN-5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Prioritas 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Sasaran 2.3. Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	77,5	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</p> <p>PROGRAM PENANGANAN</p>

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PROGRAM PRIORITAS
								KERAWANAN PANGAN
6	PN-6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Prioritas 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;	Prioritas 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Sasaran 3.1.1.Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur	Indeks kepuasan layanan Infrastruktur	Indeks	70	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
					Persentase realisasi pola pemanfaatan ruang sesuai RT/RW	Persen	37	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
					Rasio Luas Kawasan permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	Point	0,9439	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
					Rasio konektivitas kabupaten	Point	0,79	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Program Penataan Bangunan Gedung PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PROGRAM PRIORITAS
				Sasaran 3.1.2.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan Tangguh terhadap bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	56,25	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Program Penatagunaan Tanah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan Tangguh terhadap bencana	Indeks Resiko bencana (IRBI)	Indeks	120	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PROGRAM PRIORITAS
7	PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4 Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi; dan Prioritas 5 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU	Prioritas 4. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 4.1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP	Indeks	76	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Program Pengelolaan Persampahan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan
					Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	0,520	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
					Opini BPK	Predikat	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
					Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan SDM
					Maturitas SPIP Terintegrasi	Lecvel	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
					Indeks SPBE	Indeks	3,17	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PROGRAM PRIORITAS
					Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Program Pengelolaan Arsip Program Perizinan Penggunaan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.2.4 Arah Kebijakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Arah kebijakan peningkatan ekonomi dititikberatkan kepada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia kepada sektor wirausaha baru dan usaha mikro kecil hal ini berkenaan tema yang diusung pada RKPD tahun 2024. Adapun peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan dengan memberdayakan usaha mikro karena usaha mikro merupakan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan dapat berdaya saing.

Optimalisasi pemasaran produk tersebut kepada suatu tempat Gerai Tangerang Gemilang (GTG) di Desa Bojong Kecamatan Cikupa, salah satu kegiatan di Gerai Tangerang Gemilang yang difokuskan antara lain pada peningkatan digitalisasi pemasaran (*e-commerce*) baik Usaha Mikro dan juga Industri Kecil dengan pembuatan QLang (Kios Gemilang) yang terintegrasi dengan aplikasi terpadu Kabupaten Tangerang, selain itu aplikasi Bintang

Gemilang yang dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan bekerjasama dengan akademisi diharapkan dapat menyerap produk lokal dan dapat berdaya saing di pemasaran *online*. Dari beberapa kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah gemilang dari program unggulan Bupati Tangerang Proaktif tersebut dalam pemasaran Usaha Mikro dan Industri Kecil ke berbagai segmen masyarakat terlebih *e-Commerce*.

Prioritas selanjutnya adalah pengembangan lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja (LKM AKR) dan pengembangan Koperasi yang berafiliasi di Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB), Lembaga ini merupakan contoh dalam hal penguatan akses permodalan dan pemasaran sektor usaha mikro dan industri kecil menengah di Kabupaten Tangerang, tujuan dari penguatan ini adalah membantu lembaga Usaha Mikro dan Industri Kecil untuk dapat *Move On*. Secara output Sektor lembaga permodalan tersebut dikhususkan untuk pengembangan usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tangerang, adapun secara outcome (dampak) diharapkan dapat meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang secara teknis dalam kegiatan prioritas ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang. Prioritas Peningkatan Ekonomi lainnya adalah dengan meningkatkan pelayanan dan kapasitas pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) di Jayanti oleh Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) dalam menangani permasalahan pengangguran, sebagai informasi data pada tahun 2022 bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang sebesar 7,88 persen dibawah dari Propinsi Banten sebesar 8,09 persen yang berarti bahwa peran BLK telah mampu mendongkrak peningkatan peluang pekerjaan di Kabupaten Tangerang. Langkah-langkah lain di tahun 2024 yang akan dilaksanakan antara lain dengan memperbanyak pengembangan kelas pemberdayaan masyarakat, kelas pelatihan serta penambahan kelas baru sesuai dengan pemenuhan permintaan perusahaan di Kabupaten Tangerang, sebagai gambaran informasi bahwa pada tahun 2023 ini Disnaker membuka kelas keterampilan operator forklift sebagai bentuk penambahan kapasitas keterampilan di Dinas Tenaga Kerja, kedepannya Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menambah kembali BLK-BLK lain dengan berbagai jurusan tambahan antara lain perhotelan, Keterampilan Air Conditioner (AC) dan sebagainya. Upaya ini diperuntukan sebagai komitmen dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam program prioritas pemenuhan peluang pekerjaan di Daerah Urbanisasi seperti Kabupaten Tangerang ini. Upaya program prioritas lainnya dari perekonomian adalah kemudahan pelayanan perizinan usaha bagi sektor UMKM dan wirausaha baru oleh DPMPSTP. Sebagaimana Permendagri Nomor 59 tahun 2021 bahwa kemudahan dalam pelayanan/ standar pelayanan minimal (SPM) menitik beratkan kepada pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan, dalam hal iklim investasi pun pelayanan dasar perizinan mesti diwujudkan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mesti didapatkan oleh masyarakat Kabupaten dari sisi kemudahan perizinan dan penanaman Modal. Dalam hal ini prioritas utama dalam peningkatan perekonomian pasca pandemic Covid19 antara lain dengan memudahkan perizinan.

Prioritas pembangunan sektor ekonomi perlu diwujudkan melalui pengembangan pendekatan ekonomi kawasan seperti pengembangan Objek Destinasi Tujuan Wisata (ODTW) Kabupaten Tangerang salah satunya Ketapang Urban Aquaculture (KUA) di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. KUA merupakan contoh role model penataan kawasan ekonomi yang berintegrasi dengan penataan lingkungan, konsep Resirculating Aquaculture System (RAS) sebagai teknik budidaya ikan secara pemanfaatan air agar tidak boros, RAS ini

selanjutnya diintegrasikan dengan penataan lingkungan konservasi Mangrove dengan konsep WanaMina (Wana;Hutan dan Mina;Ikan) sehingga diharapkan pada jangka panjang Masyarakat Kab Tangerang dapat membudidayakan ikan secara ramah lingkungan dengan mendapatkan sarana wisata dengan memanfaatkan hutan mangrove yang rimbun. Diharapkan dari suatu kawasan yang terintegrasi tersebut didapatkan peningkatan perekonomian, pariwisata serta edukasi masyarakat dapat terwujud. Kawasan KUA tersebut dibangun dengan upaya kolaborasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan beberapa stakeholders yang sama-sama ingin mewujudkan penanganan dan pengelolaan kawasan pesisir secara terintegrasi, Hal ini untuk mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat dengan pendekatan ekonomi kawasan. Selain KUA (Ketapang Urban Aquaculture) Kabupaten Tangerang memiliki Kampung Tematik, Kampung tematik yaitu suatu kampung layak huni yang memiliki potensi berdasarkan inovasi dan kreasi dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Kampung Tematik di Kabupaten Tangerang sangat bervariasi tema dan ciri khasnya, ada yang memiliki tema lingkungan, pendidikan, kesehatan bahkan bertepatan Wisata. Diharapkan dari sektor kawasan kampung tematik tersebut dapat memberikan dampak ekonomi kepada kawasan-kawasan kampung yang memiliki potensi di daerahnya sehingga pemulihan dampak ekonomi (PDE) pasca Covid19 di Kabupaten Tangerang dapat pulih dan meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Tangerang.

Prioritas peningkatan ekonomi lainnya adalah yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) diharapkan dapat diperkuat dengan peningkatan akses distribusi jalan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan bahkan perikanan, dan terutama adalah operasionalisasi Pusat Kawasan Agropolitan (PKA)/ PUSAGRO di desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kawasan ini diharapkan dapat membuka peluang pasar baru di Kabupaten Tangerang dengan peningkatan nilai (Value added) dari produksi hasil pertanian berupa hortikultura dan buah-buahan, PUSAGRO ini juga diharapkan dapat menjadi sentra pelatihan bagi masyarakat sebagai sentra edukasi sektor pertanian dengan menumbuhkembangkan edukasi penanaman dan pelatihan bagi masyarakat secara inklusif. PUSAGRO diupayakan bukan hanya pelayanan edukasi/ pelatihan bagi masyarakat saja akan tetapi juga meningkatkan produksi pertanian sebagai upaya dalam ketahanan pangan Kabupaten Tangerang. Komitmen lain dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dengan meningkatkan kapasitas balai benih (pertanian, peternakan dan perkebunan) yang selanjutnya diharapkan dapat lebih memberdayakan masyarakat. Selain itu pengembangan inovasi dan rekayasa teknologi (pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan) serta pengembangan plasma nutfah dan pelayanan dasar bagi pemenuhan kebutuhan tanaman-tanaman buah dan pelindung bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang membutuhkan. Diharapkan dengan Sinergi dan kolaborasi dari akademisi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui teknologi tepat guna dapat meningkatkan ketahanan Pangan Daerah. Selain itu pada Tangerang Mantap juga dikembangkan Pekarangan Pangan Lestari (PPL) dengan menitikberatkan kepada produksi sektor pertanian dengan kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan memanfaatkan lahan tidak produktif di Kabupaten Tangerang, hal ini diwujudkan dalam dokumen rencana aksi pangan dan gizi yang berguna dalam mendukung penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang.

Gambaran perekonomian Kabupaten Tangerang dalam pemulihan dampak ekonomi (PDE) tersebut diharapkan dapat meningkatkan Laju Perekonomian pelaku usaha mikro serta industri kecil di Kabupaten Tangerang Pasca pandemi covid19, dan tentunya wirausaha baru (WUB) dapat tumbuh. Tentunya langkah-langkah diatas merupakan respon Pemerintah Kabupaten

Tangerang dalam mengupayakan bangkitnya keterpurukan perekonomian di Kabupaten Tangerang serta upaya tersebut dimasukkan dalam perwujudan program unggulan Bupati Tangerang 2019-2023 yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2022.

4.2.5 Penangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Laporan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa angka stunting di Kabupaten Tangerang sebesar 21,1%, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 23,3%.

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan tinggi badan dibandingkan dengan usia dan otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Hal ini disebabkan akses yang kurang terhadap makanan bergizi, terutama asupan vitamin dan mineral, serta sumber protein hewani.

Selain kekurangan gizi yang dialami anak, stunting juga dipengaruhi oleh ibu yang mengalami kekurangan nutrisi pada saat remaja, bahkan di masa kehamilan, dan menyusui. Tidak hanya itu, akses sanitasi yang layak dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Berbagai penyebab stunting di atas sangat erat dengan kemiskinan. Asumsi dasarnya adalah, kemiskinan membuat si ibu dan anak kesulitan mendapatkan makanan bergizi dengan harga terjangkau. Kemiskinan juga erat kaitannya dengan kesulitan mendapatkan akses sanitasi yang layak dan air bersih. Oleh karena itu memerlukan penanganan secara menyeluruh dan terintegrasi.


Data P3KE tahun 2022 yang dirilis oleh Kemenko PMK dan hasil EPPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat) Agustus 2022 menunjukkan:

Lokus	Jmlh keluarga miskin ekstrem (desil 1)	Jumlah balita stunting	Jumlah keluarga resiko stunting
Kabupaten Tangerang	61.685	9.016	354.751

Strategi penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun anggaran 2024 tetap mengacu kepada strategi penanganan kemiskinan ekstrem yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- pengurangan beban pengeluaran masyarakat
- peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

INTERVENSI KEGIATAN PENANGANAN WARGA MISKIN EKSTREM



- MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN**
 - Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Miskin berprestasi
 - Bantuan Sosial bagi warga miskin
 - Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - BOS Jenjang SD dan SMP
 - JAMKESDA
 - PKH
 - BPNT
 - BST
 - Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan
 - BPJS ketenagakerjaan
 - Pendampingan P2L
- MENINGKATKAN PENDAPATAN**
 - Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - Pemberdayaan Usaha Mikro
 - Pelatihan Keterampilan Wirausaha
 - Pemberian Modal Usaha, Akses Pemasaran dan Peningkatan nilai komoditas lokal
 - Pemberdayaan petani, nelayan
 - Bantuan sarana produksi pertanian perikanan dan kelautan
 - Pelatihan ketrampilan tenaga kerja
 - Penyerapan tenaga kerja baru melalui bursa tenaga kerja
 - Pemberdayaan masyarakat melalui Program Padat Karya
 - Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Mengaji
- MEMINIMALKAN KANTONG KEMISKINAN**
 - Pembangunan Rumah Layak Huni
 - Pembangunan Sanitasi Lingkungan Kumuh
 - Peningkatan Infrastruktur sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP
 - BCP Kesehatan
 - Rehabilitasi / Peningkatan jalan kabupaten dan poros desa
 - Pembangunan Jembatan
 - SPAM dan PASIMAS
 - Pemberdayaan BUMDES
 - RTLH dan KOTAKU

Pemetaan Tupoksi OPD



- Menurunkan Beban Pengeluaran**
 - Dinas Sosial
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pendidikan
 - DUKCAPIL
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA
- Meningkatkan Pendapatan**
 - Dinas Sosial
 - DUKCAPIL
 - DFMPD
 - DISKAN
 - DISPERINDAG
 - DPKP
 - DKUKM
 - DP3A
 - DISNAKER
- Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan**
 - BAPPEDA
 - DPPP
 - DBMSDA
 - DPMPD
 - DLHK
 - DINAS PENDIDIKAN
 - DINAS KESEHATAN

Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran

Strategi kebijakan melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat dilakukan Pemerintah Provinsi Banten melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan, Perindustrian dan Perdagangan Ketahanan Pangan Serta Pendidikan. Seluruh program dan kegiatan ini menyasar individu sasaran yang terdapat dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem berikutnya dilakukan melalui pendekatan guna meningkatkan pendapatan masyarakat sasaran sehingga mereka tidak lagi hidup dibawah standar garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*), serta pendekatan lokasi lingkungan tempat tinggal kelompok sasaran agar mereka mendapatkan pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya. Dengan adanya pendekatan lokasi ini diharapkan kantong kantong kemiskinan dapat diminimalisir.

Strategi Pengurangan Kantong Kemiskinan

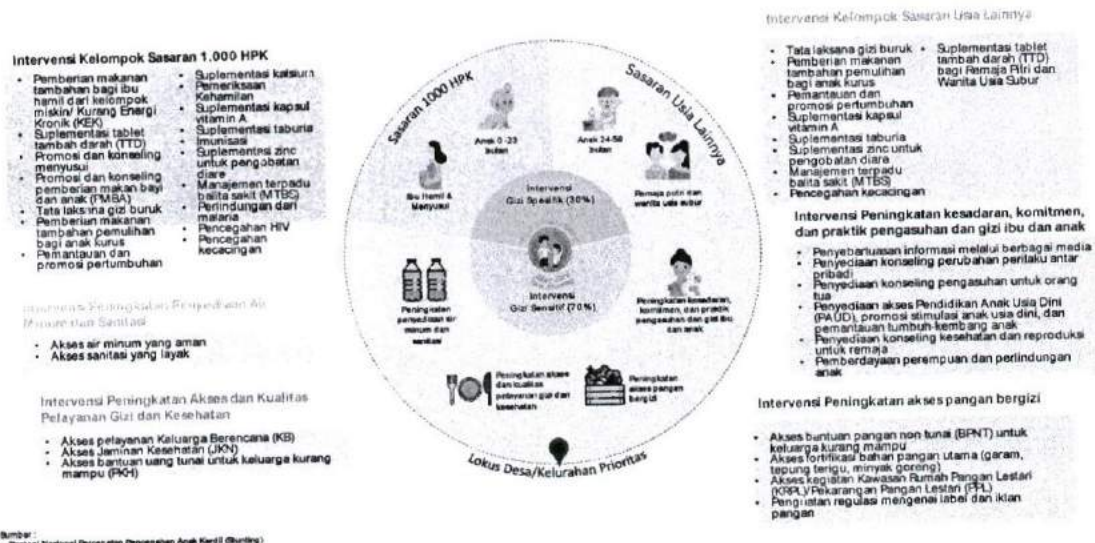
Strategi mengurangi kantong kemiskinan dilaksanakan melalui pemenuhan sarana prasarana dan infrastruktur, dengan terpenuhinya sarana prasarana maka kesenjangan antar wilayah akan dikurangi dan produktivitas ekonomi meningkat.

Mengacu pada Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ada 5 Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagai berikut:

1. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Implementasi intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi bisa digambarkan sebagai berikut:

CROSS-CUTTING INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

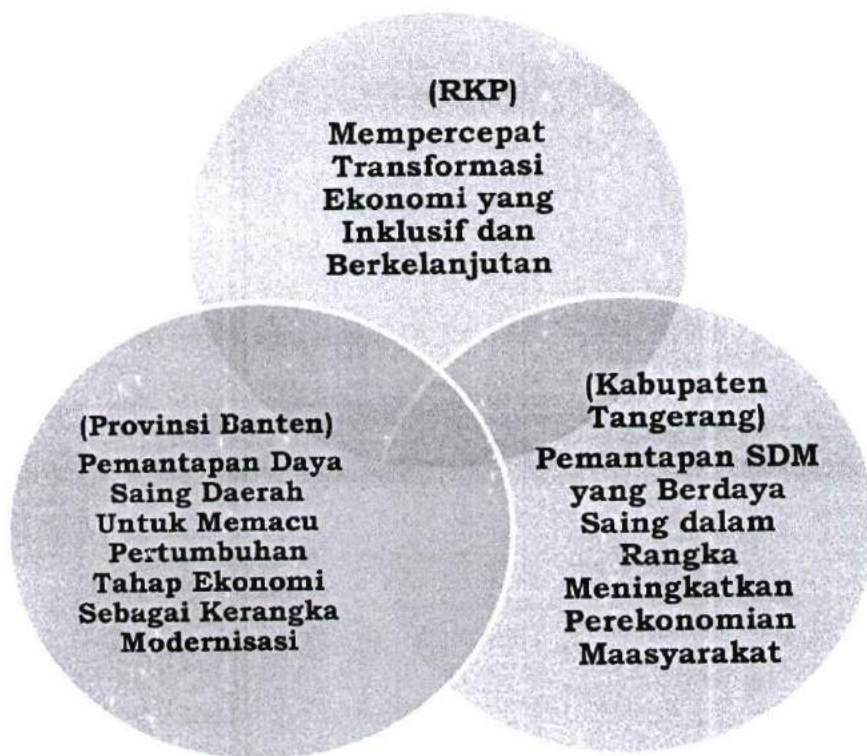


4.3 Keselarasan Tema Pembangunan Pusat, Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

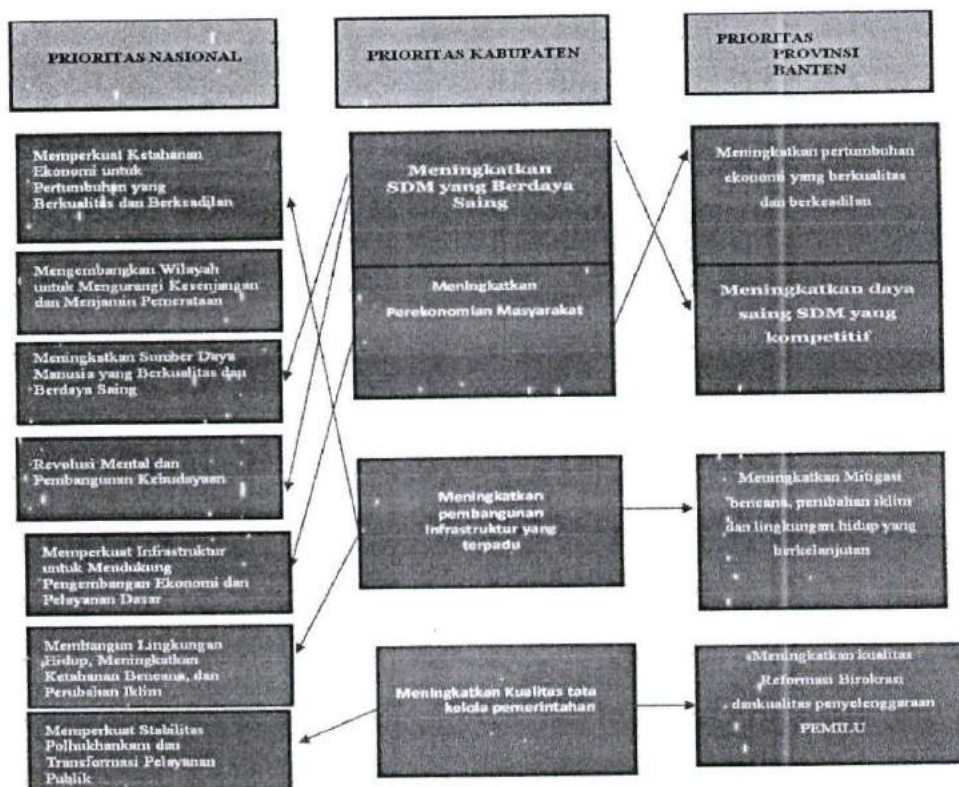
Tema pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 adalah "Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi", dan tema pembangunan di Kabupaten Tangerang adalah "Pemantapan SDM yang Berdaya Saing dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat" dalam tema pembangunan baik Nasional, Provinsi Banten maupun Kabupaten Tangerang terkandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan peningkatan SDM masyarakat, dan SDM aparatur dan semua itu diharapkan dapat meningkatkan kondisi kehidupan sosial ekonomi

masyarakat. Adapun gambaran penyelarasan tema pembangunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.2
Penyelarasan Tema Pembangunan











Gambar 4.3
Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Banten



Hasil penyelarasan target pembangunan, antara sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024 dengan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD 2024, disajikan dalam diagram berikut:

Gambar 4.4
Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Tahun 2024

			
 Pertumbuhan Ekonomi	5,3%-5,7%	5,11%-5,25%	5,11-5,25%
 Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0%-5,7%	8,51%	7,51%
 Kemiskinan	6,5%-7,5%	5,49%	5,94%
 Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02	73,55	73,55
 Gini Ratio	0,374-0,0377	0,349	0,28

4.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Selain memuat sasaran pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Tangerang, prioritas pembangunan daerah juga disusun dengan memperhatikan pandangan dan pertimbangan DPRD. Pandangan dan pertimbangan DPRD menggambarkan permasalahan pembangunan daerah untuk diselaraskan dalam dokumen rencana pembangunan daerah sehingga dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah, yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan Nasional. Pandangan dan pertimbangan tersebut berupa saran dan pendapat, yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD, berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rekapitulasi Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 yang telah diinput melalui aplikasi SIPD adalah sebagaimana berikut :

Tabel 4.6
Rekapitulasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2024

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
DEMOKRAT	53	PUPR; KEWILAYAHAN; PERUMAHAN DAN KAW PERMUKIMAN.	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Kabupaten;	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Pembangunan Irigasi/Drainase;		Kecamatan Cikupa;
			Pembangunan Gedung /Balai Warga	Pembangunan Balai Warga;		Kecamatan Tigaraksa;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN;		Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jalan lingkungan;		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemukiman;
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Pembangunan TPT;		Kecamatan Panongan;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat;		Kecamatan Curug.
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di	SAB;		

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan saluran;		
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan TPT;		
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sarana Prasarana Persampahan;		
GOLKAR	101	PUPR; KEWILAYAHAN; PERUMAHAN DAN KAW PERMUKIMAN.	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Kabupaten;	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu;	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat;	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemukiman;

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Kabupaten;		Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SAB;		Kecamatan Rajeg;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jalan lingkungan ;		Kecamatan Sepatan;
			Pembangunan Gedung /Balai Warga	Pembangunan Balai Warga;		Kecamatan Sepatan Timur;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pembangunan Ruang Publik;		Kecamatan Cisoka;
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pengadaan Perpustakaan;		Kecamatan Solear;
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembangunan gapura;		Kecamatan Tigaraksa.
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan			

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN.		
PAN	212	PUPR; KEWILAYAHAN; PERUMAHAN DAN KAW PERMUKIMAN.	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat;	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN;		Kecamatan Pasar Kemis;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jalan lingkungan ;		Kecamatan Rajeg;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SAB;		Kecamatan Sepatan Timur;

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan saluran;		Kecamatan Tigaraksa;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan TPT;		Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
			Pembangunan Gedung /Balai Warga	Pembangunan Balai Warga.		Kecamatan Legok;
PDI PERJUANGAN	239	KEWILAYAHAN; PERUMAHAN DAN KAW PERMUKIMAN; PUPR; Kepemudaan dan Olah Raga; PERHUBUNGAN; PERTANIAN.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN;	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu;	Kecamatan Pagedangan;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat;	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing;	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
			Pembangunan Gedung /Balai Warga	Pembangunan Balai Warga;	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.	Dinas Tata Ruang dan Bangunan;

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Kabupaten;		Kecamatan Kelapa Dua;
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Pembangunan TPT;		Kecamatan Tigaraksa;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jalan lingkungan ;		Kecamatan Cisauk;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sarana Prasarana Olah Raga;		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman;
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Penerangan Jalan Umum;		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Partiwisata;
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengadaan sarana dan prasarana pertanian;		Dinas Perhubungan;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	pembangunan RTLH;		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan	Pemeliharaan saluran;		Kecamatan Cikupa;

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sarana Prasarana Persampahan;		Kecamatan Curug;
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengembangan Desa Kreatif;		Kecamatan Panongan;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SAB;		Kecamatan Pasar Kemis;
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Pembangunan Irigasi/Drainase;		Kecamatan Rajeg.
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pembangunan Ruang Publik;		
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Pembangunan gapura.		

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
PKB	133	PUPR; PERUMAHAN DAN KAW PERMUKIMAN; LINGKUNGAN HIDUP; PENDIDIKAN; KEWILAYAHAN.	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Kabupaten;	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu;	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat;	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing;	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemukiman;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SAB;	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sarana dan Prasarana Persampahan;		Kecamatan Sukamulya;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di	Penataan TPU;		Kecamatan Mekar Baru;

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jalan lingkungan;		Kecamatan Sukadiri;
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penataan Sekolah;		Kecamatan Gunung Kaler;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan TPT;		Kecamatan Kronjo;
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Pembangunan TPT;		Kecamatan Kresck.
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN;		
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	pembangunan RTLH;		

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengembangan Desa Kreatif;		
			Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Kabupaten;		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengadaan Perpustakaan.		
PPP	133	PUPR; PERUMAHAN DAN KAW PERMUKIMAN; LINGKUNGAN HIDUP; KEWILAYAHAN.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi Sungai;	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu;	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan saluran;	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing.	Kecamatan Sepatan Timur;
			Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Kabupaten;		Kecamatan Sepatan;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait	PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN;		Kecamatan Pakuhaji;

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SAB;		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penataan TPU;		Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat;		Kecamatan Tigaraksa;
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Pembangunan Irigasi/Drainase;		Kecamatan Cisauk;
			Pembangunan Gedung/Balai Warga	Pembangunan Balai Warga;		Kecamatan Pagedangan;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sarana Prasarana Olah Raga;		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	pembangunan RTLH;		Kecamatan Kelapa Dua;

Fraksi	Jumlah Usulan	Urusan	Sub Kegiatan	Jenis usulan	Prioritas	OPD
			Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jalan lingkungan ;		Kecamatan Legok.
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Pembangunan TPT;		
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sarana dan Prasarana Persampahan;		
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan gapura.		
TOTAL	871					

Sumber : SIPD-RI Kemendagri, 2023.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang hingga Tahun 2023 dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Agenda pendanaan pembangunan Kabupaten Tangerang tahun 2024 diprioritaskan kepada 4 (empat) prioritas pembangunan daerah meliputi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu; meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan SDM yang berdaya saing.

Tabel 5.1
Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	4,592,696,094,734
2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	1,197,665,904,113
3	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	126,333,526,737
4	Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing	1,341,333,351,617
Total		7,258,028,877,201

Dukungan pendanaan pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten meliputi meningkatkan daya saing SDM yang kompetitif; meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi; meningkatkan mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dukungan pendanaan tercantum ditabel berikut.

Tabel 5.2
Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan daya saing SDM yang kompetitif	1,341,333,351,617
2	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi	4,592,696,094,734
3	Meningkatkan Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1,197,665,904,113
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	126,333,526,737
Total		7,258,028,877,201

Dukungan pendanaan pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional meliputi memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan

keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik; dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, dukungan pendanaan terhadap prioritas nasional tercantum ditabel berikut.

Tabel 5.3
Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1,197,665,904,113
2	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	126,333,526,737
3	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	4,592,696,094,734
4	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	1,341,333,351,617
Total		7,258,028,877,201

Tabel 5.4
Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2024

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Pendidikan				Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan				Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	100	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Persen	100	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	100	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	Persen	100	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase implementasi kurikulum muatan lokal	Persen	100	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	Persen	100	Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)	Persen	100	Dinas Pendidikan
Kesehatan				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Dinas Kesehatan
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0.10	Dinas Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Terakreditasi	Persen	85.19	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan

idarg Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Wasting	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	Angka	84.40	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	Persen	85.00	Dinas Kesehatan
	Persentase alat kesehatan memenuhi standar	Persen	81.00	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				Dinas Kesehatan
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persen	100	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				Dinas Kesehatan
	Persentase P-IRT yang sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Persen	100	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				Dinas Kesehatan
	Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang Kesehatan	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	Persen	100	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Dinas Bina Marga dan SDA
	Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik	Persen	70.20	Dinas Bina Marga dan SDA
	Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	Persen	77.27	Dinas Bina Marga dan SDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Cakupan Sarana Air Bersih	Persen	72.67	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prosentase Terpenuhiya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat	Persen	100	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun	Persen	96.61	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	Persen	0.140	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	11.93	Dinas Bina Marga dan SDA
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata	Persen	100	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun	Persen	14.14	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara	Persen	12.12	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase Pemenuhan Pembangunan Gedung yang Berkualitas Baik	Persen	60	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	Persen	40	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Persen	3.38	Dinas Bina Marga dan SDA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara	Persen	70	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	Persen	100	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persen	100	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Pemenuhan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persen	100	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	8.27	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang memenuhi Standar	Persen	47.89	Dinas Perumahan,Permukiman dan Pemakaman
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat				
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Satuan Pol PP
	Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	Satuan Pol PP
	Persentase Linmas yang terlatih	Persen	11	Satuan Pol PP

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100	Satuan Pol PP
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	100	Satuan Pol PP
Program Penanggulangan Bencana				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1. Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya	Jumlah Desa dan Kelurahan	91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.2 Desa Kelurahan tangguh bencana utama	Jumlah Desa dan Kelurahan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2. Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial				Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial	Persen	76.87	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Persen	33.33	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persen	29.96	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP	Persen	80	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Tenaga Kerja				Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan	Persen	100	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten	Persen	72.20	Dinas Tenaga Kerja
	Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi	Lembaga	30	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar	Persen	96.12	Dinas Tenaga Kerja
	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	480	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa Pengusaha-pekerja per tahun	Persen	1.34	Dinas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Seluruh Klaster Hak Anak	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan terhadap Anak	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	Persen	43,42	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%	Persen	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persen	16.90	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)	Dokumen	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	Persen	72.72	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	80	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pertanahan				Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman
Program Penatagunaan Tanah	Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun	Persen	30.97	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman
Lingkungan Hidup				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dibuat	Dokumen	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat	Entitas	25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air	Persen	50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha	250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola	Persen	1,20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	Persen	60	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Perekaman KTP-el	Persen	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan kepemilikan KIA	Persen	60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan SKPWNI yang diterbitkan	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan SKDWN1 yang diterbitkan	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	Persen	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akte Pengesahan Anak	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	69	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	Desa	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes	Desa	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Prosentase lembaga masyarakat yang difasilitasi	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	jumlah rekomendasi penataan desa	Rekomendasi	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	Desa	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Presentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan (hasil sinkronisasi dan survey) yang ditindaklanjuti	Persen	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Rumah Data di Kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna	Persen	30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem informasi pengendalian kependudukan	Persen	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Rate/ mCPR) (%)	Persen	71.25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	26.89	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga	Persen	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian	Persen	60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS	Persen	92	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prosentase keluarga beresiko yang mendapat pendampingan dan ditindaklanjuti	Persen	93	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prosentase kerjasama dengan mitra kerja	Persen	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perhubungan				Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				Dinas Perhubungan
	Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	Jaringan	1	Dinas Perhubungan
	Terminal yang terbangun	Unit	1	Dinas Perhubungan
	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio	0.3	Dinas Perhubungan
	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	Persen	33.33	Dinas Perhubungan
	Persentase Perlangkapan Jalan	Persen	58	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika				Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	Persen	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	Persen	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah				Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Persen	21.43	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.	Persen	27.03	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi berkualitas	Persen	17.86	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	Persen	26.79	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	2.8	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Dinas Koperasi dan Usaha Menengah

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	Persen	2.14	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
	Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan	Persen	1,40	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
Penanaman Modal				
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi	Persen	25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP)	Persen	25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi	Persen	33.33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	72	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan yang sesuai SOP	Persen	75.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	Persen	75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olahraga				Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persen	29%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Persen	29	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Statistik				Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase statistik sektoral	Persen	60	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian				Dinas Komunikasi dan Informatika
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	prosentase layanan keamanan informasi	Persen	55	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan				Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	Persen	33	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Perpustakaan				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase pemenuhan pembinaan perpustakaan	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perizinan penggunaan arsip	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Kelautan dan Perikanan				Dinas Perikanan

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	Persen	0.6	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1.5	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan	Persen	1,5	Dinas Perikanan
Pariwisata				Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen	33	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata	Persen	33	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan	Persen	46	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	33	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Pertanian				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	Persen	30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	55	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani	Persen	70	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI	Persen	64	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan	Persen	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	60	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Perdagangan				Dinas perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor	Persen	62.27	Dinas perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persen	80	Dinas perindustrian dan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau	Persen	50.00	Dinas perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	27	Dinas perindustrian dan Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTP	Persen	88.44	Dinas perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian				Dinas perindustrian dan Perdagangan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	Persen	20.17	Dinas perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	Persen	24.95	Dinas perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan	Persen	24.95	Dinas perindustrian dan Perdagangan

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi			
Transmigrasi				Dinas Tenaga Kerja
PPROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAN	Menurunnya Animo masyarakat bertransmigrasi	KK	10 KK	Dinas Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Sekretariat Daerah				
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				Sekretariat Daerah
	Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Sedang	Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Cukup	Sekretariat Daerah
	Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	Persen	100	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan				Sekretariat Daerah
	Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	Persen	100	Sekretariat Daerah
	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Indeks	100	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD				Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	Sekretariat DPRD
Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Ketersediaan Data Pembangunan	Persen	64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	% PD dengan kinerja baik ingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Keuangan				
Program Pengelolaan Keuangan Daerah				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase	98	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kinerja Pengelolaan Akuntansi Daerah	Persentase	92.5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase	95	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase pemanfaatan barang milik daerah yang digunakansahkan	Persentase	75	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	Persen	78	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persen	100	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Capaian Target Pajak Daerah	Persen	100	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	Persen	100	Badan Pendapatan Daerah
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah				Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	Nilai	40	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Pengadaan ASN	Nilai	40	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai	67,50	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	40	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja	Nilai	75	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	40	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	Nilai	16	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	20	Badan Kepegawaian Pengembangan

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan SDM	Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai	67,50	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penelitian dan Pengembangan				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan	Persen	50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan	Persen	50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengawasan Urusan Pemerintah				
Inspektorat Daerah				Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	Persen	33,16	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas	Persen	41,38	Inspektorat
Kewilayahan				KECAMATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	60	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	92.00	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	98.15	Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	83	Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	89.25	Kecamatan Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	89,25	Kecamatan Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	85	Kecamatan Jayanti

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	91.5	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	91.87	Kecamatan Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	89.25	Kecamatan Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	89.25	Kecamatan Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	75	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	65	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	89.50	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	90	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	93	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	93	Kecamatan Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	85	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Rajeg

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	91,35	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	91.35	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	91.35	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	75%	Kecamatan Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	75	Kecamatan Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	91	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	98	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	70	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	92,50	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	79	Kecamatan Curug
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	70	Kecamatan Jambe
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Kemiri

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	70.00	Kecamatan Kresck
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Mauk
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Legok
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	65	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	88	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	28.57	Kecamatan Panongan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	85	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	85	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	85	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Solear
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	85	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Balaraja
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Cikupa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	94	Kecamatan Cisauk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Cisoka
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	72.50	Kecamatan Cürug
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Jambe
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Jayanti

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Kemiri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Kosambi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Kresek
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Kronjo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Legok
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Mauk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	75	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Panongan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Sepatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Rajeg
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	43	Kecamatan Solear
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	92,50	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	83	Kecamatan Cisoka

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	80	Kecamatan Curug
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	89,25	Kecamatan Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	89,25	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	75	Kecamatan Kresck
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	65	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	10	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	60	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	93	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	70	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	25	Kecamatan Solcar
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	50	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	92,50	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	89,15	Kecamatan Curug
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	65,14	Kecamatan Jambe
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Kemiri

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	65.14	Kecamatan Kresek
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Legok
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	89	Kecamatan Mauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	65	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	88	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Pakuhaji
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Panongan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Rajeg
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	42.86	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	85	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	42.86	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	75	Kecamatan Solear
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	89	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	Kecamatan Tigaraksa
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
Kesatuan Bangsa dan Politik				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persen	0,09	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran. Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik di Daerah	Persen	8,61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	14,29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	0,91	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Persen	12,94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
x.x.01				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	95	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan	Persen	100	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Bina Marga dan SDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Tata Ruang Dan Bangunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Satuan Pol PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Dinas perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan admistrasi umum dan Sarana prasarana	Persen	100	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Persen	100	Sekretariat Daerah

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	100	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komponen Pelaporan SAKIP	Nilai	11,34	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Balaraja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Cikupa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	90	Kecamatan Cisauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Cisoka
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Curug
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Gunung Kaler
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Jambe
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Jayanti
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Kelapa Dua
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Kemiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Kosambi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Panongan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Kresek
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Legok
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Mauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Mekar Baru
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Pagedangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Pakuhaji

idang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2024 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Pasar Kemis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Rajcg
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Sepatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Sepatan Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Sindang Jaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Solear
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Sukadiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Sukamulya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Teluknaga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Tigaraksa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Kecamatan Kronjo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahul, diprioriaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahwajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Capaian dan target pembangunan yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kabupaten disajikan tabel 5.3.

Tabel 5.5
Capaian dan Target Pencapaian SPM Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
1.	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN									
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	%	66,52	99,26	98,13	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		49,42	51,59	54,42	56,68	53,94	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		37,1	39,54	41,54	42,45	40,27	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		56,43	60,03	63,03	66,07	63,12	Dinas Pendidikan
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	nilai		52,4	52,97	54,97	56,94	54,80	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Keamanan SD	nilai		75,31	81,91	85,00	88,99	85,07	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Kebhinekaan SD	nilai		63,28	86,23	88,00	91,21	87,26	Dinas Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SD	nilai		71,12	73,76	75,00	79,96	76,38	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai		74,49	75,96	80,00	82,64	80,21	Dinas Pendidikan
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	nilai		64,12	75,42	77,00	79,84	77,33	Dinas Pendidikan
		Indeks Inklusivitas SMP	nilai		65,92	72,94	75,00	79,14	76,36	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	69,90	74,21	96,63	80	100	100	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	68,09	82,49	67,65	80	100	100	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%		59,21	54,58	54,60	54,64	62,10	Dinas Pendidikan
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%		69,10	55,16	56,00	57,96	63,00	Dinas Pendidikan
2.	BIDANG URUSAN KESEHATAN									
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	99,04	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	99,77	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	93,57	92,38	98,07	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	89,32	96,32	95,08	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	53,24	86,33	98,61	70	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	84,45	70,80	97,27	95	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	85,62	87,34	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	80,65	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	76,66	90,71	96,45	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	53,42	72,19	98,75		100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	76,43	69,67	100	90	100	100	Dinas Kesehatan
3.	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM									
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	36,46	34,78	72,43	60	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0,52	2,11	91,89	20	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
4.	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh yang layak huni	%	15,00	62,50	100	35	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
	Kabupaten/Kota									
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	66,27	100	50	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
5.	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	%	100	100	99.54	100	100	100	Satuan Pol pp
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	59,56	100	100	100	100	100	BPBD
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	92.8	100	100	100	BPBD
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	78,11	84,29	100	100	100	100	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	78,36	86,38	96.95	100	100	100	BPBD
6.	BIDANG URUSAN SOSIAL									
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	20,29	75,82	97.33	70	100	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	17,28	84,82	97.33	70	100	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	17,47	84,63	97.33	70	100	100	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	65,55	90,00	93.33	80	100	100	Dinas Sosial
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	40	69,91	88.37	80	100	100	Dinas Sosial

Sumber: Laporan SPM Tahun 2021, 2022

Dalam rangka pemenuhan SPM, rencana sub kegiatan yang digunakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6
Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
A	SPM Bidang Pendidikan		
	SUB KEGIATAN KELOMPOK INDIKATOR ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH		
	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Penyediaan Biaya Personil/Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/ Kesetaraan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Penyediaan Biaya Personil/Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/ Kesetaraan
	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 tahun Kesetaraan		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Pembangunan Ruang Kelas Baru
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Penyediaan Biaya Personil/Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/ Kesetaraan
	SUB KEGIATAN KELOMPOK INDIKATOR LITERASI NUMERASI		
	1. Rata-rata kemampuan literasi Siswa berdasarkan asesmen nasional		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP
	2. Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Paud, SD dan SMP
			Pemyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD dan SMP
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SD dan SMP
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SD dan SMP
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan SD dan SMP
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan SD dan SMP
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SD dan SMP

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	SUB KEGIATAN INDIKATOR PAUD		
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
	SUB KEGIATAN INDIKATOR IKLIM KEAMANAN, IKLIM KEBEHINEKAAN DAN IKLIM INKLUSIVITAS		
	Indeks Iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD dan SMP
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi SD dan SMP
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SD dan SMP
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SD dan SMP
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			dan SMP
B	SPM Bidang Kesehatan		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
4	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
6	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
7	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
8	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
9	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
10	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Kelompok Masyarakat
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
			Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
			Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
2	Pelayanan informasi rawan bencana		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Edukasi (KIE) Rawan Bencana
			Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana
			Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
			Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Penyusunan Rencana Kontijensi
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Evakuasi Korban Bencana	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			Pendataan Sarana dan Prasarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Investigasi Kejadian Kebakaran	
			Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
		Penyelenggaraan Operasi	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayaka Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
F	SPM Bidang Sosial		
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Layanan Rujukan
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Makanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
			Pelayanan Dukungan Psikososial

5.3 Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2024

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, Pemerintah menganggarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari sumber Pemerintah yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan obligasi.

Kebijakan TKD pada tahun 2024 secara umum diarahkan untuk:

1. mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui
 - a. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan *stunting*;
 - c. penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
 - d. pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - e. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - f. peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
2. mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
3. meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;

4. meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan *monitoring* dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

TKDD terdiri atas empat komponen, yaitu:

1. Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik;
2. Dana Insentif Daerah (DID);
3. Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta;
4. Dana Desa.

TKDD Tahun 2024 menurut jenis transfer sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) dengan arah kebijakan adalah:

(a) mengoptimalkan kebijakan DBH *earmarked* yaitu:

- (i) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya sesuai peraturan perundangan; dan
- (ii) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DR) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan strategis lainnya sesuai peraturan perundangan.

(b) mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif khususnya untuk daerah yang berbatasan langsung;

(c) menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui pengalokasian DBH berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (t-1) sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);

(d) meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah;

(e) mendorong pemanfaatan DBH dalam mendukung target pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan menyusun kajian khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki DBH yang tinggi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dengan arah kebijakan adalah

(a) melanjutkan kebijakan *Hold Harmless* sehingga alokasi DAU setiap pemerintah daerah tidak mengalami penurunan;

(b) menjaga kapasitas keuangan daerah melalui perbaikan klasterisasi penghitungan DAU, perbaikan bobot formula, serta peningkatan kualitas data dasar perhitungan alokasi;

(c) mengarahkan pemanfaatan dan perhitungan alokasi DAU untuk pemenuhan SPM melalui

(i) perhitungan alokasi DAU per daerah berdasarkan satuan biaya dan target layanan dasar;

(ii) sinergi penyusunan kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan kebijakan pusat dan daerah.

- (d) mempertimbangkan karakteristik daerah (antara lain indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, daerah berciri kepulauan, ketahanan pangan, pariwisata, dan konservasi hutan) sebagai perhitungan faktor penyesuaian alokasi DAU per daerah;
- (e) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator SPM untuk seluruh daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan arah kebijakan adalah:

1. memperbesar dampak DAK melalui penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
2. memperkuat sinergi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah, serta DAK dengan sumber pendanaan lainnya.
3. Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah. Arah kebijakan untuk masing-masing DAK adalah sebagai berikut:

(a) Dana Alokasi Khusus Fisik

- (i) mendorong pencapaian target PN berbasis MP terpilih, khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan;
- (ii) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengentasan kawasan kumuh;
- (iii) mengurangi angka *stunting* melalui pembangunan infrastruktur dasar;
- (iv) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk penataan kota/kabupaten serta konektivitas di daerah afirmasi.
- (v) mengurangi kesenjangan layanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan;
- (vi) memfokuskan kegiatan DAK Fisik dalam menuntaskan target prioritas tematik atau bidang yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya;
- (vii) mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan agar DAK lebih berdampak signifikan;
- (viii) mengukur capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) sebagai salah satu instrumen *monitoring* dan evaluasi DAK Fisik;
- (ix) mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK;
- (x) mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan DAK serta kolaborasi kegiatan di APBD.

(b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik

- (i) mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- (ii) memperkuat daya saing usaha dan investasi serta pengurangan kemiskinan;
- (iii) mendorong penuntasan target PN;

- (iv) mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;
 - (v) meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik.
- (c) Hibah Daerah
- Tujuan alokasi Hibah kepada Daerah difokuskan untuk :
- (i) peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi);
 - (ii) penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani;
 - (iii) peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah *urban*. Evaluasi hibah ke daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri (rupiah murni) dan pengalihan/pengintegrasian dengan DAK Fisik.

4. Dana Desa

Arah kebijakan umum dana desa antara lain:

- (a) mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu
 - (i) berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri;
 - (ii) menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit, dan
 - (iii) revitalisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- (b) mendukung tema, arah kebijakan, serta PN RKP 2024;
- (c) memprioritaskan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan serta perlindungan sosial;
- (d) melanjutkan kebijakan pengalokasian dana desa sesuai UU HKPD, melalui pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan dana desa;
- (e) menyempurnakan formula pengalokasian dana desa berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula, penetapan afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan jumlah penduduk;
- (f) mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa;
- (g) memperkuat pemantauan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan dana desa;
- (h) menguatkan peran pemerintah daerah dalam penentuan pemanfaatan dana desa;
- (i) mendorong ketersediaan data desa berkualitas dan valid sebagai basis pengambilan kebijakan.

Arah kebijakan khusus dana desa adalah penguatan prioritas dan fokus pemanfaatan dana desa sesuai kewenangan, potensi dan karakteristik desa, dalam rangka

- (a) dukungan penanganan kemiskinan ekstrem;
- (b) dukungan program ketahanan pangan dan hewani mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan perikanan;
- (c) penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka prevalensi stunting, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit;

- (d) operasional pemerintahan desa, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial;
- (e) dukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan fokus
 - (j) permodalan BUMDes;
 - (k) pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDesa/BUMDesa Bersama, dan UMKM;
 - (l) akses perbankan masyarakat desa;
 - (m) akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa;
- (n) perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui peningkatan kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- (o) diversifikasi kegiatan ekonomi desa produktif, meliputi industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya;
- (p) peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDesa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
- (q) peningkatan kerja sama antardesa, termasuk penetapan dan penegakan batas wilayah antardesa untuk meningkatkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kondusivitas iklim usaha di desa.
- (r) dukungan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui program padat karya tunai desa, antara lain dalam penyediaan:
 - (i) sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala desa;
 - (ii) sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - (iii) akses dan moda transportasi desa;
 - (iv) pemanfaatan energi baru terbarukan berskala desa;
 - (v) penyediaan fasilitas pendidikan;
 - (vi) daur ulang persampahan dengan prinsip 3R dan ekonomi sirkular; serta
 - (vii) pemeliharaan lingkungan dan pembangunan prasarana lainnya dalam rangka mitigasi, adaptasi, dan penguatan ketahanan bencana.

Sinkronisasi serta keselarasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) setiap tahun sekali yang merupakan tahapan dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam Rakortekbang antara pemerintah pusat melalui K/L melakukan koordinasi dan kesepakatan terhadap usulan dari daerah yang sesuai dengan prioritas nasional tahun 2024. Berikut usulan yang disampaikan dalam Rakortekbang tahun 2023 untuk Tahun 2024 dari Kabupaten Tangerang.

Tabel 5.7
Usulan Daerah Rakortekbang Tahun 2024 Kabupaten Tangerang

NO	MAJOR PROJECT	USULAN DAERAH					DUKUNGAN KESJAPAN DAERAH			SKPD PENANGGUNGJAWAB
		PROVINSI/ KABUPATEN/K OTA	RINCIAN OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp.)/Milyard	DETAIL LOKASI	SUB KEGIATAN (APBD)	URAIAN DUKUNGAN		
1		Pembangunan Underpas Bitung	Panjang = 800 m	2024	150 Milyard	Bitung Curug Kabupaten Tangerang	Pembangunan Jalan & Jembatan	1. Lahan Terbebaskan (peta bidang lahan) 2. Dokumen FS, DED, Kajian Hidrologi 3. Dokumen Andalalin 4. Dokumen Lingkungan	Balai Prasarana & Pemeliharaan Jalan Nasional (P2JN) Banten dan Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang	
2	Pemulihan Empat Dacrah Aliran Sungai Kritis	Peburaban dan Normalisasi Sungai Cisadane, dan Sungai Cisadane Barat	Panjang = 20 Km	2024	150 Milyard	STA Sepatan Timur (lebak Wangi), STA Tanjung Burung Kec Pakuhaji	Normalisasi Sungai	1. Rekomtek	1. Balai Besar Ciliwung & Cisadane (BBWS CC) 2. Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air	
3	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Pembangunan IPLT Balaraja	Kapasitas 1.000 ltr/dt	2024	40 Milyard	Kecamatan Balaraja	Pembangunan IPLT	1. Tersedia Lahan 1 Ha 2. Dokumen FS, DED 3. Dokumen Lingkungan	Dinas Perumahan, Permukiman & pemakaman	

Sumber : Usulan Daerah Kab Tangerang, 2023

5.4 Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2024 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif yang kemudian dikelompokkan kedalam prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

Rekapitulasi pagu anggaran pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan tahun 2024 disajikan dalam lampiran.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah yang merupakan target selama tiga tahun dalam RPD Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2023– 2026, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terlihat pada Tabel 6.1 :

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten
Tangerang Tahun 2024

NO	URAIAN INDIKATOR MAKRO	SATUAN	CAPAIAN		TARGET	
			2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,63	5,47	5,20 - 5,47	5,11 - 5,25
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,06	7,88	7,67	7,51
3	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin	Persen	7,12	6,92	6,58	5,94
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,29	72,97	73,27	73,55
5	Index Gini	Poin	0,294	0,282	0,28	0,28

Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Perumusan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator- indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah

kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang telah direncanakan. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	72,97	73,55
2	Indeks Pendidikan	indeks	0,68	0,69
3	Indeks Kesehatan	indeks	0,77	0,78
4	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	50,13	52
5	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	62,17	62,67
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,47	1,3
7	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	N/A	74
8	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	indeks	2,02	2,14
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,47	5,11-5,25
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,88	7,51
11	Persentase Penduduk Miskin	persen	6,92	5,94
12	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, dan Perikanan	persen	2,28	3,08
13	Persentase Realisasi Investasi (PMA/ FMDN)	persen	N/A	5,12
14	Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	persen	20,45	22,73
15	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	3,25	3,41
16	Indeks Desa Membangun	indeks	0,7207	0,7307
17	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	77,00	77,50
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	67,05	67,45
19	Persentase PPKS yang Berdaya	persen	N/A	1,44
20	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	62,74	64
21	Nilai SAKIP	point	72,68	76
22	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	indeks	0,505	0,520
23	Opini BPK	opini	WTP	WTP
24	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	57,45	71
25	Maturitas SPIP Terintegrasi	point	3	3
26	Indeks SPBE	indeks	3,08	3,17
27	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,12	4,2
28	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	indeks	N/A	76,61
29	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen	92,95	94,5
30	Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	persen	8	37

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2024
31	Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	point	0,9433	0,9439
32	Rasio Konektivitas Kabupaten	point	0,75	0,79
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	55,88	56,25
34	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	indeks	130,45	120

Tabel 6.3
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,47	5,11 - 5,25
2	laju Inflasi	Persen	4,56	4,1
3	PDRB per kapita	Ribu Rp	46.813,25	52.260,82
4	Indeks Gini	Indeks	0,282	0,26
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,9	0,7
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	93,08	94,06
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,97	73,55
8	Angka melek huruf	Persen	96,64	97,85
9	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,92	9,52
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,28	70,51
11	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,55	0,37
12	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	2,14	1,74
13	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	86,42	87,02
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	67,05	67,85
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,88	7,51
16	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	24,9	24,87
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,45	90,45
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	50,5	52
19	Opini BPK	Status	WTP	WTP
20	Penguatan cadangan pangan	Ton	25	25
21	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,53	6,29
22	Produksi sektor pertanian	Ton	425.913,78	434.447,84
23	Pertumbuhan Industri	Persen	4,1	4,3
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Persen	1285	1,3
2	Rasio ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	Persen	40,68	38,59
III	ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR			
A	PENDIDIKAN			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	46	50,6
2	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	Persen	104,8	105
3	Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B	Persen	103,56	103,76
4	Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SD/MI	Persen	31,57	37,57
5	Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SMP/MTs	Persen	12,64	14,64
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	94,61	95,5
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	74,02	77,3
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,85	95,5
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,30	77,3
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,03	0,12
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,02	0,05
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	86,33	92,01
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	104,61	100
16	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Nilai	26,00	29,82
17	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Nilai	27,33	27,91
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Nilai	0,04	0,034
19	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Nilai	0,05	0,037
20	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Nilai	20,03	21,36
21	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	96,88	99,82
22	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	96,64	96,55
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	90,93	100
B	KESEHATAN			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Bayi	229	216
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	33	28
3	Rasio posyandu per satuan balita	Nilai	0,84	0,85
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	Nilai	18,7	19,37
5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Nilai	0,87	0,98
6	Rasio dokter per satuan penduduk	Nilai	0,39	0,42
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	79	71
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	101,4	100
9	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	96	98
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	96,6	100
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
12	Penderita diare yang ditangani	Persen	83,3	100
13	Angka kejadian Malaria	Kasus	0	
14	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99,75	100
15	Cakupan puskesmas	Persen	27,6	32,85
16	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	16,8	18,13
17	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	100	100
18	Cakupan pelayanan nifas	Persen	99	100
19	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	90,48	100
20	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	99,35	100
21	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	96	100
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	PEKERJAAN UMUM			
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	92,59	93,18
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	100	100
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,94	77,87
4	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	28,00	24,00
	PENATAAN RUANG			
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	18,40	21,10
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	18,40	21,10
3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Persen	99,35	99,45
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1	Rasio rumah layak huni	Persen	94,48	95,42
E	SOSIAL			
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	99,46	98
IV	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR			
A	TENAGA KERJA			
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	67,69	69,34
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100	100
B	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	59,6	64
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	14	14
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	23,06	23,52
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	40,60	41,96
5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99,11	99,59
6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	98,37	99,58
7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	97,37	99,31
8	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	100	100
C	PANGAN			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
1	Ketersediaan pangan utama	Ton	407.362	405.917
2	Ketersediaan energi kkal/perkapita/hari	Kalori	2.527	2.4
3	Ketersediaan protein gr/perkapita/hari	gram	82	63
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100
D	PERTANAHAN			
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	18	22
2	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100
E	LINGKUNGAN HIDUP			
1	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	44,12	60
F	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	93,10	96,89
G	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase PKK aktif	Persen	100	100
2	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100
H	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,47	1,36
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,13	2,08
3	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Persen	54,12	63,46
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	78	85
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1.8	1.4
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	70.75	71.25
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Tahun	16	16
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	6,36	6,34
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10.4	10.1
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ)	Persen	24,21	24,69
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	16,85	18,57
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	88	92
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	84.5	85.5
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	97	97.1
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	45	77.5
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	92	94
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	98.48	98.7
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	44	46
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	169,35	186,71
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	Persen	160,79	177,27
22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		58,92	64,86
23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	98.42	98.78
24	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	56.34	56.75
25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Usia Rata- Rata	21	21.6
26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	42.94	7.5
I	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Persentase koperasi aktif	Persen	95	96
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	93,99	94,2
J	PENANAMAN MODAL			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	7.248	9.238
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	18.348,19	19.287,61
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	55,3	55,3
K	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	83,33	87,72
2	Persentase wirausaha muda	Persen	87,7	92,1
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100	100
4	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	16	20
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	104	128
L	PERPUSTAKAAN			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	52.841	53.1
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	112.881	113.2
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buah	57.979	59
M	KEARSIPAN			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	66	68
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1
V	LAYANAN URUSAN PILIHAN			
A	PARIWISATA			
1	Kunjungan wisata	Kunjungan	24.579.434	27.017.377
B	KEBUDAYAAN			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	12	14
C	PERTANIAN			
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,53	6,29
D	PERDAGANGAN			
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar Rupiah	25.098,78	27.017.377
E	PERINDUSTRIAN			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	15	25
F	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Produksi perikanan	Ton	42.237,00	42.836,62
2	Konsumsi ikan	Persen	100,05	100
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	29,17	20,83
4	Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan	Persen	21,00	11
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	98,71	99,15
6	Nilai tukar nelayan	Persen	106,45	106,45
VII	PENUNJANG PEMERINTAHAN			
A	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	95,12	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	95,12	100
B	KEUANGAN			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	11,31	
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0,4	
4	Belanja pendidikan (20%)	Juta Rupiah	653.110,62	730.947,82
5	Belanja kesehatan (10%)	Juta Rupiah	326.555,31	365.473,91
6	Perbandingan antara belanja operasi dengan belanja modal	Rasio	3,25	3,15
7	Belanja Operasi	Persen	0.73	0.67
8	Belanja Modal	Persen	0.26	0.31
9	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	0.14	0.15
10	Penetapan APBD	n.a	Tepat Waktu	Tepat Waktu
C	PENGAWASAN			
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	83,54	85
D	SEKRETARIAT DEWAN			
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk	Ada/Tidak	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
	melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)			
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada

Tabel 6.4
Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET
					2022	2023*	2024
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	83,11%	100%	100%
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100%	99,16%	100%	100%
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100%	96,58%	100%	100%
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100%	100%	100%	100%
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi Jumlah Penduduk di kabupaten/kota dikali 100%	0,099734%	0.1%	0.1%
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi dibagi. Jumlah RS di kabupaten/kota	66,66%	100%	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET
					2022	2023*	2024
	Pelayanan Dasar		terakreditasi	dikali 100%			
1. b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota dikali 100%	100%	100%	100%
1. b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota dikali 100%	100%	100%	100%
1. b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota dikali 100%	99,75%	100%	100%
1. b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita di kabupaten/kota dikali 100%	99,34%	100%	100%
1. b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota dikali 100%	98,12%	100%	100%
1. b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dikali 100%	100%	100%	100%
1. b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota dikali 100%	99,38%	100%	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2022	TRANSISI 2023*	2024
		Ruang	oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) dikali 100%			
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dikali 100%	5,63%	5,63%	6,43%
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. dikali 100%	48,77%	50%	52%
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten A dikali 100%	97,56%	98%	98,3%
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Peretujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah Peretujuan Bangunan Gedung yang berlaku dikali 100%	95%	95%	95%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TRANSISI	TARGET
					2022	2023*		
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = dibagi Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota dikali 100%	92,59%	92,08%	93,18%	
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota dikali 100%	100%	100%	100%	
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi dibagi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya dikali 100%	100%	100%	100%	
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100%	100%	100%	100%	
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan dikali 100%	100%	100%	100%	
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman	2,47%	4,94%	7,41%	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TRANSISI	TARGET
					2022	2023*	2024	
		Pemukiman		kumbuh dibawah 10 ha dikali 100%				
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi Jumlah total unit rumah kabupaten/kota dikali 100%	3,32%	3,43%	3,54 %	
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi. Jumlah unit rumah kab/kota dikali 100%	27,56%	27,59%	27,62%	
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%	100%	100%	100%	
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	90,47	100%	100%	
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan dikali 100%	89,55%	90%	100%	
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100%	55,98%	70%	100%	
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi	100%	100%	100%	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET
					2022	2023*	2024
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dikali 100% Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota dikali 100%	100%	100%	100%
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14,26%	13%	13%
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100%	89,93%	100%	100%
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan	85,45%	100%	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TRANSISI		TARGET
					2022	2023*	2023*	2024	
				jaminan sosial pada saat ada dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100%					
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100%	4,58%	5%	5%	5,5%	5,5%
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja dikali 100	Rp. 56.636.673	Rp. 57.000.000	Rp. 58.000.000	Rp. 58.000.000	
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah Perusahaan dikali 100%	36,28%	38%	38%	40%	40%
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi Jumlah pencaker yang terdaftar dikali 100%	67,68%	70%	70%	72%	72%
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD dikali 100%	51,79%	51,80%	51,80%	51,81%	51,81%
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi Jumlah anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TRANSISI		TARGET
					2022	2023*	2023*	2024	
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) dikali 100%	9,62	9,50			9,38
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dibagi Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dikali 100%	9,05%	9,05%			9,05%
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibagi seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dikali 100%	100%	100%			100%
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Dibagi Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100%	96,5%	100%			100%
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibagi Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan dikali 100%	100	100%			100%
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha dibagi Jumlah penerima tanah	0	0			0

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TRANSISI		TARGET
					2022	2023*	2023*	2024	
			dan Tanah Absentee	obyek landreform dikali 100%					
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah dbagi Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan dikali 100%	0	0	0	0	0
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan dikali 100%	0	0	0	0	0
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		55,88%	55,7%	55,7%	55,95%	55,95%
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani dibagi Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota dikali 100%	56,75%	57%	57%	57,25%	57,25%
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota dibagi usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%	11,68%	11,5%	11,5%	11,25%	11,25%
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%	99,25%	99,4%	99,4%	99,45%	99,45%
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%	39,99%	50%	50%	60%	60%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET
					2022	2023*	2024
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi. Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%	93,07%	98%	99%
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi. Jumlah PD dikali 100%	66,66%	53,23%	69,35%
2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) dikali 100%	100%	100%	100%
2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) dikali 100%	93.70%	8.55%	9.35%
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.13	2.1	2.08
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%	70.75%	71%	71.25%
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%	10.4%	10.2%	10.1%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TRANSISI	TARGET
					2022	2023*	2024	
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0.95	0.95		0.76
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,5	0,6		0,7
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi Jumlah PD dikali 100%	95.23%	100%	100%	100%
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Jumlah Layanan Publik dikali 100%	100%	100%	100%	100%
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan program prioritas daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah penduduk dikali 100%	92.40%	92.45%		92.5%
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi aktif dikali 100%	11.78%	12%		14%
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi. Jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100%	100%	100%		100%
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota dibagi Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota dikali 100%	67.81%	5,12%		5,12%
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di	0,011%	0,1%		0,2%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET
					2022	TRANSISI 2023*	2024
				kabupaten/kota dikali 100%			
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota dibagi jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100%	0.92%	0.72%	0.73%
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		38%	40%	45%
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah PD dikali 100%	100%	100%	100%
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi . jumlah PD dikali 100%	100%	100%	100%
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian dikali 100%	63.41%	50.39%	54.26%
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah cagar budaya yang terdata dikali 100%	0	2%	3%
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	79.65	76.67	79.69
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek	55.58	55.6	55.62

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TRANSISI	TARGET
					2022	2023*	2024	
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	masyarakat (AM) Jumlah total Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik + persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi 4	38.5	38.6	38.7	
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah total Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten dengan NSPK + Tingkat kesesuaian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dan arsip dengan NSPK + Tingkat kesesuaian kegiatan pencerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK dibagi 6	33	33.1	33.2	
3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota dibagi Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan dikali 100%	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota dibagi Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan dikali 100%	99.03668% (42.237 ton)	100% (42.659 ton)	100% (43.110 ton)	
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1)/dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100%	2,00%	3,25%	3,41%	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TRANSISI		TARGET
					2022	2023*	2023*	2024	
3. b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi . Jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100%	3,25%	3,30%	3,30%	3,41%	
3. b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali 100%	4.32%	5%	5%	6%	
3. b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB. dibagi Total PDRB Berlaku	1,46%	1,49%	1,49%	1,52%	
3. b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata dibagi. Total realisasi PAD dikali 100%	14,01%	14,05%	14,05%	14,10%	
3. c. 1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas; pertanian per hektar per tahun/Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun dibagi luas panen dikali 100%	4,93%	4,94%	4,94%	4,94%	
3. c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular/Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%	0,53%	0,53%	0,53%	1 %	
3. d	Urusan Pilihan	Kehutanan			0	0	0	0	
3. e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dibagi Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi dikali 100%	0	0	0	0	
3. f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota dikali 100%	100%	100%	100%	100%	
3. f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi dibagi RDKK dikali 100%	35,91%	36%	36%	37%	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TRANSISI	TARGET
					2022	2023*	2024	
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase alat; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan dibagi . jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota dikali 100%	100%	100%	100%	
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100%	3.07%	3,5%	4%	
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		100%	100%	100%	
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	21,33%	21,44%	21,55%	
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	0	2%	2%	
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi. Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	0	2%	2%	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET
					2022	2023*	2024
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		100%	100%	100%
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi			0	0	0
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi. Jumlah APBD dikali 100%	9.59%	9.29%	8.99%
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan pada APBD dikali 100%	55.33%	46,75%	46,79%
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern. Pemerintah (SIIP)		3	3	3
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	3	3
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures dibagi jumlah belanja APBD dikali 100%	83.07%	83.8%	83.9%
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n dibagi jumlah kontrak keseluruhan tahun n dikali 100%	1.20%	1,5%	1,8%
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi Jumlah seluruh pengadaan dikali 100%	13,50%	7,44%	7,81%
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan dibagi total belanja operasi dan modal dikali 100%	48,33%	49%	50%

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN			TARGET
					2022	TRANSISI 2023*	2024	
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dibagi Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) dikali 100%	59,54%	60%	65%	
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas dibagi Jumlah seluruh pegawai (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dikali 100%	77,091%	78,00%	79,00%	
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibagi seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dikali 100%	13,16%	30,00%	31,00%	
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dikali 100%	82,009%	83,00%	84,00%	
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja dibagi Total Belanja APBD dikali 100%	92.73%	93.5%	93.6%	
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD dalam APBD dikali 100%	117.12%	118%	119%	
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	Apakah ada daftar aset tetap	Ada	Ada	Ada	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN	TRANSISI	TARGET
					2022	2023*	2024
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ada	Ada	Ada
				Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ada	Ada	Ada
				Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ada	Ada	Ada
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA dibagi total belanja anggaran tahun sebelumnya dikali 100%	14.58%	5.21%	3.88%
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda dibagi. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda dikali 100%	100%	100%	100%
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda dibagi total jumlah dokumen yang telah dirinci dikali 100%	83.33%	85%	87%

BAB VII
PENUTUP

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini merupakan penjabaran teknis terhadap tahun pertama RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, yang akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Daerah Tahun 2024 secara sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, sehingga RKPD Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Akhirnya dengan tersusunnya RKPD Tahun 2024 mampu mendorong pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BUPATI TANGERANG
WAKIL,

Ttd.

MAD ROMLI